



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA PRABUMULIH TAHUN 2025-2029

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PRABUMULIH

TAHUN 2025





WALIKOTA PRABUMULIH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

NOMOR **2** TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Prabumulih Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2014 Nomor 2).
19. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2024 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PRABUMULIH

Dan

WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih, sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Walikota.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II KEDUDUKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD Tahun 2025-2029, disusun berdasarkan visi, misi, arah kebijakan, Sasaran Pokok dan Program Pembangunan Daerah.

BAB III SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Dokumen RPJMD Tahun 2025- 2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN.

BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH.

BAB III : VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH.

BAB V : PENUTUP.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai visi dan mewujudkan misi pembangunan jangka menengah Kota;
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD lingkup Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bappeda;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2023 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
Pada tanggal 12 Agustus 2025

WALI KOTA PRABUMULIH,



Diundangkan di Prabumulih
Pada tanggal 12 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,



H. ELMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2025
NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH:
PROVINSI SUMATERA SELATAN (2-32/2025)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR **2** TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KOTA PRABUMULIH TAHUN 2025- 2029

I. UMUM

RPJMD Kota Prabumulih dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwasawan lingkungan serta berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan RPJMD Kota Prabumulih melibatkan partisipasi publik (pemangku kepentingan) baik internal maupun eksternal. Proses penyusunan RPJMD Kota Prabumulih tahun 2025-2029 dilakukan dengan melibatkan utamanya partisipasi masyarakat dan *stakeholder* melalui Focus Grup Discussion (FGD), Konsultasi Publik, dan Musrenbang. Dalam menjaga sinergitas antar pemerintahan, proses penyusunan RPJMD melibatkan pendanaan pembangunan non pemerintah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Prabumulih merupakan penjabaran dari visi, misi, Kepala Daerah terpilih serta isu strategis, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah untuk masa 5 (lima) tahun ke depan dari tahun 2025-2029. RPJMD mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi (RPJMD Provinsi), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Visi dan Misi RPJMD Kota Prabumulih sepenuhnya mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, daya tampung, dan daya dukung serta pencapaian pembangunan daerah periode sebelumnya.

RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2025-2029 sangat terkait dengan dokumen perencanaan lainnya. Penyusunan RPJMD memperhatikan RTRW, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah periode 2020-2024. Dengan demikian, seluruh perencanaan pembangunan lainnya mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota

Prabumulih, dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kota Prabumulih serta Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Prabumulih seluruhnya harus mengacu kepada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan RPJMN Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD Kota Prabumulih mempedomani substansi RPJPD Tahun 2025-2045, utamanya terkait dengan arah kebijakan pembangunan wilayah dan saran prasarana, isu pembangunan, dan indikator pembangunan. Kebijakan pengembangan wilayah dan indikasi kinerja secara substansi dipedomani dari RTRW sedangkan daya dukung dan daya tampung, isu-isu strategis memperhatikan substansi dalam KLHS. Sementara itu, *foresight* pembangunan pada tahun 2025-2029 memperhatikan hasil evaluasi RPJMD periode sebelumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas



DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-8
1.5 Sistematika Penulisan	I-8
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah.....	II-1
2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam	II-2
2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.....	II-3
2.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	II-5
2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas.....	II-7
2.1.6 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.....	II-11
2.1.7 Demografi.....	II-16
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-19
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi.....	II-19
2.2.2 Kesehatan untuk Semua	II-28
2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata.....	II-31
2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif.....	II-35
2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	II-36
2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	II-37
2.3 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-42
2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	II-42
2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	II-44
2.3.3 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	II-48
2.3.4 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	II-49
2.3.5 Stabilitas Ekonomi Makro	II-52
2.4 Aspek Pelayanan Umum	II-52
2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif.....	II-52

2.4.2	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substantial.....	II-58
2.4.3	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	II-60
2.4.4	Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah	II-62
2.5	Gambaran Keuangan Daerah.....	II-137
2.5.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	II-137
2.5.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	II-163
2.5.3	Kerangka Pendanaan	II-166
2.6	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah	II-168
2.6.1	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-168
2.6.2	Isu Strategis Daerah	II-192
BAB III	VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	III-1
3.1	Visi.....	III-1
3.2	Misi.....	III-3
3.3	Tujuan dan Sasaran	III-8
3.4	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	III-16
3.4.1	Strategi	III-16
3.4.2	Arah Kebijakan	III-16
3.4.3	Program Prioritas	III-30
BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	IV-1
4.1	Program Perangkat Daerah.....	IV-1
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sasaran Utama Visi	IV-47
BAB V	PENUTUP	V-1
5.1	Pedoman Transisi.....	V-1
5.2	Kaidah Pelaksanaan	V-2

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya	I-6
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Prabumulih	II-2
Gambar 2.2 Indeks Risiko Bencana Tahun 2020-2024	II-12
Gambar 2.3 Peta Indeks Kerentanan Banjir	II-13
Gambar 2.4 Peta Indeks Kerentanan Kebakaran Hutan dan Lahan	II-14
Gambar 2.5 Indeks Kerentanan Cuaca Ekstrem	II-14
Gambar 2.6 Indeks Kerentanan Kekeringan	II-15
Gambar 2.7 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Prabumulih Tahun 2019-2024	II-16
Gambar 2.8 Angka Ketergantungan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-18
Gambar 2.9 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dan Nasional Tahun 2020-2024	II-20
Gambar 2.10 Angka Kemiskinan Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2020 – 2024	II-23
Gambar 2.11 Indeks Gini Kota Prabumulih Tahun 2020 – 2024	II-27
Gambar 2.12 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dan Nasional 2020-2024	II-28
Gambar 2.13 Capaian Usia Harapan Hidup (UHH), Kota Prabumulih 2020-2024	II-29
Gambar 2.14 Rata-Rata Lama Sekolah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-31
Gambar 2.15 Harapan Lama Sekolah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-32
Gambar 2.16 Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Prabumulih	II-36
Gambar 2.17 Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Prabumulih 2020-2024	II-39
Gambar 2.18 Perkembangan Dimensi Kesehatan Reproduksi Prabumulih 2020-2024	II-39
Gambar 2.19 Perkembangan Keterwakilan Perempuan di Legislatif Prabumulih 2020-2024	II-40
Gambar 2.20 Perkembangan Pendidikan SMA ke Atas Prabumulih 2020-2024	II-41
Gambar 2.21 Perkembangan TPAK Prabumulih 2019-2023	II-42
Gambar 2.22 Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (Crime rate) (Per 100.000 Penduduk) di Kota Prabumulih , 2019-2023	II-59
Gambar 2.23 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (Crime Total) dan yang Diselesaikan (Crime Cleared) Kota Prabumulih, 2019-2023	II-60
Gambar 2.24 Progres IDSD Kota Prabumulih Tahun 2022-2024	II-60
Gambar 2.25 Indeks Daya Saing Daerah Kota Prabumulih dengan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	II-61
Gambar 2.26 Rasio Murid-Guru Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-62
Gambar 3.1 Poin Visi Kota Prabumulih Tahun 2025-2029	III-2

DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel 2.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan	II-1
Tabel 2.2	Indeks Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-5
Tabel 2.3	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-6
Tabel 2.4	Konsumsi Listrik per Kapita Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-6
Tabel 2.5	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-6
Tabel 2.6	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Layak Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-7
Tabel 2.7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Tahun 2020-2024....	II-8
Tabel 2.8	Indeks Kualitas Air Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-8
Tabel 2.9	Indeks Kualitas Udara Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-9
Tabel 2.10	Indeks Kualitas Lahan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-9
Tabel 2.11	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-10
Tabel 2.12	Cakupan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-11
Tabel 2.13	Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sex Ratio per Kecamatan Kota Prabumulih Tahun 2024	II-16
Tabel 2.14	Kepadatan Penduduk Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-17
Tabel 2.15	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-17
Tabel 2.16	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-18
Tabel 2.17	Capaian Indikator Utama Kesejahteraan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-19
Tabel 2.18	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Prabumulih Tahun 2020-2024 (%).....	II-20
Tabel 2.19	Laju Pertumbuhan Menurut Lapangan Usaha Kota Prabumulih Tahun 2020-2024 (%).....	II-21
Tabel 2.20	Distribusi PDRB ADHB Kota Prabumulih menurut Pengeluaran Tahun 2020 – 2024 (%)	II-21
Tabel 2.21	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kota Prabumulih menurut Pengeluaran Tahun 2020 – 2024 (%).....	II-21
Tabel 2.22	Kondisi Kemiskinan di Kota Prabumulih Tahun 2020 – 2024	II-22
Tabel 2.23	Kemiskinan Ekstrem Prabumulih 2020-2024	II-23
Tabel 2.24	PDRB Per Kapita Kota Prabumulih 2020-2024	II-24
Tabel 2.25	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Prabumulih 2020-2024.....	II-25

Tabel 2.26	Kondisi Ketenagakerjaan menurut Pendidikan Kota Prabumulih Tahun 2024	II-25
Tabel 2.27	Pertumbuhan Jumlah Angkatan Kerja Kota Prabumulih 2020-2024	II-26
Tabel 2.28	Pertumbuhan Jumlah Angkatan Kerja Kota Prabumulih 2020-2024	II-26
Tabel 2.29	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Prabumulih 2020-2024.....	II-26
Tabel 2.30	Indeks Pembangunan Manusia Kota Prabumulih 2020-2024.....	II-28
Tabel 2.31	Prevalensi Stunting Kota Prabumulih.....	II-31
Tabel 2.32	Skor Kemampuan Literasi dan Numerasi Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-32
Tabel 2.33	Indeks Masyarakat Digital Prabumulih Kota Prabumulih.....	II-34
Tabel 2.34	Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 2019-2023.....	II-35
Tabel 2.35	Indikator Kebudayaan di Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-37
Tabel 2.36	Indeks Pemberdayaan Gender Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-38
Tabel 2.37	Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Prabumulih Tahun 2020 – 2024	II-43
Tabel 2.38	Parameter Proyeksi Penduduk Kota Prabumulih Tahun 2020 – 2024	II-43
Tabel 2.39	Kontribusi Sektor Usaha Pertambangan & Penggalian Tahun 2020 - 2024	II-44
Tabel 2.40	Kontribusi Sektor Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2020 - 2024	II-44
Tabel 2.41	Kontribusi Sektor Usaha Industri Pengolahan 2020 - 2024	II-45
Tabel 2.42	Perkembangan PDRB Sektor Industri Pengolahan Kota Prabumulih Tahun 2010 -2024	II-45
Tabel 2.43	Perkembangan PDRB Kota Prabumulih Tahun 2020 -2024.....	II-46
Tabel 2.44	Nilai Tambah Kategori Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2020 - 2024	II-46
Tabel 2.45	Rasio Kewirausahaan Kota Prabumulih Tahun 2020 - 2024.....	II-47
Tabel 2.46	Indeks Inovasi Daerah Kota Prabumulih	II-48
Tabel 2.47	Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Prabumulih Tahun 2020-2024....	II-48
Tabel 2.48	Nilai Net Ekspor Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-49
Tabel 2.49	Indeks Infrastruktur Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-49
Tabel 2.50	Kategori Desa di Prabumulih berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2020-2024	II-51
Tabel 2.51	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Prabumulih Tahun 2020-2024 .	II-52
Tabel 2.52	Indeks Reformasi Hukum Kota Prabumulih	II-53
Tabel 2.53	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Prabumulih	II-54
Tabel 2.54	Indeks Pelayanan Publik Kota Prabumulih	II-54
Tabel 2.55	Indeks Sistem Merit Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-55

Tabel 2.56	Indeks Profesionalisme ASN Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-56
Tabel 2.57	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-57
Tabel 2.58	Hasil Survey Penilaian Integritas Kota Prabumulih	II-57
Tabel 2.59	Persentase Peningkatan Penegakan Perda Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-58
Tabel 2.60	Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-58
Tabel 2.61	Persentase Guru Berpendidikan Minimal S1 di Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-62
Tabel 2.62	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah di Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-63
Tabel 2.63	Angka Partisipasi Sekolah di Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-64
Tabel 2.64	Angka Partisipasi Kasar di Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-64
Tabel 2.65	Angka Partisipasi Murni di Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-65
Tabel 2.66	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan di Kota Prabumulih Tahun 2024	II-66
Tabel 2.67	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Tahun 2024	II-66
Tabel 2.68	Angka Kematian Ibu Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024	II-67
Tabel 2.69	Angka Kematian Bayi Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024.....	II-67
Tabel 2.70	Case Notification Rate (CNR) for TB Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024	II-68
Tabel 2.71	Case Detection Rate (CDR) for TB Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024 ..	II-68
Tabel 2.72	Persentase Kasus HIV yang Diobati Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024	II-69
Tabel 2.73	Universal Coverage / Jaminan Pembiayaan Kesehatan Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024	II-69
Tabel 2.74	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024	II-70
Tabel 2.75	Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024	II-71
Tabel 2.76	Tenaga Kesehatan yang Memiliki Surat Izin Praktik (SIP) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024	II-71
Tabel 2.77	Kondisi Jalan Mantap Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024	II-71
Tabel 2.78	Saluran Drainase yang Berfungsi Dengan Baik Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024	II-72
Tabel 2.79	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024	II-72
Tabel 2.80	Rumah Tangga yang Terlayani Pengolahan Air Limbah Domestik Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024.....	II-73
Tabel 2.81	Rumah Kota dengan Akses Air Minum Aman Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024	II-73

Tabel 2.82	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024.....	II-74
Tabel 2.83	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024.....	II-75
Tabel 2.84	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Prabumulih Tahun 2019- 2023	II-76
Tabel 2.85	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024	II-76
Tabel 2.86	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024.....	II-77
Tabel 2.87	Cakupan Perlindungan Masyarakat Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024	II-77
Tabel 2.88	Persentase PPNS Kompetensinya Kota Prabumulih yang Ditingkatkan Tahun 2020- 2024	II-78
Tabel 2.89	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024.....	II-78
Tabel 2.90	Persentase Penanganan Pasca Bencana Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024	II-78
Tabel 2.91	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024	II-79
Tabel 2.92	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024	II-80
Tabel 2.93	Anak Terlantar yang Dibina Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024	II-81
Tabel 2.94	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Tahun 2024...	II-81
Tabel 2.95	Persentase Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024	II-82
Tabel 2.96	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024	II-83
Tabel 2.97	Produktivitas Tenaga Kerja Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024	II-83
Tabel 2.98	Perusahaan yang Memenuhi Sarana Hubungan Industrial di Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024.....	II-84
Tabel 2.99	Anggaran Responsif Gender di Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024	II-85
Tabel 2.100	TPAK Laki-Laki dan Perempuan Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024	II-86
Tabel 2.101	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024	II-86
Tabel 2.102	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024	II-87
Tabel 2.103	Cadangan Pangan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-89
Tabel 2.104	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-90
Tabel 2.105	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024	II-90

Tabel 2.106	Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-91
Tabel 2.107	Ruang Terbuka Hijau Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-92
Tabel 2.108	Cakupan Kepemilikan KTP Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-92
Tabel 2.109	Cakupan Kepemilikan KK Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-93
Tabel 2.110	Cakupan Kepemilikan KIA Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-93
Tabel 2.111	Cakupan Kepemilikan Akta catatan Sipil Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-93
Tabel 2.112	Persentase PD yang dapat mengakses data dan informasi adminduk Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-94
Tabel 2.113	Indeks tertib administrasi kependudukan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-94
Tabel 2.114	Angka Kelahiran Total Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-96
Tabel 2.115	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-96
Tabel 2.116	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-97
Tabel 2.117	Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-98
Tabel 2.118	Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-98
Tabel 2.119	Layanan Angkutan Darat Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-99
Tabel 2.120	Rambu rambu Lalu Lintas yang terpenuhi Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-99
Tabel 2.121	Perlintasan Kereta Api yang Ditangani Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-99
Tabel 2.122	Cakupan koneksi Jaringan Internet Pada PD dan Kecamatan, Kelurahan /Desa di Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-100
Tabel 2.123	Cakupan Publikasi informasi dan Teknologi informasi melalui media online dan media cetak di Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-100
Tabel 2.124	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi di Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-101
Tabel 2.125	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi di Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-101
Tabel 2.126	Persentase Koperasi Aktif Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-102
Tabel 2.127	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-102
Tabel 2.128	Persentase Usaha Kecil Bertransformasi dari Informal ke Formal Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-103
Tabel 2.129	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru Berskala Mikro Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-103

Tabel 2.130	Persentase penerbitan izin usaha Simpan Pinjam Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-103
Tabel 2.131	Persentase Pertumbuhan nilai investasi Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-103
Tabel 2.132	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-104
Tabel 2.133	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-105
Tabel 2.134	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-105
Tabel 2.135	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-106
Tabel 2.136	Rasio Wirausaha Pemuda Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-106
Tabel 2.137	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-107
Tabel 2.138	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-107
Tabel 2.139	Indeks Pembangunan Statistik Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-108
Tabel 2.140	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-108
Tabel 2.141	Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-109
Tabel 2.142	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-110
Tabel 2.143	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.	II-111
Tabel 2.144	Produksi Perikanan Tangkap Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-112
Tabel 2.145	Produksi Perikanan Budidaya Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-112
Tabel 2.146	Konsumsi Ikan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-112
Tabel 2.147	Wisatawan Yang Berkunjung di Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-113
Tabel 2.148	Tingkat pertumbuhan Sektor Akomodasi dan Makan Minum Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-113
Tabel 2.149	Produktivitas Tanaman Pangan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-114
Tabel 2.150	Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-114
Tabel 2.151	Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-114
Tabel 2.152	Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa Sawit Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-114
Tabel 2.153	Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-115

Tabel 2.154	Kelompok Petani yang Dibina Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-115
Tabel 2.155	Industri Menengah dan Besar Kategori Dasar Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-116
Tabel 2.156	Industri Menengah dan Besar Kategori Aneka Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-116
Tabel 2.157	Industri Mikro Kecil Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-117
Tabel 2.158	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-118
Tabel 2.159	Alat UTTP Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-118
Tabel 2.160	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-119
Tabel 2.161	Bina kelompok pedagang Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-119
Tabel 2.162	Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-120
Tabel 2.163	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-120
Tabel 2.164	Persentase Produk Hukum yang dihasilkan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-121
Tabel 2.165	Persentase Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-121
Tabel 2.166	Persentase MoU / Perjanjian Kerjasama yang difasilitasi Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-122
Tabel 2.167	Persentase Akses Keuangan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-122
Tabel 2.168	Persentase Realisasi Fisik OPD Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-122
Tabel 2.169	Tingkat Kematangan UKPBJ Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-123
Tabel 2.170	Persentase belanja pegawai terhadap APBD Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-124
Tabel 2.171	Persentase Realisasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-125
Tabel 2.172	Persentase Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (SPM) Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-125
Tabel 2.173	Persentase Penurunan SILPA Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-126
Tabel 2.174	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-126
Tabel 2.175	Opini BPK Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-127
Tabel 2.176	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-127
Tabel 2.177	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-128
Tabel 2.178	Rasio Pegawai Fungsional Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-128
Tabel 2.179	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-129

Tabel 2.180	Rasio Pegawai menurut Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-130
Tabel 2.181	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-130
Tabel 2.182	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-131
Tabel 2.183	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-132
Tabel 2.184	Persentase data hasil riset dan inovasi yang berkualitas Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-132
Tabel 2.185	Indeks Inovasi Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-132
Tabel 2.186	Indeks Inovasi Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-133
Tabel 2.187	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-134
Tabel 2.188	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-134
Tabel 2.189	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Prabumulih Tahun 2020-2024..	II-134
Tabel 2.190	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-135
Tabel 2.191	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada, Pilpres dan Pileg Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-135
Tabel 2.192	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada, Pilpres dan Pileg Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-136
Tabel 2.193	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial yang Terjadi di wilayah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-137
Tabel 2.194	Realisasi Pendapatan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-138
Tabel 2.195	Pertumbuhan Komponen Pendapatan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-139
Tabel 2.196	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-141
Tabel 2.197	Pertumbuhan Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-142
Tabel 2.198	Realisasi dan Capaian Pendapatan Transfer Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-143
Tabel 2.199	Pertumbuhan Komponen Pendapatan Transfer Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-144
Tabel 2.200	Capaian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-145
Tabel 2.201	Realisasi Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-147
Tabel 2.202	Kontribusi Komponen Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-148

Tabel 2.203	Pertumbuhan Komponen Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-149
Tabel 2.204	Realisasi Belanja Operasi Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-150
Tabel 2.205	Kontribusi Komponen Belanja Operasi Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-151
Tabel 2.206	Realisasi Belanja Modal Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-152
Tabel 2.207	Kontribusi Komponen Belanja Modal Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-153
Tabel 2.208	Realisasi dan Capaian Belanja Tidak Terduga Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-154
Tabel 2.209	Kontribusi Komponen Belanja Tidak Terduga Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-154
Tabel 2.210	Realisasi Belanja Transfer Kota Prabumulih Tahun 2020-2023	II-155
Tabel 2.211	Kontribusi Komponen Belanja Transfer Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-156
Tabel 2.212	Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	II-158
Tabel 2.213	Pertumbuhan Pembiayaan Netto dan SiLPA Kota Prabumulih Tahun 2020-2023	II-159
Tabel 2.214	Neraca Keuangan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-161
Tabel 2.215	Analisis Rasio Keuangan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-163
Tabel 2.216	Analisis Proporsi Pemenuhan Kebutuhan Aparatur 2020-2024	II-163
Tabel 2.217	Surplus/Defisit Anggaran Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	II-164
Tabel 2.218	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2020-2024	II-165
Tabel 2.219	Proyeksi Keuangan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2026-2030.....	II-167
Tabel 2.220	Perumusan Permasalahan Bidang Pendidikan.....	II-171
Tabel 2.221	Perumusan Permasalahan Bidang Kesehatan.....	II-172
Tabel 2.222	Perumusan Permasalahan Bidang Kesehatan.....	II-174
Tabel 2.223	Perumusan Permasalahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.....	II-175
Tabel 2.224	Perumusan Permasalahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	II-175
Tabel 2.225	Perumusan Permasalahan Bidang Sosial	II-175
Tabel 2.226	Perumusan Permasalahan Bidang Tenaga Kerja	II-176
Tabel 2.227	Perumusan Permasalahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	II-177
Tabel 2.228	Perumusan Permasalahan Bidang Pangan.....	II-177
Tabel 2.229	Perumusan Permasalahan Bidang Lingkungan Hidup	II-177
Tabel 2.230	Perumusan Permasalahan Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil .	II-178

Tabel 2.231	Perumusan Permasalahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	II-179
Tabel 2.232	Perumusan Permasalahan Bidang Perhubungan.....	II-179
Tabel 2.233	Perumusan Permasalahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	II-180
Tabel 2.234	Perumusan Permasalahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	II-180
Tabel 2.235	Perumusan Permasalahan Bidang Penanaman Modal	II-181
Tabel 2.236	Perumusan Permasalahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	II-181
Tabel 2.237	Perumusan Permasalahan Bidang Statistik.....	II-181
Tabel 2.238	Perumusan Permasalahan Bidang Persandian.....	II-182
Tabel 2.239	Perumusan Permasalahan Bidang Kebudayaan.....	II-182
Tabel 2.240	Perumusan Permasalahan Bidang Perpustakaan	II-182
Tabel 2.241	Perumusan Permasalahan Bidang Kearsipan.....	II-183
Tabel 2.242	Perumusan Permasalahan Bidang Pariwisata	II-183
Tabel 2.243	Perumusan Permasalahan Bidang Pertanian	II-183
Tabel 2.244	Perumusan Permasalahan Bidang Perindustrian.....	II-184
Tabel 2.245	Perumusan Permasalahan Bidang Perdagangan	II-185
Tabel 2.246	Perumusan Permasalahan Bidang Perikanan	II-185
Tabel 2.247	Perumusan Permasalahan Sekretariat Dewan.....	II-186
Tabel 2.248	Perumusan Permasalahan Sekretariat Daerah	II-186
Tabel 2.249	Perumusan Permasalahan Perencanaan	II-186
Tabel 2.250	Perumusan Permasalahan Keuangan	II-187
Tabel 2.251	Perumusan Permasalahan Kepegawaian	II-187
Tabel 2.252	Perumusan Permasalahan Penelitian dan pengembangan	II-187
Tabel 2.253	Perumusan Permasalahan Pendidikan dan pelatihan	II-188
Tabel 2.254	Perumusan Permasalahan Pengawasan	II-188
Tabel 2.255	Perumusan Permasalahan Kewilayahan (Kecamatan)	II-189
Tabel 2.256	Perumusan Permasalahan Kesatuan Bangsa dan Politik	II-189
Tabel 2.257	Perumusan Permasalahan Daerah.....	II-190
Tabel 2.258	Perumusan Isu Strategis Kota Prabumulih Tahun 2025-2029.....	II-202
Tabel. 3.1	Sasaran Utama Pembangunan Nasional, Provinsi SUMSEL dan Kota Prabumulih Tahun 2029	III-3
Tabel 3.2	Transformasi Misi Kota Prabumulih Tahun 2025-2029	III-4
Tabel 3.3	Keselarasan Misi RPJMD Provinsi Sumsel, dan RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2025-2029	III-6
Tabel 3.4	Keselarasan Misi RPJPD 2025-2045 dan Misi RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2025-2029	III-7

Tabel 3.5	Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Prabumulih 2025-2029	III-9
Tabel 3.6	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Prabumulih Tahun 2025-2029	III-17
Tabel 3.7	Tema dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan 2026-2030	III-29
Tabel 3.8	Program Prioritas RPJMD	III-32
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah	IV-3
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama	IV-47
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Daerah	IV-48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Pada tahun 2024, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Prabumulih diselenggarakan secara serentak untuk menetapkan Walikota dan Wakil Walikota Kota Prabumulih Periode 2025-2030. Periode pembangunan jangka menengah daerah Kota Prabumulih Tahun 2025-2029 dimulai sejak dilantiknnya Walikota Kota Prabumulih H. Arlan dan Wakil Walikota Kota Prabumulih Franky Nasril, S.Kom., M.M pada tanggal 20 Februari 2025. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 65 ayat (1) huruf c yaitu kepala daerah berkewajiban dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Walikota dan Wakil Walikota dilantik.

RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2025-2029 merupakan tahap pembangunan jangka menengah pertama pada periode RPJPD Kota Prabumulih Tahun 2025-2045. **Visi pembangunan Kota Prabumulih Tahun 2025-2029 adalah “Prabumulih Mas 2029”. Dalam rangka mencapai visi dilakukan upaya yang dijabarkan pada 6 (enam) misi, yaitu:** 1) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju masyarakat makmur dan sejahtera; 2) Mewujudkan perekonomian yang lebih baik melalui kemudahan investasi yang berkeadilan, dan peningkatan kesempatan kerja serta pengembangan kegiatan ekonomi berbasis kearifan lokal dan keunggulan wilayah; 3) Mendorong kemandirian masyarakat melalui penguatan ketahanan pangan daerah dan mendukung swasembada energi; 4) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berprestasi, berbudaya, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 5) Mewujudkan pembangunan daerah dengan dukungan infrastruktur yang berkualitas, dan ramah lingkungan; dan 6) Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis, efisien, bersih dan profesional.

Dokumen RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD ini juga menjadi acuan penyusunan RENSTRA (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaan Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

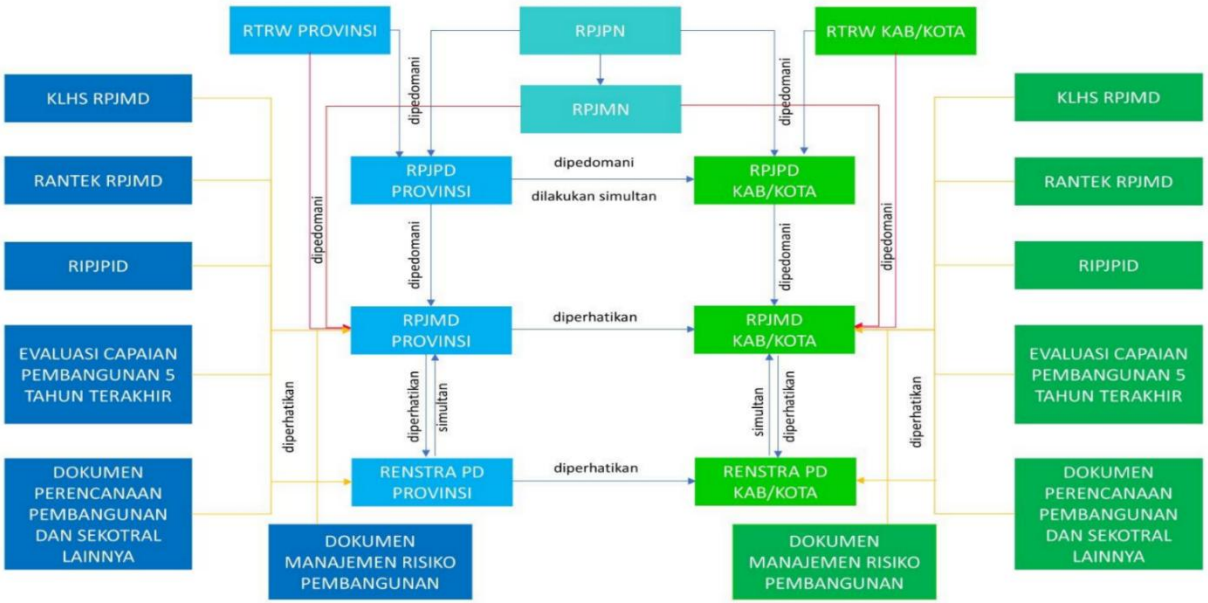
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6633);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6634);
20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

- dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Prabumulih Tahun 2025-2045;
 31. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Prabumulih Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2014 Nomor 2);
 32. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Prabumulih Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2024 Nomor 7);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Prabumulih Tahun 2025-2045 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Prabumulih Tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Prabumulih Tahun 2014-2034, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. RPJMD Kota Prabumulih telah disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. RPJMD Kota Prabumulih disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, di mana proses penyusunannya dilakukan

secara simultan. Gambaran keterkaitan RPJMD Kota Prabumulih tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

a. Hubungan RPJMD Kota Prabumulih dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Penyusunan RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2025- 2029 juga memperhatikan RPJMN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional yang memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah. RPJMN merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Pada RPJMN Tahun 2025-2029, pembangunan Kota Prabumulih diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan target yang jelas disertai arah kebijakan dan pembangunan wilayah berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan.

b. Hubungan RPJMD Kota Prabumulih Dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan

RPJMD Kota Prabumulih 2025-2029 mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029, sehingga keselarasan arah dan indikator utama Pembangunan antara Pemerintah Kota Prabumulih dengan Provinsi Sumatera Selatan bisa terwujud.

c. Hubungan RPJMD Kota Prabumulih Dengan RTRW Kota Prabumulih

Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang tentang Penataan Ruang menghendaki sebuah keintegrasian, yaitu agar dokumen rencana tata ruang yang dibuat dapat selaras dengan dokumen rencana pembangunan. Lebih khusus lagi, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 mengamanatkan bahwa konsistensi pemanfaatan ruang dapat dicapai dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Penyusunan RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2025- 2029 memperhatikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Prabumulih Tahun 2014-2034. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kota Prabumulih dengan kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang.

d. Hubungan RPJMD Kota Prabumulih Dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Prabumulih

Salah satu dokumen penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJMD adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Penyusunan KLHS dilakukan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Ayat (1); “ Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”, dan ayat (2) yaitu KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi: a. Rencana Tata Ruang Wilayah beserta rencana rincinya, RPJP Nasional, RPJP Daerah, RPJM Nasional, dan RPJM Daerah; dan b. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup.

e. Hubungan RPJMD Kota Prabumulih dengan RPJPD, Renstra-PD

Dokumen RPJPD Kota Prabumulih Tahun 2005-2025 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD. Penyusunan RPJMD Kota Tahun 2025-2029 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap I RPJPD Kota Prabumulih Tahun 2025-2045. RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD merupakan rencana kerja 5 (lima) tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, serta menjadi alat strategis yang memungkinkan kepala daerah terpilih menjalankan program-program prioritas selama masa jabatan mereka.

Sedangkan Tujuan penyusunan RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2025-2029 adalah :

1. Menjadi pedoman bagi seluruh komponen daerah, seperti pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya;
2. Menjawab tantangan global terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
3. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah;
5. Menjamin manfaat pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran Umum Daerah

Memuat :

1. Aspek Geografi dan Demografi
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
3. Aspek Daya Saing Daerah

4. Aspek Pelayanan Umum
5. Gambaran Keuangan Daerah
6. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Bab III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat :

1. Visi
2. Misi
3. Tujuan dan Sasaran
4. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab IV : Program Perangkat Daerah Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Memuat :

1. Program Perangkat Daerah
2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab V : Penutup

Memuat :

1. Pedoman Transisi
2. Kaidah Pelaksanaan

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kota Prabumulih merupakan satu dari empat kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Kota terbesar ketiga di Sumatera Selatan setelah Palembang dan Lubuk Linggau ini merupakan kota transit yang terletak di tengah simpul transportasi Sumatera Selatan. Letaknya yang strategis menyebabkan Prabumulih berkembang sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang memenuhi kebutuhan masyarakat Prabumulih dan masyarakat sekitar yang melintas di Sumatera Selatan. Kota Prabumulih merupakan pemekaran dari Kabupaten Muara Enim pada tahun 2001. Kota ini berdiri otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih dan kemudian diresmikan menjadi Pemerintah Kota pada tanggal 17 Oktober 2001. Sebelumnya, Prabumulih merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Muara Enim. Statusnya ditingkatkan menjadi Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administrasi Prabumulih.

Secara astronomis Kota Prabumulih terletak di antara 3°20’09,1” – 3°34’24,7” Lintang Selatan dan 104°07’50,4” – 104°19’41,6” Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 477,311 km² dan dengan batasan wilayah:

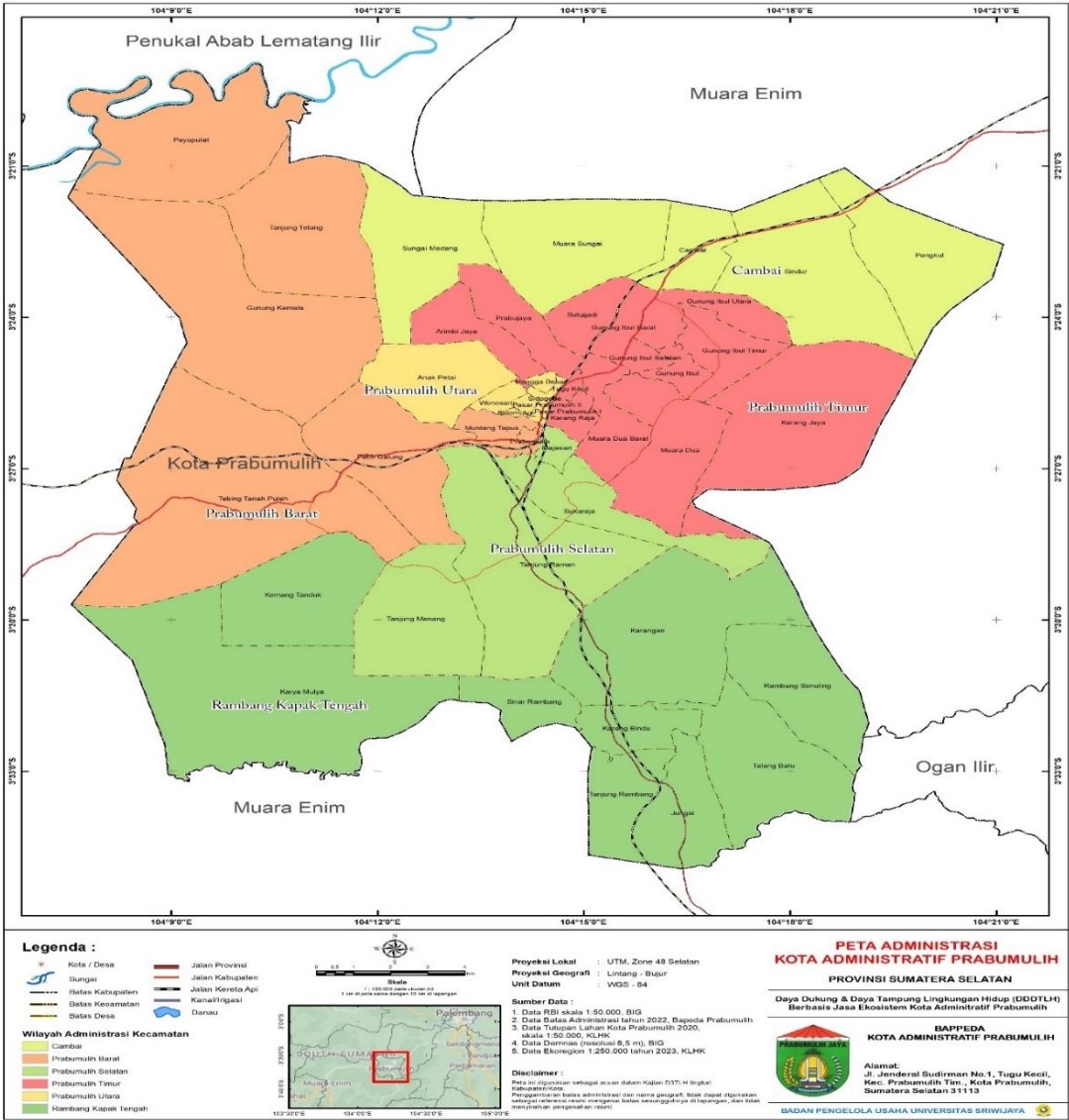
- Sebelah Utara : Kabupaten PALI
- Sebelah Timur : Kabupaten Muara Enim
- Sebelah Selatan : Kabupaten Muara Enim
- Sebelah Barat : Kabupaten Muara Enim

Secara administrasi Kota Prabumulih terdiri dari 6 kecamatan, 33 kelurahan dan 12 desa. Rinciannya seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas Daratan (km ²)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
Prabumulih Barat	67,36	6	1
Prabumulih Timur	147,15	13	-
Cambai	64,75	3	2
Rambang Kapak Tengah	79,44	1	8
Prabumulih Utara	12,12	7	-
Prabumulih Selatan	106,28	3	1
Total	477,311	33	12

Sumber: Keputusan Menteri dalam Negeri 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2022



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Prabumulih

Kota Prabumulih merupakan salah-satu kota penunjang serta pusat perekonomian bagi kabupaten/kota lain di Sumatera Selatan seperti Ogan Ilir, Pali, Muara Enim. Kota yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Muara Enim ini juga merupakan sebagai kota perlintasan karena lokasinya yang sangat strategis dan kerap kali dilalui kendaraan serta angkutan dari Palembang - Pali - Muara Enim - Baturaja - OKU - dan berbagai Kabupaten/Kota lain di luar Sumsel.

2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Prabumulih merupakan salah satu daerah yang kaya akan sumber daya alam, terutama bersumber dari pertambangan yaitu minyak dan gas alam (Migas). Berdasarkan laporan dari Perusahaan pertambangan yang ada di Kota Prabumulih, sepanjang Tahun 2024 produksi minyak menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 8.000 barel per hari (BOPD) di awal tahun menjadi 11.200 BOPD di akhir tahun, begitu juga dengan produksi gas yang juga meningkat dari 100 juta standar kaki kubik per hari (MMScfd) menjadi 118 MMScfd. Peningkatan ini didorong dengan adanya pengeboran di wilayah sekitar

Prabumulih Gunung Kemala (GNK), Lembak (LBK), serta pengembangan area Prabumenang (PMN). Selain minyak bumi dan gas alam (Migas), Prabumulih juga memiliki potensi pertambangan lainnya yaitu Batubara, diperkirakan terbesar di 4(empat) kecamatan yang meliputi Kecamatan Prabumulih Barat, Prabumulih Selatan, Prabumulih Utara, serta Rambang Kapak Tengah. Ini berarti bahwa lebih dari 50% wilayah Kota Prabumulih merupakan wilayah yang memiliki kandungan mineral Batubara dan akan menggunakan tidak kurang dari 21.772 hektar lahan dari total wilayah Kota Prabumulih. Kawasan tersebut akan berada di kawasan pertanian, perkebunan dan permukiman penduduk di empat wilayah tersebut. Namun dengan pertimbangan bahwa bila eksploitasi Batubara ini tetea[dipaksakan maka akan banyak memberikan dampak negative seperti misalnya kerusakan lingkungan, hilangnya mata pencaharian penduduk dan meningkatnya kemiskinan. Berdasarkan pertimbangan inilah maka Pemerintah Kota Prabumulih bersama Anggota DPRD Prabumulih sepakat untuk melarang aktifitas pertambangan Batubara di Kota Prabumulih, hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kota Prabumulih Tahun 2014-2034 pada pasal 48 ayat 1 dan pasal 61 ayat 11 huruf a.

Selain itu, Prabumulih juga memiliki potensi alam lainnya seperti pertanian dan Perkebunan. Pada sektor pertanian, Prabumulih dikenal sebagai sentra nanas dengan luas lahan panen yang cukup besar mencapai 18,110 hektar dengan produksi mencapai 45,574 ton. Produksi nanas yang cukup besar ini memberdayakan petani lokal, memberikan mata pencaharian serta meningkatkan pendapatan keluarga. Beberapa hasil produk olahan nanas Prabumulih diantaranya selai, sirup, keripik, dan produk makanan lainnya, yang turut berkontribusi pada pertumbuhan sektor industri mikro dan kecil. Selanjutnya Prabumulih juga memiliki potensi pariwisata yang terkait dengan nanas yaitu agrowisata di Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur yang dikenal dengan nama “Agronanas Edukasi Prabumulih”. Oleh karena itu, sebagai komoditas unggulan, nanas tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi petani, tetapi juga mendukung sektor industri makanan dan minuman serta pariwisata di Kota Prabumulih.

2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

a) Daya Dukung Lahan Terbangun

Nilai daya dukung lahan terbangun Kota Prabumulih sebesar 8,83 yang termasuk daya dukung lahan terbangun baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa kawasan terbangun belum terlalu banyak, terfokus dalam jenis penggunaan lahan permukiman, sehingga masih banyak area yang dapat dimaksimalkan sebagai lokasi pembangunan dan pengembangan.

b) Daya Dukung Pangan

Pengukuran ambang batas Daya Dukung Lingkungan Hidup digunakan untuk mengetahui dampak yang terjadi akibat pengembangan wilayah. Perhitungan daya dukung melihat dari dua komponen yaitu kebutuhan dan ketersediaan. Kebutuhan dari daya dukung pangan digambarkan oleh jumlah penduduk, sedangkan ketersediaan digambarkan oleh produksi dan luas lahan. Perhitungan Daya Dukung Pangan merujuk pada Permen LH nomor 17 tahun 2019 tentang penentuan daya dukung untuk penataan ruang.

Hasil analisis daya dukung lahan berdasarkan perbandingan ketersediaan dan kebutuhan lahan berbasis produktivitas lahan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan produk hayati penduduk di Kota Prabumulih Tahun 2023 termasuk kedalam kategori baik ($SL > SD$). Jadi, DDLp di Kota Prabumulih mencapai 14,76 yang termasuk daya dukung lahan pertanian baik. Maka dapat diartikan Kota Prabumulih masih dapat menyuplai kebutuhan pangan sendiri dan belum perlu untuk mengimpor dari wilayah lain

c) Daya Dukung Air

Daya dukung air merupakan kemampuan sumber daya air untuk memenuhi suatu kebutuhan dengan meninjau besarnya ketersediaan air. Daya dukung air dihitung berdasarkan perhitungan kebutuhan air dan ketersediaan air. Kedua variabel tersebut dibandingkan sehingga dapat diketahui air yang tersedia dapat mencukupi untuk berbagai kebutuhan.

Berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa kebutuhan air (air domestik dan air non domestik) Kota Prabumulih secara keseluruhan mencapai 330.952.329,26 m³/th dimana kebutuhan terbesar dari sektor perkebunan. Sedangkan ketersediaan air di Kota Prabumulih mencapai 56.415.971,61 m³/th. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh Nilai Daya Dukung Air (DDA) Kota Prabumulih sebesar 0,17. Angka tersebut berarti daya dukung air di Kota Prabumulih termasuk Kategori Terlampaui atau Buruk. Berdasarkan hasil tersebut, pemenuhan kebutuhan air permukaan di Kota Prabumulih perlu mengoptimalkan potensi-potensi sumber daya air yang tersedia, baik di wilayah sendiri maupun wilayah sekitarnya. Faktor terbesar kebutuhan air terbesar adalah adanya perkebunan yaitu sekitar 34.209,28 ha yang terdiri atas perkebunan karet, perkebunan kelapa dan perkebunan sawit (BPS Kota Prabumulih, 2022). Selain itu, Kapasitas produksi air minum PDAM Kota Prabumulih selama tahun 2023 sebesar 1.297.833 m³ dan air minum tersebut didistribusikan kepada 8.691 pelanggan (BPS Kota Prabumulih, 2024).

2.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Pangan, Energi, dan Air adalah kebutuhan dasar dan sumber kehidupan utama manusia. Seiring dengan pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan akan pangan, energi dan air terus meningkat. Ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air bukanlah masalah yang berdiri sendiri-sendiri, sebaliknya mereka terkait sangat erat satu sama lain. Ketahanan pangan akan membutuhkan air dalam jumlah besar, yang dapat disiapkan antara lain untuk pembangunan jaringan irigasi, demikian pula peningkatan ketahanan energi mungkin membutuhkan air dalam skala besar untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik, atau membutuhkan biomassa maupun komoditas pertanian lainnya yang akan memiliki pengaruh pada pencapaian ketahanan pangan. Sebagai gambaran keterkaitan ketahanan pangan, energi, dan air, berikut ini disajikan tabel indikator-indikator pendukungnya.

a) Indeks Ketahanan Pangan

Tabel 2.2 Indeks Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Pangan	nilai	61,23	60,17	59,71	68,83	68,11

Sumber: Badan Pangan Nasional

Terjadi peningkatan kategori Indeks Ketahanan Pangan Kota Prabumulih di Tahun 2023 dan 2024 menjadi kategori sedang dari tahun-tahun sebelumnya yaitu kategori rendah. Kota Prabumulih bukan merupakan daerah sentra pangan, tetapi selama ini telah berupaya memberikan dukungan terhadap peningkatan Indeks Ketahanan Pangan, diantaranya Kota Prabumulih telah melakukan kerjasama dengan daerah lain untuk menyuplai bahan pangan. Kemudian Pemerintah Kota Prabumulih juga aktif melakukan gerakan pangan murah yang menunjang ketahanan pangan, melalui kegiatan ini, terdapat aspek pemanfaatan yang nilainya cukup tinggi, yakni keragaman konsumsi pangan

b) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidacukupan pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) di Kota Prabumulih sebesar 7,62% pada 2024. Angka tersebut turun 0,47% dari tahun sebelumnya sebesar 8,06%. Rata-rata PoU Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,97% pada 2024, ini berarti bahwa persentase penduduk di Prabumulih yang mengalami kekurangan konsumsi pangan lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi Sumatera Selatan.

Secara definisi, PoU merupakan suatu kondisi seseorang, secara regular, mengkonsumsi jumlah makanan yang tidak cukup untuk memenuhi energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat. Indikator tersebut dapat digunakan

sebagai alat untuk melihat kondisi kerawanan pangan dan gizi, maka PoU yang sebesar 7,62% dapat diartikan bahwa penduduk di Kota Prabumulih yang mengkonsumsi makanan sehari-hari tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat atau dapat diartikan bahwa pada Tahun 2024 terdapat sekitar 8 orang dari 100 orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan energi untuk hidup normal, aktif, dan sehat.

Tabel 2.3 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	persen	14,56	13,36	10,54	8,09	7,62

Sumber: BPS

c) Konsumsi Listrik per Kapita

Konsumsi listrik per kapita merupakan salah satu indikator peningkatan kesejahteraan, perekonomian, dan kemajuan suatu wilayah/daerah. PT PLN Persero menjadi pemasok utama kebutuhan tenaga listrik di Kota Prabumulih. Data besaran konsumsi listrik per kapita di Kota Prabumulih menunjukkan kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,49 persen per tahun, yaitu pada Tahun 2019 sebesar 1.096,61 kWh/kapita menjadi 1.209,64 kWh/kapita di Tahun 2023.

Tabel 2.4 Konsumsi Listrik per Kapita Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi listrik perkapita	kWh/kapita	1.121,02	1.166,39	1.173,60	1.209,64	n/a

Sumber: PT PLN (Persero) Wilayah Sumsel, Jambi, dan Bengkulu/ PT PLN (Persero) of Sumsel, Jambi, and Bengkulu Region

Peningkatan konsumsi listrik per kapita ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi sekaligus menandakan kemajuan ekonomi dan peningkatan penggunaan energi di suatu daerah.

d) Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Sumber air minum Kota Prabumulih berasal dari layanan PDAM Tirta Prabujaya, sumur dan mata air terlindung. Cakupan layanan PDAM Tirta Prabujaya atau Akses Rumah Tangga terhadap air minum perpipaan baru mencapai 10,30 persen pada Tahun 2023 sedangkan cakupan Akses Rumah Tangga terhadap air minum yang berasal dari sumur dan mata air terlindung mencapai 77,21 persen.

Tabel 2.5 Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Akses RT terhadap air minum perpipaan	%	14,67	16,66	10,75	10,30	n/a
Akses Rumah Tangga terhadap air minum yang berasal dari sumur dan mata air	%	62	79,73	79,73	77,21	n/a

Sumber: BPS-Kota Prabumulih, PDAM Tirta Prabujaya

Tabel di atas menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Prabumulih yang mendapatkan layanan air PDAM Tirta Prabujaya sehingga untuk memenuhi kebutuhan air minum, sebagian besar masyarakat mendapatkannya dari sumur dan mata air terlindung. Kurang meratanya pendistribusian air PDAM Tirta Prabujaya disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana terutama sarana pengambilan air baku dari kapasitas terpasang 60 liter/detik, hanya dapat memproduksi 32 liter/detik. Selain itu, masih terdapat wilayah dalam Kota Prabumulih yang belum dapat dijangkau oleh jaringan perpipaan PDAM seperti Kecamatan Prabumulih Barat dan Kecamatan Prabumulih Selatan. Walaupun demikian, untuk cakupan akses akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak Kota Prabumulih sudah baik, rata-rata diatas 95 persen.

Tabel 2.6 Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Layak Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Akses RT terhadap air minum layak	%	96,4	93,77	98,42	95,69	n/a

Sumber: BPS-Kota Prabumulih

2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, seperti menjaga lingkungan hidup, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup, membangun infrastruktur hijau, menerapkan teknologi hijau, memberdayakan komunitas lokal serta menerapkan praktik pengelolaan limbah yang efektif. Keberhasilan mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dapat dilihat dari beberapa indikator berikut.

a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa lingkungan hidup yang semakin menurun mengancam kelangsungan hidup manusia sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sebagai bahan informasi dalam

proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perhitungan IKLH sendiri sudah dilakukan sejak Tahun 2009, namun hingga saat ini telah mengalami beberapa kali penyesuaian. Perbedaannya terletak pada cara perhitungan dan parameter yang digunakan.

Tabel 2.7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	nilai	68,49	59,86	62,79	57,64	62,79

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup -Kota Prabumulih

Penurunan nilai IKLH Kota Prabumulih pada Tahun 2023 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya menjadi 57,64 dikarenakan adanya penyesuaian tata cara dan metode perhitungan sesuai dengan peraturan yang terbaru, kemudian di Tahun 2024 meningkat menjadi 62,79. Walaupun demikian, nilai 62,79 masih termasuk dalam kategori sedang artinya masih perlu upaya Pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik.

1) Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air merupakan ukuran untuk menilai kualitas air di suatu daerah. IKA diperoleh dari analisis data kualitas air sungai yang dipantau pada 2 sungai yang menjadi kewenangan Kota Prabumulih yaitu Sungai Kelekar dan Sungai Rambang, dengan menggunakan delapan parameter, yaitu Derajat Keasaman (PH), Kebutuhan Oksigen Biologi (BOD), Kebutuhan Oksigen Kimia (COD), Padatan Tersuspensi Total (TSS), Oksigen Terlarut (DO), Nitrat (NO3-N), total Phosphat dan Coliform.

Pelaksanaan ini berdasarkan amanat PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Di dalamnya terdapat klasifikasi kelas air yang merupakan peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu. Berdasarkan hasil perhitungan melalui aplikasi IKLH diperoleh angka IKA Kota Prabumulih Tahun 2024 sebesar 53,33.

Tabel 2.8 Indeks Kualitas Air Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air	nilai	41,98	65,00	65,56	50,00	53,33

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup -Kota Prabumulih

Sama seperti beberapa tahun sebelumnya capaian Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 53,33 pada Tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat pencemaran sungai di Kota Prabumulih berada pada level sedang berarti Air Tercemar Sedang (*fairly polluted*). Pencemaran ini disebabkan oleh masih adanya masyarakat yang membuang sampah ke sungai dan pelaku industry (pabrik tahu dan tempe) membuang limbah ke sungai.

2) Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan tingkat pencemaran udara di suatu daerah. IKU umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama, yaitu oksidan/ozon di permukaan, bahan partikel, Karbon Monoksida (CO), Sulfur Dioksida (SO2) dan Nitrogen Dioksida (NO2). Namun saat ini (IKLH 2023) penghitungan IKU hanya menggunakan dua parameter saja yaitu SO2 dan NO2 . Parameter NO2 mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin dan SO2 mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bakar solar yang mengandung sulfur lainnya.

Pengukuran kualitas udara di Prabumulih dilakukan pada empat lokasi yaitu kawasan industri, perkantoran, transportasi dan permukiman. Pengambilan sampel menggunakan metode sampling aktif dengan pengukuran 1 jam per titik.

Tabel 2.9 Indeks Kualitas Udara Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Udara	nilai	84,24	75,02	81,79	83,04	91,44

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup -Kota Prabumulih

Dalam lima tahun terakhir Indeks Kualitas Udara di Kota Prabumulih terus menunjukkan peningkatan yang lebih baik, artinya tingkat udara yang dihirup tidak memberikan efek buruk bagi manusia, hewan dan tumbuhan.

3) Indeks Kualitas Lahan

Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan penyempurnaan dari Indeks Tutupan Hutan (ITH) yang digunakan Tahun 2017 kebelakang. Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, aspek lahan hanya didasarkan pada satu parameter yaitu Tutupan Hutan (TH) yang sebelumnya disebut Indeks Tutupan Hutan (ITH). Indeks Kualitas Lahan yang baru menggunakan indikator utama yaitu Tutupan Hutan (TH) dan Tutupan Vegetasi Non Hutan (TnH).

Penghitungan ITH dilakukan dengan membandingkan antara luas hutan dengan luas wilayah administrasinya.

Tabel 2.10 Indeks Kualitas Lahan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lahan	nilai	39,69	23,01	22,91	23,01	26,05

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup -Kota Prabumulih

Dalam penghitungan ITH digunakan asumsi bahwa daerah-daerah yang memiliki kawasan hutan 30 persen dari luas wilayah administrasinya diberi nilai 50. Sedangkan Kota Prabumulih tidak memiliki tutupan vegetasi hutan, hanya memiliki tutupan vegetasi non hutan yang terdiri dari RTH. Selain itu, kepadatan penduduk di Kota Prabumulih yang semakin meningkat turut mempengaruhi kualitas

lingkungannya. Alih fungsi lahan terbuka menjadi bangunan tempat tinggal dan bangunan lainnya semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan penduduk sehingga dapat mempengaruhi indeks tutupan vegetasi. Uraian sebelumnya ini menjelaskan penyebab Indeks Kualitas Lahan Kota Prabumulih masuk dalam Kategori Kurang (26,05).

b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Selain memastikan seluruh Rumah Tangga memiliki akses terhadap sanitasi yang layak, kebutuhan Rumah Tangga akan akses terhadap sanitasi yang aman juga harus dipenuhi. Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman ialah ketika rumah tangga tersebut dapat mengolah air limbah domestik yang dihasilkan dengan tangki septik sesuai standar dan disedot secara berkala atau melalui jaringan perpipaan terpusat, yang nantinya akan dikelola melalui IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) secara aman serta tangki septik berjarak kurang lebih 10 meter dari sumber air minum rumah tangga. Sanitasi aman penting untuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan, serta mencegah penyebaran penyakit.

Tabel 2.11 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	%	0,18	n/a	0,12	0,19	0,65

Sumber: Dinas Perkim-Kota Prabumulih

Dalam lima tahun terakhir capaian Akses Sanitasi Layak Kota Prabumulih sudah diatas 90%, di Tahun 2023 Akses Sanitasi Layak Prabumulih sebesar 96,44 persen, namun ini tidak termasuk aman karena tangki septiknya belum semuanya disedot secara berkala dan lumpurnya belum sepenuhnya diolah dengan baik atau saluran dari toilet bisa langsung ke IPAL dan bisa langsung diolah. Padahal yang merasa tangki septiknya sudah aman dan tidak bau, belum tentu aman.

c) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Untuk pengelolaan sampah, di Tahun 2024 Kota Prabumulih memiliki 30 unit Bank Sampah Unit (BSU), satu unit Bank Sampah Induk, 1 unit Komposting Skala kecil atau RTRW, 2 unit Pusat Olah Organik, 3 unit TPS 3R, satu unit Pusat Daur Ulang, satu unit TPA, 19 unit TPS dan 11 pengepul. Luas TPA Sungai Medang seluas 8,5 Ha. Pada Tahun 2024, dari seluruh total sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan sampah di Kota Prabumulih hanya sekitar 85,49% sampah yang dapat terkelola di fasilitas pengolahan sampah Kota Prabumulih.

Tabel 2.12 Cakupan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	88,52	88,98	89,76	86,05	85,49

Sumber: sipsn.menlhk

Dalam lima tahun terakhir cakupan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah semakin menurun, ini sekaligus menunjukkan semakin menurunnya kinerja pengolahan sampah di Kota Prabumulih, akibatnya banyak terlihat tumpukan sampah di beberapa sudut kota. Keterbatasan Pemerintah Kota Prabumulih dalam memberikan jangkauan pelayanan dan kurangnya sarana serta prasarana pengolahan sampah seperti TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) menjadi salah satu penyebab sampah belum terkelola secara baik.

d) Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Kondisi sarana pemilahan dan pengumpulan sampah di Kota Prabumulih sangat minim, terutama di lingkungan pemukiman, jalan, pasar, pertokoan dan sarana publik lainnya. Sebagai dampaknya, saat ini semakin banyak ditemukan tumpukan sampah liar di beberapa tempat di Kota Prabumulih.

Pengangkutan sampah di Kota Prabumulih dilaksanakan dengan motor sampah, dump truck, truck armroll dan mobil pick up oleh pihak swasta. Jumlah motor sampah yang beroperasi dalam angkutan sampah mencapai 40 unit yang sebagian dalam kondisi tidak layak pakai sedangkan dump truck yang beroperasi 14 unit.

2.1.6 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Bencana alam yang terjadi seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, dan tsunami kerap menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik moril ataupun materi. Salah satu upaya antisipasi kondisi tersebut maka diperlukan resiliensi masyarakat dalam mengatasi dampak bencana ataupun perubahan iklim. Secara definisi, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim adalah kemampuan untuk bertahan dan pulih dari bencana dan perubahan iklim. Untuk mendukung perwujudan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim dapat dilihat dari beberapa indikator seperti Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Indeks Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah.

a) Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan isu global yang semakin mendesak. Peningkatan emisi GRK disebabkan karena adanya peningkatan konsentrasi gas rumah kaca seperti Karbondioksida (CO2), Metana (CH4), dan Dinitrogen Oksida (N2O) di atmosfer. Hal ini menyebabkan dampak lingkungan, termasuk pemanasan

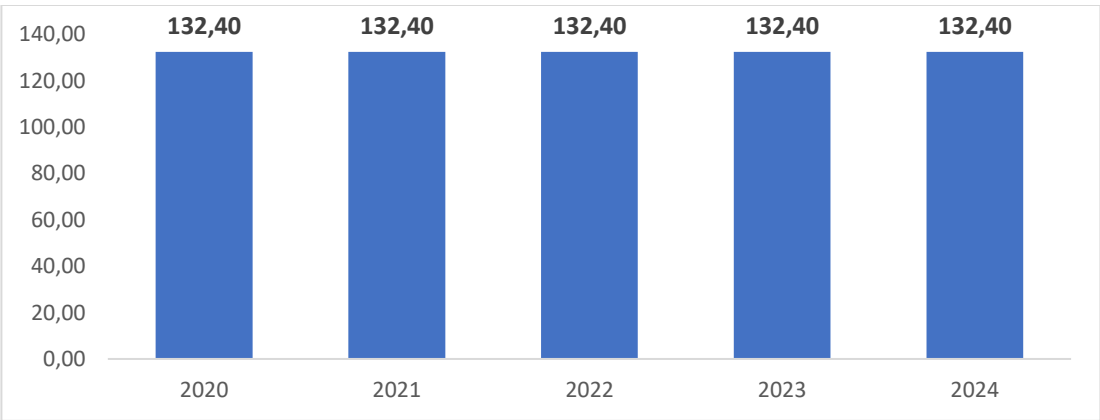
global yang dapat memicu perubahan iklim lokal, mengakibatkan pola hujan yang tidak stabil, musim kemarau yang lebih panjang, dan kekeringan yang lebih serius, tentunya hal ini dapat mengganggu siklus hidrologi serta ketersediaan air bersih untuk konsumsi manusia dan industri. Bagi Kota Prabumulih, Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang menjadi salah satu penyebab pemanasan global salah satunya dihasilkan dari sektor limbah (sampah domestik).

Untuk mengurangi dampak pemanasan global karena meningkatnya Emisi Gas Rumah Kaca, maka Pemerintah Kota Prabumulih telah berupaya melakukan penurunan Emisi Gas Rumah Kaca diantaranya pengelolaan sampah melalui Bank Sampah Prabumulih (BSP) dan Program Kampung Iklim (Proklam). Upaya tersebut menghasilkan penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

b) Indeks Risiko Bencana

Kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana alam menjadi aspek yang sangat penting untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat bencana alam sekaligus dapat menekan angka indeks risiko bencana.

Secara definisi Indeks Risiko Bencana adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap bencana. Angka ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kerentanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.



Gambar 2.2 Indeks Risiko Bencana Tahun 2020-2024

Sumber: Buku IRBI BNPB 2023

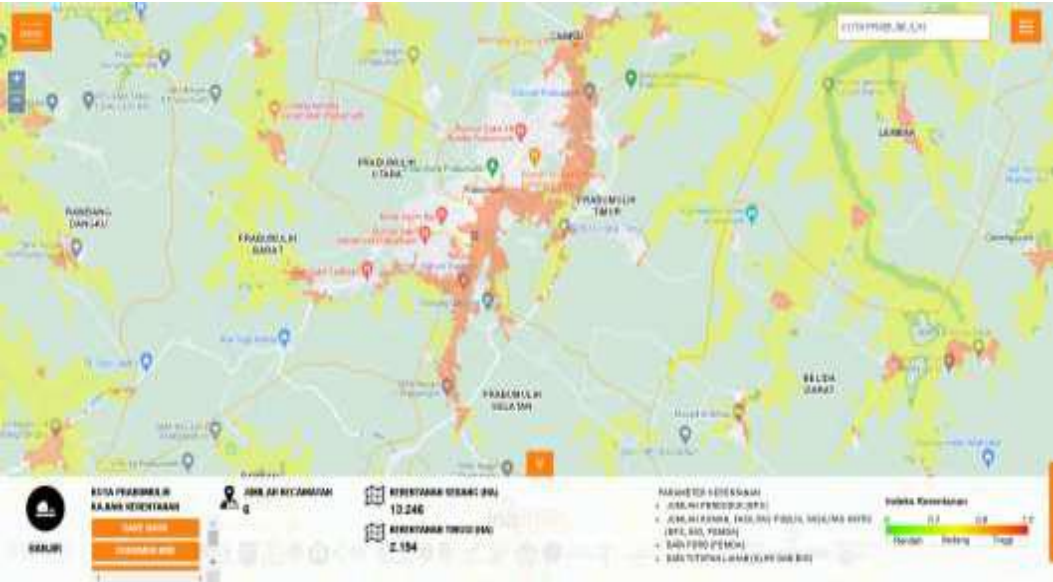
Pada Gambar diatas menunjukkan Indeks Risiko Bencana sedang, artinya wilayah Kota Prabumulih memiliki tingkat kerentanan yang sedang terhadap bencana.

➤ Banjir

Bencana yang sering terjadi di Kota Prabumulih adalah banjir, penyebabnya karena sebagian besar wilayah Prabumulih berada di dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 32 mdpl – 54 mdpl, dengan rata-rata ketinggian setinggi 34 mdpl. Selain itu secara geomorfologis, wilayah Kota Prabumulih juga sedikit bergelombang, terdapat sekitar 92% dari wilayah Kota Prabumulih yang berada

pada wilayah kemiringan kurang dari 12° dan sekitar 7,99% pada kemiringan antara 12°-40°. Kondisi inilah yang menyebabkan Kota Prabumulih rawan terhadap bencana banjir. Bencana banjir yang sering terjadi, terutama disebabkan karena curah hujan yang tinggi, sehingga sungai tidak lagi mampu menampung limpasan air hujan yang berasal dari DAS. Di wilayah Prabumulih terdapat 3 (tiga) aliran sungai yang mengalir sepanjang tahun dengan sub DAS, yaitu sub DAS Kelekar, Rambang, dan Lematang. Kondisi sungai-sungai tersebut dapat dikatakan cukup mengkhawatirkan, hal ini dapat dilihat dari tinggi air permukaan dan debit air yang menurun drastis pada musim kemarau.

Berdasarkan laporan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pada Tahun 2023, indeks resiko bencana banjir Kota Prabumulih mendapatkan skor 36.00 (termasuk dalam kelas resiko tinggi).



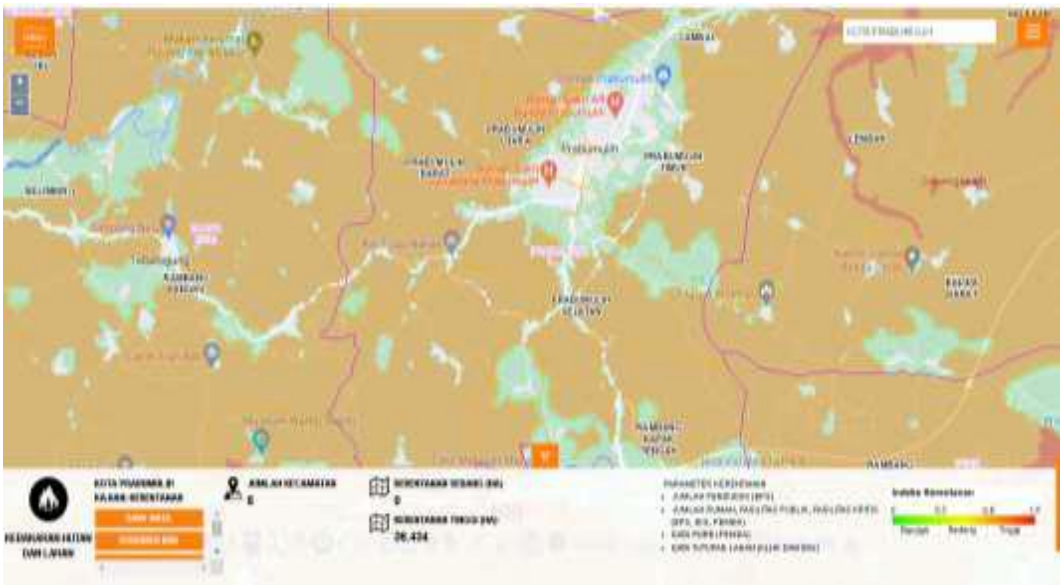
Gambar 2.3 Peta Indeks Kerentanan Banjir

Sumber: <https://inarisk.bnpb.go.id/#> (2022)

Kota Prabumulih memiliki indeks kerentanan banjir yang beragam mulai dari kerentanan rendah, sedang, hingga tinggi. Namun, didominasi oleh kerentanan kelas tinggi dan sedang. Dari 6 kecamatan di Kota Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Timur, Cambai, dan Prabumulih Selatan merupakan wilayah yang mendapatkan kerentanan tinggi. Sedangkan indeks kerentanan sedang terdapat pada Kecamatan Prabumulih Barat, Prabumulih Utara, dan Rambang Kapak Tengah.

➤ **Kebakaran**

Indeks resiko kebakaran hutan dan lahan di Kota Prabumulih pada Tahun 2023 yaitu 36.00 (termasuk dalam kelas tinggi).



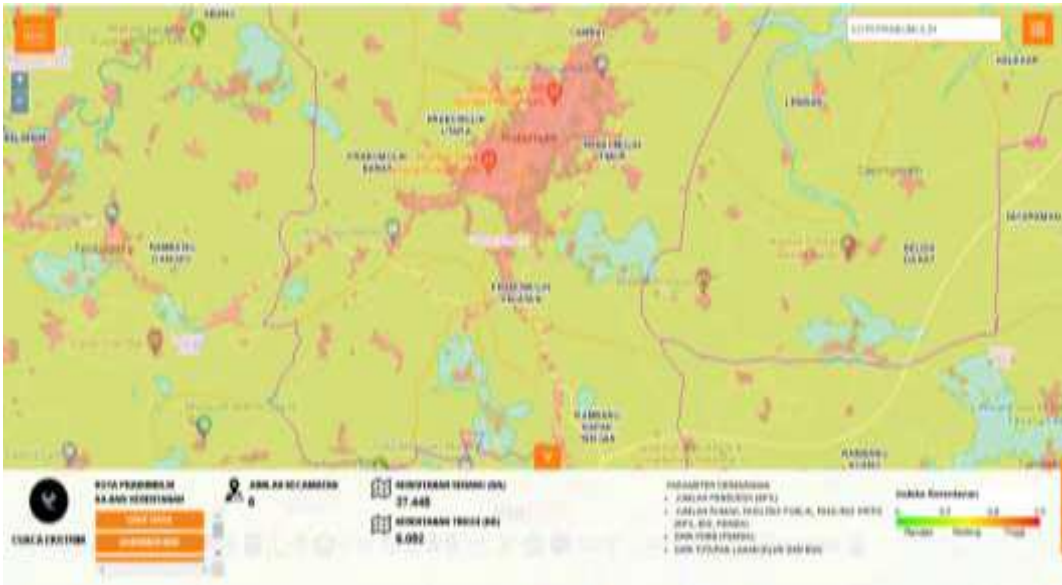
Gambar 2.4 Peta Indeks Kerentanan Kebakaran Hutan dan Lahan

Sumber: <https://inarisk.bnpb.go.id/> (2022)

Dari peta tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat kerentanan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Prabumulih yang terdiri dari 6 kecamatan yaitu Kecamatan Prabumulih Timur, Cambai, Prabumulih Selatan, Prabumulih Barat, Prabumulih Utara, dan Rambang Kapak Tengah mendapatkan nilai sedang dengan jumlah kerentanan 36.434 Ha.

➤ **Cuaca Ekstrem**

Indeks bahaya dan kerentanan cuaca ekstrem dilihat dari tiga parameter yaitu keterbukaan lahan, kemiringan lereng, dan curah hujan tahunan berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia. Indeks risiko cuaca ekstrem di Kota Prabumulih pada Tahun 2023 yaitu dengan skor 13.60 (termasuk dalam kelas tinggi).



Gambar 2.5 Indeks Kerentanan Cuaca Ekstrem

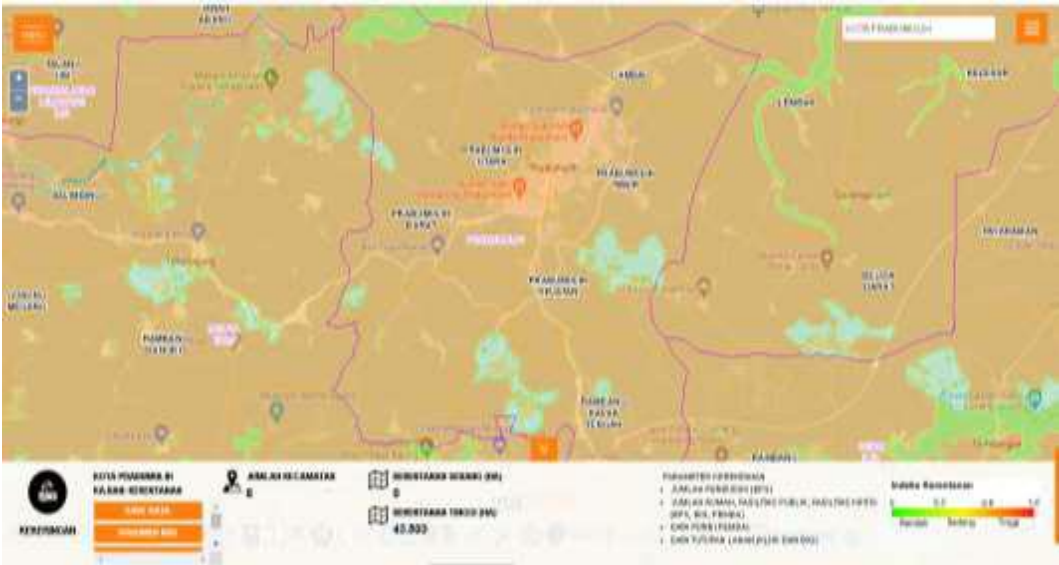
Sumber: <https://inarisk.bnpb.go.id/> (2022)

Dari peta di atas, dapat dilihat bahwa indeks kerentanan cuaca ekstrem di Kota Prabumulih mendapatkan tingkat sedang dan tinggi, namun didominasi oleh

kerentanan sedang sebesar 37.448 ha yaitu pada Kecamatan Prabumulih Selatan, Prabumulih Barat, dan Rambang Kapak Tengah. Sedangkan kerentanan tinggi yaitu sebesar 6.052 ha dengan beberapa kecamatan yaitu Prabumulih Timur, Cambai, dan Prabumulih Utara.

➤ **Kekeringan**

Potensi bahaya kekeringan dapat terjadi pada seluruh wilayah Kota Prabumulih. Berdasarkan data Indeks Rencana Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2023, Kota Prabumulih dalam bencana kekeringan mendapatkan skor sebesar 24.00 (termasuk dalam kelas tinggi).



Gambar 2.6 Indeks Kerentanan Kekeringan

Sumber: <https://inarisk.bnpb.go.id/> (2022)

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa indeks kerentanan bencana kekeringan di Kota Prabumulih mendapatkan kelas tinggi yaitu sebesar 43.503 ha yang tersebar merata di seluruh kecamatan dan kelurahan. Namun, beberapa kelurahan di Kota Prabumulih memiliki indeks kerentanan rendah yaitu pada Kelurahan Karang Jaya, Muara Dua, Sinar Rambang, dan Tanjung Menang.

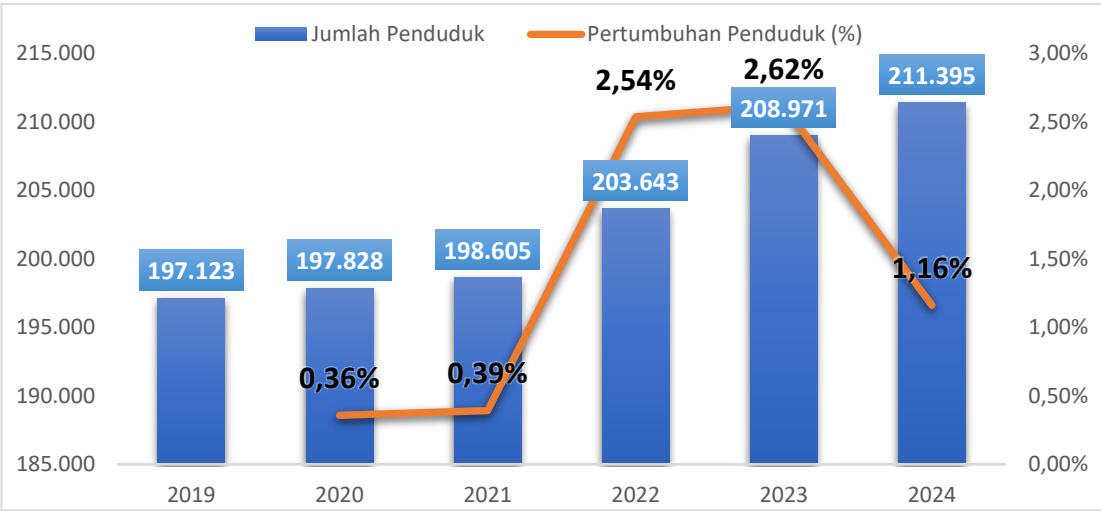
c) Indeks Ketahanan Daerah

Sasaran pengarusutamaan kerentanan bencana adalah meningkatkan ketahanan suatu daerah untuk menghadapi kejadian bencana. Berdasarkan penilaian kapasitas secara keseluruhan, ketahanan daerah Kota Prabumulih dalam menghadapi potensi bencana memiliki Indeks Ketahanan Daerah 0,23 pada Tahun 2023, dan nilai ini menunjukkan Tingkat Kapasitas Daerah Rendah. Nilai ini menunjukkan bahwa Kota Prabumulih masih perlu banyak melaksanakan berbagai tindakan pengurangan risiko bencana, disertai dengan peningkatan komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan sistematis yang lebih baik.

2.1.7 Demografi

a) Laju Pertumbuhan Penduduk

Kondisi Demografi, ditunjukkan dengan jumlah penduduk Prabumulih selama kurun waktu Tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Tahun 2020, jumlah penduduk Prabumulih sebanyak 197.828 jiwa dan Tahun 2024 sebanyak 211.395 jiwa atau mengalami penambahan penduduk sebanyak 13.567 jiwa atau 6,86 persen, atau selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan tahunan penduduk di sebesar 1,34%. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk Prabumulih cenderung meningkat, meskipun dengan laju pertumbuhan yang relatif lambat.



Gambar 2.7 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Prabumulih Tahun 2019-2024

Sumber : Disdukcapil-Kota Prabumulih dan Analisis Bappeda Prabumulih

Berdasarkan data jumlah penduduk Kota Prabumulih yang terus meningkat setiap tahunnya, ini sekaligus menunjukkan pertumbuhan konsisten dari Tahun 2025 hingga Tahun 2029, tentunya ini membutuhkan pengelolaan sumber daya manusia yang baik dan tepat untuk mendukung daya saing daerah serta perkembangan wilayah.

b) Rasio Jenis Kelamin

Rasio Jenis Kelamin (sex ratio) merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu.

Tabel 2.13 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sex Ratio per Kecamatan Kota Prabumulih Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Prabumulih Barat	16.344	15.939	32.283	102,54
2	Prabumulih Timur	43.714	43.248	86.962	101,08
3	Cambai	10.776	10.620	21.396	101,47
4	Rambang Kapak Tengah	7.252	7.151	14.403	101,41
5	Prabumulih Utara	16.624	16.555	33.179	100,42
6	Prabumulih Selatan	11.726	11.446	23.172	102,45
Total		106.436	104.959	211.395	101,41

Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, Hasil Analisis Bappeda Prabumulih

Walaupun jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan di Kota Prabumulih terlihat hampir sama, namun jumlah penduduk laki-laki masih lebih besar sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal tersebut ditunjukkan dengan sex ratio sebahagian besar masing-masing kecamatan yang nilainya lebih dari 100.

c) **Kepadatan Penduduk**

Kepadatan Penduduk merupakan jumlah penduduk di suatu daerah per satuan luas.

Tabel 2.14 Kepadatan Penduduk Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Prabumulih Barat	67,4	462	461	468	476	479
2	Prabumulih Timur	147,19	542	547	564	582	591
3	Cambai	64,79	298	299	313	324	330
4	Rambang Kapak Tengah	79,48	168	169	174	179	181
5	Prabumulih Utara	12,16	2.698	2.676	2.678	2.718	2.729
6	Prabumulih Selatan	106,32	202	203	210	215	218
Total		477.311	414	416	427	438	443

Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, Hasil Analisis Bappeda Prabumulih

Kota Prabumulih mengalami variasi kepadatan penduduk di setiap kecamatan selama lima tahun terakhir. Kecamatan Prabumulih Utara menunjukkan kepadatan tertinggi yang konsisten, mulai dari 2.698 jiwa/km2 pada Tahun 2020 hingga 2.729 jiwa/km2 pada Tahun 2024. Sementara itu, Kecamatan Rambang Kapak Tengah kepadatan terendah, berkisar dari 168 jiwa/km2 pada Tahun 2020 hingga 181 jiwa/km2 pada Tahun 2024. Beberapa kecamatan lainnya menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya. Jadi secara garis besar kepadatan penduduk di Kota Prabumulih menunjukkan tren yang meningkat dari 414 jiwa/km2 pada Tahun 2020 hingga 443 jiwa/km2 pada Tahun 2024, ini menunjukkan adanya pertumbuhan penduduk yang signifikan di sebagian besar kecamatan.

d) **Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur**

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dibagi menjadi tiga kelompok sebagaimana pada uraian tabel berikut.

Tabel 2.15 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Kelompok Umur	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
0-14	%	28,37	29,41	29,24	28,33	27,85
15-64	%	59,16	66,18	66,13	66,72	66,91
64	%	4,29	4,41	4,63	4,96	5,24

Sumber: BPS Prabumulih, Hasil Analisis Bappeda Kota Prabumulih

Pada Tahun 2020 persentase penduduk kelompok umur 0-14 tahun sebesar 28,37 persen dan perlahan terus menurun hingga pada Tahun 2024 menjadi 27,85 persen. Sebaliknya persentase penduduk usia 65 tahun keatas cenderung meningkat selama

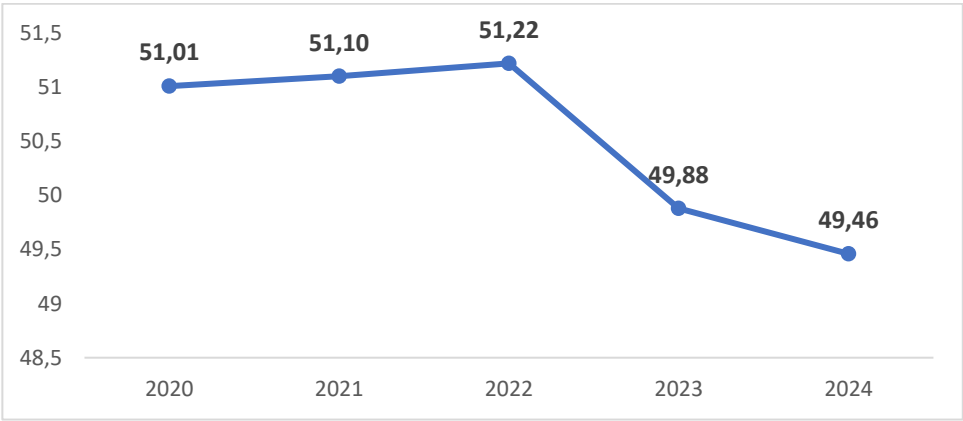
periode 2020-2024, namun peningkatannya tidak banyak. Pada Tahun 2020 persentase penduduk usia 65 tahun keatas mencapai 4,29 persen dari total penduduk dan pada 2024 meningkat menjadi 5,24 persen. Kondisi menurunnya persentase penduduk kelompok umur 0-14 tahun dan meningkatnya persentase penduduk kelompok usia 65 tahun keatas berkaitan erat dengan seiring membaiknya kualitas hidup Masyarakat dan Usia Harapan Hidup. Kondisi ini berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penduduk lansia dan menggambarkan bahwa Prabumulih ke depan harus mulai mempersiapkan diri untuk memasuki masa transisi menuju *ageing population*.

Tabel 2.16 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Kelompok Umur	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
0-14	jiwa	53.601	57.560	58.206	56.836	56.625
15-64	jiwa	127.227	129.551	131.627	133.889	136.033
64	jiwa	8.101	8.637	9.214	9.948	10.654

Sumber: BPS Prabumulih, Hasil Analisis Bappeda Kota Prabumulih

Angka ketergantungan (dependency ratio), adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif (anak-anak dan lanjut usia) dengan penduduk usia produktif (usia kerja) dalam suatu populasi. Rasio ini menggambarkan tentang beban ekonomi yang ditanggung oleh kelompok usia produktif untuk mendukung kelompok usia non-produktif.



Gambar 2.8 Angka Ketergantungan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Sumber : BPS Prabumulih, Hasil Analisis Bappeda Kota Prabumulih

Berdasarkan gambar di atas, angka ketergantungan menunjukkan trend menurun dimulai dari Tahun 2022, dan penyumbang penurunan angka ketergantungan terbesar adalah pada kelompok penduduk belum produktif (usia 0-14 tahun). angka ketergantungan terhadap usia produktif di Prabumulih tercatat sebesar 49,46% pada 2024, artinya setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) mempunyai beban tanggungan sebanyak 48-49 orang yang dianggap belum produktif atau sudah tidak produktif lagi. Angka tersebut turun 0,42% poin dibandingkan pada tahun lalu yang sebesar 49,88%, dengan kata lain beban tanggungan penduduk untuk membiayai

penduduk yang tidak produktif juga turun. Angka tersebut pun merupakan level terendah dalam lima tahun terakhir.

Angka ketergantungan yang semakin menurun berpotensi terjadinya bonus demografi.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Pada sub bab ini akan dibahas karakteristik kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi. Secara ringkas, capaian indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17 Capaian Indikator Utama Kesejahteraan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

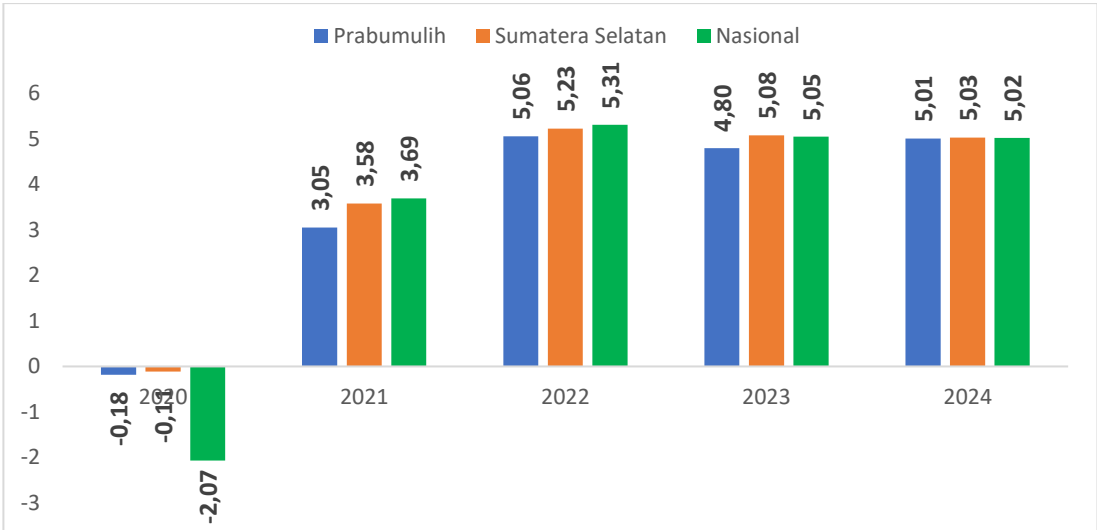
Indikator	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
		Realisasi	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian
Pertumbuhan Ekonomi	%	-0,18	5,37	-3,35	3,05	5,42	56,3	5,06	5,57	93	4,8	5,52	87	5,01	5,26-5,56	94,53
Angka Kemiskinan	%	11,59	10,42	88,77	12,2	9,92	77,02	11,28	9,42	80,25	11,23	8,92	74,10	10,13	10,13	93,97
PDRB Per Kapita	Juta rupiah	40,88	41,46	96	42,74	44,20	96	46,26	46,94	99	49,01	49,68	99	51,81	47,22-48,22	102
Tingkat Pengangguran terbuka	%	6,64	6,62	99,70	5,86	5,97	101,84	5,25	5,71	108,06	5,05	5,46	107,51	4,94	5,08	103
Gini Ratio	nilai	0,372	0,32	83,75	0,382	0,300	72,67	0,372	0,300	76	0,373	0,300	75,67	0,353	0,37	104,59
Indeks Pembangunan Manusia	nilai	74,55	74,55	100,3	74,67	74,4	100,4	75,52	74,45	101,44	76,46	74,5	102,63	77,08	76,03	103,49

Sumber: Dokumen Evaluasi Pembangunan Lima Tahun Kota Prabumulih

Gambaran kondisi laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, PDRB Per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini serta Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan perekonomian wilayah secara makro dapat dilihat melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah, yang besarnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian yang akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menjadikan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat atau bertambah dan berimbas pada meningkatnya kemakmuran masyarakat, yang mana pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah.



Gambar 2.9 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS- Kota Prabumulih

Pada periode 2020 hingga 2024, laju pertumbuhan ekonomi di Kota Prabumulih menunjukkan fluktuasi, dengan angka tertinggi mencapai 5,06% pada Tahun 2022 dan turun lagi menjadi 4,80% pada Tahun 2023. Meskipun mengalami penurunan, pertumbuhan ekonomi di Kota Prabumulih kembali naik di Tahun 2024 menjadi 5,01%. Kenaikan ini terjadi karena adanya peningkatan laju pertumbuhan sektor tersier dari tahun sebelumnya, dalam hal ini sektor jasa seperti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Pendidikan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Keuangan dan Asuransi.

Tabel 2.18 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Prabumulih Tahun 2020-2024 (%)

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,10	6,20	5,93	5,72	5.88
2	Pertambangan dan Penggalian	9,77	9,80	9,60	8,49	8.2
3	Industri Pengolahan	10,56	10,53	10,47	10,71	10.85
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,21	0,21	0,20	0,20	0.21
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,03	0.03
6	Bangunan	17,41	17,54	17,48	17,42	17.12
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan Sepeda Motor	24,27	24,71	25,70	26,74	27.15
8	Transportasi dan Pergudangan	2,82	2,71,2,	2,84	3,02	2.74
9	Penyediaan, Akomondasi dan Makan-Minum	2,82	2,71	2,84	3,02	4.25
10	Informasi dan Komunikasi	3,90	3,92	4,10	4,24	1.29
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,17	1,20	1,18	1,22	4.18
12	Real Estate	4,64	4,54	4,34	4,25	7.58
13	Jasa Perusahaan	8,12	7,87	7,70	7,66	0.8
14	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan SosialWajib	3,76	3,69	3,50	3,42	3.42
15	Jasa Pendidikan	2,97	2,87	2,82	2,83	2.94
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,93,	2,86	2,79	2,71	2.8
17	Jasa Lainnya	0,53	0,52	0,52	0,54	0.55
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Buku PDRB -BPS Prabumulih

Tabel 2.19 Laju Pertumbuhan Menurut Lapangan Usaha Kota Prabumulih Tahun 2020-2024 (%)

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.18	2.15	2.19	1.68	3.85
2	Pertambangan dan Penggalian	-2.31	-3.16	-0.52	2.77	2.87
3	Industri Pengolahan	1.19	3.01	5.27	5.19	5.26
4	Pengadaan Listrik dan Gas	12.22	4.84	4.34	7.66	6.65
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.96	0.19	4.38	-0.79	1.8
6	Bangunan	-1.98	3.09	3.74	3.77	4.25
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan Sepeda Motor	-0.98	6.6	9.56	7.75	6.59
8	Transoprtasi dan Pergudangan	-5.04	1.99	9.73	6.27	0.5
9	Penyediaan, Akomondasi dan Makan- Minum	-5.06	5.48	12.86	9.23	7.07
10	Informasi dan Komunikasi	11.07	6.21	6.68	7.55	6.96
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.44	3.14	1.01	2.43	4.75
12	Real Estate	0.24	2.77	4.3	4.36	5.22
13	Jasa Perusahaan	-0.2	2.65	5.2	6.09	5.69
14	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.84	4.07	3.23	3.3	5.03
15	Jasa Pendidikan	-0.79	2.28	5.88	5.06	5.87
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12.1	Bi2	5.63	0.03	5.31
17	Jasa Lainnya	2.46	2.41	5	7.15	5.64
PDRB		-0.18	3.05	5.06	4.8	5.01

Sumber : Buku PDRB -BPS Prabumulih

Tabel 2.20 Distribusi PDRB ADHB Kota Prabumulih menurut Pengeluaran Tahun 2020 – 2024 (%)

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	65,31	63,67	64,34	64,51	65.93
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,6	1,58	1,57	1,62	1.84
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12,33	11,99	11,54	11,44	12.15
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	40,39	37,45	37,64	36,22	37.48
5	Perubahan Inventori	0,05	-0,01	0,38	0,34	-0.05
6	Net Ekspor Brang dan Jasa	-19,66	-14,7	-15,46	-14,13	-17.34
PDRB		100	100	100	100	100

Sumber: BPS – Kota Prabumulih

Tabel 2.21 Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kota Prabumulih menurut Pengeluaran Tahun 2020 – 2024 (%)

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	-0,38	1,7	5,4	3,78	6,04
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-3,04	2,78	5,26	6,50	
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-10,8	0,19	4,93	4,69	11,6
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	-0,75	-2,63	-1,27	0,69	4,50
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Net Ekspor Brang dan Jasa	-	-	-	-	-
PDRB		-0.18	3,05	5,06	4,8	5,01

Sumber: BPS – Kota Prabumulih

Selain dari lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi dari sisi pengeluaran. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Kota Prabumulih Tahun 2024 tumbuh meningkat 6,04 persen dibandingkan periode sebelumnya atau tumbuh positif 2,26 persen, kondisi ini terjadi karena adanya peningkatan pendapatan masyarakat, bantuan sosial dari pemerintah sehingga mendorong daya beli masyarakat, kenaikan upah minimum serta peningkatan

mobilitas masyarakat. Diketahui bahwa konsumsi rumah tangga merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi suatu wilayah/daerah (memiliki proporsi terbesar perekonomian suatu wilayah/daerah) sekitar 60-an persen.

b. Tingkat Kemiskinan

Saat ini, pembahasan kemiskinan tidak hanya tentang kemiskinan tetapi juga tentang kemiskinan ekstrem. Secara definisi kemiskinan adalah kondisi seseorang atau keluarga hidup di bawah Ambang Kemiskinan (Garis Kemiskinan/GK) sedangkan Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Selanjutnya kalau dilihat dari sisi pengeluaran, untuk miskin ekstrem yaitu seseorang yang kebutuhan atau pengeluaran sehari-harinya hanya Rp 10.739 per hari atau Rp 322.170 per bulan, sedangkan miskin biasa pengeluarannya Rp 15.750 per hari dan Rp 472.525 per bulan. Selanjutnya bagaimana kondisi kemiskinan di Kota Prabumulih dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22 Kondisi Kemiskinan di Kota Prabumulih Tahun 2020 – 2024

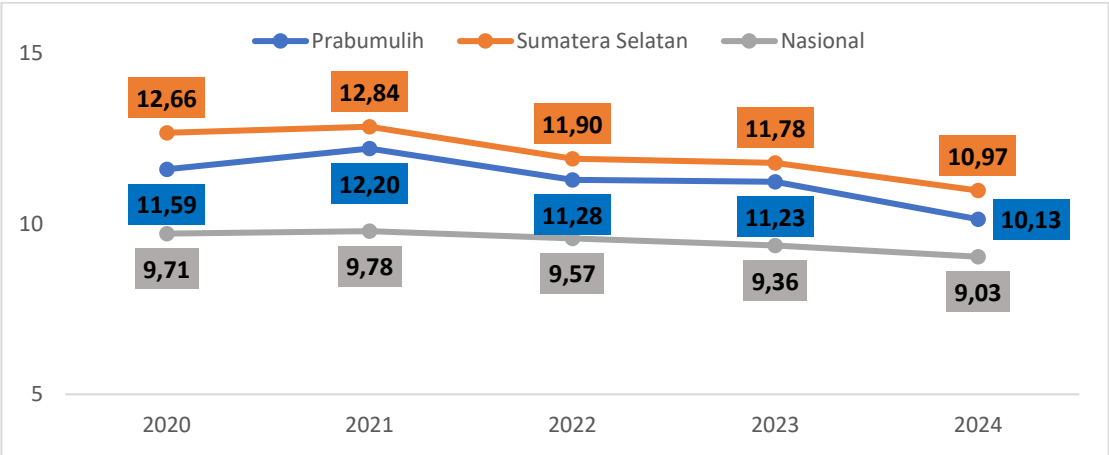
No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Garis Kemiskinan	Rp/Kapita/Bulan	569.769	592.210	623.429	649.951	650.002
2	Jumlah Penduduk Miskin	jiwa	21.830	24.000	22.120	22.330	20.410
3	Persentase Penduduk Miskin	(%)	11.59	12.2	11.28	11.23	10.13
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Nilai	1.27	1.20	1.37	1.48	1.47
5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Nilai	0.23	0.18	0.26	0.27	0.36

Sumber: BPS

Garis Kemiskinan direpresentasikan sebagai rupiah yang diperlukan atau harga yang dibayarkan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum makanan (setara dengan 2.100 kkal per kapita per hari) dan kebutuhan paling mendasar kelompok bukan makanan. Garis Kemiskinan meningkat dari 569,769 Rp/Kapita/Bulan pada Tahun 2020 menjadi 650,002 Rp/Kapita/Bulan pada Tahun 2024, ini menggambarkan kenaikan biaya hidup per kapita per bulan. Jumlah penduduk miskin sempat mengalami peningkatan dari 21.830 jiwa pada Tahun 2020 menjadi 24.000 jiwa pada tahun 2020 tetapi kemudian turun menjadi 20.410 jiwa pada Tahun 2024. Kemudian, persentase penduduk miskin menunjukkan trend serupa, terjadi peningkatan dari 11,59% pada Tahun 2020 menjadi 12,2% pada tahun 2020 kemudian turun menjadi 10,13% pada Tahun 2024, yang artinya bahwa pada Tahun 2019 dari 100 orang penduduk, 11 atau 12

diantaranya adalah penduduk miskin kemudian jumlahnya turun menjadi sekitar 10 orang penduduk miskin dari 100 orang penduduk pada Tahun 2024.

Capaian kemiskinan, tidak hanya sebatas pada jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan saja, namun perlu dilihat juga dari perspektif yang lain seperti Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tercatat sebesar 1,27 pada awal periode (2020) kemudian menjadi 1,47 pada tahun akhir (2024). Hal ini berarti terjadi peningkatan Kedalaman Kemiskinan selama periode tersebut, yang memperlihatkan bahwa rata-rata kesenjangan pendapatan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan cenderung melebar atau dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk miskin yang pengeluarannya jauh di bawah garis kemiskinan semakin banyak. Capaian Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga menunjukkan trend yang sama dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan, dengan kenaikan dari 0,26 pada awal periode (2020) menjadi 0,36 pada tahun akhir (2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran semakin melebar di antara penduduk miskin.



Gambar 2.10 Angka Kemiskinan Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2020 – 2024

Sumber: BPS

Dalam lima tahun terakhir tingkat kemiskinan di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan dan nasional menunjukkan tren penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan Pemerintah Kota Prabumulih dan provinsi sudah mulai selaras.

Kemiskinan Ekstrem

Selaras dengan tingkat kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kota Prabumulih dari tahun 2020 hingga 2024 memperlihatkan trend menurun, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23 Kemiskinan Ekstrem Prabumulih 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Kemiskinan Ekstrem	%	3,14	0,33	1,57	1,57	0,45

Sumber : BPS Kota Prabumulih

Berdasarkan data BPS, Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kota Prabumulih pada tahun 2024 sebesar 0,45%. Terjadi penurunan tingkat kemiskinan ekstrem bila dibandingkan data tahun awal 2020 yang sebesar 3,14. Bentuk upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Prabumulih diantaranya adalah :

- 1. Menurunkan beban pengeluaran, yaitu berupa perlindungan sosial, jaminan sosial, bantuan sosial.
- 2. Meningkatkan pendapatan, yaitu berupa pemberdayaan, pelatihan & akses pekerjaan, peningkatan produktivitas dan akses modal.
- 3. Pengurangan kantong-kantong kemiskinan, yaitu berupa peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi layak, rumah layak huni dan air minum layak.

c. **PDRB Per Kapita**

PDRB per kapita sering digunakan sebagai indikator paling sederhana untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk, artinya untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat, harus melihat aspek yang lebih jauh, seperti kemiskinan. PDRB per kapita menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah. Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Dengan demikian, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB perkapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

PDRB perkapita terbagi menjadi PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku yang menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk, serta PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan yang berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

Tabel 2.24 PDRB Per Kapita Kota Prabumulih 2020-2024

Pendapatan Per Kapita	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	40.884,93	42.736,29	46.506,62	49.005,76	51.808,00
Atas Dasar Harga Konstan	ribu rupiah	27.948,03	28.378,29	29.405,3	30.408,19	31.516,00

Sumber : BPS Prov Sumatera Selatan

Selama kurun waktu 2020-2024, nilai PDRB per Kapita Kota Prabumulih baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan terus mengalami peningkatan. Hal ini memperlihatkan bahwa PDRB per Kapita ADHB dan ADHK Kota Prabumulih selama periode 2020-2024 masing-masing mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 6,24 persen dan 2,86 persen. Hal ini sekaligus juga mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat perlahan meningkat.

d. **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Secara makro, kondisi ketenagakerjaan di Kota Prabumulih termasuk cukup baik, hal ini dapat dilihat dari kecenderungan penurunan tingkat pengangguran dari tahun-tahun sebelumnya seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.25 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Prabumulih 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Pengangguran Terbuka	(%)	6.64	5.86	5.25	5.05	4.94

Sumber : BPS-Kota Prabumulih

Pada tahun 2020-2024 TPT Kota Prabumulih cenderung mengalami penurunan menjadi 4,94%, artinya pada Tahun 2024 dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 5 orang yang menganggur. Selanjutnya akan kita lihat indikator lainnya masih terkait ketenagakerjaan.

Tabel 2.26 Kondisi Ketenagakerjaan menurut Pendidikan Kota Prabumulih Tahun 2024

Kategori	Satuan	SD ke bawah	SMP	SMA/SMK	PT
Penduduk yang bekerja	%	98,37	98,81	92,25	95,69
TPT	%	7,61	2,58	72,23	17,58

Sumber : BPS-Kota Prabumulih, Analisis Bappeda Prabumulih

Secara umum proporsi penduduk yang bekerja di Kota Prabumulih berdasarkan tingkat pendidikan hampir sama, namun proporsi penduduk yang bekerja dengan latar belakang SD ke bawah dan Sekolah Menengah Pertama masih lebih banyak dibandingkan tingkat pendidikan lainnya sebesar 98,37 persen dan 98,81 persen. Sementara itu, TPT tertinggi ada pada kelompok pendidikan jenjang SMA/SMK sebesar 72,23 persen. Dari kondisi ini dapat dikatakan bahwa kualitas SDM tenaga kerja di Kota Prabumulih masih belum cukup baik, sehingga berpengaruh kepada produktivitasnya karena tenaga kerja dengan latar belakang SD ke bawah secara umum memiliki kualifikasi pendidikan dan keterampilan yang sangat terbatas. Kemudian proporsi yang cukup signifikan angkatan kerja dengan latar belakang pendidikan SMA/SMK ternyata masih banyak belum terserap oleh lapangan pekerjaan, hal ini dianggap bahwa kualifikasi keterampilan lulusan SMA/SMK belum benar-benar memenuhi kebutuhan pasar kerja seperti perusahaan industri atau jasa.

Kemudian hal terpenting lainnya terkait ketenagakerjaan adalah ketersediaan pekerjaan (kesempatan kerja) karena ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk usia kerja dan lapangan kerja memunculkan tantangan dalam bentuk pengangguran, yang mana masalah ketenagakerjaan dihasilkan dari pertumbuhan penduduk yang cepat dan ekspansi Angkatan Kerja (AK) yang tidak disertai dengan ketersediaan lapangan kerja.

Angkatan kerja adalah penduduk yang berada dalam usia kerja, baik yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran), atau secara singkat angkatan kerja terdiri dari tenaga kerja dan pengangguran.

Tabel 2.27 Pertumbuhan Jumlah Angkatan Kerja Kota Prabumulih 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah (jiwa/orang)	96.417	98.204	103.002	98.919	103.675
Pertumbuhan (%)	3,86	1,85	4,89	-3,96	4,81

Sumber : BPS-Kota Prabumulih, Analisis Bappeda Prabumulih

Tabel 2.28 Pertumbuhan Jumlah Angkatan Kerja Kota Prabumulih 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kesempatan Kerja (%)	93.36	94.14	94.75	94.04	95.06
Pertumbuhan (%)	-0,63	0,84	0,65	-0,75	1,08

Sumber : BPS-Kota Prabumulih, Analisis Bappeda Prabumulih

Dari kedua tabel di atas, diperoleh rata-rata pertumbuhan Angkatan Kerja selama lima tahun terakhir adalah 2,29%, angka lebih besar bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan Tingkat Kesempatan Kerja yang sebesar 0,23%. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah angkatan kerja belum sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia. Walaupun demikian, ternyata tingkat pengangguran cenderung turun, kondisi ini terjadi karena bertambahnya jumlah Angkatan Kerja yang tidak mencari pekerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Pada Tahun 2024, penduduk usia kerja di Kota Prabumulih sebanyak 147.059 orang, 103.675 orang di antaranya tergolong sebagai Angkatan Kerja Atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 70,50 persen, sedangkan sisanya 29,50% tergolong sebagai bukan angkatan kerja, yakni mereka yang hanya memiliki kegiatan bersekolah, mengurus rumah tangga serta aktivitas lainnya.

Tabel 2.29 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Prabumulih 2020-2024

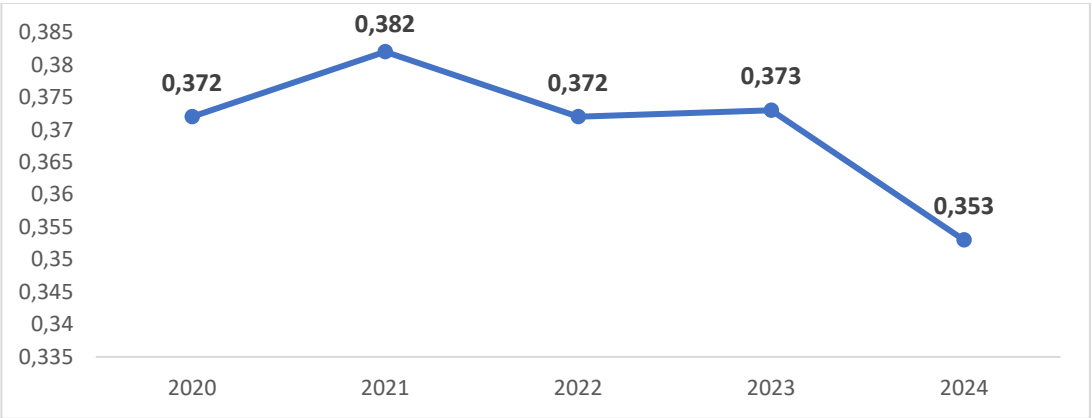
No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	orang	96.417	98.204	103.002	98.919	103.675
2	Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas	orang	138.931	141.479	143.620	144.189	147.059
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	%	69.39	69.41	71.71	68.6	70.50

Sumber : BPS-Kota Prabumulih

Tabel di atas mencatat adanya peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari 69,39 di Tahun 2019 menjadi 70,50 di Tahun 2024. Peningkatan TPAK mengindikasikan semakin banyak orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang berpeluang untuk lebih banyak menghasilkan barang dan jasa, secara positif kondisi ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

e. Indeks Gini

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah ukuran yang biasa digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan/ketimpangan distribusi pendapatan penduduk di suatu wilayah. Capaian Gini Ratio Kota Prabumulih pada Tahun 2024 meningkat 0,02 poin dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,373 dan tetap berada pada rentang “Sedang” artinya walaupun terjadi penurunan distribusi pendapatan namun ketimpangan masih ada. Penurunan Gini Ratio dari 0,373 menjadi 0,353 mengindikasikan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan.



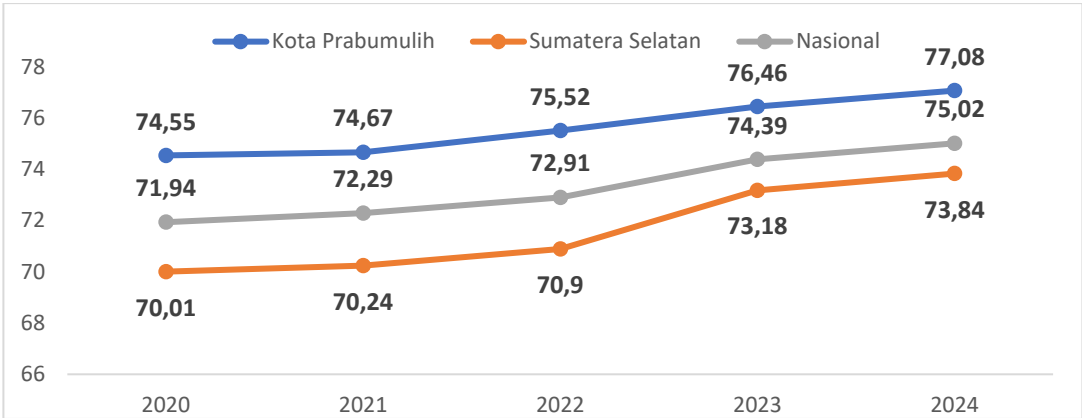
Gambar 2.11 Indeks Gini Kota Prabumulih Tahun 2020 – 2024

Sumber : BPS Prov Sumatera Selatan

f. Indeks Pembangunan Manusia

Indikator Indeks Pembangunan Manusia dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan dalam aspek sosial dan kesejahteraan manusia. Semakin tinggi tingkat pembangunan manusia, semakin besar kemampuan penduduk dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.

Sejak tahun 2020, nilai IPM di Kota Prabumulih terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, nilai IPM Kota Prabumulih adalah 74,55 dan terus meningkat hingga mencapai 77,08 pada tahun 2024. Dalam periode lima tahun, terjadi kenaikan IPM sebesar 2,53 poin. Perkembangan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat Prabumulih di bidang kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dengan capaian ini, status pembangunan manusia di Kota Prabumulih telah berada pada level tinggi ($70 \leq \text{IPM} \leq 80$). Perkembangan IPM di Kota Prabumulih sejalan dengan perkembangan IPM di Provinsi Sumatera Selatan dan secara nasional. Secara keseluruhan, nilai IPM Kota Prabumulih lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional. Secara rinci dapat dijelaskan pada gambar 2.12 berikut.



Gambar 2.12 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dan Nasional 2020-2024

Sumber : BPS Prov Sumatera Selatan

Tabel 2.30 Indeks Pembangunan Manusia Kota Prabumulih 2020-2024

Komponen IPM	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Harapan Hidup	tahun	70,32	70,47	70,87	71,27	71,59
Harapan Lama sekolah	tahun	12,91	12,92	13,03	13,31	13,41
Rata-rata Lama Sekolah	tahun	9,96	9,97	10,20	10,35	10,36
Pengeluaran	ribu Rp/kapita/tahun	12.723	12.752	13.106	13.494	13.982
IPM		74,55	74,67	75,52	76,46	77,08

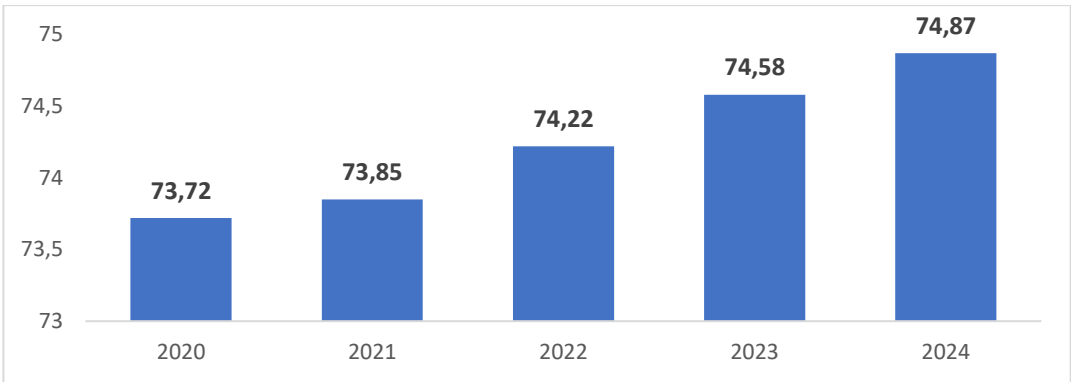
Sumber : BPS Prov Sumatera Selatan

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Prabumulih dari Tahun 2020-2024 cenderung terus menunjukkan peningkatan dengan nilai tinggi sebesar 77,08 di Tahun 2024. Pertumbuhan IPM Kota Prabumulih dipengaruhi oleh ke-empat komponen penyusunnya. Setiap tahunnya seluruh komponen penyusun IPM mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terdapat pada komponen pengeluaran per kapita penduduk Kota Prabumulih, sementara peningkatan terendah pada komponen rata-rata lama sekolah. Artinya, pemerintah Kota Prabumulih perlu untuk memastikan keberlanjutan anak yang melanjutkan sekolah agar tidak putus di tengah jalan.

2.2.2 Kesehatan untuk Semua

a. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) dapat mencerminkan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ke arah lebih baik dapat dilihat dari meningkatnya UHH.



Gambar 2.13 Capaian Usia Harapan Hidup (UHH), Kota Prabumulih 2020-2024
Sumber : BPS Prov Sumatera Selatan

Usia Harapan Hidup Kota Prabumulih pada Tahun 2024 adalah sebesar 71,59, artinya rata-rata bayi yang lahir di Prabumulih diharapkan hidup hingga usia sekitar 71,59 tahun. Meningkatnya Usia Harapan Hidup Kota Prabumulih ini menandakan bahwa kualitas status kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat Prabumulih telah mengalami peningkatan.

Teori klasik H.L. Bloom mengemukakan bahwa derajat kesehatan masyarakat ditentukan oleh 40 persen faktor lingkungan, 30 persen faktor perilaku, 20 persen faktor pelayanan kesehatan, dan 10 persen faktor genetika (keturunan). Dengan demikian, faktor lingkungan memainkan peran penting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. indikator yang dapat menggambarkan kondisi lingkungan antara lain indikator akses air minum bersih, akses air minum layak, dan fasilitas tempat buang air besar. Salah satu dari ketiga indikator ini mengalami perbaikan di Tahun 2024 yaitu fasilitas tempat buang air besar (Tangki Septi Tank) meningkat dari 96,35 persen di Tahun 2023 menjadi 98,58 persen di Tahun 2024. Selanjutnya, indikator yang dapat menggambarkan faktor perilaku, antara lain perkawinan usia dini (berumur 16 tahun ke bawah), serta pemanfaatan fasilitas dan tenaga kesehatan dalam persalinan. Perkawinan usia dini dapat memiliki sisi negatif pada kualitas anak yang dilahirkan, baik dari segi kesiapan fisik dan organ, maupun dari segi mental dan pengetahuan ibu mengenai perawatan dan pengasuhan anak pasca melahirkan. Anak yang dilahirkan dari ibu yang sudah siap dari segi fisik dan mental serta pengetahuan akan memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh dengan baik dan sehat di masa depan. Di Prabumulih Tahun 2024, persentase perempuan pernah kawin yang umur saat perkawinan pertamanya adalah 16 tahun kebawah sebesar 9,48 persen. Angka ini turun cukup signifikan 20,78 persen poin dibandingkan kondisi pada Tahun 2023. Dalam hal ini, peran pemerintah sudah cukup baik untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar kejadian pernikahan dini dapat terus ditekan. Pemanfaatan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan saat melahirkan dapat menghindarkan komplikasi saat proses kelahiran sehingga dapat mengurangi

risiko kematian ibu dan bayi. Sebanyak 90,90 persen perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun di Prabumulih menjalani proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, dan praktik tenaga kesehatan, dan sebagainya. Sejalan dengan itu, persentase perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun di Prabumulih yang proses melahirkan terakhirnya dibantu oleh tenaga kesehatan juga sudah mencapai 100 persen. Capaian indikator yang baik ini mendukung meningkatnya umur harapan hidup di Prabumulih.

Kalau dilihat menurut jenis kelamin, Usia Harapan Hidup perempuan lebih besar dibandingkan Usia Harapan Hidup laki-laki. Pada Tahun 2024 Usia Harapan Hidup perempuan adalah 73,62 tahun lebih besar dibandingkan Usia Harapan Hidup laki-laki yaitu 69,65 tahun, banyak faktor yang mempengaruhi kondisi ini mulai dari faktor biologis hingga gaya hidup, namun secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kaum perempuan cenderung lebih memperhatikan kondisi kesehatan dibandingkan kaum laki-laki. Kembali ke Usia Harapan Hidup Kota Prabumulih yang meningkat menjadi 71,59 tahun pada Tahun 2024. Tapi sayangnya, 71,59 tahun sudah termasuk ke dalam kategori lansia. Seiring bertambahnya usia, terjadi penurunan fungsi organ tubuh manusia sehingga lansia menjadi semakin rentan terhadap penyakit. Beberapa penyakit yang dapat dengan mudah menyerang lansia meliputi hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung koroner, stroke, katarak, demensia, dan masih banyak lagi.

b. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat dan upaya dalam rangka mendukung Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Tahun 2023 Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Prabumulih baru mencapai 0,551 artinya baru berada pada level Pra Sehat atau keluarga di Prabumulih baru menuju sehat (belum sehat). Angka ini sama dengan angka di Tahun 2023. Dari 12 indikator keluarga sehat capaian yang persentasenya masih rendah adalah penderita hipertensi (Penyakit Tidak Menular) yang berobat teratur yaitu sebesar 43,74%.

c. Prevalensi Stunting

Perkembangan prevalensi stunting di Kota Prabumulih cukup baik. Dari data survei yang dilaksanakan oleh Kementrian Kesehatan baik itu Riskesdas, SSGBI, maupun terakhir SSGI, dari Tahun 2019-2024 terlihat kecenderungan penurunan prevalensi stunting di Kota Prabumulih.

Tabel 2.31 Prevalensi Stunting Kota Prabumulih

Indikator	Satuan	2019	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Stunting	%	25,2	22,0	12,3	15,43	9,3

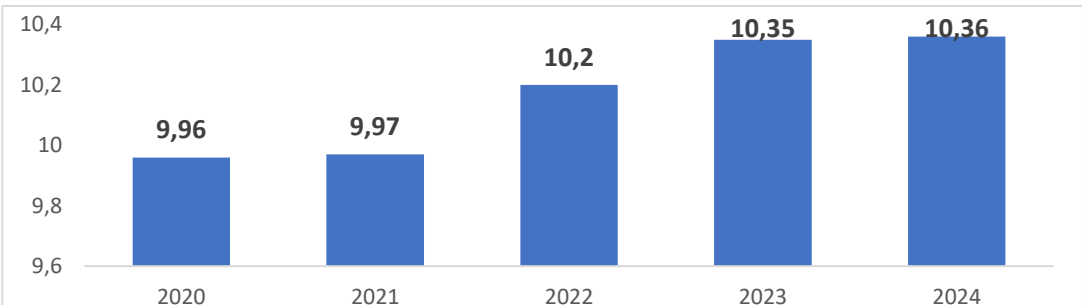
Sumber: Buku Saku Hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan RI
Untuk data tahun 2023 adalah data yang bersumber dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023

Penyebab penurunan prevalensi stunting ini adalah sudah meningkatnya kesadaran masyarakat terkait pencegahan stunting sehingga orang tua balita berusaha untuk memantau pertumbuhan anaknya secara rutin di posyandu. Hal ini tidak terlepas dari peran kader, petugas puskesmas, dan lintas sektoral dalam mendorong dan mengedukasi masyarakat terkait pencegahan stunting, seperti pemberian makanan tambahan makanan bergizi, bimbingan perkawinan untuk calon pengantin, pendampingan ibu hamil, pendampingan ibu menyusui dan sebagainya.

2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

a. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) menunjukkan rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun keatas di suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan pencapaian pendidikan generasi sebelumnya dan memberikan gambaran tentang kualitas pendidikan pada masa lalu sebagai modal pembangunan manusia di wilayah tersebut.



Gambar 2.14 Rata-Rata Lama Sekolah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

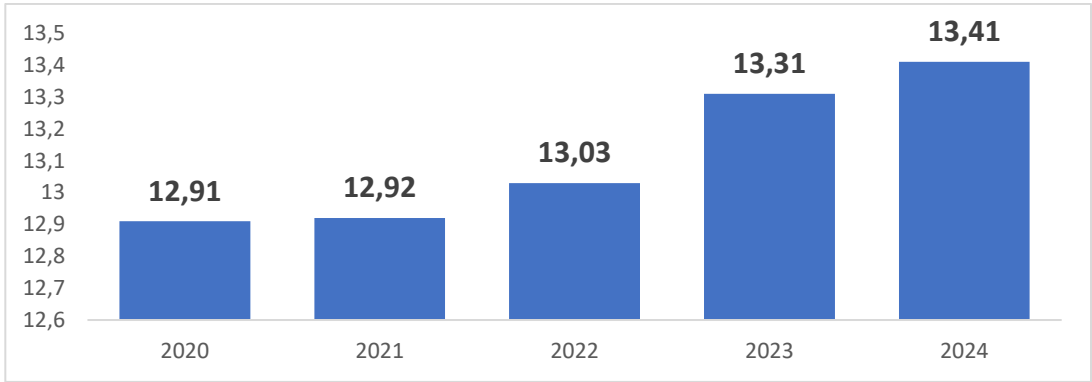
Sumber : BPS Prov Sumatera Selatan

Rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun keatas di Kota Prabumulih Tahun 2024 adalah 10,36 tahun, meningkat 0,01 tahun atau 0,1 persen dibandingkan Tahun 2023 yang mencapai 10,35 tahun, artinya secara umum angka rata-rata lama sekolah penduduk berumur 25 tahun keatas di Kota Prabumulih adalah sampai dengan kelas 1 SLTA.

b. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah (HLS) mengindikasikan estimasi jumlah tahun pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak-anak usia 7 tahun keatas di suatu wilayah. Harapan lama sekolah juga menggambarkan seberapa besar peluang generasi muda di wilayah tersebut untuk mengakses pendidikan formal. Indikator ini sangat penting karena menunjukkan potensi peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa

depan. Semakin tinggi HLS, semakin besar harapan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih lama, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan keterampilan, daya saing tenaga kerja, serta pertumbuhan ekonomi dan sosial.



Gambar 2.15 Harapan Lama Sekolah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Sumber : BPS Prov Sumatera Selatan

Harapan lama sekolah di Kota Prabumulih Tahun 2024 sebesar 13,41 tahun, naik 0,1 tahun dibandingkan tahun lalu. Artinya penduduk usia 7 tahun ke atas di wilayah ini diharapkan dapat menempuh pendidikan formal hingga 13,41 tahun di masa depan atau sampai pada tingkat Diploma II. Dengan kata lain, anak usia 7 tahun ke atas di wilayah ini berpeluang untuk menyelesaikan pendidikan hingga SMA/ sederajat, tetapi belum mencapai pendidikan tinggi secara penuh.

c. Skor Kemampuan Literasi dan Numerasi

Skor kemampuan numerasi adalah nilai yang menunjukkan kemampuan seseorang dalam memahami dan menggunakan angka dan simbol matematika kemudian skor kemampuan literasi adalah nilai yang menunjukkan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, dan memahami informasi.

Tabel 2.32 Skor Kemampuan Literasi dan Numerasi Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jenjang	2021	2022	2023	2024
1	Skor kemampuan literasi	SD	49,73	54,13	59,65	60,27
		SMP	61,66	65,82	71,40	72,45
2	Skor kemampuan numerasi	SD	34,6	41,34	49,5	54,11
		SMP	61,66	65,82	63,96	62,88

Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kota Prabumulih

Berdasar Rapor Pendidikan 2024 yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) di laman resmi Kemendikbud Ristek, menunjukkan bahwa kemampuan literasi (baca tulis) maupun numerasi (menghitung) Kota Prabumulih cenderung meningkat. Skor kecakapan literasi siswa pada jenjang SD naik dari angka 59,65 di Tahun 2023 menjadi 60,27 di Tahun 2024. Skor numerasi meningkat dari 49,50 pada 2023 menjadi 54,11 pada 2024. Peningkatan juga terjadi di tingkat SMP. Angka literasi yang sebelumnya 71,40 pada Tahun 2023 naik menjadi 72,45 di Tahun 2024. Begitu pula angka numerasi naik dari

63,96 menjadi 62,88. Akan tetapi peningkatan skor kemampuan literasi dan numerasi pada jenjang SD maupun SMP ini selalu masih dalam kategori sedang.

d. Tingkat Gemar Membaca

Salah satu upaya membangun kualitas manusia adalah melalui budaya literasi (membaca). Secara definisi literasi adalah bentuk *cognitive skill* memungkinkan manusia untuk mengidentifikasi, mengerti, memahami, dan mencipta yang diperoleh dari kegiatan membaca yang kemudian ditransformasikan dalam kegiatan-kegiatan yang produktif yang memberikan manfaat sosial, ekonomi dan kesejahteraan. Perkembangan literasi masyarakat di Prabumulih sangat bergantung kepada kegemaran membaca masyarakat.

Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) adalah tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat untuk memperoleh pengetahuan maupun informasi dari beragam bentuk media yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah secara mandiri dalam jangka waktu tertentu. TGM dihitung dengan beberapa indikator dan hasilnya dimasukkan dalam skala kategori penilaian TGM.

Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Prabumulih berdasarkan kajian Perpustnas Tahun 2024 menunjukkan nilai 60,02 dengan katagori sedang. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan pada Tahun 2023 bernilai 58,90. Peningkatan ini seiring dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Umum Kota Prabumulih melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kegiatan yang dilakukan diantaranya ekstensifikasi layanan perpustakaan melalui Mobil Perpustakaan Keliling sebanyak 4 kali dalam seminggu dengan jangkauan wilayah seluruh kecamatan se Kota Prabumulih dengan sasaran sekolah, pondok pesantren dan komunitas masyarakat serta memberikan undangan ke Taman Kanak-Kanak untuk melakukan kunjungan ke perpustakaan umum.

e. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas sumber daya manusia, karena dengan literasi, tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dan informasi yang diterima menjadi lebih baik. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Terdapat tujuh unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat

kunjungan per hari, jumlah pepustakaan ber SNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial/promosi, dan anggota perpustakaan.

Kota Prabumulih pada Tahun 2024, memiliki nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) sebesar 73,68 meningkat 0,21 dari tahun sebelumnya sebesar 73,47 dan masih masuk dalam kategori sedang. Dari 7 Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) Kota Prabumulih Tahun 2023, 4 UPLM bernilai sempurna dengan skor 1. Sedangkan UPLM terendah adalah UPLM 4 yaitu unsur tingkat kunjungan per hari dengan nilai 0,0922.

f. Indeks Masyarakat Digital

Indeks Masyarakat Digital merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Masyarakat digital sendiri diartikan sebagai sekumpulan individu yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-seharinya, di mana semua aktivitas yang dijalankan secara elektronik dan tanpa kertas (*paperless*) menjadi suatu hal yang biasa. Masyarakat ini diciptakan oleh digitalisasi dengan karakter esensialnya dibentuk melalui pengembangan teknologi digital, di mana semua ini kehidupannya sangat bergantung pada TIK, mulai dari penciptaan, distribusi, dan penggunaan seluruh kegiatan utamanya. Terdapat empat pilar utama pembentuk Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) yaitu Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan, Pemberdayaan, serta Pekerjaan.

Tabel 2.33 Indeks Masyarakat Digital Prabumulih Kota Prabumulih

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Angka	n/a	n/a	25,89	40,89	42,08
Klasifikasi	n/a	n/a	Sangat Kurang	Cukup	Cukup
Pilar 1 (Infrastruktur Ekosistem)	n/a	n/a	39,79	55,23	57,32
Pilar 2 (Keterampilan Digital)	n/a	n/a	26,17	53,96	53,30
Pilar 3 (Pemberdayaan)	n/a	n/a	10,58	22,17	21,60
Pilar 4 (Pekerjaan)	n/a	n/a	30,19	33,22	38,73

Sumber: Publikasi Balitbang SDM Kementerian Komunikasi & Informatika

Nilai Indeks Masyarakat Digital (IMD) Kota Prabumulih pada Tahun 2024 termasuk dalam kategori cukup dengan nilai 42,08. Nilai tersebut berasal dari rata-rata skor 4 pilar yaitu Pilar Infrastruktur Ekosistem (57,32), Pilar Keterampilan Digital (53,30), Pilar Pemberdayaan (21,60) dan Pilar Pekerjaan (38,73). Secara lebih rinci, pilar infrastruktur ekosistem memiliki poin paling tinggi yang artinya secara merata infrastruktur digital sudah dapat di akses oleh masyarakat Kota Prabumulih dengan cukup baik. Sedangkan nilai terendah ada pada Pilar Pemberdayaan (21,60), hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik dalam kegiatan masyarakat. Sehingga meskipun akses infrastruktur digital sudah

cukup merata namun masyarakat belum memanfaatkannya untuk kegiatan sehari-hari.

2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

a. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Lapangan usaha di Kota Prabumulih didukung oleh tiga lapangan usaha utama, yaitu lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; lapangan usaha konstruksi dan lapangan usaha Industri Pengolahan. Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebagai penyumbang terbesar dengan memberikan kontribusi sebesar 26,74%.

Sektor informal mempunyai peranan penting terhadap perekonomian di Kota Prabumulih karena banyak menyerap tenaga kerja, namun diantara pekerjaanya kebanyakan adalah pekerja bukan penerima upah. Untuk mewujudkan aktivitas perekonomian yang sehat perlu didukung dengan perlindungan sosial terhadap pekerjaanya. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah, karena pada Tahun 2023 pencapaian kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada sektor informal masih rendah.

Tabel 2.34 Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 2019-2023

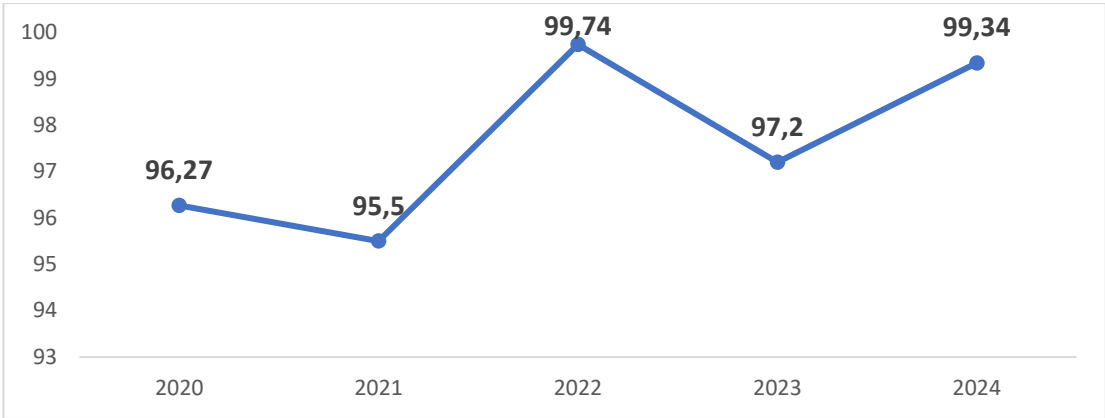
No	Indikator	2019		2020		2021		2022		2023	
		Jumlah Peserta	%	Jumlah Peserta	%	Jumlah Peserta	%	Jumlah Peserta	%	Jumlah Peserta	%
1	Pekerja Penerima Upah (PU)	12.923	32,93	13.094	38,09	14.225	44,80	16.026	53,80	16.704	60,88
2	Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)	2.492	6,35	2.341	6,81	2.420	7,62	4.927	16,54	4.303	15,68
3	Pekerja Jasa Konstruksi(JK)	23.829	60,72	18.943	55,10	15.107	47,58	8.834	29,66	6.430	23,44
Total		39.244		34.378		31.752		29.787		27.437	
Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (%)			44,99		38,19		34,35		30,52		29,21

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, Hasil Olahan Bappeda- Kota Prabumulih

Berdasarkan data BPJS Kota Prabumulih, cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) mencapai 29,21% pada Tahun 2023, terjadi penurunan yang semula 44,99% di Tahun 2019. Penurunan ini disebabkan semakin menurunnya jumlah kepesertaan pada segmen jasa konstruksi karena semakin berkurangnya pengerjaan proyek konstruksi.

b. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Universal Health Coverage (UHC) merupakan konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif, dan bermutu tanpa adanya hambatan finansial. UHC ini diwujudkan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).



Gambar 2.16 Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Prabumulih

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Prabumulih

Tahun 2024, sampai dengan triwulan IV dilaporkan jumlah peserta JKN di Kota Prabumulih sebanyak 209.994 jiwa dari 211.395 jiwa atau sebesar 99,34% dari jumlah penduduk, angka ini meningkat sekitar 2,20% dari tahun 2023 yang mencapai sebesar 97,2%.

Capaian sebesar 99,34% ini sudah sangat baik karena sudah di atas 98 persen dari total penduduk, dengan lebih dari 209 ribu jiwa terdaftar dalam Program JKN-KIS atau hampir 100% masyarakat Prabumulih telah mendapatkan layanan kesehatan tanpa terkendala biaya. Pencapaian ini tidak lepas dari peran sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah.

2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

a. Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama

Penduduk asli Kota Prabumulih umumnya merupakan etnis Melayu asli dari wilayah sekitar, yaitu Suku Rambang, Suku Enim, Suku Penesak, Suku Melayu Palembang dan lain-lain, serta pendatang yang berasal dari suku Jawa, Suku Minang dan juga suku Batak, serta Tionghoa-Indonesia. Mayoritas penduduk Kota Prabumulih memeluk agama Islam. Adapun persentase agama penduduk Kota Prabumulih yang memeluk agama Islam sebanyak 98,05%, kemudian Kristen sebanyak 1,23% dengan rincian Protestan sebanyak 0,90% dan Katolik sebanyak 0,33%. Selanjutnya penduduk yang beragama Buddha sebanyak 0,69%, kemudian Hindu sebanyak 0,03% dan yang menganut agama Konghucu serta kepercayaan kurang dari 0,01%. Keragaman agama di Kota Prabumulih hingga saat ini tidak menimbulkan konflik terbuka secara langsung, namun disadari terdapat gesekan-gesekan yang terjadi antar umat beragama, terutama dalam hal pendirian rumah ibadah. Kebijakan formal yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menghindari permasalahan tersebut dibentuklah Forum Kerukunan Antar Umat Beragama, yang beranggota para tokoh agama. Tugas utamanya adalah menyediakan mediasi permasalahan antar umat beragama.

b. Pembangunan Kebudayaan

Kota Prabumulih memiliki budaya rumpun melayu, disertai 3 tutur bahasa melayu yaitu Rambang, Belida dan Lematang. Seiring dengan perkembangan zaman, urusan kebudayaan memiliki peran penting guna pembelajaran bagi generasi penerus agar tidak lupa pada sejarah dan budaya daerah.

Tabel 2.35 Indikator Kebudayaan di Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyelenggaraan pertunjukan (festival) seni dan budaya	pertunjukan	-	-	3	5	6
2	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan- Kota Prabumulih

Kota Prabumulih cukup aktif mengikuti festival seni dan budaya, beberapa diantaranya mengikuti Festival Sriwijaya, Festival Candi Bumi Ayu, Festival Tari Sambut dan Batang Hari 9, Pekan Kebudayaan Daerah Tingkat Provinsi, Pagelaran Acara Khusus di RRI Surakarta dan Festival Randik di Kabupaten Musi Banyuasin di Tahun 2024. Karena pandemi covid-19, maka pada Tahun 2020 dan 2021 Pemerintah Kota Prabumulih tidak mengikuti pertunjukan satu pun. Kemudian seiring dengan meredahnya kasus covid-19 dan mulai longgarnya pengetatan aktivitas masyarakat, maka di Tahun 2022 Pemerintah Kota Prabumulih mulai mengikuti lagi 3 festival, 5 festival di Tahun 2023 dan di Tahun 2024 ini mengikuti 6 festival.

Terkait Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan, saat ini Pemerintah Kota Prabumulih baru mau penetapan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya, melalui proses pendataan dan pengkajian terlebih dahulu.

2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

a. Kota Layak Anak (KLA)

Kota Layak Anak merupakan kota yang memiliki sistem pembangunan yang berfokus pada pemenuhan hak anak, yang diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat. Diketahui bahwa setiap anak memiliki hak yang harus dipenuhi, diantaranya hak untuk dijamin, dilindungi, dipenuhi oleh orang tua, keluarga dan masyarakat.

Adapun bentuk perwujudannya dapat berupa penyediaan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi yang sehat, penyediaan kebijakan dan anggaran khusus untuk anak, penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman, memberikan perhatian khusus pada anak yang bekerja di jalan, mengalami eksploitasi seksual, hidup dengan kecacatan serta memberikan wadah bagi anak-anak untuk berperan serta dalam pembuatan keputusan.

Pada Tahun 2023, Kota Prabumulih telah meraih Predikat Pratama (tingkat dasar) untuk Kategori KLA, Predikat Pratama ini menunjukkan bahwa Kota Prabumulih merupakan kota yang memenuhi kriteria untuk menjadi kota ramah anak. Penilaian tersebut dilihat dari bagaimana anak-anak yang mendapati kasus kekerasan anak terlayani dengan baik. Sebagaimana diketahui pada Tahun 2023, terdapat 24 kasus kekerasan terhadap anak, 2 kekerasan fisik, 2 kekerasan psikis dan 20 kekerasan seksual (Satu Data Indonesia).

b. Kesenjangan Gender

Upaya pembangunan manusia diperuntukkan bagi seluruh penduduk di suatu wilayah, tanpa harus memandang adanya perbedaan jenis kelamin. Capaian pembangunan manusia berbasis gender dilihat diantaranya dari nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebagai indikator pendukung dalam pembangunan manusia berbasis gender.

➤ **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

Indeks Pemberdayaan Gender mengukur sejauh mana perempuan dapat memainkan peran aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks ini mencerminkan keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik dan ekonomi.

Tabel 2.36 Indeks Pemberdayaan Gender Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

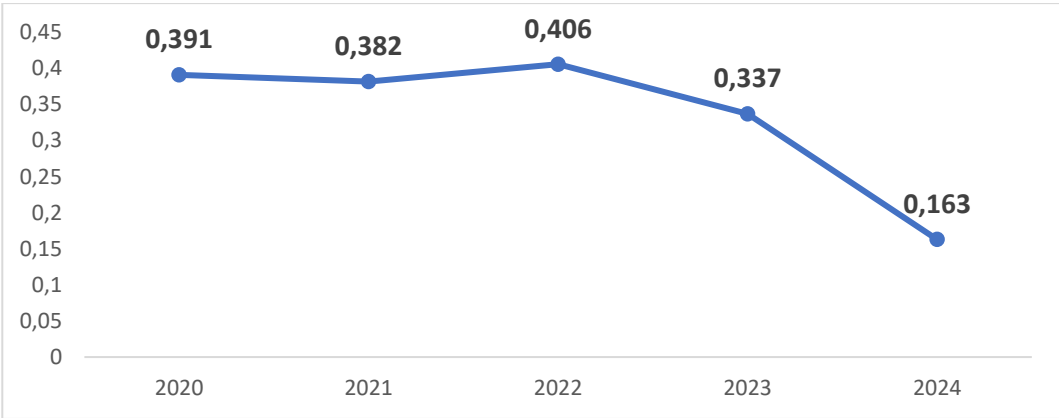
Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pemberdayaan Gender	nilai	59,8	60,2	58,08	58,39	67,94

Sumber: BPS

Tabel data di atas menunjukkan bahwa IDG Prabumulih terus meningkat. Pada Tahun 2024, skor IDG Prabumulih mencapai 67,94 poin, naik 9,55 poin dari Tahun 2023 yang sebesar 58,39 poin. Angka 67,94 ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki akses yang lebih baik terhadap kesempatan ekonomi dan politik, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan, namun masih ada kesenjangan yang perlu diatasi.

➤ **Indeks Ketimpangan Gender**

Pembangunan manusia akan optimal apabila ketimpangan pencapaian antar individu rendah, terutama antar gender. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran ketimpangan gender yang menunjukkan capaian pembangunan manusia yang kurang optimal karena ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.



Gambar 2.17 Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Prabumulih 2020-2024

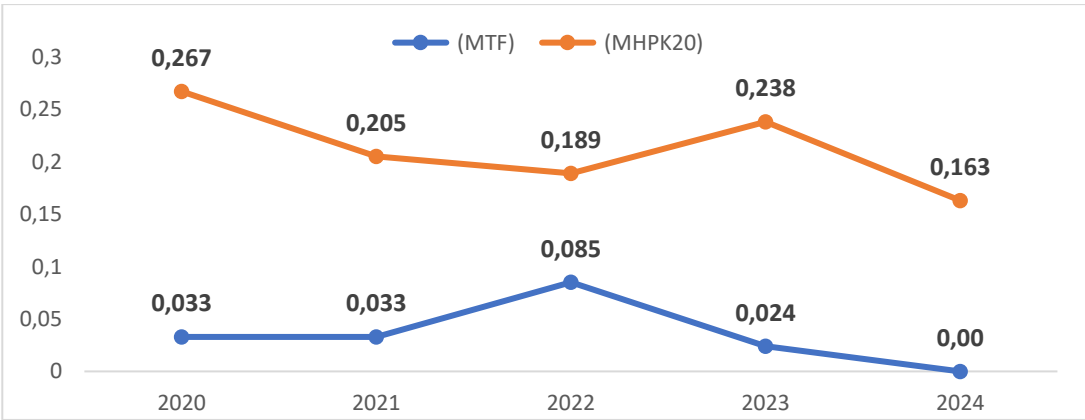
Sumber: BPS

Dari gambar di atas, memperlihatkan bahwa Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Prabumulih dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 cenderung menurun. IKG Tahun 2024 sebesar 0,163, turun 0,174 poin dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar 0,337. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya mengurangi ketimpangan gender di Kota Prabumulih.

Berikut ini gambaran tiga dimensi penyusun IKG.

1. Dimensi kesehatan reproduksi

Dimensi kesehatan reproduksi perempuan dibentuk dari 2 (dua) indikator, yaitu proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20).



Gambar 2.18 Perkembangan Dimensi Kesehatan Reproduksi Prabumulih 2020-2024

Sumber: BPS

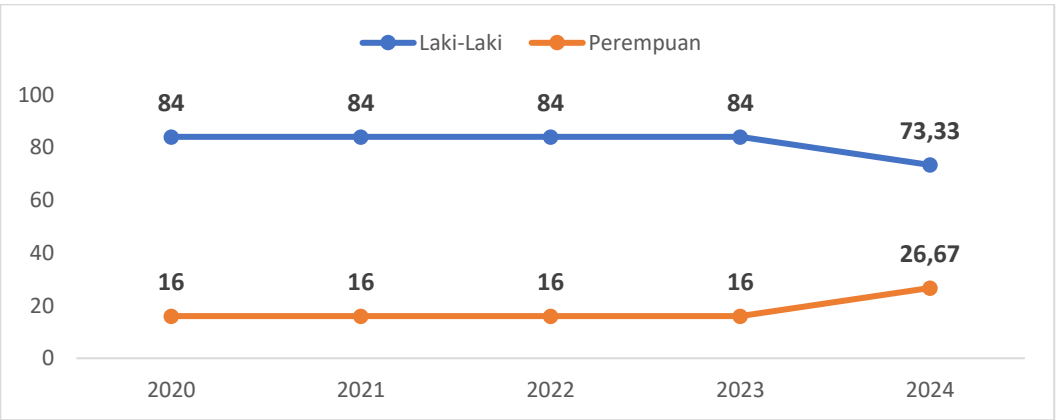
Pada Tahun 2020, angka MTF mencapai sebesar 0,033 atau 3,3% kemudian turun hingga menjadi 0,000 atau 0,0% pada Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan layanan kesehatan kesehatan reproduksi berhasil sekaligus ini juga merupakan upaya untuk mengurangi risiko kematian ibu dan bayi. Angka MTF 0,033 artinya 3,3% dari perempuan usia tersebut melahirkan tanpa bantuan tenaga kesehatan profesional di fasilitas

kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas, angka ini menunjukkan bahwa dari setiap 100 perempuan yang melahirkan, sekitar 3-4 orang melahirkan di luar fasilitas kesehatan kemudian di Tahun 2024 menjadi 0,000 yang berarti bahwa tidak ada perempuan dalam kelompok usia tersebut yang melahirkan hidup di luar fasilitas kesehatan, ini juga mengindikasikan bahwa seluruh persalinan hidup pada perempuan usia 15-49 tahun di Prabumulih terjadi di fasilitas kesehatan.

Indikator dimensi kesehatan reproduksi selanjutnya adalah indikator MHPK20 yang cenderung berfluktuasi selama Tahun 2020–2024. Pada 2020, MHPK20 tercatat sebesar 0,267 berarti 26,7% dari perempuan usia 15-49 tahun di Prabumulih pernah menikah dan melahirkan anak pertama mereka saat berusia kurang dari 20 tahun, angka 0,267 atau 26,7% juga berarti bahwa dari setiap 100 perempuan usia 15-49 tahun, ada sekitar 27 yang melahirkan anak pertama mereka sebelum usia 20 tahun. Kemudian di Tahun 2024 turun menjadi 0,163 berarti 16,3% dari perempuan usia 15-49 tahun di Prabumulih pernah menikah dan melahirkan anak pertama mereka saat berusia kurang dari 20 tahun, angka 0,163 atau 16,3% juga berarti bahwa dari setiap 100 perempuan usia 15-49 tahun, ada sekitar 16 yang melahirkan anak pertama mereka sebelum usia 20 tahun. Penurunan MHPK20 menunjukkan bahwa semakin sedikit perempuan yang melahirkan pada usia muda (di bawah 20 tahun), hal ini berarti adanya upaya Pemerintah Kota Prabumulih untuk memperbaiki kondisi kesehatan reproduksi perempuan serta upaya penurunan angka pernikahan usia muda.

2. Dimensi pemberdayaan.

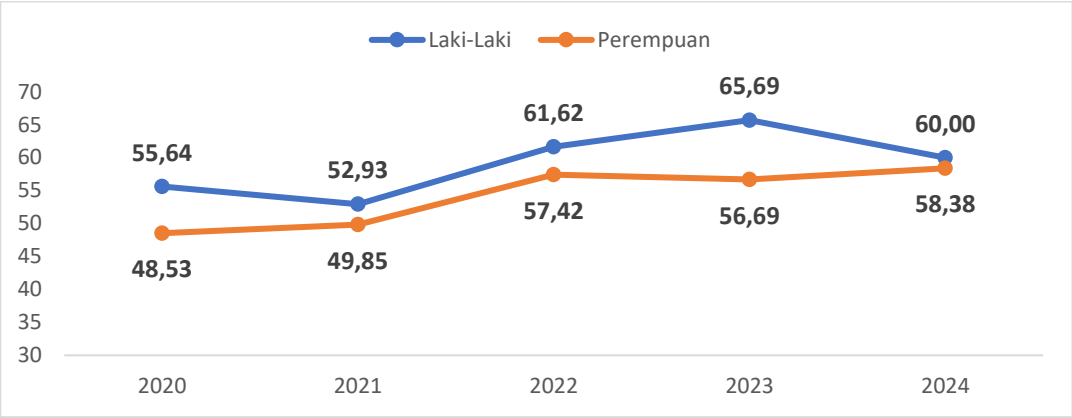
Dimensi pemberdayaan dibentuk oleh 2 (dua) indikator, yaitu persentase anggota legislatif dan persentase penduduk 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas.



Gambar 2.19 Perkembangan Keterwakilan Perempuan di Legislatif Prabumulih 2020-2024

Sumber: BPS

Selama periode 2020–2023, persentase perempuan anggota legislatif cenderung sama, namun di tahun 2024 persentase keterwakilan perempuan di legislatif menunjukkan ada peningkatan menjadi 26,67% dari tahun-tahun sebelumnya yang stagnan di angka 16%, sebaliknya persentase keterwakilan laki-laki justru menurun menjadi 73,33% dari tahun-tahun sebelumnya yang stagnan di angka 84%. Kondisi ini menunjukkan upaya Pemerintah Kota Prabumulih untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik.



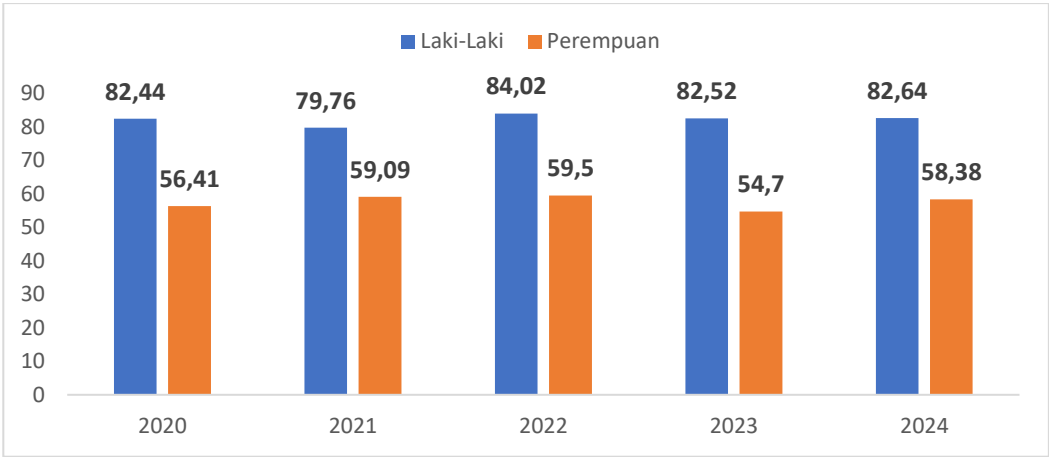
Gambar 2.20 Perkembangan Pendidikan SMA ke Atas Prabumulih 2020-2024

Sumber: BPS

Persentase penduduk usia 25 tahun ke atas berpendidikan SMA ke atas selama kurun waktu lima tahun terakhir cenderung meningkat, baik laki-laki maupun perempuan. Persentase laki-laki pada Tahun 2020 sebesar 55,64 persen, meningkat menjadi 60,00 persen pada Tahun 2024, sementara persentase perempuan meningkat dari 48,53 persen pada Tahun 2020 menjadi 58,38 persen pada Tahun 2024. Peningkatan pendidikan laki-laki ternyata masih lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan perempuan.

3. Dimensi Pasar Tenaga Kerja

Dimensi pasar tenaga kerja direpresentasikan dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Selama Tahun 2020–2024 TPAK perempuan dan laki-laki menunjukkan tren meningkat. TPAK laki-laki pada Tahun 2020 sebesar 82,44 persen menurun menjadi 82,64 persen pada Tahun 2024, sementara TPAK perempuan juga meningkat dari 56,41 persen pada Tahun 2020 menjadi 58,38 persen pada Tahun 2024. Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) baik laki-laki dan perempuan artinya semakin banyak laki-laki dan perempuan yang masuk ke dalam pasar tenaga kerja.



Gambar 2.21 Perkembangan TPAK Prabumulih 2019-2023

Sumber: BPS

Berdasarkan uraian tiga dimensi penyusun ketimpangan gender di atas, penurunan ketimpangan gender Kota Prabumulih dipengaruhi oleh dimensi kesehatan reproduksi, yang semakin berkurangnya cakupan perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan, selain itu juga semakin berkurangnya perempuan usia 15-49 tahun ketika melahirkan anak lahir hidup pertama masih berusia kurang dari dua puluh tahun, semakin meningkatnya keterwakilan perempuan di legislatif serta semakin aktifnya peran perempuan dalam kegiatan perekonomian.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

Sektor unggulan adalah sektor ekonomi yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Sektor unggulan memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, mampu memenuhi permintaan lokal dan ekspor, serta memiliki dampak positif pada sektor lain. Sektor unggulan ini memberikan manfaat dapat meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat identitas daerah. Kemudian daya saing daerah adalah kemampuan suatu wilayah (provinsi, kabupaten, kota) untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan bersaing secara efektif baik di pasar domestik maupun internasional.

Sektor unggulan Kota Prabumulih yang menjadi daya saing dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Selatan adalah pertambangan minyak dan gas (migas), pertanian (khususnya nanas), dan transportasi.

2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas tenaga kerja yang tinggi akan meningkatkan daya saing sumber daya manusia, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing suatu wilayah atau daerah. Kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari beberapa faktor, terutama tingkat pendidikan serta keterampilan yang dimiliki.

a. Penduduk Yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

Tabel 2.37 Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Prabumulih Tahun 2020 – 2024

No	Tingkat Pendidikan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	≤ SD	%	30,30	28,29	28,58	26,03	23,86
2	SMP	%	16,56	16,26	15,26	13,59	11,13
3	SMA	%	36,87	38,98	40,48	42,76	44,72
4	PERGURUAN TINGGI	%	16,28	16,47	15,68	17,63	20,29

Sumber: BPS Prabumulih, Hasil Analisis Bappeda

Data menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir lulusan SMA masih menjadi penyumbang terbesar (44,72%) angkatan kerja di Kota Prabumulih, kemudian di urutan kedua adalah lulusan SD (23,86%) atau tidak tidak tamat SD. Kondisi ini menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah penduduk angkatan kerja saat ini masih belum dibarengi dengan tingkat pendidikan yang juga tinggi.

b. Bonus Demografi

Tabel 2.38 Parameter Proyeksi Penduduk Kota Prabumulih Tahun 2020 – 2024

Kelompok Umur	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
0-14	%	29,59	27,34	24,36	21,87	23,86
15-64	%	66,24	67,13	68,51	69,33	11,13
64+	%	4,17	5,53	7,13	8,80	44,72
Angka ketergantungan	%	50,97	48,97	45,97	44,24	20,29

Sumber: BPS Sumatera Selatan

Mulai Tahun 2020 proporsi penduduk usia produktif di Prabumulih diatas 60%, angka ini mengindikasikan bahwa Kota Prabumulih mulai memasuki era bonus demografi dan akan mencapai puncaknya di Tahun 2030-2035. Fenomena ini ditandai dengan semakin mengecilnya angka ketergantungan yang akan mencapai angka terendahnya yaitu 44,24 pada Tahun 2035. Angka ini memiliki arti bahwa untuk setiap 100 penduduk usia produktif di Kota Prabumulih akan menanggung sekitar 44 orang penduduk dengan usia non produktif pada Tahun 2035 nantinya. Angka tersebut kemudian akan kembali meningkat pada tahun-tahun setelah Tahun 2035.

Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada rentang waktu sekitar kurang lebih sepuluh tahun dari sekarang yang bisa dimanfaatkan untuk bisa merasakan manfaat dari fenomena bonus demografi tersebut.

Diketahui bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Prabumulih mencapai 70,50 persen pada 2024. Capaian ini mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2023. Sejalan dengan hal tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Prabumulih juga mengalami penurunan sekitar 0,11 persen poin, dengan capaian angkanya sekitar 4,94 persen pada 2024.

Berdasarkan kondisi TPAK dan TPT tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Kota Prabumulih masih sangat memiliki peluang yang cukup besar untuk dapat menikmati manfaat dari fenomena bonus demografi di masa mendatang.

2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

a. Kontribusi PDRB Sektor Pertambangan & Penggalian

Prabumulih dikenal sebagai "Kota Minyak" karena memiliki potensi besar dalam produksi minyak bumi dan gas alam.

Tabel 2.39 Kontribusi Sektor Usaha Pertambangan & Penggalian Tahun 2020 - 2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Distribusi terhadap PDRB	persen	9,77	9,80	9,60	8,49	8,20

Sumber: BPS Kota Prabumulih

Kontribusi Sektor Usaha Pertambangan & Penggalian terhadap PDRB Kota Prabumulih hanya sekitar 8-9% dan kalau mau dibandingkan dengan penghasil Pertambangan & Penggalian kabupaten/kota lainnya seperti Muara Enim, dan Kabupaten Musi Banyuasin, memang belum sebesar dua kabupaten ini, namun Sektor Usaha Pertambangan & Penggalian di Prabumulih cukup memberikan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Prabumulih, seperti penyediaan energi murah dengan pemanfaatan gas bumi melalui Program Jaringan Gas Rumah Tangga (JARGAS) memberikan dampak positif pada penghematan pengeluaran rumah tangga karena harga gas yang lebih kompetitif dibandingkan bahan bakar minyak. Pengembangan Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas) dikelola oleh salah satu BUMD yang ada di Prabumulih yaitu PT.Petro Prabu. Saat ini ada sekitar 44.668 Sambungan Rumah (SR), dari 44.668 SR ini terdapat sekitar 5.911 pelanggan penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Peran Jaringan Gas Rumah Tangga (JARGAS) PT. Petro Prabu Prabumulih terhadap pelanggan Program Keluarga Harapan (PKH) sangat berarti dalam penyediaan akses energi gas yang lebih murah, aman, dan efisien, yang diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga miskin dan rentan penerima PKH. Selain itu, pengembangan industri migas juga membuka peluang ekonomi dan lapangan kerja baru baru di sektor eksplorasi, produksi, dan distribusi migas. Terhadap lingkungan, gas bumi juga merupakan sumber energi yang lebih bersih dibandingkan dengan bahan bakar minyak, sehingga berkontribusi pada lingkungan yang lebih baik.

b. Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Tabel 2.40 Kontribusi Sektor Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2020 - 2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Distribusi terhadap PDRB	persen	6,10	6,20	5,94	5,72	5,88

Sumber: BPS Kota Prabumulih

Kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Prabumulih berada pada angka 5-6 persen, tepatnya di tahun 2024 Kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Prabumulih sebesar 5,88%, ini berarti bahwa sektor ini

menyumbang 5,88% dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota Prabumulih atau dapat diartikan bahwa dari setiap 100 rupiah yang dihasilkan di Prabumulih, 5,88 rupiah berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Angka 5,88% ini menunjukkan bahwa meskipun sektor ini memiliki kontribusi, namun relatif kecil dibandingkan sektor-sektor ekonomi lainnya di Prabumulih.

Sebagian besar penyumbang komoditi pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan di Kota Prabumulih adalah karet. Di sisi lain, sebagai daya saing daerah dalam sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dibandingkan dengan daerah lainnya di Kota Prabumulih memiliki keunggulan dalam komoditi nanas.

Nanas Kota Prabumulih dikenal memiliki rasa yang manis dan kadar air yang tinggi, yang membuatnya berbeda dari nanas di daerah lain. Secara khusus, nanas "Queen" dari Prabumulih diklaim memiliki tingkat kemanisan hingga 13 derajat briks, lebih tinggi dari nanas pada umumnya di Indonesia yang berkisar antara 8-11 derajat briks.

c. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Industri pengolahan merupakan salah satu lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja di Kota Prabumulih. Usaha-usaha Industri pengolahan di Kota Prabumulih, sebagian besar didominasi oleh usaha berskala kecil dan menengah, sehingga pertumbuhan pada kategori ini mempengaruhi kesejahteraan masyarakat kelas menengah kebawah.

Tabel 2.41 Kontribusi Sektor Usaha Industri Pengolahan 2020 - 2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Distribusi terhadap PDRB	persen	10,56	10,53	10,47	10,71	10,85

Sumber: BPS Kota Prabumulih

Sektor usaha Industri Pengolahan merupakan salah satu dari lima sektor usaha terbesar dalam pembentuk PDRB Kota Prabumulih selain sektor usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan Sepeda Motor dan Sektor Usaha Bangunan. Tabel di atas menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir kontribusi sektor usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB Kota Prabumulih selalu di kisaran angka 10%.

Tabel 2.42 Perkembangan PDRB Sektor Industri Pengolahan Kota Prabumulih Tahun 2010 -2024

Tahun	Nilai Tambah Kategori Industri Pengolahan (Miliar Rp)	Pertumbuhan (%)
2020	830.55	6,22
2021	879.17	5,85
2022	964.48	9,70
2023	1,052.85	9,16
2024	1.142,83	8,55
Rerata		8,32

Sumber: BPS Kota Prabumulih, olahan-Bappeda Kota Prabumulih

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan penerimaan Produk Domestik Regional Bruto Kota Prabumulih dari Sektor Industri Pengolahan dalam lima

tahun terakhir berfluktuasi, hal ini mengindikasikan bahwa tingkat perekonomian secara umum di Kota Prabumulih masih berubah-ubah, dan ini juga berarti bahwa tingkat aktivitas masyarakat di bidang industri pengolahan berubah atau hasil produksi dari industri di Kota Prabumulih terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Berikut ini tabel perkembangan Produk Domestik Regional Bruto.

Tabel 2.43 Perkembangan PDRB Kota Prabumulih Tahun 2020 -2024

Tahun	PDRB (Miliar Rp)	Pertumbuhan (%)
2020	7.867,32	0,98
2021	8.345,93	6,08
2022	9.208,50	10,34
2023	9.834,13	6,36
2024	10.533,23	7,11
Rerata		7,58

Sumber: BPS Kota Prabumulih, olahan-Bappeda Kota Prabumulih

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kota Prabumulih dalam lima tahun terakhir menunjukkan trend yang meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,58% per tahunnya.

d. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Sektor usaha penyediaan akomodasi makan dan minum merupakan salah satu sektor ekonomi yang dapat dikembangkan pemerintah guna mendukung perkembangan pariwisata.

Tabel 2.44 Nilai Tambah Kategori Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2020 - 2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Distribusi terhadap PDRB	persen	2,82	2,71	2,84	3,02	4,25
Laju Pertumbuhan	persen	-5,06	5,46	12,86	9,23	7,07

Sumber: BPS Kota Prabumulih

Di Kota Prabumulih, secara keseluruhan kategori ini mencatatkan laju pertumbuhan yang paling tinggi dibandingkan kategori lainnya, yaitu tertinggi selama lima tahun terakhir sebesar 12,86 persen pada Tahun 2022, namun Tahun 2024 tumbuh melambat sebesar 7,07 persen. Laju pertumbuhan sektor usaha ini dipengaruhi dari posisi strategis Kota Prabumulih sebagai kota perlintasan yang dilalui jalur transportasi darat antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan sehingga semakin bermunculan rumah makan ataupun gerai makanan dalam beberapa tahun terakhir untuk menjadi peluang usaha.

Bila dilihat dari besaran kontribusinya terhadap PDRB Kota Prabumulih, ternyata sumbangan kategori ini relatif kecil, sehingga tidak terlalu signifikan mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi Kota Prabumulih.

Berdasarkan informasi di atas dapat dikatakan bahwa meskipun kontribusi sektor ini tergolong rendah yakni hanya sebesar 2-3 persen per tahun, namun laju pertumbuhannya tergolong cepat yaitu mampu mencapai 12 persen, hal ini

mengindikasikan bahwa potensi wisata bisa berkembang lebih besar lagi sehingga kemungkinan akan mendorong sektor-sektor usaha lainnya. Adapun pertumbuhannya berkontraksi sebesar -5% persen akibat pandemi covid-19.

e. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan adalah seberapa banyak orang yang benar-benar menjalankan usaha dalam suatu populasi. Berdasarkan definisi tersebut maka perhitungan rasio kewirausahaan diperoleh sebagai berikut.

Tabel 2.45 Rasio Kewirausahaan Kota Prabumulih Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Wirausaha	orang	2.173	2.524	2.516	2.525	3.690
2	Angkatan Kerja 15 Tahun ke atas (yang bekerja)	orang	90.013	92.448	97.593	93.922	98.550
3	Rasio Kewirausahaan	%	2,41	2,73	2,58	2,69	3,74

Sumber:Hasil Olahan Bappeda - Kota Prabumulih

Di Tahun 2024 rasio kewirausahaan Kota Prabumulih tercatat sebesar 3,74 persen, artinya dari setiap 100 penduduk, terdapat sekitar 3-4 orang yang benar-benar menjalankan usaha. Walaupun ada peningkatan dari tahun sebelumnya, rasio kewirausahaan Kota Prabumulih masih relatif rendah.

Beberapa faktor penyebab masih rendahnya rasio kewirausahaan Kota Prabumulih diantaranya pola pikir masyarakat untuk lebih mencari pekerjaan, rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaku wirausaha, kendala mengakses modal serta sistem pendidikan yang kurang mendorong mahasiswanya untuk berkembang menjadi seorang *entrepreneurship*.

f. Indeks Inovasi Daerah

Agar pemerintah daerah dapat mandiri dan mensejahterakan masyarakatnya, maka pemerintah daerah dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya melalui peningkatan kreativitas dan inovasi yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan serta kearifan lokal di daerahnya masing-masing, maka untuk mengukur tingkat inovasi digunakan Indeks Inovasi Daerah (IID). IID dirancang untuk mengukur tingkat inovasi dalam berbagai bidang, termasuk tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya. IID terdiri dari 3 komponen, yaitu: (i) inovasi tata kelola pemerintahan, yang mengukur tingkat inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; (ii) inovasi pelayanan publik, yang mengukur tingkat inovasi dalam penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat; dan (iii) inovasi daerah lainnya, yang mengukur tingkat inovasi dalam bidang-bidang lainnya, seperti ekonomi, sosial, dan budaya.

Tabel 2.46 Indeks Inovasi Daerah Kota Prabumulih

Indeks Inovasi Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Predikat	Sangat inovatif	inovatif	inovatif	Kurang inovatif	Kurang inovatif
Nilai	1.050	38,51	37,18	10,50	10,20

Sumber: SK Kemendagri tentang Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah Kota Prabumulih dalam lima tahun terakhir cenderung menurun, di Tahun 2024 meraih predikat “kurang inovatif” dengan nillai 10,20 menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Angka indeks inovasi daerah sebesar 10,20 menunjukkan bahwa tingkat inovasi daerah Kota Prabumulih tergolong rendah atau kurang inovatif artinya Kota Prabumulih belum optimal dalam menciptakan dan menerapkan ide-ide baru serta pembaruan dalam berbagai aspek.

2.3.3 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

a. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah.

PMTB juga dapat diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang digunakan sebagai investasi fisik dan merupakan salah satu instrumen penggerak perekonomian.

Tabel 2.47 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	40,39	37,78	37,64	36,22	37,48

Sumber: BPS-Prabumulih

Tidak seperti tiga tahun sebelumnya, di Tahun 2024 terjadi peningkatan kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB sebesar 37,48 yang artinya bahwa 37,48% dari total Produk Domestik Regional Bruto Prabumulih dialokasikan untuk investasi dalam bentuk aset tetap. Ini menunjukkan bahwa sekitar sepertiga dari nilai tambah baru yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut diinvestasikan, bukan dikonsumsi.

b. Ekspor Barang dan Jasa

Net ekspor adalah nilai ekspor yang dilakukan dalam suatu tahun tertentu dikurangi dengan nilai impor dalam periode yang sama.

Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDRB. Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) suatu daerah. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk-produk domestik di pasar internasional maupun nasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.48 Nilai Net Ekspor Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Net Ekspor	Miliar Rupiah	-1 546,85	-1 273,47	-1 421,86 -	- 1 389,14	-1 826,76

Sumber: BPS-Prabumulih

Hasil dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ekspor Kota Prabumulih selalu lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah impornya dengan selisih nilai yang selalu berfluktuatif setiap tahunnya. Tahun 2024 selisih net ekspornya 1.826,76 milyar rupiah lebih bila dibandingkan Tahun 2023 sebesar 1.389,14 milyar rupiah.

2.3.4 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

a. Indeks Infrastruktur

Indeks infrastruktur merupakan salah satu komponen *city development index* (CDI) yang menilai kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas dasar. Indeks infrastruktur didapatkan dengan cara menjumlahkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada air bersih, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada listrik dan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada telepon. Semakin tinggi indeks infrastruktur yang dimiliki oleh sebuah kota maka dapat dikatakan tingkat pembangunan di kota tersebut semakin baik.

Tabel 2.49 Indeks Infrastruktur Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Indikator Penyusun Indeks Infrastruktur	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses pada air bersih (perpipaan)	%	14.67	16.66	10.75	10.30	64,14
2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi (layak)	%	95.97	97.9	97.61	96.44	96,44
3	Persentase rumah tangga yang memiliki akses pada listrik	%	99.22	99.79	99.8	99.98	99,82
4	Persentase rumah tangga yang memiliki akses pada telepon	%	85.9	90.73	90.89	91.75	91,02
5	Indeks Infrastruktur	%	73.94	76.27	74.76	74.45	87.86

Sumber: BPS-Prabumulih, Analisis Bappeda Prabumulih

➤ Persentase rumah tangga yang memiliki akses pada air bersih

Akses air bersih mengacu pada ketersediaan sumber air yang memenuhi standar kesehatan dan kualitas, seperti air minum yang layak konsumsi. Ini berarti air tersebut tidak mengandung bakteri, virus, atau bahan kimia berbahaya, serta tidak

berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Selama lima tahun terakhir rata-rata akses air bersih di Kota Prabumulih berada pada angka 64,60% berarti bahwa sekitar 65 dari setiap 100 rumah tangga memiliki akses ke sumber air bersih yang memenuhi standar kualitas tertentu, sedangkan sisanya sekitar 35,40% tidak memiliki akses ke air bersih atau menggunakan sumber air yang tidak memenuhi syarat.

➤ **Persentase rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi (layak)**

Sanitasi memberikan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan, serta memiliki pengaruh yang cukup besar pada pembangunan ekonomi. Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa kondisi penyediaan akses sanitasi layak eksisting di Kota Prabumulih sebesar 95,97% di Tahun 2020 meningkat menjadi 96,44% di Tahun 2024, ini dapat dikatakan tinggi, artinya hampir seluruh Rumah Tangga yang ada di Kota Prabumulih telah dapat mengakses sanitasi layak. Penyediaan sanitasi layak sangat penting dalam menghadapi peningkatan jumlah penduduk, dan juga berkaitan erat dengan kualitas perumahan layak huni.

➤ **Persentase rumah tangga yang memiliki akses pada listrik**

Listrik menjadi salah satu aspek untuk memenuhi kebutuhan dasar, pendidikan, dan pekerjaan. Suatu kota harus menyediakan akses listrik yang merata agar dapat meningkatkan kualitas hidup, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan produktivitas. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa kondisi penyediaan akses listrik di Kota Prabumulih sebesar 99,82% atau sangat tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh Rumah Tangga Kota Prabumulih telah memiliki akses listrik yang dialiri oleh PLN. Peningkatan jumlah penduduk akan memperbesar permintaan pada layanan publik yang bergantung pada ketersediaan Listrik.

➤ **Persentase rumah tangga yang memiliki akses pada telepon**

Perkembangan akses komunikasi di Kota Prabumulih cukup pesat. Setiap tahunnya terdapat peningkatan akses masyarakat terhadap telepon. Pada Tahun 2024, sekitar 91,02 persen penduduk berumur 5 tahun ke atas di prabumulih sudah menggunakan telepon (seluler). capaian ini meningkat dibandingkan lima tahun sebelumnya yaitu 85,90 persen Tahun 2020.

Dalam lima tahun terakhir, Indeks Infrastruktur Kota Prabumulih berada pada rentang 86-89%. Nilai ini dipengaruhi dari empat indikator penyusun Indeks Infrastruktur sebagaimana telah diuraikan di atas. Dari keempat indikator tersebut, indikator

persentase rumah tangga yang memiliki akses pada air bersih masih harus ditingkatkan.

b. Aksesibilitas

Kota Prabumulih merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki jarak tempuh yang tidak terlalu jauh dengan ibukota Palembang, yaitu kurang lebih 98 km atau dalam hitungan waktu sekitar 2 jam perjalanan. Kedekatan ini menjadikan Prabumulih sebagai tujuan investasi yang menarik dan dapat memberikan keuntungan bagi investor yang ingin menanamkan modal di Prabumulih. Selain itu Kota Prabumulih merupakan jalur utama yang menghubungkan berbagai kota di Sumatera Selatan, bahkan hingga pulau Jawa, baik melalui jalur darat maupun kereta api.

Walapun secara umum aksesibilitas Kota Prabumulih sudah baik, karena posisinya yang strategis sebagai jalur transit di Sumatera Selatan. Namun, dibandingkan dengan kota lain seperti Palembang, Prabumulih masih memiliki beberapa keterbatasan dalam hal infrastruktur transportasi dan konektivitas.

c. Persentase Desa Mandiri

Saat ini Kota Prabumulih memiliki 12 desa dengan kategori desa maju. Penetapan kategori tersebut berdasarkan statusnya dirilis oleh Kemendes PDT melalui “Indeks Desa Membangun” (IDM). Data IDM merupakan salah satu dasar bagi Kementerian Keuangan untuk menetapkan pengalokasian Dana Desa.

Indeks Desa membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. Masing-masing indeks tersebut terdiri dari beberapa dimensi yang terdiri dari banyak indikator. IDM mengklasifikasikan desa menjadi 5 status desa, yaitu :

- 1. Desa Mandiri
- 2. Desa Maju
- 3. Desa Berkembang
- 4. Desa Tertinggal
- 5. Desa Sangat Tertinggal

Tabel 2.50 Kategori Desa di Prabumulih berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2020-2024

No	Tahun	Nilai Rata-Rata IDM	Status IDM
1	2020	0,6392	Berkembang
2	2021	0,6543	Berkembang
3	2022	0,6658	Berkembang
4	2023	0,6673	Berkembang
5	2024	0,7163	Maju

Sumber: Publikasi Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan kondisi desa di Kota Prabumulih pada Tahun 2024 sudah masuk kategori desa maju dari tahun sebelumnya desa berkembang. Desa Maju adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah baik. Meskipun demikian tetap diharapkan ada intervensi dari pemerintah daerah berupa program/kegiatan yang diharapkan dapat terus meningkatkan statusnya menjadi desa mandiri.

2.3.5 Stabilitas Ekonomi Makro

a. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah (*local tax ratio*) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap PDRB. Rasio penerimaan pajak ini digunakan untuk memperkirakan pembiayaan domestik pelaksanaan program, mendukung pembangunan infrastruktur, barang dan jasa, juga untuk mendukung pengembangan sistem perpajakan dan menunjukkan keberhasilan kerangka tata kelola.

Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.

Tabel 2.51 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penerimaan pajak daerah	Rp	28.477.773.075	33.523.668.080	35.858.544.356	42.889.604.190	40.959.338.759
2	Total PDRB	Rp	7.867.320.000.000	8.345.930.000.000	9.208.500.000.000	9.834.130.000.000	10.533.230.000.000
3	Rasio Penerimaan pajak	%	0,36	0,40	0,39	0,44	0,39

Sumber: Bapenda, BPS, Hasil Olahan Bappeda - Kota Prabumulih

Perkembangan Pajak Daerah Kota Prabumulih secara nilai selalu meningkat dari Tahun 2020 sampai 2023, namun pada Tahun 2024 turun menjadi 40,69 miliar rupiah. Perkembangan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB berfluktuatif dan memberikan kontribusi terhadap PDRB masih berada di bawah 1% (masih rendah), yaitu sebesar 0,39% Tahun 2024, ini artinya penerimaan pajak daerah di tahun 2024 hanya sebesar 0,39% dari PDRB.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

a. Indeks Reformasi Hukum

Amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan sebagaimana telah

diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa salah satu indikator sasaran Reformasi Birokrasi adalah Indeks Reformasi Hukum. Indeks Reformasi Hukum adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel. Untuk memperoleh gambaran atas pencapaian sasaran tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan penilaian Indeks Reformasi Hukum sebagai salah satu upaya me-reviu berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Pemerintah Daerah, sehingga nantinya dapat menghadirkan regulasi perundang-undangan yang berkualitas, sesuai dengan tujuan dari reformasi birokrasi tersebut.

Tabel 2.52 Indeks Reformasi Hukum Kota Prabumulih

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi birokrasi	n/a	n/a	n/a	56,62	77,40
Predikat	n/a	n/a	n/a	Cukup	Baik

Sumber: Kemenkumham

Kota Prabumulih pada Tahun 2023, hanya meraih nilai 56,62 dengan kategori CC (Cukup), yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Prabumulih belum melengkapi seluruh variabel pemenuhan data dukung penilaian Indeks Reformasi Hukum. Namun, pada Tahun 2024, dengan upaya yang lebih serius, Kota Prabumulih mampu mendapatkan capaian 77,40, termasuk dalam kategori BB (Baik). Peningkatan ini mencerminkan upaya yang konsisten dan kerja keras pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Kota Prabumulih dengan cara melengkapi data dukung penilaian Indeks Reformasi Hukum, namun masih terdapat hal-hal lainnya yang harus diperbaiki seperti kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan, Kualitas deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu dan Penataan Database Peraturan Perundang-Undangan.

b. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilaksanakan bukan semata-mata mendapatkan nilai pemeringkatan tertinggi, tetapi untuk melihat gambaran penerapan SPBE yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah sehingga dapat menentukan langkah strategis dalam upaya perbaikan. Adapun penerapan SPBE adalah sebagai *key driver* transformasi digital yang bertujuan untuk mengarahkan pengembangan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik menuju puncak tertinggi kepuasan masyarakat pengguna SPBE, sehingga

ketika masyarakat mengingat SPBE yang terlintas adalah pemerintah yang akuntabel dan layanan yang berkualitas.

Berdasarkan Keputusan Menteri PAN RB tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, capaian Indeks SPBE Kota Prabumulih Kabupaten pada Tahun 2024 adalah 3,37 dengan predikat “baik”, indeks ini terus bergerak naik dari Tahun 2019 sebesar 1,72 dengan predikat “kurang”.

Tabel 2.53 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Prabumulih

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE	1,72	n/a	2,56	2,62	3,35	3,37
Predikat	kurang	n/a	cukup	baik	baik	baik

Sumber: Laporan hasil evaluasi SPBE Tahun 2024 dari Kemenpanrb

c. Indeks Pelayanan Publik

Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Instansi pemerintah memiliki tugas mendasar untuk memberikan pelayanan prima (*excellent service*) dan harus memastikan bahwa layanan yang diberikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Dalam rangka menjaga pelayanan publik yang berkualitas dan transparan serta memenuhi harapan masyarakat, diperlukan penilaian terhadap instansi pemerintah pusat serta pemerintah daerah yang selama ini telah dilakukan oleh KemenPAN RB. Kementerian PAN-RB melaksanakan penilaian dalam bentuk Evaluasi Unit Pelayanan Publik (EUPP) sesuai Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang menghasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP).

Tabel 2.54 Indeks Pelayanan Publik Kota Prabumulih

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pelayanan Publik	n/a	n/a	4,81	3,64	4,46
Predikat	n/a	n/a	Sangat baik	baik	Sangat baik

Sumber: Biro Organisasi Sekretariat Daerah Kota Prabumulih

Dalam hal nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kota Prabumulih Tahun 2024 adalah sebesar 4,46 termasuk kategori A- (sangat baik), predikat sangat baik ini berarti menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kota Prabumulih umumnya berkualitas baik dan dapat memenuhi standar pelayanan publik yang ditetapkan. Nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya 2023 sebesar 3,64 termasuk kategori A- (sangat baik), disebabkan karena adanya penambahan unit yang dievaluasi.

d. Indeks Sistem Merit

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Pasal 1, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.

Selanjutnya Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah.

Penilaian Indeks Sistem Merit dilakukan sebagai evaluasi agar kedepannya penataan sistem merit semakin sempurna, mampu menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan potensi dan kompetensinya.

Tabel 2.55 Indeks Sistem Merit Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Sistem Merit	nilai	n/a	n/a	n/a	94	169,5
2	Kategori	predikat	n/a	n/a	n/a	kurang	kurang

Sumber: BKPSDM- Kota Prabumulih

Pemerintah Kota Prabumulih memperoleh predikat Kurang dalam Penilaian Sistem Merit yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada Tahun 2023 dan 2024. Kategori Kurang ini menandakan ada aspek-aspek penting dalam manajemen ASN yang belum berjalan dengan baik, seperti perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, atau promosi dan mutasi.

e. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan mereka atau kalau menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019, Indeks Profesionalisme ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Pengukuran indeks profesionalisme ASN dilakukan berdasarkan prinsip dan dimensi penilaian indeks tersebut. Dimensi pengukuran indeks profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Dimensi kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal ASN dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Porsi dimensi kualifikasi adalah 25% dari total pengukuran indeks profesionalisme ASN;
2. Dimensi kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh ASN dan memiliki

- kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Porsi dimensi kompetensi adalah 40% dari total pengukuran indeks profesionalisme ASN;
3. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Porsi dimensi ini 30% dari total pengukuran, indikatornya adalah nilai SKP dan PKP; dan
 4. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Porsi dimensi ini adalah 5% yang terdiri dari penjatuhan hukuman disiplin (berat, sedang, ringan).

Tabel 2.56 Indeks Profesionalisme ASN Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Profesionalisme ASN	nilai	n/a	n/a	56,95	65,19	76,92
2	Kategori	predikat	n/a	n/a	Sangat Rendah	Rendah	sedang

Sumber: BKPSDM- Kota Prabumulih

Tahun 2022 Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) sebesar 56,95 dengan predikat Sangat Rendah (Buruk), atas kondisi ini BKN memberikan peringatan. Di tahun ini juga, apkilkasi e-kinerja belum dipakai sehingga masih menggunakan sistem manual. Di Tahun 2023, ada peningkatan nilai sebesar 8,27 poin menjadi 65,19 dengan predikat rendah. Berdasarkan tabel di atas, kenaikan IP ASN di Tahun 2023 sangat dipengaruhi dari dimensi kompetensi, dapat ditunjukkan dari semakin meningkatnya pejabat fungsional yang mulai meng-upload sertifikat kompetensi mereka melalui aplikasi e-kinerja. Akan tetapi walaupun ada kenaikan IP ASN dari 56,95 menjadi 65,19, predikatnya tetap Rendah, karena masih banyak ASN yang belum mengisi apkilkasi e-kinerja dan meng-upload sertifikat kompetensi. Di Tahun 2024, Indeks Profesionalitas ASN 76,92 menunjukkan tingkat profesionalitas yang sedang. Ini berarti kualitas ASN dalam hal kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan berada di level yang masih perlu ditingkatkan.

f. Indeks pengelolaan keuangan daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah. IPKD bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) memiliki 6 dimensi yang digunakan untuk menilai kualitas tata kelola keuangan daerah. Dimensi-dimensi tersebut meliputi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, kualitas anggaran

belanja, transparansi pengelolaan keuangan, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, dan opini BPK.

Tabel 2.57 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks pengelolaan keuangan daerah	nilai	n/a	n/a	59,57	61,39	n/a
2	Kategori	predikat	n/a	n/a	Perlu perbaikan	Sangat Perlu perbaikan	n/a

Sumber: Balitbang- Kota Prabumulih

Pada Tahun 2022 Nilai Indeks pengelolaan keuangan daerah Kota Prabumulih adalah 59,57 atau B dengan predikat perlu perbaikan, namun di Tahun 2023 predikatnya menjadi Sangat Perlu Perbaikan dengan nilai 61,39. Nilai IPKD Kota Prabumulih yang hanya sebesar 59-62 sangat dipengaruhi oleh kurang transparansinya dokumen pengelolaan keuangan daerah di website utama pemda dalam rentang waktu <30 hari dari tanggal penetapan serta pemerintah daerah belum sepenuhnya membuka akses informasi terkait pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat, sehingga hal ini mempengaruhi dimensi 3 yaitu Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator ketepatan waktu dan keterlaksanaan.

g. Survey Penilaian Integritas

Upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih terus dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah, namun masih terdapat sumber persoalan yang diidentifikasi dapat menghambat upaya ini yaitu rendahnya integritas birokrasi, yang bisa menyebabkan pelayanan publik tidak transparan, tidak akuntabel, dan berpotensi korupsi. Pada dasarnya, pemerintah daerah telah menginisiasi upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan integritas. Namun, capaian upaya-upaya tersebut belum memiliki ukuran yang objektif. Maka melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dibangun oleh KPK ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan pemerintah daerah memetakan dan memonitor risiko korupsi serta mendorong upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut.

Tabel 2.58 Hasil Survey Penilaian Integritas Kota Prabumulih

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Hasil Survey Penilaian Integritas	n/a	68,77	75,54	71,26	74,59

Sumber: Inspektorat-Daerah Kota Prabumulih

Pada Tahun 2024 Kota Prabumulih mendapatkan skor integritas sebesar 74,59 (dari rentang skala interval 0-100) dimana skor ini menempatkan posisi Kota Prabumulih diatas rata-rata nasional, yaitu 71,53 dan Provinsi Sumatera Selatan yaitu 60,63. Skor SPI sebesar 74,59 berarti dalam upaya pencegahan korupsi termasuk dalam kategori waspada atau zona kuning, kategori ini menunjukkan bahwa wilayah Kota Prabumulih berpotensi rawan korupsi.

2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substantial

a. Persentase Penegakan Perda

Penegakan Perda menjadi salah satu aktivitas yang penting karena penegakan Perda memiliki pengaruh besar terhadap terciptanya lingkungan yang nyaman, aman dan tertib. Setiap Perda perlu dikawal dengan baik dalam implementasinya, sehingga dapat mencapai sasaran yang tepat, dan optimal dalam mengatur suatu subyek seperti yang telah dijelaskan dalam setiap Perda. Oleh karena itu terhitung sejak waktu berlakunya, sebuah Perda perlu untuk selalu dimonitor.

Tabel 2.59 Persentase Peningkatan Penegakan Perda Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	kasus	116	201	138	63	8
2	Jumlah Pelanggaran Perda	kasus	116	201	138	63	8
3	Penegakan PERDA	%	100	100	100	100	100

Sumber: Satpol PP Kota Prabumulih

Setiap pelanggaran yang terjadi langsung segera diselesaikan sehingga capaian penegakan PERDA 100% setiap tahunnya. Adapun bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah penertiban pedagang kaki lima, panti pijat, tempat-tempat hiburan, anak jalanan, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

b. Persentase Capaian Aksi HAM

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) merupakan komitmen pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah untuk meningkatkan Penghormatan, Pemenuhan, Perlindungan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM) sehingga terwujud kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. RANHAM disusun sebagai komitmen Pemerintah Indonesia terhadap penghormatan HAM di tingkat pusat dan daerah. Sasaran strategis RANHAM meliputi: Perempuan, Anak, Penyandang disabilitas, Kelompok masyarakat adat.

Tabel 2.60 Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Kelompok Sasaran	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
-	Perempuan	%	n/a	n/a	90,5	86,7	n/a
-	Anak	%	n/a	n/a	82,7	92,23	n/a
-	Penyandang Disabilitas	%	n/a	n/a	61,25	61,65	n/a
-	Masyarakat Adat	%	n/a	n/a	n/a	90	n/a
1	Total Capaian	%	n/a	n/a	80,41	82,38	n/a

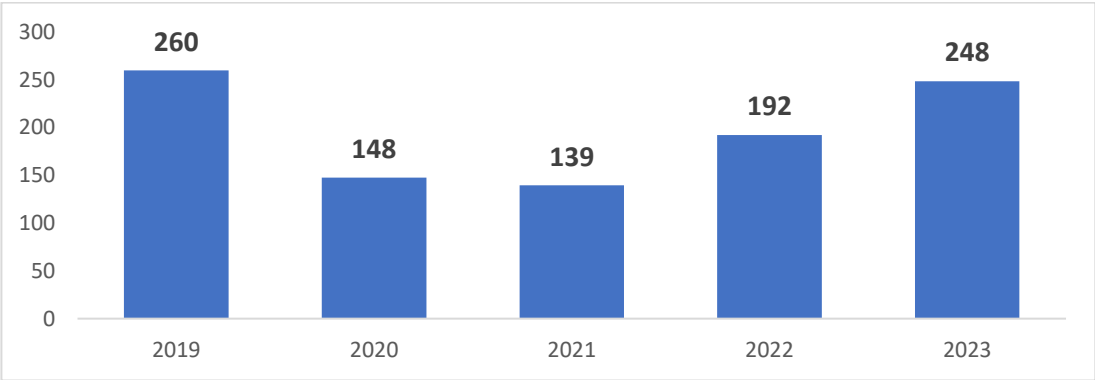
Sumber: Kemenkumham

Dari hasil pelaporan RANHAM di Tahun 2023 dapat dilihat bahwa capaian secara total untuk Aksi HAM Pemerintah Kota Prabumulih adalah 82,38%, meningkat 1,97 poin

dari Tahun 2022, peningkatan ini mengindikasikan komitmen dan upaya serius dalam meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di wilayah Kota Prabumulih, terutama pada kelompok sasaran anak. Namun, meski meraih capaian yang baik, diantara kelompok sasaran pada Rencana Aksi Nasional HAM ini kelompok sasaran penyandang disabilitas memiliki capaian paling kecil dibandingkan kelompok sasaran lainnya.

c. **Angka Kriminalitas**

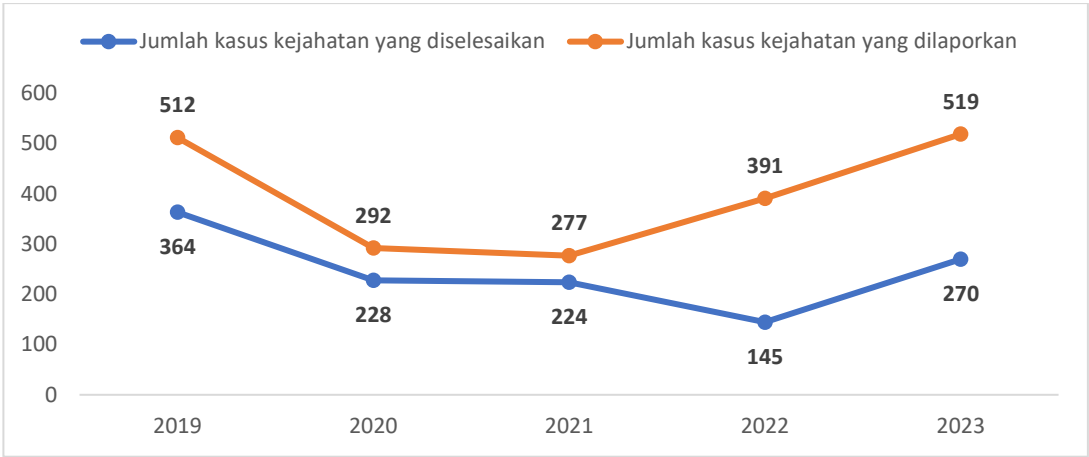
Kriminalitas merupakan masalah sosial yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan di masyarakat. Tingkat kriminalitas rendah merupakan indikator penting dalam keberhasilan pembangunan. Rendahnya tingkat kriminalitas menunjukkan kesejahteraan, sebab memberikan rasa aman bagi semua pihak. Tindak kriminal yang tinggi akan menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, kepercayaan masyarakat akan keamanan kota akan semakin berkurang dan berakibat pada perkembangan kota, kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang akan menurun.



Gambar 2.22 Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (*Crime rate*) (Per 100.000 Penduduk) di Kota Prabumulih , 2019-2023

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, Analisis Bappeda Prabumulih

Grafik tersebut menunjukkan kecenderungan peningkatan risiko penduduk terkena tindak pidana (*crime rate*) per 100.000 penduduk di Kota Prabumulih. Sejak Tahun 2020 hingga 2023 terjadi peningkatan risiko penduduk terkena tindak pidana (*crime rate*) per 100.000 penduduk, seperti di Tahun 2023 adalah sebesar 248. Angka ini berarti bahwa setiap 100.000 penduduk di Kota Prabumulih berisiko mengalami tindak kejahatan sebanyak 248 orang. Peningkatan ini menunjukkan kondisi keamanan yang tidak baik, yang juga dapat dilihat melalui Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*) dan yang Diselesaikan (*Crime Cleared*) seperti pada gambar 2.23 berikut.



Gambar 2.23 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*) dan yang Diselesaikan (*Crime Cleared*) Kota Prabumulih, 2019-2023

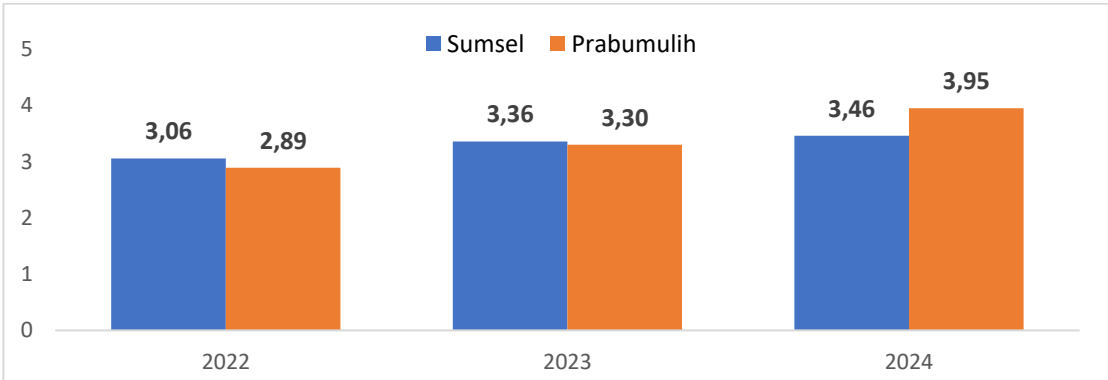
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, Analisis Bappeda Prabumulih

Berdasarkan jumlah kejahatan yang tampak pada grafik di atas, terjadi peningkatan tindakan kejahatan. Bila dilihat dari Tahun 2019 ke Tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan tindakan kejahatan namun terjadi peningkatan tindakan kejahatan di Tahun 2022 yang diikuti peningkatan lagi Tahun 2023. Berdasarkan data BPS itu juga pengungkapan kasus kriminal di Prabumulih mengalami kenaikan hal ini tampak dari gambaran grafik di Tahun 2022 dan 2023. Hal ini membuktikan bahwa jika dilihat secara keseluruhan, tindak kejahatan masih banyak terjadi setiap tahunnya di Kota Prabumulih, sementara tindak kejahatan yang dapat diselesaikan rata-rata masih jauh di bawah tindak kejahatan yang terjadi. Hal ini menunjukkan keamanan yang kurang.

2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

a. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) ukuran yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan atau dengan kata lain bahwa IDSD merupakan alat yang sangat penting dalam upaya mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.



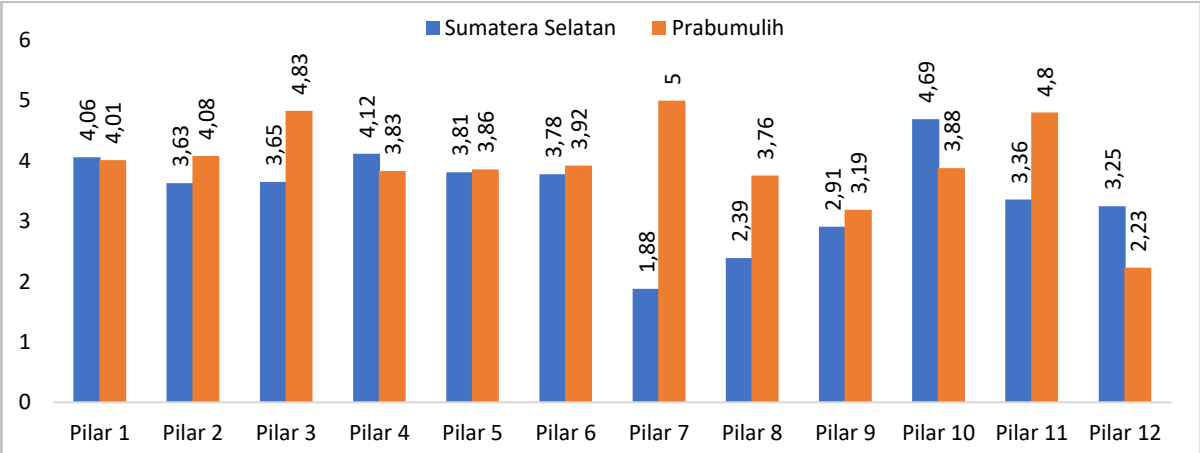
Gambar 2.24 Progres IDSD Kota Prabumulih Tahun 2022-2024

Sumber : BRIN (Publikasi)

Nilai IDSD Tahun 2024 sebesar 3,90 meningkat dari Tahun 2023 yang sebesar 3,30. Nilai 3,90 menunjukkan bahwa Kota Prabumulih memiliki tingkat daya saing di atas rata-rata atau di atas kategori sedang, artinya masih ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut. Nilai IDSD Kota Prabumulih Tahun 2024 sebesar 3,90 diatas angka provinsi sebesar3,46.

Peningkatan IDSD di Tahun 2024 disebabkan karena upaya pemerintah daerah dalam membangun dan meningkatkan infrastruktur (pilar 2), pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil rata-rata di angka 5% (pilar 4), Peningkatan akses dan partisipasi dalam pendidikan dan pelatihan (pilar 6), proporsional sektor jasa dan non jasa cukup baik komposisinya (pilar 7), peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja (pilar 8), peningkatan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta *start up*, peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga keuangan yang melayani UMKM (pilar 9), perbaikan dalam berbagai aspek yang memengaruhi kemudahan memulai dan menjalankan bisnis (pilar 10), perkembangan pasar keuangan (pilar 11), dan perbaikan dalam kemampuan daerah untuk menciptakan dan mengadopsi inovasi (pilar 12).

Dari 12 pilar daya saing terdapat satu pilar yang skornya masih rendah atau di bawah 3, yaitu kapabilitas inovasi nilainya 2,23. Nilai 2,23 pada pilar Kapabilitas Inovasi menunjukkan bahwa tingkat inovasi di Kota Prabumulih masih tergolong rendah.



Gambar 2.25 Indeks Daya Saing Daerah Kota Prabumulih dengan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Sumber : BRIN (Publikasi)

Jika dilihat dari 12 pilar IDSD, terdapat 8 pilar yang nilainya di atas nilai provinsi. Kedelapan pilar tersebut diantaranya pilar 2 (Infrastruktur), pilar 3 (adopsi TIK), pilar 5 (kesehatan), pilar 6 (keterampilan), pilar 7 (pasar produk), pilar 8 (pasar tenaga kerja) pilar 9 (sistem keuangan) dan pilar 11 (dinamika bisnis).

2.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

2.4.4.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Bidang Pendidikan

1. Persentase Guru Berpendidikan > S1

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mewajibkan guru memiliki kualifikasi pendidikan S1 atau D4. Persentase Guru Berpendidikan > S1 di Kota Prabumulih Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

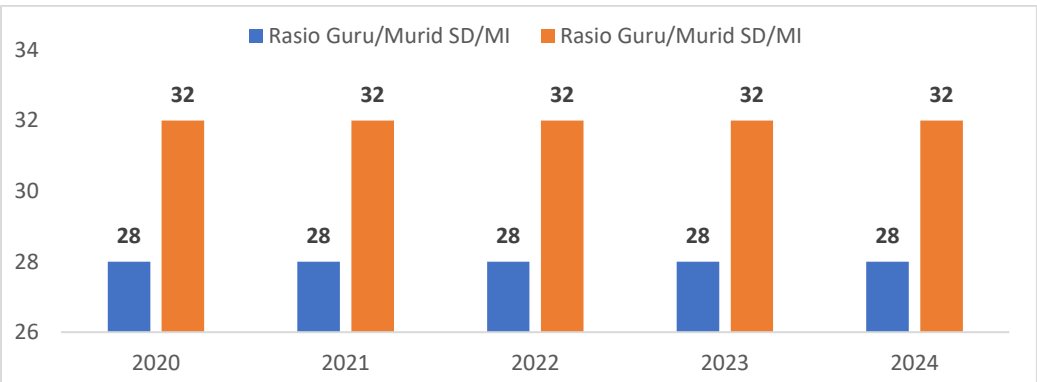
Tabel 2.61 Persentase Guru Berpendidikan Minimal S1 di Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	90,61	93,40	85,82	-	84,98

Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kota Prabumulih

Data menunjukkan Persentase Guru Berpendidikan minimal S1 di Kota Prabumulih periode 2020 sampai dengan 2024 bersifat fluktuatif. Adanya penurunan dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan oleh pengurangan pendidik yang pensiun namun tidak ada penambahan ASN pendidik baru. Namun diupayakan penyediaan pendidik non ASN yang dibiayai oleh APBD.

2. Rasio Murid-Guru



Gambar 2.26 Rasio Murid-Guru Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kota Prabumulih

Di setiap jenjang pendidikan, rasio antara guru dan murid tetap sama tidak ada perubahan. Secara rinci, rasio guru-murid di Sekolah Dasar (SD) sebesar 28, ini berarti setiap satu guru SD bertanggung jawab terhadap 28 murid, kemudian di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), rasio guru-murid tercatat sebesar 32 yang berarti setiap satu guru SMP bertanggung jawab terhadap 32 murid. Jika mengacu pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang rasio ideal guru yang rata-rata sebesar 20, maka dapat dikatakan bahwa rasio guru-murid pada tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kota Prabumulih belum ideal begitu juga dengan rasio guru-murid pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) juga belum ideal.

3. Rasio Murid-Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menampung penduduk usia sekolah. Rasio ketersediaan sekolah SD/MI terhadap penduduk menunjukkan kemampuan daerah menampung penduduk usia 7–12 tahun. Rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs terhadap penduduk menunjukkan kemampuan daerah menampung penduduk usia 13–15 tahun.

Semakin tinggi rasio ketersediaan sekolah, maka semakin baik kesempatan belajar bagi penduduk. Sebaliknya, rasio ketersediaan sekolah yang rendah menunjukkan kemampuan daerah yang terbatas dalam menampung penduduk usia sekolah. Perkembangan rasio ketersediaan sekolah di Kota Prabumulih Tahun 2020 – 2024 diuraikan dalam table berikut.

Tabel 2.62 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah di Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI						
	Jumlah murid	siswa	23149	23402	23542	23699	23535
	Jumlah sekolah	unit	104	104	100	103	113
	Rasio ketersediaan sekolah dasar/ sederajat	unit/10.000 jiwa	44.93	44.44	42.48	43.46	48.01
2	SMP/MTs						
	Jumlah murid	siswa	11200	11483	11438	11073	11056
	Jumlah sekolah	unit	29	29	32	33	32
	Rasio ketersediaan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	unit/10.000 jiwa	25.89	25.25	27.98	29.80	29.94

Sumber : BPS, Hasil Analisis Bappeda Kota Prabumulih

Daya tampung sekolah SD/MI terhadap murid berfluktuasi pada kisaran 42,48% sampai 48,01% begitu juga dengan daya tampung sekolah SMP/MTs terhadap murid berfluktuasi pada kisaran 25,25% sampai 29,94%, kedua rasio ini berada di bawah rasio ideal (52) per 10.000 penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun, sehingga dapat dikatakan bahwa ketersediaan gedung sekolah SD/MI dan SMP/MTs belum memadai.

4. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah persentase penduduk usia sekolah yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu. APS menggambarkan jumlah penduduk yang bersekolah dibandingkan dengan jumlah penduduk total, tanpa mempertimbangkan apakah mereka berada dalam kelompok usia yang sesuai untuk jenjang pendidikan yang diikuti. APS bersifat makro karena meliputi setiap individu yang terlibat dalam pendidikan tanpa memandang usia, berbeda dengan APK yang menggambarkan total siswa yang terdaftar di setiap jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tidak dalam kelompok usia ideal

Perkembangan APS Kota Prabumulih dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.63 Angka Partisipasi Sekolah di Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Tingkat Pendidikan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	PAUD	%	-	-	26.15	76.7	76.69
2	SD/MI	%	99.99	99.89	99.87	99.24	98.81
3	SMP/MTs	%	96,16	97,65	95,35	95,87	97,95

Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kota Prabumulih

APS jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Prabumulih Tahun 2020 sampai 2024 sudah cukup tinggi walaupun belum mencapai 100%. Ini dapat diartikan bahwa masih terdapat sebagian kecil penduduk usia 7 tahun hingga 12 tahun yang tidak bersekolah di SD/MI dan penduduk usia 13 tahun hingga 15 tahun SMP/MTs yang tidak bersekolah di. Apabila dikaitkan dengan program wajib belajar 9 tahun, kondisi ini belum ideal karena masih ada anak-anak yang tidak masuk sekolah pada pada jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Kemudian pada jenjang PAUD, APS nya juga masih rendah, kondisi ini antara lain berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana untuk pendidikan pra-sekolah, ketersediaan guru (tenaga pengajar) dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan pra-sekolah.

5. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu, berapapun umurnya, terhadap jumlah penduduk kelompok umur tertentu. Indikator APK digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Selain itu, APK juga merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk umur sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 2.64 Angka Partisipasi Kasar di Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Tingkat Pendidikan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	PAUD	%	26,01	27,35	27,65	30,02	30,25
2	SD/MI	%	110.64	109.43	109.2	112.14	105.26
3	SMP/MTs	%	106.81	105.47	99.89	87.87	93.52

Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kota Prabumulih

Capaian APK Kota Prabumulih untuk tingkat PAUD setiap tahunnya perlahan menunjukan peningkatan walaupun angkanya masih sangat rendah. APK tingkat SD/MI setiap tahunnya melampaui 100% seperti di tahun 2024 sebesar 105,26% yang berarti bahwa terdapat sekitar 5% murid yang bersekolah pada tingkat SD/MI yang usianya di bawah atau di atas 7-12 tahun, APK lebih dari 100% ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Prabumulih mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Kemudian pada jenjang Pendidikan SMP, diketahui bahwa APK SMP terus mengalami penurunan dari Tahun 2020 ke Tahun 2024. Pada tabel diketahui

bahwa persentasenya mengalami penurunan dari 106,81 persen di Tahun 2020 menjadi 75,56 persen di Tahun 2024, penurunan APK SMP hingga di bawah 100 persen, seperti di Tahun 2024 sebesar 75,56 persen menunjukkan bahwa terdapat sekitar 75,56 persen penduduk yang berusia 13 – 15 tahun sekolah pada jenjang SMP/MTs turun dari tahun sebelumnya yang mana terdapat sekitar 87,87 persen penduduk yang berusia 13 – 15 tahun sekolah pada jenjang SMP/MTs. Jauhnya nilai APK SD/MI terhadap APK SMP/MTs mengindikasikan bahwa banyak anak SD/MI tidak melanjutkan pendidikan mereka ke SMP/MTs atau putus sekolah.

6. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. APM memberikan gambaran yang lebih akurat tentang peserta didik yang berada di usia yang tepat untuk jenjang pendidikan mereka, sehingga lebih tepat untuk melihat efisiensi sistem pendidikan. Secara umum nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK, karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah.

Tabel 2.65 Angka Partisipasi Murni di Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Tingkat Pendidikan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	PAUD	%	25.01	26.25	26.55	19.05	25.30
2	SD/MI	%	97.78	98.91	98.62	93.49	84.51
3	SMP/MTs	%	73.23	90.01	89.29	75.26	69.66

Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kota Prabumulih

Pada Tahun 2024, nilai APM SD/MI sebesar 84,51 yang berarti terdapat sekitar 84,51 persen anak usia 7 sampai 12 tahun di Kota Prabumulih yang sedang memperoleh pendidikan di tingkat SD/MI. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya kondisi ini menunjukkan penurunan. Hampir sama pada jenjang SMP/MTs, yang mana APM nya 69,66 yang berarti terdapat sekitar 69,66 persen anak usia 13 sampai 15 tahun di Kota Prabumulih yang sedang memperoleh pendidikan di tingkat SMP/MTs, kondisi ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya.

Dari tabel di atas juga didapat bahwa nilai APM untuk semua jenjang pendidikan kurang dari 100 persen dan APM pendidikan cenderung semakin menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan.

7. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

Hasil capaian pada dokumen laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.66 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan di Kota Prabumulih Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	Sasaran	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	4.751	4.751	100
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	31.198	31.198	100
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	1.026	1.026	100

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih 2024

Permasalahan dalam penerapan pelaksanaan SPM pada Bidang Pendidikan adalah dibutuhkan koordiansi antar instansi untuk pengumpulan data pendukung SPM antar Dinas atau Bidang terkait untuk meningkatkan mutu dan pelayanan SPM khususnya yang melibatkan Kanwil/Departemen Agama dan Disdukcapil.

b. Bidang Kesehatan

1. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 2.67 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2024
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	99,50%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai Standar	99,04%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	103,25%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,03%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrening kesehatan sesuai standar	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2024
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita Diabetes mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	99.37%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AIDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIVAIDS	103.42%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Prabumulih

Permasalahan dalam penerapan pelaksanaan SPM pada Bidang Kesehatan adalah Berdasarkan Permenkes terbaru yaitu PMK. No.6 Tahun 2024 terdapat penambahan pada menu mutu minimal layanan dasar pada jumlah mutu barang/jasa/SDM sehingga terjadi penyesuaian pada menu tersebut yang mengakibatkan terkendalanya dalam pengumpulan data.

2. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Tabel 2.68 Angka Kematian Ibu Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	77	25,67	n/a	25	85,22

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Prabumulih

Angka kematian Ibu tertinggi terjadi pada Tahun 2024 sebesar 85 orang per 100.000 kelahiran hidup. Kasus kematian ibu ini disebabkan karena komplikasi kehamilan dan persalinan yang dipengaruhi oleh status kesehatan ibu dengan penyakit jantung, serta terdapat satu (1) kasus yang disebabkan oleh komplikasi persalinan (perdarahan).

3. Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup

Tabel 2.69 Angka Kematian Bayi Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Bayi	per 1.000 kelahiran hidup	5,13	11,81	n/a	2,2	5,40

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Prabumulih

Angka kematian bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi dalam usia 1 tahun pertama kehidupan per 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Tahun 2024 terdapat 19 kasus kematian bayi yang dilaporkan dari 3.512 kelahiran hidup, artinya jika dihitung angka kematian Bayi (AKB) di Kota Prabumulih Tahun 2024 menjadi 5.4 /1.000 kelahiran hidup. Peningkatan AKB ini umumnya disebabkan karena kelahiran prematur, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, infeksi, kelainan bawaan, serta kondisi medis yang memengaruhi ibu selama kehamilan.

4. Case Notification Rate (CNR) for TB

Penyakit Tuberkulosis (TBC) menjadi indikator kesehatan nasional maupun global karena penyakit ini dapat memberikan dampak besar terhadap kesehatan masyarakat dan perekonomian.

Case Notification Rate (CNR/Angka penemuan kasus TB ternotifikasi) TB. CNR adalah rasio antara jumlah kasus TB yang dilaporkan terhadap jumlah kasus TB yang sebenarnya ada.

Tabel 2.70 Case Notification Rate (CNR) for TB Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Case Notification Rate (CNR) for TB	%	43,00	45,00	1,54	1,90	40,67

Sumber: BPS-Prov Sumsel

Dalam lima tahun terakhir, rata-rata CNR/Angka penemuan kasus TB ternotifikasi adalah berada diangka 40%. Di Tahun 2024, CNR/Angka penemuan kasus TB ternotifikasi Kota Prabumulih adalah 40,67%, ini menunjukkan bahwa dari setiap 100 kasus TB yang sebenarnya ada, hanya 40,67 kasus yang dilaporkan dan Ini berarti ada sekitar 59,33 kasus yang tidak dilaporkan.

5. Case Detection Rate (CDR) TB

Case Detection Rate (CDR) TB adalah proporsi pasien baru TB BTA positif yang ditemukan dan diobati, dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus TB BTA positif yang ada di suatu wilayah.

Tabel 2.71 Case Detection Rate (CDR) for TB Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Case Detection Rate (CDR) TB	%	32,00	57,00	n/a	74,32	77,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Prabumulih

Dalam lima tahun terakhir, Case Detection Rate (CDR) TB Kota Prabumulih terus menunjukkan peningkatan. CDR tertinggi di Tahun 2024, yaitu 77%, ini menunjukkan bahwa lebih dari 70% kasus TB BTA positif yang diperkirakan ada di Kota Prabumulih telah berhasil ditemukan dan diobati. Angka 77% ini sudah diatas target nasional yaitu 70%. Pencapaian CDR Kota Prabumulih di atas target nasional menunjukkan bahwa upaya penanggulangan TB di Kota Prabumulih sudah berjalan dengan baik.

6. Persentase kasus HIV yang diobati

Penurunan angka kesakitan dan kematian di Kota Prabumulih dilaksanakan antara lain dengan pencegahan dan pengendalian penyakit, baik penyakit menular maupun tidak menular. Salah satu fokus pencegahan dan

pengendalian penyakit adalah penanggulangan kasus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*).

Jumlah ODHA on ART merupakan indikator yang menggambarkan sejauh mana program mampu mengendalikan laju transmisi penyakit HIV. ODHA yang menjalani terapi ARV terus-menerus tidak akan menularkan virus HIV lagi ke orang lain. Dengan demikian, semakin tinggi ODHA on ART, akan semakin menurunlah terjadinya infeksi baru HIV (insidens HIV) di populasi.

Tabel 2.72 Persentase Kasus HIV yang Diobati Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Orang dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART)	%	43,00	78,00	n/a	78,00	82,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Prabumulih

Persentase Orang dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART) terus menunjukkan peningkatan hingga mencapai 82% di Tahun 2024, yang artinya dari setiap 100 orang yang hidup dengan HIV, sebanyak 82 orang sedang menjalani terapi obat ARV. Angka ini sekaligus juga menunjukkan bahwa sebagian besar ODHA di Kota Prabumulih sedang mendapatkan perawatan yang penting untuk kesehatan mereka dan untuk mencegah penularan HIV, capaian ini sudah cukup baik, karena sudah diatas target nasional 81%.

7. Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

Tabel 2.73 Universal Coverage / Jaminan Pembiayaan Kesehatan Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan <i>Universal Coverage</i>	%	96,27	95,50	99,74	97,20	99,34

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Prabumulih

Rata-Rata UHC Kota Prabumulih sudah diatas 95%, seperti di Tahun 2024 sebesar 99,34% artinya bahwa hampir seluruh penduduk di Kota Prabumulih telah mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan dan perlindungan finansial yang ditawarkan oleh sistem UHC.

8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Sesuai Standar

Yang dimaksud fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar disini adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi dan sesuai dengan penerapan pola keuangan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Akreditasi bertujuan untuk :

- Meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien;
- Meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan, masyarakat dan lingkungannya, serta Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi sebagai institusi; dan
- Meningkatkan kinerja Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi dalam pelayanan kesehatan perseorangan dan/atau kesehatan masyarakat.

Tabel 2.74 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	%	50,00	50,00	n/a	93,84	89,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Prabumulih

Sampai dengan Tahun 2024, 9 (sembilan) Puskesmas dan 1 (satu) laboratorium kesehatan di Kota Prabumulih telah terakreditasi, mulai dengan status terakreditasi dasar dan madya. Namun, belum ada satupun Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi yang terakreditasi. Selain itu adanya penurunan capaian di Tahun 2024 disebabkan terjadinya perubahan definisi operasional pada indikator tersebut, dimana pada awalnya sasaran akreditasi hanya terdiri dari fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah terdiri dari rumah sakit, puskesmas dan laboratorium kesehatan daerah. Kemudian mengalami perubahan definisi operasional pada Revisi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Prabumulih, dimana sasaran fasyankes memenuhi standar terdiri dari fasyankes milik pemerintah dan swasta yang sudah terakreditasi dan juga sudah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

9. Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas

Selain pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar, salah satu faktor lain yang mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan adalah dengan menjamin kecukupan obat-obatan, bahan habis pakai, bahan

medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan bagi masyarakat Kota Prabumulih.

Tabel 2.75 Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Prabumulih

Dalam lima tahun terakhir, kecukupan obat di Kota Prabumulih telah mencapai 100%, hal ini tidak terlepas dari dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

10. Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Surat Izin Praktik (SIP) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Untuk terselenggaranya praktik tenaga kesehatan yang bermutu dan perlindungan kepada masyarakat, kualitas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau perlu didukung dengan sumber daya kesehatan, khususnya Tenaga Kesehatan yang memadai, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun penyebarannya. Upaya yang dapat dilakukan adalah pemenuhan tenaga kesehatan yang sudah memiliki SIP dan STR sehingga diketahui kompetensi dan keahlian di bidangnya masing-masing.

Tabel 2.76 Tenaga Kesehatan yang Memiliki Surat Izin Praktik (SIP) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) di fasilitas pelayanan kesehatan	%	67	96,6	n/a	92,6	n/a

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Prabumulih

Berdasarkan tabel diatas menginformasikan bahwa tenaga kesehatan di Kota Prabumulih belum semuanya memiliki SIP dan STR, kondisi ini terjadi karena beberapa belum memiliki atau memperpanjang Surat Tanda Registrasi (STR), proses perizinan yang belum selesai atau masih terkendala.

c. Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

1. Persentase kondisi jalan mantap

Jalan mantap merupakan jalan yang dalam kondisi baik atau sedang dan dapat digunakan dengan aman dan nyaman.

Tabel 2.77 Kondisi Jalan Mantap Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Panjang kondisi jalan mantap	km	324,55	320,89	327,87	327,87	377,75
Persentase kondisi jalan mantap	%	82,77	81,83	64,92	64,92	85,41

Sumber : Dinas PUPR Kota Prabumulih

Persentase kondisi jalan mantap Kota Prabumulih terus menunjukkan peningkatan seperti di Tahun 2024, capaiannya sebesar 85,41%, kondisi ini menunjukkan bahwa sekitar 85,41% dari total jalan yang ada dalam kondisi baik, sedang, atau memadai untuk dilalui, ini juga sekaligus mengindikasikan bahwa infrastruktur jalan tersebut secara umum dalam kondisi yang baik dan dapat mendukung lalu lintas dengan baik.

2. Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik

Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik mengindikasikan seberapa besar saluran yang efektif dalam mengalirkan air, mencegah genangan, dan menjaga kualitas lingkungan. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik kinerja sistem drainase dan semakin rendah risiko banjir, genangan, dan penyebaran penyakit akibat sanitasi buruk.

Tabel 2.78 Saluran Drainase yang Berfungsi Dengan Baik Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik	%	48,77	53,46	57,47	58,68	66,10

Sumber : Dinas PUPR Kota Prabumulih

Dilihat capaian persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik Kota Prabumulih dalam rentang waktu Tahun 2020-2024 termasuk dalam capaian sedang, sehingga perlu dilakukan identifikasi dan perbaikan saluran yang bermasalah.

3. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mengindikasikan seberapa besar bagian dari jaringan jalan kota yang dalam kondisi baik atau layak digunakan. Semakin tinggi proporsinya, semakin baik kondisi jaringan jalan kota secara keseluruhan.

Tabel 2.79 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	59,60	67,99	53,97	72,06	78,38

Sumber : Dinas PUPR Kota Prabumulih

Dilihat capaian Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Kota Prabumulih di lima tahun terakhir, menunjukkan capaian sedang yang artinya bahwa sebagian jalan masih di Kota Prabumulih sudah dalam kondisi yang baik, tetapi ada sebagian jalan yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk perbaikan atau pemeliharaan.

4. Rumah Tangga yang terlayani pengolahan Air Limbah Domestik

Rumah tangga yang terlayani pengolahan air limbah domestik berarti rumah tangga tersebut memiliki sistem atau fasilitas untuk mengolah air limbah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga sebelum dibuang ke lingkungan. Pengolahan ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif air limbah terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Tabel 2.80 Rumah Tangga yang Terlayani Pengolahan Air Limbah Domestik Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Tangga yang terlayani pengolahan air limbah domestik	%	27,87	30,66	33,73	38,62	44,09

Sumber : Dinas PUPR Kota Prabumulih

Capaian persentase Rumah Tangga yang terlayani pengolahan air limbah domestik selama lima tahun terakhir di Kota Prabumulih adalah sekitar 25-44%, seperti di Tahun 2024 persentase Rumah Tangga yang terlayani pengolahan air limbah domestik yaitu 44,09% artinya hanya sekitar 44,09% dari total rumah tangga di Kota Prabumulih yang terlayani oleh sistem pengolahan air limbah domestik. Ini berarti sebagian besar rumah tangga masih membuang air limbah langsung ke lingkungan tanpa pengolahan, yang dapat menyebabkan masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat.

5. Rumah tangga dengan akses air minum aman

Rumah tangga dengan akses air minum aman berarti rumah tangga yang sumber air minumannya sudah aman untuk dikonsumsi, bebas dari kontaminasi bakteri, dan memenuhi persyaratan kualitas fisik, mikrobiologi, kimia, dan radioaktif. Air minum aman biasanya berasal dari sumber air yang terlindungi, seperti air perpipaan PDAM atau air kemasan yang memenuhi standar. Mengacu pada air minum aman merupakan Air minum aman biasanya berasal dari sumber air yang terlindungi, seperti air perpipaan PDAM, maka tabel berikut ini akan menjelaskan uraian capaian akses air minum aman di Kota Prabumulih.

Tabel 2.81 Rumah Kota dengan Akses Air Minum Aman Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum aman	%	14,67	16,65	10,75	10,30	n/a

Sumber : Dinas PUPR Kota Prabumulih

Secara umum lebih dari 95% rumah tangga di Kota Prabumulih sudah memiliki akses air minum layak, namun hanya sekitar belasan persen saja yang memiliki akses air minum aman seperti pada uraian pada tabel diatas. Kurangnya sarana prasarana pengembangan air minum seperti jaringan perpipaan yang rusak,

bocor karena usia jaringan perpipaan yang sudah tua inilah menjadi salah satu penyebab masih rendahnya capaian Rumah Tangga dengan akses air minum aman.

6. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.82 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2024
1	Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Kabupaten/Kota	Jumlah Yang Harus Dilayani	100%
		Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	100%
		Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	100%
		Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	0
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik Kabupaten/Kota	Jumlah Yang Harus Dilayani	100%
		Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	100%
		Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	100%
		Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	100%

Sumber : Dinas PUPR Kota Prabumulih

Permasalahan dalam penerapan pelaksanaan SPM pada Bidang Pekerjaan Umum adalah dalam pelaksanaan kegiatan masih minimnya kebutuhan sarana dan prasarana serta SDM.

d. Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.83 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2024
1	Renovasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	29 rumah yang rusak akibat bencana alam	100%
2	Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah	Tidak ada masyarakat yang direlokasi program pemerintah	0

Sumber : Dinas Perkim Kota Prabumulih

Permasalahan dalam penerapan pelaksanaan SPM pada Bidang Perumahan Rakyat adalah :

- Sebagian rumah terdampak bencana alam tidak dihuni oleh pemilik
- Dikarenakan bencana alam tidak dapat diprediksi sehingga perhitungan kebutuhan dan penganggaran sulit dilaksanakan.
- Prosedur pelaksanaan renovasi rumah membutuhkan waktu yang lama.

2. Rumah Layak Huni Terjangkau Berkelanjutan

Rumah layak huni bagi rumah tangga berarti memenuhi kriteria seperti kecukupan luas, ketahanan bangunan, akses air minum dan sanitasi layak. Rumah juga harus terjangkau dan berkelanjutan, yaitu tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tapi juga menjaga kualitas lingkungan dan sumber daya untuk masa depan.

Rumah Layak Huni:

- **Luas yang Memadai:** Minimal 7,2 m2 per kapita.
- **Ketahanan Bangunan:** Atap, dinding, dan lantai yang kuat dan tahan lama.
- **Akses Air Minum:** Kemudahan mendapatkan air bersih yang layak dikonsumsi.
- **Akses Sanitasi:** Tersedia fasilitas sanitasi yang layak dan aman.

Rumah Terjangkau:

Biaya rumah dan biaya terkait lainnya (seperti biaya pemeliharaan dan utilitas) harus sesuai dengan kemampuan ekonomi rumah tangga (rumah tangga yang biaya huniannya (sewa atau cicilan rumah) tidak lebih dari 30% dari total pendapatan kotor rumah tangga).

Rumah Berkelanjutan:

- Penggunaan sumber daya yang efisien dan ramah lingkungan (misalnya, penggunaan energi terbarukan, material daur ulang).

- Desain yang memperhitungkan dampak lingkungan (misalnya, ventilasi alami, penyerapan air hujan).

Tabel 2.84 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Prabumulih Tahun 2019- 2023

No	Indiaktor		Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Ketahanan Bangunan	Atap Layak	%	99.29	92.26	87.22	86.5	99.85
		Dinding permanen	%	99.84	99.87	100	99.55	99.8
		Lantai Bukan Tanah	%	99.64	98.95	99.71	99.89	99.99
2	Luas tempat tinggal	≥ 7,2 m²	%		69.04	74.25	77.43	
3	Akses air minum layak		%	95.82	96.4	93.77	98.42	95.69
4	Akses sanitasi layak		%	91.91	91.23	95.2	97.61	96.44
5	Kepemilikan Rumah	Milik Sendiri	%	73,04	72,45	72,22	84.59	84.36
		Sewa	%	15,20	13,50	12,44	7,98	8,47

Sumber : Dinas Perkim Kota Prabumulih

Capaian akses perumahan dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023 terhadap hunian layak sudah cukup baik rata-rata capaiannya sudah diatas 95%, begitu juga rumah tangga dengan akses terjangkau di Kota Prabumulih rata-rata sudah memiliki rumah sendiri. Beda dengan rumah tangga dengan akses berkelanjutan, sampai saat ini ter-cover capaiannya rumah tangga dengan akses berkelanjutan.

e. Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

1. Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan

Persentase Perda/Perkada yang ditegakkan mengacu pada Jumlah Perda atau Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan terhadap Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi.

Tabel 2.85 Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Perda atau Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	Perda atau Perkada	3	4	4	8	8
Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	Perda atau Perkada	10	11	4	8	8
Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	30,00	36,36	100	100	100

Sumber : Satpol PP Kota Prabumulih

Ada peningkatan yang signifikan Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan di tiga tahun terakhir yaitu mencapai 100% dari tahun sebelumnya 30%. Peningkatan ini menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda ataupun Perkada yang yaitu sebesar 100%.

2. Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang sering terjadi di Kota Prabumulih diantaranya pencurian, anak- anak yang sering balapan liar di jalanan, pemerasan. Selain itu, pelanggaran seperti pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang dilarang atau mengganggu lalu lintas juga sering

terjadi. Kondisi ini perlu penanganan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk aparaturnya seperti Satpol PP, aparat kelurahan, dan masyarakat. Penanganan ini bertujuan tidak lain untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menciptakan ketertiban umum, dan menjaga ketenteraman masyarakat.

Tabel 2.86 Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan	pelanggaran K3	116	201	138	63	46
Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan	pelanggaran K3	290	443	138	63	46
Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	40,00	48,37	100	100	100

Sumber : Satpol PP Kota Prabumulih

Walaupun di awal-awal tahun periode persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum hanya mencapai 40-an persen, namun menjelang akhir periode lima tahunan ini mampu meningkat menjadi 100%, artinya seluruh gangguan yang terjadi telah berhasil ditangani dan diselesaikan.

3. Cakupan Perlindungan Masyarakat

Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan tugas yang berasal dari masyarakat, dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bencana alam maupun gangguan ketertiban umum.

Tabel 2.87 Cakupan Perlindungan Masyarakat Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah petugas Linmas	orang	370	370	370	370	370
Jumlah Wilayah Kerja di Kota Prabumulih	wilayah	37	37	37	37	37
Cakupan Perlindungan Masyarakat	Satlinmas/ Wilayah Kerja	10	10	10	10	10

Sumber : Satpol PP Kota Prabumulih

Cakupan Perlindungan Masyarakat setiap tahun di Kota Prabumulih adalah 10 Satlinmas/ Wilayah Kerja artinya setiap wilayah kerja, baik itu desa maupun kecamatan bertugas atau terdapat 10 petugas Linmas.

4. Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya

Peningkatan kompetensi PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan profesional. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai cara, diantaranya pendidikan dan pelatihan.

Tabel 2.88 Persentase PPNS Kompetensinya Kota Prabumulih yang Ditingkatkan Tahun 2020- 2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti pelatihan dan pembinaan PPNS	orang	0	0	0	0	0
Jumlah seluruh anggota Satpol PP	orang	172	156	153	150	135
Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Satpol PP Kota Prabumulih

Dari seluruh anggota Satpol PP yang ada di Kota Prabumulih semuanya belum ada yang mengikuti pelatihan dan pembinaan PPNS, sehingga belum capaian terkait persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya.

5. Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana

Salah satu layanan yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana dengan tujuan untuk lebih memahami berbagai ancaman bencana yang ada seperti bagaimana cara mengurangi ancaman (*hazards*) dan kerentanan (*vulnerability*) yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan (*capacity*) dalam menghadapi ancaman/dampak bencana.

Tabel 2.89 Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	-	100	100	100	100

Sumber : BPBD Kota Prabumulih

Setiap tahunnya persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana di Kota Prabumulih 100%, menunjukkan bahwa semua masyarakat Prabumulih telah menerima informasi dan edukasi mengenai risiko bencana, artinya mereka lebih siap dan tanggap terhadap potensi bahaya akibat bencana.

6. Persentase Penanganan Pasca Bencana

Persentase penanganan pasca bencana menunjukkan seberapa besar wilayah yang telah pulih setelah bencana. Ini mencakup pemulihan sarana dan prasarana yang rusak, serta pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak.

Tabel 2.90 Persentase Penanganan Pasca Bencana Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	-	100	100	100	100

Sumber : BPBD Kota Prabumulih

Persentase penanganan pasca bencana sudah mencapai 100%, ini menunjukkan bahwa semua aspek penanganan, termasuk pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi, telah berhasil diselesaikan, Ini juga bisa berarti bahwa kondisi masyarakat dan lingkungan yang terkena bencana telah kembali ke keadaan normal, atau mendekati normal.

7. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.91 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2024
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (Trantibum)	Jumlah yang harus dilayan	100%
		Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan Perda dan Perkada	100%
		Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan Perda dan Perkada	100%
		Standar penegakan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan Perda dan Perkada PNS yang tealh lulus diklat dasar Satpol PP dan Satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM	100%
		Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	100%
		Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	100%
		Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	100%
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)	Pemetaan terhadap lokasi / daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen kajian resiko bencana	100%
		Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	100%
		Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	0
		Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	0
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kebencanaan)	Sarana prasarana penaggulangan bencana	100%
		Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	0
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Kebencanaan)	Aktifasi sistem komando penanganan darurat bencana	100%
		Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	100%
		Melakukan respon cepat darurat bencana	100%
		Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonis prioritas	0
		Pelaksanaan pencarian, pertolongann evakuasi korban bencana	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2024
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban (Damkar)	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	85,71%
		Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	100%
		Sarana dan prasarana pemadam kebakaran	100%
		Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan /sumber daya manusia	66,37%
		Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	100%
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	100%

Sumber : BPBD Kota Prabumulih

Permasalahan dalam penerapan pelaksanaan SPM pada Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah masih kurangnya kebutuhan jumlah SDM yang handal dan ketersediaan anggaran untuk penyediaan alat pendukung.

f. Bidang Sosial

1. PKMS yang memperoleh bantuan sosial

Yang termasuk sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa permasalahan permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ ketertinggalan, dan bencana alam maupun bencana sosial. PMKS yang memperoleh bantuan adalah proporsi jumlah PMKS yang memperoleh bantuan terhadap jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan.

Tabel 2.92 PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial	orang	19	18	95	105	207
2	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	orang	19	18	95	105	207
3	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial- Kota Prabumulih

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam kurun waktu 2019-2023 sudah mencapai 100%, artinya bantuan sosial sudah mampu meng-cover seluruh PMKS yang ada di Kota Prabumulih. PMKS yang memperoleh bantuan sosial ini dari kelompok

disabilitas yang memperoleh bantuan kaki palsu, alat bantu dengar dan tongkat, dan dari kelompok anak terlantar yang sudah di rawat panti memperoleh bantuan berupa Sembako. Informasi lain yang dapat diperoleh dari tabel diatas yaitu bahwa jumlah PMKS di Kota Prabumulih cenderung menunjukkan peningkatan, di Tahun 2019 ada sebanyak 19 orang lalu di Tahun 2023 menjadi 207 orang, dengan rata-rata kenaikan sekitar 135,2%. Hal ini mengindikasikan banyaknya masalah kesejahteraan sosial. Masalah ini menjadi tanggung jawab pemerintah melalui dinas-dinas terkait.

2. Cakupan Anak Terlantar yang Dibina

Sebagaimana yang tertera dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Oleh karena itu, seluruh anak terlantar yang ada di Kota Prabumulih menjadi tanggungan dari pemerintah Kota Prabumulih melalui dinas terkait.

Tabel 2.93 Anak Terlantar yang Dibina Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah anak terlantar yang dibina	orang	n/a	n/a	n/a	n/a	1
2	Jumlah anak terlantar	orang	n/a	n/a	n/a	n/a	1
3	Cakupan anak terlantar yang dibina	%					100

Sumber : Dinas Sosial- Kota Prabumulih

Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Di Tahun 2023, terdapat satu orang anak terlantar yang telah dibina sehingga cakupannya 100%, bentuk pembinaannya adalah anak tersebut dirawat di rumah singgah.

3. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

Tabel 2.94 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2024
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti sosial	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti sosial	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%

Sumber : Dinas Sosial- Kota Prabumulih

Permasalahan dalam penerapan pelaksanaan SPM pada Bidang sosial adalah Kurangnya SDM ASN dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan SPM sehingga kurang adanya tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

2.4.4.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Bidang Tenaga Kerja

1. Rencana Tenaga Kerja Daerah

RTKD (Rencana Tenaga Kerja Daerah) adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mengelola kebutuhan tenaga kerja di suatu wilayah. Dokumen ini bertujuan untuk memastikan adanya tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. RTKD biasanya berisi tentang Analisis kondisi ketenagakerjaan di daerah, Perkiraan persediaan dan kebutuhan tenaga kerja serta berisi tentang Kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan. Mengacu pada kondisi tersebut maka capaian terkait informasi tentang RTKD adalah Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja.

2. Persentase Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi

Yang dimaksud dengan Sertifikat kompetensi ini biasanya diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi setelah seseorang telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) atau standar khusus lainnya. Sertifikat ini membuktikan bahwa tenaga kerja tersebut telah memiliki keterampilan dan pengetahuan tertentu yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.

Tabel 2.95 Persentase Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah tenaga kerja yang telah memiliki sertifikat kompetensi	orang	107	127	144	162	192
2	Total jumlah tenaga kerja	orang	550	550	550	550	550
3	Cakupan Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi	%	19.45	23.14	26.23	29.48	34.93

Sumber : Dinas Tenaga Kerja - Kota Prabumulih

Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi di Kota Prabumulih Tahun 2024 adalah 34,93%, ini berarti sekitar 34,93% dari total tenaga kerja di Kota Prabumulih telah memiliki sertifikat kompetensi. Walaupun masih cakupan ini masih rendah, namun bila dilihat tiap tahunnya capaian ini selalu meningkat,

ini berarti menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di Kota Prabumulih.

3. Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan

Pencari kerja terdaftar adalah orang yang sedang mencari pekerjaan dan mendaftar di dinas tenaga kerja, agar dinas tenaga kerja mengetahui jumlah dan data pencari kerja untuk difasilitasi penempatan kerja. Persentase Pencari Kerja terdaftar yang Ditempatkan terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.96 Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	orang	0	112	827	523	659
2	Jumlah Pencari kerja terdaftar	orang	172	581	1127	765	986
3	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	%	0	19.28	73.38	68.37	66.84

Sumber : BPS – Prov Sumsel

Dari tabel diatas terlihat bahwa Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan cenderung fluktuatif karena besar kecilnya persentase tergantung pada banyaknya pendaftar dan seberapa banyak dapat menempatkan. Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada Tahun 2024 sebesar 66,84% menunjukkan bahwa lebih dari 2/3 dari pencari kerja yang terdaftar berhasil mendapatkan pekerjaan. Capaian Ini juga menunjukkan keberhasilan upaya penempatan kerja dan kesesuaian antara kebutuhan pasar kerja dengan kualifikasi pencari kerja.

4. Tingkat produktivitas tenaga kerja

Produktivitas tenaga kerja merupakan ukuran kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan output atau produk dalam satuan waktu tertentu atau bisa didefinisikan sebagai perbandingan antara hasil yang diperoleh (output) dengan jumlah sumber kerja yang dipergunakan (input). Produktivitas kerja dikatakan tinggi jika hasil yang diperoleh lebih besar dari pada sumber kerja yang dipergunakan, sebaliknya produktivitas kerja dikatakan rendah, jika hasil yang diperoleh lebih kecil dari sumber kerja yang dipergunakan. Semakin tinggi tingkat produktivitas, semakin efisien dan efektif tenaga kerja dalam menghasilkan barang atau jasa.

Tabel 2.97 Produktivitas Tenaga Kerja Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB ADHK	Milyar Rp	7867.32	8345.93	9201.5	9834.13	10533.23
2	Jam agregat	jam	187227040	192291840	202993440	195357760	204984000
3	Produktivitas Tenaga Kerja	Rp per jam kerja	42.020,21	43.402,41	45.329,05	50.339,08	51.385,62

Sumber : BPS, Hasil Analisis Bappeda Kota Prabumulih

5. **Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan**

Pengertian hubungan industrial berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) adalah suatu sistem hubungan yang berbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 103 UU Ketenagakerjaan mengatur bentuk-bentuk sarana hubungan industrial adalah:

- 1. Serikat pekerja/serikat buruh
- 2. Organisasi pengusaha
- 3. Lembaga kerja sama bipartit
- 4. Lembaga kerja sama tripartit
- 5. Perjanjian kerja bersama
- 6. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
- 7. Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Berdasarkan pada Pasal 106 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

- Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk LKS Bipartit.
- Lembaga Kerjasama Bipartit tersebut berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan
- Susunan keanggotaan LKS Bipartit terdiri dari Unsur Pengusaha, Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang ditunjuk oleh pekerja/buruh secara demokratis untuk mewakili kepentingan pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.

Dengan adanya ketentuan diatas, maka hanya perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja saja yang dihitung dalam indikator ini. Indikator ini untuk mengukur seberapa besar persentase perusahaan yang telah mempunyai sarana hubungan industrial untuk menjamin kesejahteraan tenaga kerjanya, gambarannya seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.98 Perusahaan yang Memenuhi Sarana Hubungan Industrial di Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial	perusahaan	3	2	8	4	16
2	Jumlah Perusahaan	perusahaan	18	4	31	24	63

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase Perusahaan yang Memenuhi Sarana Hubungan Industrial	%	16.67	50.00	25.81	16.67	25.40

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Prabumulih

Persentase Perusahaan yang Memenuhi Sarana Hubungan Industrial sebesar 25,40% di Tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 1/4 perusahaan saja yang memenuhi standar atau persyaratan yang diperlukan terkait dengan hubungan industrial. Ini berarti bahwa mayoritas perusahaan belum sepenuhnya menerapkan praktik hubungan industrial yang baik, yang mencakup aspek seperti dialog sosial, penyelesaian perselisihan, dan partisipasi pekerja dalam pengambilan keputusan.

b. Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1. Anggaran Responsif Gender (ARG)

ARG adalah pendekatan penganggaran yang mempertimbangkan perbedaan kebutuhan dan prioritas antara perempuan dan laki-laki dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, serta memastikan bahwa APBD mengakomodasi kebutuhan dan prioritas gender.

Tabel 2.99 Anggaran Responsif Gender di Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ARG Daerah	%	1,7	1,7	1,8	1,9	1,9

Sumber : DPPKBPPPA - Kota Prabumulih

Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dari Tahun 2020 sampai 2024 baru sebesar 1,7–1,9%, ini menunjukkan bahwa anggaran daerah yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas gender masih relatif rendah. Angka ini mengindikasikan bahwa upaya pengarusutamaan gender dalam perencanaan anggaran daerah masih perlu ditingkatkan.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

TPAK perempuan menggambarkan besarnya pasokan tenaga kerja perempuan yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK perempuan identik dengan kesamaan peluang antara kaum laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan akses yang adil terhadap sumber ekonomi utama yaitu lapangan pekerjaan. Berikut ini perbandingan TPAK laki-laki dengan TPAK perempuan selama Tahun 2020 sampai 2024.

Tabel 2.100 TPAK Laki-Laki dan Perempuan Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Laki-Laki	82,44	79,76	84,02	82,52	82,64
2	Perempuan	56,41	59,09	59,50	54,70	58,38

Sumber : BPS Sumatera Selatan

Tabel diatas menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan selalu berada pada kisaran 50% untuk 5 tahun terakhir, jauh di bawah partisipasi laki-laki yang sebesar 80%. TPAK perempuan umumnya memang lebih rendah dibandingkan TPAK laki-laki, cenderung stagnan di sekitar 50-60%, kondisi ini dipengaruhi karena pekerja perempuan lebih banyak melakukan pekerjaan yang sifatnya informal.

3. Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum

Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum bervariasi, namun umumnya mencakup berbagai jenis kekerasan, seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan seksual, dan kekerasan berbasis gender lainnya. Layanan bantuan hukum ini bisa berupa perlindungan sementara atau berdasarkan penetapan pengadilan, pelayanan kesehatan, dan bantuan hukum lainnya.

Layanan bantuan hukum sangat penting untuk melindungi korban kekerasan, memberikan mereka akses ke keadilan, dan membantu mereka untuk pulih dari trauma yang dialami.

Tabel 2.101 Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum	orang	6	20	2	7	10
2	Jumlah seluruh perempuan korban kekerasan	orang	8	30	2	9	14
3	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum	%	75	66.67	100.00	77.78	71.43

Sumber : BPS Sumatera Selatan

Selain di Tahun 2022 yang capaiannya 100%, di tahun lainnya seperti di tahun 2024 Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum sebesar 71,43% menunjukkan bahwa sebagian besar korban kekerasan sudah mendapatkan akses ke bantuan hukum, artinya sekitar 71,43% dari perempuan yang menjadi korban kekerasan berhasil mengakses layanan hukum yang dibutuhkan untuk melindungi hak-hak mereka dan mendapatkan keadilan.

- 4. Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif**
- Anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif adalah anak yang menerima bantuan menyeluruh untuk mengatasi trauma dan pemulihan, termasuk pendampingan psikologis, pendampingan hukum, dan layanan medis serta sosial. Layanan komprehensif ini bertujuan untuk memastikan korban kekerasan dapat memperoleh keadilan dan pulih kembali ke masyarakat.

Tabel 2.102 Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Kota Prabumulih Tahun 2020- 2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	jumlah anak korban kekerasan yang tertangani	orang	9	20	8	17	8
2	Jumlah seluruh anak korban kekerasan	orang	13	36	12	20	13
3	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	69.23	55.56	66.67	85.00	61.54

Sumber : BPS Sumatera Selatan

Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif tertinggi dicapai di Tahun 2024 sebesar 85%, ini berarti dari setiap 100 anak yang dilaporkan mengalami kekerasan, 85 di antaranya mendapatkan bantuan yang komprehensif.

5. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks Perlindungan Anak merupakan alat ukur untuk mengetahui sejauh mana capaian pemerintah dalam memberikan perlindungan pada anak. Di Tahun 2024, capaian Indeks Perlindungan Anak Kota Prabumulih sebesar 67,17. Angka 67,17 ini menunjukkan bahwa perlindungan anak di Kota Prabumulih masih belum mencapai tingkat yang optimal, karena masih ditemukan kasus kekerasan terhadap anak.

6. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) atau iBangga adalah indikator yang mengukur kualitas pembangunan keluarga berdasarkan berbagai aspek penting dalam kehidupan rumah tangga. Indeks ini dikembangkan oleh BKKBN sejak Tahun 2020 untuk mengevaluasi sejauh mana keluarga di Indonesia memiliki ketahanan yang baik dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Indeks ini bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana keluarga telah mencapai kondisi sejahtera, mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, serta memiliki pola pengasuhan yang baik bagi anak-anak dan anggota keluarga lainnya. iBangga diukur berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu Ketenteraman, Kemandirian, dan Kebahagiaan. Skala pengukuran menggunakan nilai 0 hingga 100, dengan semakin tinggi nilai indeks menunjukkan kondisi keluarga yang semakin baik. Indeks Pembangunan Keluarga berperan

penting dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat secara luas karena keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang berperan dalam menciptakan generasi yang berkualitas. Adapun capaian Indeks Pembangunan Keluarga Kota Prabumulih Tahun 2024 adalah 64,10. Angka 64,10 ini menunjukkan bahwa keluarga-keluarga di Kota Prabumulih telah mencapai beberapa kemajuan dalam pembangunan keluarga, namun perlu terus didukung agar dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi dan berkualitas.

7. Kota Layak Anak (KLA)

Kota Layak Anak merupakan kota yang memiliki sistem pembangunan yang berfokus pada pemenuhan hak anak, yang diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat. Diketahui bahwa setiap anak memiliki hak yang harus dipenuhi, diantaranya hak untuk dijamin, dilindungi, dipenuhi oleh orang tua, keluarga dan masyarakat.

Adapun bentuk perwujudannya dapat berupa penyediaan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi yang sehat, penyediaan kebijakan dan anggaran khusus untuk anak, penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman, memberikan perhatian khusus pada anak yang bekerja di jalan, mengalami eksploitasi seksual, hidup dengan kecacatan serta memberikan wadah bagi anak-anak untuk berperan serta dalam pembuatan keputusan.

Pada Tahun 2023, Kota Prabumulih telah meraih Predikat Pratama (tingkat dasar) untuk Kategori KLA, Predikat Pratama ini menunjukkan bahwa Kota Prabumulih merupakan kota yang memenuhi kriteria untuk menjadi kota ramah anak.

Penilaian tersebut dilihat dari bagaimana anak-anak yang mendapati kasus kekerasan anak terlayani dengan baik.

c. Bidang Pangan

1. Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan

Pangan segar asal tumbuhan (PSAT) adalah pangan yang berasal dari tumbuhan dan dapat dikonsumsi langsung atau menjadi bahan baku pangan olahan.

Pengujian mutu keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dilakukan dengan pengambilan sampel sayuran maupun buah-buahan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui residu pestisida pada Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dengan menggunakan Bioeasy Pestisida Residu Rapi Test Kit.

Pengujian dengan alat tersebut merupakan cara mudah untuk mendeteksi apakah terdapat zat membahayakan pada tanaman sayuran seperti zat pestisida yang sering digunakan petani untuk mengusir hama daun pada tanaman sayuran. Setelah di lakukan pengujian kita bisa mengetahui apakah sayuran atau buah-buahan tersebut terdapat cemaran atau layak untuk di konsumsi. Jika hasil tes residu pestisida secara keseluruhan didapat hasil negatif maka pangan aman dikonsumsi dan bebas bahan kimia yang berbahaya.

Di Prabumulih, di Tahun 2024 pemerintah setempat telah melakukan pengawasan keamanan pangan terhadap PSAT yang beredar di pasar dan capaiannya sebesar 78,56%, ini menunjukkan bahwa sebagian besar hasil panen tumbuhan tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan.

2. Cadangan Pangan Pemerintah

Cadangan pangan pemerintah adalah persediaan pangan pokok yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Cadangan ini berfungsi untuk menjamin stabilitas harga, mendukung peningkatan ekonomi petani, dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan, atau keadaan darurat. Berikut rekapitulasi persediaan beras cadangan pangan pemerintah daerah kota prabumulih dari tahun Tahun 2020 s.d 2024.

Tabel 2.103 Cadangan Pangan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cadangan Pangan Pemerintah	ton	32,244	32,244	32,244	12,264	15,472

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan- Kota Prabumulih

Tahun 2024, cadangan pangan Kota Prabumulih sebesar 15,472 ton karena adanya penyaluran beras cadangan pangan pemerintah daerah untuk masyarakat miskin sebesar 5 ton, beras tersebut disalurkan kepada kelurahan dan desa di se-Kecamatan Prabumulih Barat. Peraturan dari Badan Pangan Nasional menyatakan bahwa kabupaten/kota harus memiliki cadangan pangan minimal 7,8 ton. Berdasarkan kondisi ini, dapat dikatakan bahwa cadangan pangan Kota Prabumulih masih cukup aman.

3. Skor Pola Pangan Harapan

- Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Skor PPH mencerminkan kualitas konsumsi pangan, yaitu seberapa beragam dan seimbang komposisi makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Skor PPH memiliki skala maksimal 100. PPH dengan skor 100 menunjukkan pola

konsumsi pangan yang ideal, sedangkan semakin rendah skornya, semakin tidak beragam dan seimbang pola konsumsi pangan.

Tabel 2.104 Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Nilai	83,88	82,9	85,20	93,1	89,2

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan- Kota Prabumulih

Berdasarkan uraian tabel diatas tingkat kecukupan gizi konsumsi energi terjadi penurunan pada Tahun 2024 sebesar 4 poin, menjadi 89,2, skor ini sudah menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan di Kota Prabumulih sudah baik. Adapun penurunan skor ini dibandingkan tahun sebelumnya dipengaruhi beberapa faktor antara lain menurunnya tren konsumsi pangan, gaya hidup, selera, tingkat pendapatan.

• **Pola Pangan Harapan(PPH) Ketersediaan**

Skor PPH ketersediaan adalah indikator yang digunakan untuk menilai kualitas ketersediaan pangan di suatu wilayah, dengan mempertimbangkan jumlah dan komposisi sembilan kelompok pangan utama yang dikonsumsi. Skor ini mengukur sejauh mana ketersediaan pangan dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Nilai skor PPH ketersediaan berkisar antara 0 hingga 100, dengan skor 100 menunjukkan ketersediaan pangan yang ideal. Semakin tinggi skor PPH, semakin beragam dan seimbang ketersediaan pangan.

Tabel 2.105 Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	Nilai	95,50	95,50	94,8	94,03	94,59

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan- Kota Prabumulih

Dalam lima tahun terakhir Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (PPHK) Kota Prabumulih diatas 95. Skor diatas 95 ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Kota Prabumulih memiliki kualitas yang baik dalam memenuhi kebutuhan gizi. Angka ini mengindikasikan bahwa komposisi sembilan kelompok pangan utama yang dikonsumsi sudah cukup beragam dan seimbang sehingga masyarakat di Kota Prabumulih memiliki akses ke berbagai jenis pangan yang beragam dan seimbang.

4. Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan

Kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) dijelaskan melalui pembagian/pengelompokkan desa/ wilayah kedalam 6 prioritas.

- Prioritas 1tingkat rentan pangan tinggi
- Prioritas 2 rentan pangan sedang
- Prioritas 3 rentan pangan rendah
- Prioritas 4 tahan pangan rendah
- Prioritas 5 tahan pangan sedang
- Prioritas 6 tahan pangan tinggi.

Dari 37 desa/kelurahan yang ada di Kota Prabumulih didapatkan 0 desa/kelurahan (Prioritas 1), 0 desa/kelurahan (Prioritas 2), 0 desa/kelurahan (Prioritas 3), 15 desa (Prioritas 4), 18 desa/kelurahan (Prioritas 5) dan 4 desa/kelurahan (Prioritas 6), kemudian Dari 37 desa/kelurahan tersebut semuanya termasuk dalam kategori tahan pangan.

d. Bidang Lingkungan Hidup

1. Kelompok masyarakat peduli/pemerhati lingkungan

Kelompok masyarakat peduli/pemerhati lingkungan, juga dikenal sebagai komunitas peduli lingkungan, adalah kelompok yang aktif dalam menjaga kelestarian alam dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan. Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan seperti edukasi, pengelolaan sampah, penghijauan, dan kampanye lingkungan. Saat ini, kelompok masyarakat yang peduli dan memerhati lingkungan di Kota Prabumulih adalah DPC Paskas, kelompok ini telah menggelar aksi peduli lingkungan dengan tema "Cintai Bumi, Lestari Alamku *Let's Go Green*". Aksi ini termasuk penanaman pohon dan kegiatan lainnya yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian alam.

2. Pengelolaan sampah

Pengelolaan sampah adalah serangkaian kegiatan sistematis yang terdiri dari Pengurangan (*Reduce*), Penggunaan Kembali (*Reuse*), Daur Ulang (*Recycle*) dan Penanganan Sampah.

Tabel 2.106 Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
I	Volume timbulan sampah	ton	34,479.54	35,426.54	35,918.19	36,405.83	37,104.08
II	Pengurangan sampah	ton	5,701.65	8,009.83	9,246.94	6,944.36	7,813.15
	Persentase pengurangan sampah	%	16,54	22,59	25,74	19,07	21,06
III	Penanganan sampah	ton	24,820.00	23,517.69	22,995.00	24,382.00	23,907.50
	Persentase penanganan sampah	%	71,98	66,38	64,02	66,97	64,43
IV	sampah terkelola	ton	30,521.65	31,521.53	32,241.94	31,326.36	31,720.65
	Persentase sampah terkelola	%	88,52	88,98	89,76	86,05	85,49

Sumber : *sipsn.menlhk*

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, capaian pengelolaan sampah di Kota Prabumulih menunjukkan bahwa rata-rata volume sampah mencapai 35,866.83 ribu ton/tahun. Di Tahun 2024 penanganan sampah mencapai 23,9 ribu ton/tahun atau 64,43%. Sampah yang dikelola dengan optimal hanya mencapai 31,7 ribu ton/tahun atau 85,49% sedangkan sisanya, yaitu sekitar 14,51%, masih belum terkelola. Data tersebut membuktikan bahwa penanganan sampah di cenderung masih belum efektif. Selain itu, cakupan penanganan sampah setiap tahunnya cenderung menurun sebesar 64,43% dan cakupan pengurangan sampah baru mencapai 21,06%.

3. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang ditanami vegetasi, baik secara alami maupun sengaja ditanam, yang berfungsi sebagai ruang terbuka dalam suatu wilayah perkotaan. Standar ideal proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah kota adalah minimal 30%, ini terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. RTH dapat berupa taman, hutan kota, jalur hijau, atau area terbuka lainnya yang ditumbuhi tanaman. Beberapa contoh RTH di Prabumulih meliputi taman kota, taman di sekitar pemukiman, dan jalur hijau di jalan-jalan utama.

Tabel 2.107 Ruang Terbuka Hijau Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Luas RTH	Km ²	4,53844	4,72758	4,73758	5,17342	5.,7342
Luas Wilayah	Km ²	434,46	434,46	434,46	434,6	434.46
Persentase RTH	%	1,04	1,09	1,09	1,19	1,19

Sumber : sipsn.menlhk

Kota Prabumulih memiliki ruang terbuka hijau sebesar 5,7342 Km² (1,19%). Ruang terbuka hijau 1,19% berarti proporsi area hijau di Kota Prabumulih hanya sebesar 1,19% dari total luas wilayah Kota Prabumulih. Ini menunjukkan bahwa area yang ditutupi oleh vegetasi, seperti pohon, rumput, dan taman, sangat kecil dan jauh di bawah standar ideal yang seharusnya ada di sebuah kota.

e. Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

1. Cakupan Kepemilikan KTP

Cakupan kepemilikan KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) mengacu pada persentase warga negara yang telah memiliki KTP-el. Secara umum, KTP-el adalah dokumen identitas resmi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara yang telah berusia 17 tahun.

Tabel 2.108 Cakupan Kepemilikan KTP Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Kepemilikan KTP	%	97,6	98,89	95,70	91,70	97,35

Sumber : Disdukcapil-Kota Prabumulih

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari total penduduk yang wajib memiliki KTP-el, di Tahun 2024 sekitar 97,35% di antaranya telah berhasil mendapatkan KTP-el.

2. Cakupan kepemilikan KK

Tabel 2.109 Cakupan Kepemilikan KK Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Kepemilikan KK	%	75,9	79,48	86,48	90,9	98,97

Sumber : Disdukcapil-Kota Prabumulih

Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Tahun 2024 sebesar 98,97% berarti bahwa dari total penduduk di Kota Prabumulih, 98,97% di antaranya memiliki Kartu Keluarga. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga di Kota Prabumulih sudah memiliki KK sebagai dokumen resmi identitas keluarga.

3. Cakupan kepemilikan KIA

Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) mencakup seluruh anak di bawah usia 17 tahun. KIA berfungsi sebagai bukti identitas resmi bagi anak-anak.

Tabel 2.110 Cakupan Kepemilikan KIA Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Kepemilikan KIA	%	20,9	42,70	43,2	46,99	51,54

Sumber : Disdukcapil-Kota Prabumulih

Sampai dengan Tahun 2024 capaian persentase kepemilikan KIA terus meningkat, hingga mencapai 51,54% di Tahun 2024, namun masih dibawah target nasional 60%. Cakupan kepemilikan KIA sebesar 51,54% menunjukkan bahwa hanya 51,54% dari anak yang seharusnya memiliki KIA telah memilikinya.

4. Cakupan Kepemilikan Akta catatan Sipil

Cakupan kepemilikan akta catatan sipil adalah persentase penduduk yang memiliki dokumen resmi seperti akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, dan akta perceraian. Dokumen ini merupakan bukti sah atas peristiwa penting dalam kehidupan seseorang dan menjadi dasar administrasi kependudukan.

Tabel 2.111 Cakupan Kepemilikan Akta catatan Sipil Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Kepemilikan Akta catatan Sipil	%	95,94	97	99,14	99,80	98,60

Sumber : Disdukcapil-Kota Prabumulih

Cakupan kepemilikan akta catatan sipil sebesar 98,60% di Tahun 2024 berarti bahwa sekitar 98,60% dari Jumlah penduduk Kota Prabumulih telah memiliki akta catatan sipil seperti akta kelahiran, akta perkawinan, atau akta kematian, ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Prabumulih telah memiliki

dokumen penting yang mencatat peristiwa penting dalam kehidupan mereka dan telah diakui oleh negara.

5. Persentase PD yang dapat mengakses data dan informasi adminduk

Data kependudukan yang akurat dan terpercaya sangat penting untuk berbagai pelayanan publik dan pengambilan kebijakan pemerintah. Persentase perangkat daerah yang dapat mengakses data dan informasi administrasi kependudukan (adminduk) menunjukkan tingkat keterlibatan dan pemanfaatan data kependudukan oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi persentase, semakin luas pula cakupan penggunaan data kependudukan oleh perangkat daerah dalam berbagai kegiatan pemerintahan.

Tabel 2.112 Persentase PD yang dapat mengakses data dan informasi adminduk Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase PD yang dapat mengakses data dan informasi adminduk	%	26,6	26,6	26,6	26,6	43,24

Sumber : Disdukcapil-Kota Prabumulih

Persentase 43,24% berarti bahwa hanya 43,24% dari total perangkat daerah yang memiliki akses untuk melihat dan menggunakan data yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), sisanya, yaitu 56,76%, belum memiliki akses.

6. Indeks tertib administrasi kependudukan

Indeks Tertib Administrasi Kependudukan (ITAK) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana masyarakat telah melakukan administrasi kependudukan secara tertib. ITAK dihitung berdasarkan cakupan kepemilikan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA), kepemilikan akta catatan sipil, dan penggunaan data kependudukan oleh Pemerintah Daerah (PD).

Tabel 2.113 Indeks tertib administrasi kependudukan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks tertib administrasi kependudukan	Nilai	69,62	73,60	75,03	75,85	81,14

Sumber : Disdukcapil- Hasil Analisis Bappeda-Kota Prabumulih

Selama 5 tahun terakhir Indeks tertib administrasi kependudukan cenderung meningkat, seperti di Tahun 2024 yaitu sebesar 81,1%, ini menunjukkan bahwa secara umum, administrasi kependudukan di Kota Prabumulih sudah berjalan dengan baik dengan mayoritas penduduk memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan akurat, serta data tersebut dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah. Peningkatan ini karena adanya upaya perbaikan

diantaranya penyempurnaan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas pelayanan, memperpendek prosedur, mempercepat penyelesaian, dan menurunkan biaya.

f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Cakupan penyelenggaraan penataan desa yang difasilitasi

Penataan desa adalah tindakan pemerintah daerah untuk melakukan berbagai hal terkait wilayah desa, seperti pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa.

Difasilitasi berarti kegiatan tersebut dilakukan dengan bantuan atau dukungan dari pihak lain, bantuan tersebut bisa berupa bantuan teknis, pendanaan, atau dukungan administratif dalam proses penataan desa.

Jadi Cakupan penyelenggaraan penataan desa yang difasilitasi mengacu pada jumlah desa yang menerima bantuan atau fasilitasi dalam melakukan penataan wilayah, pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status desa, atau penyesuaian batas desa.

2. Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa

Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa mengacu pada peningkatan jumlah desa yang terlibat dalam kerja sama, peningkatan skala kerja sama, atau peningkatan kualitas kerja sama.

3. Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa yang difasilitasi

Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa yang difasilitasi adalah semua kegiatan administratif di tingkat desa yang mendapatkan bantuan atau dukungan dari pihak luar, seperti pemerintah daerah atau lembaga terkait, untuk memastikan kelancaran dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa mengacu pada Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya.

4. Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya

Cakupan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya berarti semua lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan bantuan dan dukungan untuk memperkuat peran serta dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ini mencakup berbagai lembaga seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak PKK, RT/RW,

Karang Taruna, dan lembaga adat. Cakupan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja lembaga kemasyarakatan dalam berbagai aspek, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta pelayanan masyarakat.

g. Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*)

Jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menghambat proses-proses pembangunan menuju tujuan yang ingin dicapai karena sumber daya pembangunan terserap untuk pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan manusia yang selalu bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan program keluarga berencana. Indikator utama keberhasilan pengendalian penduduk adalah Angka Kelahiran Total.

Angka Kelahiran Total, atau *Total Fertility Rate* (TFR) adalah jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya (biasanya antara usia 15-49 tahun). Melalui TFR ini dapat memproyeksikan jumlah penduduk di masa depan, meningkatkan program pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

Tabel 2.114 Angka Kelahiran Total Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kelahiran Total	Nilai	2,39	2,39	2,40	2,45	2,14

Sumber : DPPKBPPPA - Kota Prabumulih

TFR Kota Prabumulih berkisar 2,39 – 2,14, artinya penduduk perempuan Kota Prabumulih usia 15-49 tahun secara rata-rata mempunyai 2 anak selama masa usia suburnya. Kisaran TFR antara 2,39 – 2,14 termasuk tingkat kelahiran yang sedang. Kondisi ini tidak terlepas dari pelaksanaan program KB.

2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15- 19*)

Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19*) di Indonesia adalah banyaknya kelahiran per 1.000 perempuan pada kelompok usia 15-19 tahun. Angka ini merupakan indikator penting untuk memantau tren kelahiran pada usia muda dan dampaknya terhadap kesehatan ibu dan bayi.

Tabel 2.115 Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun	Nilai	0,57	22,71	36,62	19,05	16,09

Sumber : DPPKBPPPA - Kota Prabumulih

Periode Tahun 2021-2022 Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun Kota Prabumulih meningkat cukup signifikan dari 22,71 menjadi 36,62, karena adanya upaya meningkatkan akses informasi tentang kontrasepsi dan kesehatan reproduksi melalui sosialisasi yang dilakukan Perangkat Daerah terkait, maka di Tahun 2023 Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun menjadi 19,05 dan di Tahun 2024 turun lagi menjadi 16,09. Angka 16,09 berarti ada sekitar 16 bayi lahir dari setiap 1000 remaja perempuan dalam usia 15-19 Tahun.

3. **Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ *Modem Contraceptive* (mCPR)**

Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR) adalah indikator yang menunjukkan persentase wanita usia subur (15-49 tahun) yang menggunakan atau pasangannya menggunakan metode kontrasepsi modern.

Tabel 2.116 Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern	Nilai	77,6	86,48	60,68	68,66	67,14

Sumber : DPPKBPPPA - Kota Prabumulih

Walaupun capaian Angka prevalensi kontrasepsi modern cenderung berfluktuasi namun capaian 67,14 sudah cukup baik karena bila dilihat dari Tahun 2020 sampai saat ini menunjukkan bahwa hampir dua pertiga (67,14%) dari wanita usia subur di Kota Prabumulih menggunakan metode kontrasepsi modern. Angka ini juga mengindikasikan bahwa banyak wanita telah mengakses dan menggunakan metode kontrasepsi modern untuk perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi.

Pada awal periode 2020-2021 Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern mengalami peningkatan karena adanya kampanye KB intensif kemudian menurun karena terkait akses layanan kontrasepsi dan perubahan demografi yaitu perubahan usia rata-rata pernikahan sehingga memengaruhi jumlah wanita kawin usia subur yang berpotensi menggunakan kontrasepsi modern.

4. **Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (*Unmet Needs*)**

Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (*Unmet Needs*) adalah wanita usia subur yang berada pada usia 15-49 tahun yang sedang ingin mengontrol kehamilannya (menunda, menjarangkan, mengakhiri) tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi apapun, ataupun wanita yang sedang hamil tetapi kehamilannya tidak dikehendaki.

Tabel 2.117 Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi	%	10,25	13,51	24,38	12,54	10,36

Sumber : DPPKBPPPA - Kota Prabumulih

Di Tahun 2024 terjadi penurunan Persentase Kebutuhan Ber- KB yang menunjukkan bahwa ada sekitar 10,36% perempuan usia subur di Kota Prabumulih yang ingin mencegah kehamilan atau memiliki anak dengan jarak tertentu, tetapi tidak menggunakan kontrasepsi.

5. **Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga**
- Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk menghadapi dan mengelola masalah dalam situasi sulit, serta tetap menjaga fungsi keluarga tetap harmonis untuk mencapai kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin anggotanya. Secara umum, kelompok kegiatan ketahanan keluarga bertujuan untuk memperkuat keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan dan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Tabel 2.118 Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	keluarga	-	-	1576	4.616	6392
Jumlah seluruh Keluarga	keluarga	49.457	49.651	50.911	52.243	52.849
Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	%	-	-	3,10	8,84	12,09

Sumber : DPPKBPPPA - Kota Prabumulih

Ada peningkatan Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga dari Tahun 2022 hingga 2024, seperti di Tahun 2024 cakupannya sebesar 12,09% yang berarti bahwa hanya 12,09% dari jumlah keluarga yang terlibat dalam kegiatan ketahanan keluarga, ini juga menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari keluarga yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

h. Bidang Perhubungan

1. **Persentase Layanan angkutan darat**

Layanan angkutan darat adalah berbagai jenis transportasi yang menggunakan jalan atau rel untuk mengangkut penumpang atau barang.

Layanan angkutan darat meliputi segala bentuk transportasi yang menggunakan jalan untuk mengangkut penumpang atau barang, seperti sepeda, sepeda motor, mobil, bus, truk, kereta api, dan angkutan umum seperti mikrolet dan angkot. Selain itu, layanan ini juga mencakup pengiriman barang menggunakan truk, trailer, dan kereta api.

Persentase layanan angkutan darat adalah angka yang menunjukkan proporsi jumlah perjalanan atau kargo yang diangkut oleh angkutan darat dari total jumlah perjalanan atau kargo yang diangkut melalui semua jenis transportasi.

Tabel 2.119 Layanan Angkutan Darat Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Layanan angkutan darat	%	28	28	27	27	27

Sumber : Dishub - Kota Prabumulih

Persentase layanan angkutan darat 27% berarti bahwa 27% dari total layanan angkutan yang tersedia adalah angkutan darat. Angka ini bisa dikatakan masih rendah, mengingat bahwa semakin berkurangnya jumlah angkutan umum dan semakin mudahnya orang membeli kendaraan bermotor.

2. Persentase Rambu rambu Lalu Lintas yang terpenuhi

Rambu lalu lintas merupakan bagian dari sarana dan prasarana transportasi darat, lebih tepatnya sebagai prasarana. Rambu lalu lintas berfungsi sebagai alat peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.

Persentase rambu-rambu lalu lintas yang terpenuhi mengacu pada seberapa banyak rambu-rambu tersebut dapat dikenali dan dipatuhi oleh pengguna jalan. Semakin tinggi persentase, semakin efektif rambu-rambu dalam mengatur dan meningkatkan keselamatan lalu lintas.

Tabel 2.120 Rambu rambu Lalu Lintas yang terpenuhi Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rambu rambu Lalu Lintas yang terpenuhi	%	49,98	49,98	49,98	53,56	57,14

Sumber : Dishub - Kota Prabumulih

Berdasarkan data capaian tabel diatas menunjukkan bahwa ada sekitar 49-58% rambu-rambu di Kota Prabumulih dapat dikenali dan dipatuhi oleh pengguna jalan.

3. Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani

Dalam hal ini yang dimaksud dengan perlintasan kereta api yang ditangani adalah perlintasan yang dijaga yang ada petugas.

Tabel 2.121 Perlintasan Kereta Api yang Ditangani Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Perlintasan Kereta Api yang Ditangani yang ada di Prabumulih	titik perlintasan	7	7	7	7	7
Jumlah seluruh Perlintasan Kereta Api yang ada di Prabumulih	titik perlintasan	19	19	19	19	19
Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	%	36,84	36,84	36,84	36,84	36,84

Sumber : Dishub - Kota Prabumulih

Berdasarkan data capaian tabel diatas menunjukkan bahwa dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 tidak ada perubahan selalu sama, dari seluruh titik Perlintasan Kereta Api yang ada di Prabumulih baru ada 7 titik perlintasan yang ditangani atau baru sekitar 36,84%.

i. Bidang Komunikasi Dan Informatika

1. Cakupan koneksi Jaringan Internet Pada PD dan Kecamatan ,Kelurahan /Desa

Dalam hal ini yang dimaksud dengan perlintasan kereta api yang ditangani adalah perlintasan yang dijaga yang ada petugas.

Tabel 2.122 Cakupan koneksi Jaringan Internet Pada PD dan Kecamatan, Kelurahan /Desa di Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan koneksi Jaringan Internet Pada PD dan Kecamatan ,Kelurahan /Desa	%	90	99	99	99	99

Sumber : Diskominfo - Kota Prabumulih

Secara umum, Kota Prabumulih telah mengalami peningkatan signifikan dalam cakupan sinyal internet 4G/LTE di berbagai desa/kelurahan, namun masih ada beberapa wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau dengan sinyal yang kuat dan stabil.

2. Cakupan Publikasi informasi dan Teknologi informasi melalui media online dan media cetak

Media online, seperti website dan media sosial, menawarkan kecepatan dan interaktivitas yang lebih tinggi, memungkinkan penyebaran informasi yang cepat dan responsif terhadap perkembangan terkini. Media cetak, seperti koran dan majalah, memberikan ruang untuk analisis mendalam dan informasi yang lebih lengkap, namun dengan kecepatan publikasi yang lebih lambat.

Tabel 2.123 Cakupan Publikasi informasi dan Teknologi informasi melalui media online dan media cetak di Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Publikasi informasi dan Teknologi informasi melalui media online dan media cetak	%	90	99	99	99	99

Sumber : Diskominfo - Kota Prabumulih

Secara keseluruhan, Cakupan Publikasi informasi dan Teknologi informasi melalui media online dan media cetak di Kota Prabumulih sudah diatas 90%, artinya lebih dari 90% total informasi dan teknologi informasi yang dipublikasikan sudah diakses melalui kombinasi media online dan media cetak.

j. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

1. Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi

Volume usaha koperasi adalah nilai yang dihasilkan oleh badan usaha koperasi, yang dapat dihitung sebagai jumlah barang atau jasa yang terjual dalam jangka waktu tertentu. Volume usaha koperasi ini mengacu pada omzet atau pendapatan yang diperoleh koperasi dari kegiatan usahanya.

Tabel 2.124 Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi di Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Omzet koperasi	Juta Rp	5.159,16	4.655,53	6.132,83	6.443,20	n/a

Sumber : Diskop-UKM - Kota Prabumulih

Perkembangan volume usaha koperasi di Kota Prabumulih sangat bergantung nilai omzetnya. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel diatas, terjadi penurunan omzet sekitar 9.8% kemudian meningkat signifikan 31,7% di Tahun 2022 dan tetap meningkat 5,1% di Tahun 2023. Berfluktuasinya nilai omzet koperasi ini maka bisa dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan volume usaha koperasi tergolong sedang.

2. Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah indikator yang menunjukkan proporsi koperasi yang diawasi dan diperiksa dari total koperasi yang ada. Pengawasan koperasi dilakukan oleh pengawas koperasi, yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada pengurus koperasi. Pemeriksaan kesehatan koperasi juga dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Persentase ini penting karena menunjukkan seberapa efektif pemerintah atau badan pengawas dalam memastikan koperasi beroperasi sesuai dengan peraturan dan prinsip koperasi.

Tabel 2.125 Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi di Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah koperasi yang mendapatkan Pengawasan dan Pemeriksaan	unit	40	40	70	70	70
Jumlah seluruh koperasi	unit	176	181	183	186	187
Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	22,73	22,10	38,25	37,63	37,43

Sumber : Diskop-UKM - Kota Prabumulih

Dalam lima tahun terakhir, capaian tertinggi pengawasan dan pemeriksaan koperasi yaitu di Tahun 2022 sebesar 38,25% yang berarti bahwa dari total koperasi yang seharusnya diawasi dan diperiksa, hanya 38,25% yang telah

dilalui. Ini menunjukkan bahwa masih ada sekitar 61,75% koperasi yang belum diawasi dan diperiksa.

3. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam 3 tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggotanya. Koperasi aktif menunjukkan bahwa koperasi tersebut masih beroperasi dan aktif dalam memberikan pelayanan kepada anggotanya.

Tabel 2.126 Persentase Koperasi Aktif Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Koperasi Aktif	unit	64	69	71	74	75
Jumlah seluruh koperasi	unit	176	181	183	186	187
Persentase Koperasi Aktif	%	36,36	38,12	38,8	39,78	40,10

Sumber : Diskop-UKM - Kota Prabumulih

Cakupan koperasi aktif di Kota Prabumulih paling tinggi sekitar 40-an persen, tidak sampai setengah dari jumlah keseluruhan koperasi yang ada di Kota Prabumulih.

4. Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan

Secara umum, dukungan fasilitas pelatihan koperasi bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM koperasi, seperti pelatihan manajerial, pengelolaan keuangan, dan pemasaran digital.

Tabel 2.127 Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah koperasi yang mendapatkan Dukungan Fasilitas Pelatihan	unit					
Jumlah seluruh koperasi	unit	176	181	183	186	187
Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	%					

Sumber : Diskop-UKM - Kota Prabumulih

5. Persentase Usaha Kecil Bertransformasi dari Informal ke Formal

Usaha kecil informal umumnya beroperasi tanpa pendaftaran resmi, seringkali dengan skala kecil dan tanpa pemenuhan standar hukum yang ketat.

Transformasi usaha kecil dari informal ke formal adalah proses peningkatan skala dan formalisasi usaha, yang meliputi pendaftaran resmi, pemenuhan standar hukum, dan penggunaan teknologi serta manajemen modern. Transformasi ini memberikan berbagai manfaat, seperti akses ke pembiayaan yang lebih luas, peningkatan kredibilitas, dan potensi pertumbuhan yang lebih besar.

Tabel 2.128 Persentase Usaha Kecil Bertransformasi dari Informal ke Formal Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	unit					
Jumlah Usaha Kecil	unit			152	152	
Persentase Usaha Kecil Bertransformasi dari Informal ke Formal	%					

Sumber : Diskop-UKM - Kota Prabumulih

6. Persentase Pertumbuhan wirausaha baru berskala mikro

Pertumbuhan wirausaha baru berskala mikro merupakan bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan dukungan pemerintah dan berbagai program, diharapkan rasio kewirausahaan dapat terus meningkat dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, terutama di sektor UMKM.

Tabel 2.129 Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru Berskala Mikro Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pertumbuhan wirausaha baru berskala mikro	%					

Sumber : Diskop-UKM - Kota Prabumulih

7. Persentase penerbitan izin usaha Simpan Pinjam

Penerbitan izin usaha simpan pinjam (USP) untuk koperasi dilakukan melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko di lembaga pemerintah yang menangani urusan penanaman modal. Koperasi yang beroperasi sebagai koperasi simpan pinjam (KSP) juga memerlukan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tabel 2.130 Persentase penerbitan izin usaha Simpan Pinjam Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penerbitan izin usaha Simpan Pinjam	%					

Sumber : Diskop-UKM - Kota Prabumulih

k. Bidang Penanaman Modal

1. Persentase Pertumbuhan nilai investasi

Tabel 2.131 Persentase Pertumbuhan nilai investasi Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Investasi PMA	milyar Rp	16,037	23,819	175,2	30,374	17,927
	Tingkat Pertumbuhan	%		48,52	635,54	-82,66	-89,77
2	Nilai Investasi PMDN	milyar Rp	326,318	275,031	225,104	377,342	91,805
	Tingkat Pertumbuhan	%		-15,72	-18,15	54,14	-59,22

Sumber : DPMPTSP - Kota Prabumulih

Sepanjang kurun Tahun 2020 hingga 2022, nilai investasi PMA yang masuk ke Kota Prabumulih menunjukkan trend peningkatan. Namun mulai Tahun 2023 hingga 2024 mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 17,927

(milyar Rp) dengan perlambatan sebesar 89,77%, angka ini menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi di Tahun 2024 paling lambat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan nilai investasi PMA sehingga menyebabkan pertumbuhan yang melambat diakibatkan oleh pengerjaan proyek yang sudah selesai, dan tidak dipenuhinya kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Hal yang juga dialami untuk nilai investasi PMDN, setelah di tahun-tahun sebelumnya nilai investasi PMDN menunjukkan kecenderungan meningkat maka di Tahun 2024 ini mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 91,805 (milyar Rp), dengan perlambatan sebesar 59,22%, angka ini juga menunjukkan pertumbuhan investasi yang paling lambat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan nilai investasi disebabkan karena adanya beberapa perusahaan yang tidak melaporkan LKPM, kemudian ada perusahaan yang melapor tapi tidak ada kegiatan jadi realisasi investasinya nol serta karena ada pelaku usaha yang melapor tapi laporannya tidak disetujui oleh Kemenvest.

2. Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi

Tabel 2.132 Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Investor Luar Negeri	unit	4	4	3	9	10
2	Jumlah Investor Dalam Negeri	unit	16	31	24	62	119

Sumber : DPMPTSP - Kota Prabumulih

Jumlah investor baik dari luar negeri maupun dalam negeri di Prabumulih menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama investor dalam negeri, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 46,53% untuk investor luar negeri dan 80,36% untuk investor dalam negeri.

3. Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan

Pelaku usaha yang memperoleh izin usaha sesuai ketentuan adalah individu atau badan usaha yang telah mendapatkan izin resmi dari pemerintah atau lembaga terkait untuk menjalankan kegiatan usaha mereka. Izin usaha ini memastikan bahwa pelaku usaha telah memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga kegiatan usahanya dapat berjalan secara legal dan sah. Pentingnya indikator ini karena didasari untuk beberapa alasan, diantaranya:

- **Kepastian Hukum:** Menunjukkan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perizinan, yang penting untuk menciptakan lingkungan usaha yang legal dan teratur.

- **Pengendalian Bisnis:** Memungkinkan pemerintah untuk melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap aktivitas bisnis secara efektif.
- **Peningkatan Investasi:** Lingkungan usaha yang legal dan teratur dapat menarik investasi, karena investor lebih percaya dengan risiko hukum yang lebih rendah.
- **Peningkatan Pendapatan:** Pelaku usaha yang legal membayar pajak dan kontribusi lain kepada pemerintah, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan negara.

Tabel 2.133 Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pelaku Usaha yang telah memenuhi persyaratan izin yang berlaku	jumlah pelaku usaha	467	458	3.656	4.084	3.905
Jumlah total Pelaku Usaha yang seharusnya memiliki izin	jumlah pelaku usaha	467	458	3.656	4.084	3.905
Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	100	100

Sumber : DPMPTSP - Kota Prabumulih

Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan dari Tahun 2020 hingga 2024, capaiannya sudah 100%, artinya seluruh pelaku usaha di Kota Prabumulih telah memenuhi persyaratan dan mendapatkan izin usaha yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa semua usaha di Kota Prabumulih telah beroperasi secara legal dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha

Tabel 2.134 Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah permasalahan/hambatan yang diselesaikan	permasalahan					
Total jumlah permasalahan/ hambatan	permasalahan					
Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%					

Sumber : DPMPTSP - Kota Prabumulih

5. Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal

Pemanfaatan data dan informasi terkait penanaman modal sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, perencanaan ekonomi, dan pertumbuhan investasi. Data dan informasi ini digunakan untuk memahami tren investasi, mengidentifikasi peluang investasi baru, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan investasi.

Bagi pemerintah, pemanfaatan data dan informasi terkait penanaman modal digunakan untuk merumuskan kebijakan investasi, merencanakan pembangunan infrastruktur, dan menarik investor asing, kemudian bagi perusahaan untuk mengidentifikasi peluang investasi baru, melakukan analisis pasar, dan membuat keputusan investasi. Selanjutnya bagi investor sendiri untuk menganalisis risiko dan imbal hasil investasi, serta membandingkan peluang investasi yang tersedia.

Tabel 2.135 Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah data dan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan investasi	dokumen	11	20	10	6	4
jumlah total data dan informasi yang tersedia	dokumen	11	20	10	6	4
Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	100	100	100	100	100

Sumber : DPMPTSP - Kota Prabumulih

Selama lima tahun terakhir semua data dan informasi terkait investasi yang disediakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu (DPMPTSP) Kota Prabumulih telah dimanfaatkan oleh *stakeholder*, sehingga capaiannya 100%.

I. Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

1. Rasio Wirausaha Pemuda

Pemuda adalah individu yang berusia 16 hingga 30 tahun, selanjutnya wirausaha pemuda adalah pemuda yang memiliki jiwa Kewirausahaan dan menjalankan kewirausahaan.

Tabel 2.136 Rasio Wirausaha Pemuda Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pemuda yang berwirausaha	orang	4	5	6	7	9
Jumlah pemuda	orang	23.264	23.532	23.576	23.915	24.117
Rasio Wirausaha Pemuda	%	0,017	0,021	0,025	0,029	0,037

Sumber : DKOP, Hasil Analisis Bappeda - Kota Prabumulih

Dari Tahun 2020-2024, rasio wirausaha pemuda sekitar 0,017 hingga 0,037 orang yang menjadi wirausaha pemuda. Angka ini sangat rendah dan menunjukkan bahwa sebagian besar pemuda di Kota Prabumulih belum memilih jalur kewirausahaan sebagai pilihan karir mereka.

2. Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas

Persentase atlet yang masuk Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) menunjukkan proporsi atlet yang terpilih untuk mengikuti program pemusatan latihan intensif guna mempersiapkan diri menghadapi kompetisi olahraga internasional atau nasional yang lebih bergengsi. Semakin tinggi persentase

atlet yang masuk Pelatnas, biasanya menandakan semakin banyak atlet potensial yang memiliki peluang untuk meraih prestasi lebih tinggi.

Tabel 2.137 Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Atlet yang Masuk Pelatnas	orang	30	91	140	135	135
JuJumlah seluruh Atlet yang ada di Prabumulih	orang	80	150	164	150	150
Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	%	58,26	54,20	48,77	85,97	85,97

Sumber : DKOP, Hasil Analisis Bappeda - Kota Prabumulih

Secara rata-rata dari Tahun 2020-2024, persentase atlet Kota Prabumulih yang masuk Pelatnas yaitu 66,63% artinya lebih dari 2/3 atlet Kota Prabumulih terpilih untuk mengikuti program Pelatnas.

3. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan

Tingkat partisipasi masyarakat dalam Gerakan Pramuka merupakan bukti adanya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk membentuk generasi muda yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, dan memiliki kecakapan hidup. Partisipasi ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari dukungan finansial, partisipasi langsung dalam kegiatan kepramukaan, hingga peran sebagai relawan atau pengawas.

Tabel 2.138 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%					

Sumber : DKOP, Hasil Analisis Bappeda - Kota Prabumulih

m. Bidang Statistik

1. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Nilai indeks pembangunan statistik merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektoral secara keseluruhan, sehingga dapat diketahui sudah sejauh mana suatu wilayah atau daerah telah mencapai kemajuan dalam pembangunan statistik untuk menghasilkan data yang berkualitas dan relevan.

Statistik Sektoral merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) adalah suatu proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian

mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Tabel 2.139 Indeks Pembangunan Statistik Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Statistik	nilai	1,39	2,21			
Kategori		Kurang	Cukup			

Sumber : BPS- Kota Prabumulih

Di Tahun 2023, IPS Kota Prabumulih sebesar 1,39 berada kategori "Kurang", yang mengindikasikan bahwa pembangunan statistik di Kota Prabumulih sedang dalam tahap awal atau belum berkembang, kemudian di tahun 2024 IPS Kota Prabumulih meningkat menjadi 2,21, berada kategori "Cukup". nilai IPS 2,21 menunjukkan menunjukkan bahwa pembangunan statistik di daerah tersebut belum mencapai tingkat yang matang atau optimal karena masih dalam tahap pengembangan, namun sudah ada kemajuan yang terlihat.

n. Bidang Persandian

1. Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

Tingkat kesiapan pengamanan informasi Pemerintah Daerah adalah proses evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa informasi penting terlindungi dari ancaman dan sesuai dengan standar keamanan yang berlaku. Skala ini mengindikasikan tingkat kesiapan, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kesiapan yang lebih baik atau lebih siap dalam hal keamanan informasi.

Tabel 2.140 Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	-	1	1	3	4

Sumber : Diskominfo- Kota Prabumulih

Di Tahun 2021 dan 2022 Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Kota Prabumulih baru mencapai 1% yang artinya bahwa tingkat kesiapan penerapan pengamanan informasi di Pemerintah Kota Prabumulih masih berada pada tahap awal, kemudian meningkat menjadi 3% menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Prabumulih telah mulai membangun dan menerapkan beberapa elemen kunci dalam pengamanan informasi, namun masih dalam tahap awal dan perlu pengembangan lebih lanjut dan di Tahun 2024 meningkat lagi menjadi 4% mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Prabumulih telah memiliki sistem keamanan informasi yang cukup baik dan matang, dengan fokus pada perlindungan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi, serta pengelolaan risiko yang efektif dengan kata lain bahwa keamanan

informasi tidak hanya menjadi fokus pada tingkat teknis, tetapi juga pada tingkat kebijakan, organisasi, dan sumber daya manusia.

o. Bidang Kebudayaan

1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan

Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan memiliki peran penting karena menentukan keberhasilan dan keberlanjutan upaya pelestarian serta pengembangan budaya.

Adapun manfaat yang diterima masyarakat dengan terlibat dalam pengembangan kebudayaan diantaranya:

- Dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan menjaga keberlanjutan budaya lokal.
- Masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap budaya lokal, sehingga mendorong pelestarian budaya.

Bentuk partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan diantaranya:

- Masyarakat dapat terlibat dalam pengembangan desa wisata dengan menyediakan homestay, warung makan, atau menjadi pemandu wisata.
- Mereka juga dapat membantu melestarikan seni dan kerajinan tangan tradisional, atau ikut serta dalam kegiatan budaya seperti pertunjukan atau festival

2. Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan

Kesenian tradisional dikatakan dilestarikan dan dikembangkan melalui berbagai upaya yang bertujuan untuk menjaga keberadaan dan pertumbuhan seni tersebut, serta meneruskannya kepada generasi mendatang. Upaya ini mencakup Pendidikan dan Penyuluhan, Dukungan Pemerintah dan Swasta serta Kolaborasi dan Partisipasi Masyarakat.

Tabel 2.141 Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan Festival Seni Budaya	pertunjukkan	-	-	3	5	7

Sumber : Disdikbud- Kota Prabumulih

Bentuk pelestarian dan pengembangan kesenian tradisional yang dilakukan oleh Pemerintah saat ini baru sebatas mengikuti termasuk festival seni budaya, diantaranya Festival Sriwijaya, Batanghari 9, Pekan kebudayaan Daerah, Tutar Melayu, Festival Bukit Siguntang dan Festival Bumi Ayu.

3. **Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal**

Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal mengacu pada seberapa aktif masyarakat terlibat dalam proses penelitian, pengumpulan data, dan penyebaran informasi tentang sejarah lokal. Ini berarti masyarakat bukan hanya menjadi objek penelitian, tetapi juga menjadi pelaku aktif yang berkontribusi dalam pemahaman dan pelestarian sejarah daerah mereka.

4. **Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan**

Terkait warisan budaya yang dilestarikan, saat ini Pemerintah Kota Prabumulih baru mau penetapan warisan budaya melalui proses pendataan dan pengkajian terlebih dahulu.

5. **Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapan**

Terkait Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan, saat ini Pemerintah Kota Prabumulih baru mau penetapan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya, melalui proses pendataan dan pengkajian terlebih dahulu.

p. **Bidang Perpustakaan**

1. **Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat**

Tingkat kegemaran membaca masyarakat adalah ukuran seberapa banyak dan sering seseorang membaca, yang mencerminkan minat dan kebiasaan mereka dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari media cetak atau digital.

Tabel 2.142 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2023	2024
Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	nilai	58,90	60,02
Kategori		sedang	sedang

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan-Kota Prabumulih

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Prabumulih dari Tahun 2023 dan 2024 masih dalam kategori sedang, artinya masyarakat Prabumulih mulai memiliki kebiasaan membaca secara rutin.

q. **Bidang Kearsipan**

1. **Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan**

Indeks hasil pengawasan kearsipan adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kepatuhan dan kualitas penyelenggaraan kearsipan pada suatu lembaga atau instansi. Pengawasan kearsipan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan arsip dilakukan sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan yang berlaku.

Tabel 2.143 Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	nilai	52,59	25,32	31,7	52,98	55,62

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan-Kota Prabumulih

Menjelang Tahun 2024, Indeks hasil pengawasan kearsipan Kota Prabumulih menunjukkan trend meningkat. Nilai 55,62 artinya bahwa penyelenggaraan kearsipan sedang dalam kondisi cukup, nilai ini juga menunjukkan bahwa penyelenggaraan kearsipan belum sepenuhnya optimal, namun masih dapat diterima.

2. Tingkat Ketersediaan Arsip

Tingkat ketersediaan arsip merujuk pada persentase atau proporsi arsip yang tersedia dan dapat diakses dengan mudah untuk berbagai keperluan, seperti akuntabilitas kinerja, alat bukti, dan pertanggungjawaban nasional.

3. Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip meliputi tindakan yang dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana untuk melindungi arsip dari kerusakan dan kehilangan. Tindakan ini mencakup identifikasi arsip vital, persiapan prabencana, tindakan saat tanggap darurat (evakuasi, penyimpanan sementara), dan pascabencana (pemulihan, pendokumentasian, dan pemusnahan arsip yang rusak parah).

Tujuan dari perlindungan dan penyelamatan arsip adalah untuk memastikan bahwa arsip yang berharga bagi masyarakat, negara, dan generasi mendatang tetap terjaga dan dapat diakses.

4. Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup

Arsip Tertutup adalah Arsip yang tidak dapat diakses oleh publik karena mengandung informasi yang dianggap rahasia, sensitif, atau penting untuk kepentingan tertentu.

2.4.4.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Bidang Kelautan Dan Perikanan

1. Produksi Perikanan Tangkap

Perikanan Tangkap adalah kegiatan penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam liar (laut, sungai, danau, dan badan air lainnya), tanpa pengendalian yang sengaja oleh manusia.

Tabel 2.144 Produksi Perikanan Tangkap Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Produksi Ikan	ton	n/a	202,819	161,768	142,314	142,383

Sumber : Dinas Perikanan-Kota Prabumulih

Produksi ikan tangkap, produksinya cenderung menurun dari semula sebesar 202,819 ton di tahun 2021. Adanya proyek pembangunan tol Prabumulih-Palembang serta limbah batu bara di Payu Putat menjadi pemicu menurunnya produksi ikan tangkap.

2. Produksi Perikanan Budidaya

Perikanan Budidaya merupakan kegiatan menghasilkan komoditas ikan konsumsi atau organisme air lainnya melalui pemeliharaan dan pengembangbiakan dalam lingkungan yang terkontrol.

Tabel 2.145 Produksi Perikanan Budidaya Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Produksi Ikan	ton	n/a	211,830	224,009	255,999	268,60

Sumber : Dinas Perikanan-Kota Prabumulih

Dilihat dari perkembangannya selama tahun 2021-2024, diketahui bahwa produksi ikan budidaya menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2021 jumlah produksi ikan budidaya sebesar 211,830 ton terus meningkat menjadi 268,60 ton di tahun 2024. Peningkatan produksi ikan budidaya ini karena banyaknya jumlah bantuan benih dan pakan ikan, sarana produksi perikanan ke Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) baik yang berasal dari Pemerintah Kota Prabumulih, provinsi serta CSR Bank Indonesia.

3. Konsumsi Ikan

Tabel 2.146 Konsumsi Ikan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kap/Th	n/a	39,29	41,07	41,57	n/a

Sumber : Dinas Perikanan-Kota Prabumulih

Konsumsi ikan di Kota Prabumulih dari tahun 2021-2023 cenderung meningkat di setiap tahunnya. Pada tahun 2021 Angka konsumsi ikan di Kota Prabumulih sebesar 39,29 kg per kapita dan terus meningkat sampai tahun 2023 menjadi 41,57 kg per kapita, peningkatan ini karena didukung adanya kegiatan Gemar Makan Ikan (gemarikan) serta lomba memasak serba berbahan ikan. Angka Konsumsi ikan sebesar 41,57 kg per kapita artinya setiap orang di Kota Prabumulih dalam satu tahun rata-rata mengonsumsi ikan sebanyak 41,57 kilogram. Angka sebesar 41,57 kg per kapita ini masih dibawah angka nasional sebesar 62,5 kilogram per kapita yang merupakan upaya meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat sehingga bisa membangkitkan sektor perikanan.

b. Bidang Pariwisata

1. Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan

Peningkatan kunjungan wisatawan dapat memberikan dampak positif, seperti peningkatan pendapatan, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 2.147 Wisatawan Yang Berkunjung di Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah wisatawan	orang	17374	14410	41688	45857	49563
Persentase Pertumbuhan Jumlah wisatawan yang berkunjung	%		-17,06	189,30	10,00	8,08

Sumber : Dinas Pemberdayaan , Olahraga Kepemudaan dan Pariwisata - Kota Prabumulih - Kota Prabumulih

Menjelang tahun 2024, tingkat pertumbuhan wisatawan yang berkunjung ke Prabumulih cenderung semakin melambat menjadi 8,08% setelah sebelumnya tumbuh sebesar 10%.

2. Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata

Bentuk pemasaran pariwisata di Kota Prabumulih dilakukan melalui promosi melalui Media video, media cetak serta pemilihan Duta Priwisata. Secara tidak langsung hasil promosi ini menyumbang nilai tambah bagi PDRB Kota Prabumulih, sehingga dalam hal ini untuk indikator Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata mengacu pada Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB.

Tabel 2.148 Tingkat pertumbuhan Sektor Akomodasi dan Makan Minum Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum	milyar Rp	172,91	182,39	205,84	224,85	240,75
Tingkat pertumbuhan	%	-	5,48	12,86	9,23	7,07

Sumber : PDRB - Kota Prabumulih

Menjelang tahun 2024 tingkat pertumbuhan sektor pariwisata, dalam hal ini Sektor Akomodasi dan Makan Minum menunjukkan tren yang melambat dari 12,86% tahun 2022 melambat menjadi 9,23% tahun 2023 kemudian melambat kembali menjadi 7,07 % tahun 2024. Selain itu, tabel diatas juga menginformasikan bahwa meskipun pertumbuhan melambat namun Sektor ini terus mengalami peningkatan. Ini menunjukkan bahwa sektor ini tetap menjadi penopang ekonomi dan memiliki potensi pertumbuhan lebih lanjut.

c. Bidang Pertanian

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

Peningkatan produksi tanaman pangan diperoleh dengan menghitung perubahan produktivitas (hasil per hektar) dan/atau perubahan luas tanam.

Tabel 2.149 Produktivitas Tanaman Pangan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Produktivitas	ton/ha	3,952	3,877	3,996	4,436	3,855
Peningkatan Produktivitas	%		-1,90	3,07	11,01	-13,10

Sumber : BPS – Sumsel

Produktivitas tanaman pangan di tahun 2021 dan 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya, ini menunjukkan bahwa hasil panen tanaman pangan di tahun tersebut atau produksi per satuan lahan mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

2. Peningkatan Produksi Hortikultura

- Tanaman Hortikultura Jenis Cabai

Tabel 2.150 Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Produksi	ton	30,4	71,4	49,4	37,4	10
Persentase Peningkatan	%		134.87	-30.81	-24.29	-73.26

Sumber : BPS – Sumsel

Produksi cabai di Kota Prabumulih pada tahun 2024 semakin menunjukkan penurunan menjadi 73,26% dari tahun-tahun sebelumnya.

3. Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan

- Tanaman Perkebunan Jenis Karet

Tabel 2.151 Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Produksi	ton	10166	10277	19246	2046	2046
Persentase Peningkatan	%		1,09	87,27	-89,37	0,00

Sumber : BPS – Sumsel

Produksi karet di Kota Prabumulih semakin menunjukkan penurunan di tahun 2024.

- Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa Sawit

Tabel 2.152 Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa Sawit Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Produksi	ton	1350	1592	967	1592	1592
Persentase Peningkatan	%		17,93	-39,26	64,63	0.00

Sumber : BPS – Sumsel

Berdasarkan tabel diatas perkembangan jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa Sawit Kota Prabumulih cenderung stagnan.

4. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna

menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

Dalam hal ini mengacu pada Distribusi Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan.

Tabel 2.153 Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Kelas Tinggi	ha	36.092	-	318	39.633	39.633
Kelas rendah	ha	6.356	43.730	7.628	6.371	6.371

Sumber : BPS – Sumsel

Dalam periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa Jasa ekosistem penyediaan pangan dengan kategori tinggi mendominasi wilayah Prabumulih, dengan luas rata-rata 39.633 ha atau 91,09%.

- 5. Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan
- 6. Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular
- 7. Kelompok Tani

Sektor pertanian di Kota Prabumulih relatif sangat kecil, baik dilihat dari skala kegiatan maupun kontribusinya terhadap PDRB. Agar sektor ini tetap berkembang, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan pembinaan kelompok-kelompok tani. Seluruh kelompok tani di Kota Prabumulih secara umum mendapat pembinaan dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat , misalnya dalam bentuk penyuluhan, pemberian bantuan bibit, Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) serta kegiatan pembinaan lainnya.

Tabel 2.154 Kelompok Petani yang Dibina Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kelompok tani yang dibina	kelompok	483	489	495	499	520

Sumber : Dinas Pertanian-Kota Prabumulih

Umumnya kelompok tani yang berkembang di Kota Prabumulih adalah Kelompok Wanita Tani (KWT), jumlahnya menunjukkan perkembangan yang positif dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 1,14 persen per tahun pada rentang waktu 2020 – 2024. KWT dibentuk berdasarkan minat petani itu sendiri dengan persyaratan yang harus dipenuhi seperti sudah memiliki lahan, struktur organisasi, lengkap administrasi kependudukan.

d. Bidang Perindustrian

1. Pertumbuhan Industri

• **Industri Menengah dan Besar Kategori Dasar**

Industri Menengah dan Besar Kategori Dasar merujuk pada kelompok industri yang di klasifikasikan berdasarkan skala modal usaha dan jumlah tenaga kerja. Industri Menengah memiliki modal antara Rp 5 miliar hingga Rp10 miliar dan memiliki jumlah karyawan antara 20 hingga 99 orang, sedangkan Industri Besar memiliki modal lebih dari Rp10 miliar dan memiliki jumlah karyawan lebih dari 100 orang. Kota Prabumulih memiliki Industri Menengah dan Besar Kategori Dasar diantaranya yaitu Industri Pupuk Kimia dan Barang Dari Karet, Industri Semen dan Galian Non Logam, Industri Alat Angkut Mesin dan Peralatan.

Tabel 2.155 Industri Menengah dan Besar Kategori Dasar Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Unit Usaha	unit	5	5	5	2	5
2	Tenaga Kerja	orang	563	563	653	506	621
3	Investasi	Juta Rp	519,18	519,18	363,68	157	159,18

Sumber : BPS – Prov Sumsel

Jumlah Unit Usaha Industri Menengah dan Besar Kategori Dasar yang ada di Kota Prabumulih dari tahun 2020 hingga 2024 rata-rata relatif sama yaitu 5 Unit, begitu pun dengan jumlah tenaga kerjanya antara 500-600 pekerja, namun berbeda dengan nilai investasinya yang menunjukkan tren menurun yang cukup signifikan bila dibandingkan tahun awal periode yang sebesar 519,18 Juta Rupiah.

• **Industri Menengah dan Besar Kategori Aneka**

Industri aneka pada skala menengah dan besar mencakup berbagai jenis industri yang tidak termasuk dalam kelompok industri utama, seperti logam, mesin, atau tekstil, tetapi memiliki kegiatan ekonomi yang penting, karena industri aneka ini memainkan peran penting dalam perekonomian, termasuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat.

Industri aneka di Kota Prabumulih secara umum dapat mencakup industri makanan, minuman, pakaian, kerajinan, dan lainnya.

Tabel 2.156 Industri Menengah dan Besar Kategori Aneka Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Unit Usaha	unit	2	2	2	2	2
2	Tenaga Kerja	orang	109	109	124	124	124

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
3	Investasi	Juta Rp	3,482	3,482	104,30	2,2	2,2

Sumber : BPS – Prov Sumsel

Jumlah Unit Usaha Industri Menengah dan Besar Kategori Dasar yang ada di Kota Prabumulih dari tahun 2020 hingga 2024 rata-rata relatif sama yaitu 5 Unit, begitu pun dengan jumlah tenaga kerjanya antara 500-600 pekerja, namun berbeda dengan nilai investasinya yang menunjukkan tren menurun yang cukup signifikan bila dibandingkan tahun awal periode yang sebesar 519,18 Juta Rp.

• **Industri Mikro Kecil**

Industri Mikro dan Kecil (IMK) adalah usaha industri yang skala produksinya relatif kecil, namun memiliki peran penting dalam ekonomi, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. IMK umumnya dianggap sebagai usaha padat karya.

Industri Mikro dan Kecil (IMK) meliputi usaha industri yang menggunakan modal dan aset yang relatif kecil, serta jumlah pekerja yang tidak terlalu banyak. IMK seringkali merupakan usaha rumahan atau usaha skala kecil dengan kegiatan produksi yang sederhana.

Tabel 2.157 Industri Mikro Kecil Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Unit Usaha	unit	2414	2552	2314	2308	n/a
2	Tenaga Kerja	orang	3492	4972	4376	5526	n/a
3	Investasi	Juta Rp	1987,50	346,78	294,61	248,58	n/a

Sumber : BPS – Prov Sumsel

Jumlah Unit Usaha Industri Mikro Kecil di Kota Prabumulih cenderung berfluktuasi dengan serapan tenaga kerja yang mengalami peningkatan, ini menunjukkan IMK memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja. Tabel diatas juga menginformasikan bahwa meningkatnya Jumlah Unit Usaha IMK akan meningkatkan nilai investasinya.

2. Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan

Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan ini mengukur efektivitas atau tingkat keberhasilan pemerintah dalam menerbitkan izin usaha industri sehingga diperoleh gambaran tentang seberapa efektif pemerintah dalam melayani kebutuhan izin usaha industri.

Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan ini diperoleh melalui Perbandingan dalam bentuk persentase antara jumlah izin yang diterbitkan dengan jumlah total permohonan atau potensi izin yang seharusnya diterbitkan.

Tabel 2.158 Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	%	100	100	100	100	100

Sumber : DPMPTSP-Kota Prabumulih

Persentase izin usaha industri yang diterbitkan dari tahun 2020-2024 sebesar 100%. Ini berarti semua izin usaha industri di Kota Prabumulih yang diajukan telah diterbitkan.

3. Persentase Terlaksananya Pengelolaan Data Industri Melalui SIINas

Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) adalah sistem yang memfasilitasi pengelolaan dan penyebaran informasi industri.

e. Bidang Perdagangan

1. Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi

Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam mendukung pelaku usaha. Indikator ini diperoleh melalui perbandingan jumlah izin usaha yang diterbitkan dan disiapkan oleh pemerintah (dengan fasilitasi) terhadap jumlah total izin usaha yang seharusnya diterbitkan.

2. Persentase Pasar yang dipelihara (revitalisasi)

3. Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang

Indikator ini menunjukkan perkembangan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasaran.

4. Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya UTPP yang ditera tera ulang

Indikator ini menunjukkan sejauhmana kesadaran pedagang / pelaku usaha di Kota Prabumulih dalam menggunakan alat UTPP sesuai ketentuan, sehingga dapat melindungi kepentingan umum / konsumen melalui jaminan kebenaran hasil pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian alat UTPP.

Tabel 2.159 Alat UTPP Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Alat UTPP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera	%	80%	90%	95%	100%	100%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan -Kota Prabumulih

Dari data diatas diketahui bahwa pelayanan tera/tera ulang dari tahun 2020 terus mengalami peningkatan hingga mencapai 100% di tahun 2023, kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tera/tera ulang UTPP pelaku usaha

atau pedagang di Kota Prabumulih sudah semakin baik, sehingga diharapkan terwujudnya perlindungan terhadap konsumen (pembeli) dan pedagang.

5. Persentase produk lokal yang ada di pasar luar negeri

Kota Prabumulih memiliki berbagai produk lokal yang berpotensi untuk diekspor, seperti karet (yang merupakan unggulan perkebunan rakyat).

Tabel 2.160 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase produk lokal yang ada di pasar luar negeri	%	26,94	26,92	27,42	22,95	22,71

Sumber : BPS-Kota Prabumulih

Persentase produk lokal Kota Prabumulih yang menembus pasar luar negeri berkisar antara 22% hingga 27%. Ini berarti sebagian produk dari Prabumulih berhasil diekspor dan dipasarkan di luar negeri, meskipun persentase ini masih relatif kecil.

6. Persentase Pelaku Usaha Yang Dibina

Indikator ini mengacu pada kelompok pedagang yang dibina.

Tabel 2.161 Bina kelompok pedagang Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kelompok Pedagang Informal yang mendapat bantuan penda	Kelompok	300	125	70	50	100
2	Jumlah Kelompok pedagang/Usaha Informal	Kelompok	600	250	140	50	200
3	Cakupan bina kelompok pedagang	%	50	50	50	100	50

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan -Kota Prabumulih

Merosotnya omzet pedagang menjadi salah satu penyebab semakin berkurangnya jumlah kelompok pedagang. Pembinaan terhadap kelompok pedagang telah dilakukan secara rutin dengan menyasar pedagang Pasar Tradisional Modern (PTM) yang ada di Kota Prabumulih dengan tujuan meningkatkan daya saing pasar, namun karena keterbatasan sarana dan prasarana maka cakupan bina kelompok pedagang dari tahun 2020-2022 capaiannya hanya 50%, hanya di tahun 2023 yang mencapai 100%.

2.4.4.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Dewan

1. Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda

Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) yang disahkan menjadi Perda (Peraturan Daerah) adalah raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan kepala daerah, kemudian ditetapkan sebagai Perda melalui tanda tangan bersama dan pengundangan.

Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) yang disahkan menjadi Perda (Peraturan Daerah) melalui proses yang panjang. Proses ini melibatkan perencanaan, penyusunan, pembahasan, evaluasi, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Raperda yang sudah disetujui oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan Bupati/Walikota, kemudian ditetapkan dan diundangkan sebagai Perda.

Tabel 2.162 Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Raperda yang dibahas dan berhasil disahkan menjadi Perda	Raperda	4	10	4	9	4
2	Jumlah Raperda yang diajukan untuk dibahas	Raperda	4	10	8	12	6
3	Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda	%	100	100	50	75	66,7

Sumber : Sekretariat DPRD-Kota Prabumulih

Dalam periode tahun 2020-2024, secara rata-rata persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda nilainya 78,34%, artinya bahwa 78,34%, dari Raperda yang diajukan berhasil melewati proses pembahasan, persetujuan, dan akhirnya diundangkan menjadi Perda. Adapun penyebab belum semua Raperda yang diajukan dibahas dan disahkan menjadi Perda karena adanya kepentingan politik dari masing-masing Parpol dalam membahas produk hukum yang salah satunya didasari dari keberagaman latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial anggota DPRD.

b. Sekretariat Dewan

1. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah hasil penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dilakukan secara sistematis melalui pengumpulan dan analisis data menggunakan sistem pengukuran kinerja. EKPPD bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program daerah berjalan efektif dan efisien.

Secara umum, nilai EKPPD menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah berhasil dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat, serta mencapai tujuan pembangunan daerah.

Tabel 2.163 Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai					3,1

Sumber : Sekretariat Daerah-Kota Prabumulih

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 3,1 menunjukkan kinerja pemerintahan daerah tergolong sedang.

2. Persentase Produk Hukum yang dihasilkan

Produk hukum adalah setiap putusan, ketetapan, peraturan, dan keputusan yang dihasilkan oleh lembaga atau pihak yang memiliki wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya. Produk hukum ini dapat berbentuk peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, hingga keputusan pengadilan dan fatwa.

Dalam konteks ini, Persentase Produk Hukum yang dihasilkan, mengacu pada persentase produk hukum daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan baru.

Tabel 2.164 Persentase Produk Hukum yang dihasilkan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Produk Hukum yang dihasilkan	%					83

Sumber : Sekretariat Daerah-Kota Prabumulih

Persentase produk hukum yang dihasilkan di tahun 2024 sebesar 83% menunjukkan bahwa dari total produk hukum yang seharusnya dihasilkan, 83% diantaranya telah dibuat atau dikeluarkan. Ini berarti masih ada 17% produk hukum yang belum dihasilkan atau belum selesai dibuat, karena masih dalam proses penyusunan, revisi.

3. Persentase Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi

Kegiatan keagamaan yang difasilitasi adalah kegiatan yang diselenggarakan dan didukung oleh suatu lembaga atau organisasi untuk memfasilitasi praktik keagamaan, baik secara individual maupun kolektif. Contohnya termasuk sholat berjamaah, kegiatan pengajian, peringatan hari besar keagamaan, dan kegiatan sosial keagamaan lainnya.

Fasilitasi kegiatan keagamaan ini bertujuan untuk memberikan dukungan dan kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadah dan praktik keagamaan mereka. Selain itu, kegiatan keagamaan yang difasilitasi juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 2.165 Persentase Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi	%					100

Sumber : Sekretariat Daerah-Kota Prabumulih

Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi 100% menunjukkan bahwa semua kegiatan keagamaan yang direncanakan telah difasilitasi secara penuh, artinya tidak ada kegiatan keagamaan yang tidak mendapatkan dukungan atau fasilitas dari pihak terkait.

4. Persentase MoU / Perjanjian Kerjasama yang difasilitasi

Persentase MoU/Perjanjian Kerjasama yang difasilitasi adalah ukuran yang menunjukkan seberapa banyak MoU atau perjanjian kerjasama yang telah dihasilkan oleh suatu pihak (misalnya perangkat daerah) dan telah diimplementasikan atau dilaksanakan.

Tabel 2.166 Persentase MoU / Perjanjian Kerjasama yang difasilitasi Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase MoU / Perjanjian Kerjasama yang difasilitasi	%					100

Sumber : Sekretariat Daerah-Kota Prabumulih

Persentase MoU/Perjanjian Kerjasama yang difasilitasi 100% berarti seluruh MoU/Perjanjian Kerjasama yang telah dibuat telah mendapatkan bantuan atau dukungan penuh untuk terlaksananya, mulai dari tahapan penyusunan, negosiasi, hingga implementasi.

5. Persentase Akses Keuangan Daerah Kota Prabumulih

Akses keuangan daerah (AKD) merujuk pada kemampuan masyarakat di suatu daerah untuk mengakses layanan keuangan seperti kredit, simpanan, pembayaran, dan asuransi.

Tabel 2.167 Persentase Akses Keuangan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Akses Keuangan Daerah	%					76,47

Sumber : Sekretariat Daerah-Kota Prabumulih

Persentase Akses Keuangan Daerah Kota Prabumulih sebesar 76,47%, artinya dari 100 orang yang tinggal di Kota Prabumulih, 76,47 di antaranya sudah memiliki akses ke layanan keuangan formal. Ini berarti masyarakat Prabumulih relatif memiliki akses yang baik terhadap tabungan, kredit, asuransi, dan investasi.

6. Persentase Realisasi Fisik OPD Kota Prabumulih

Persentase realisasi fisik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan kinerja pelaksanaan kegiatan fisik yang dianggarkan dalam APBD.

Tabel 2.168 Persentase Realisasi Fisik OPD Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Realisasi Fisik OPD	%					81,50

Sumber : Sekretariat Daerah-Kota Prabumulih

Persentase realisasi fisik OPD yang mencapai 81,50% menunjukkan bahwa baru sebagian besar kegiatan fisik yang direncanakan oleh OPD telah diselesaikan.

7. Tingkat Kematangan UKPBJ

Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah model yang digunakan untuk menilai dan meningkatkan kinerja UKPBJ dalam pengadaan barang dan jasa.

Tabel 2.169 Tingkat Kematangan UKPBJ Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kematangan UKPBJ	%					84,17

Sumber : Sekretariat Daerah-Kota Prabumulih

Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebesar 84,17% Menunjukkan UKPBJ tersebut telah mencapai tingkat kesiapan yang cukup baik dalam menjalankan fungsinya dalam proses pengadaan barang dan jasa.

2.4.4.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

1. Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD

Indikator ini menunjukkan menunjukkan seberapa jauh perencanaan tahunan (RKPD) selaras dengan perencanaan jangka menengah (RPJMD). Semakin tinggi persentase keselarasan, semakin baik koordinasi dan implementasi program pembangunan daerah.

Persentase keselarasan ini dihitung dengan membandingkan jumlah sasaran atau program dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD, kemudian dikalikan 100%.

2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD

Indikator ini menunjukkan seberapa besar keselarasan antara perencanaan jangka menengah daerah dengan rencana strategis masing-masing Perangkat Daerah (PD).

Persentase keselarasan ini dihitung dengan membandingkan Jumlah Renstra PD yang Selaras dengan RPJMD terhadap Jumlah Renstra PD dikalikan 100%.

3. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Indikator ini menunjukkan seberapa besar tujuan dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD selaras dengan Renja PD pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Persentase Keselarasan ini dihitung dengan membandingkan Jumlah Program dan Kegiatan Sejalan terhadap Jumlah Total Program dan Kegiatan dikalikan 100%.

4. **Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**

Indikator ini menunjukkan seberapa besar tujuan dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD selaras dengan Renja PD pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Persentase Keselarasan ini dihitung dengan membandingkan Jumlah Program dan Kegiatan Sejalan terhadap Jumlah Total Program dan Kegiatan dikalikan 100%.

5. **Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA**

Indikator ini menunjukkan seberapa besar tujuan dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD selaras dengan Renja PD pada bidang Perekonomian dan SDA. Persentase Keselarasan ini dihitung dengan membandingkan Jumlah Program dan Kegiatan Sejalan terhadap Jumlah Total Program dan Kegiatan dikalikan 100%.

b. **Keuangan**

1. **Persentase realisasi belanja pegawai terhadap APBD**

Belanja pegawai adalah pengeluaran yang digunakan untuk membayar kompensasi (gaji, tunjangan, insentif, honorarium, dll.) kepada pegawai negeri, pejabat negara, pensiunan, dan pegawai honorer yang bekerja di lingkungan pemerintahan. Undang-undang No. 1 Tahun 2022 menetapkan pembatasan proporsi belanja pegawai maksimal 30% dari total belanja APBD.

Tabel 2.170 Persentase belanja pegawai terhadap APBD Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah belanja pegawai	milyar Rp	386,05	451,96	454,86	458,31	543,23
2	Total belanja daerah	milyar Rp	1.054,35	949,04	996,27	1.077,61	1.192,76
3	Persentase realisasi belanja pegawai terhadap APBD	%	36,61	47,62	45,66	42,53	45,54

Sumber : BPKAD, Analisis Bappeda-Kota Prabumulih

Proporsi belanja pegawai pemerintah Kota Prabumulih berkisar antara 36% hingga 47%. Proporsi 45,54% menunjukkan bahwa lebih dari 40% dari total anggaran daerah dialokasikan untuk membayar pegawai. Proporsi ini juga menunjukkan bahwa proporsi anggaran untuk belanja pegawai sangat tinggi.

2. Persentase Realisasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Belanja infrastruktur mencakup belanja modal dan pemeliharaan yang terkait dengan pembangunan dan operasional fasilitas pelayanan publik, seperti jalan, jembatan, bandara, dan sistem air bersih.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menetapkan bahwa alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik harus minimal 40% dari total belanja daerah (di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa).

Tabel 2.171 Persentase Realisasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Total belanja infrastruktur (belanja modal)	milyar Rp	220,76	169,88	168,23	233,49	251,05
2	Total belanja daerah	milyar Rp	1.054,35	949,04	996,27	1.077,61	1.192,76
3	Persentase Realisasi Belanja Infrastruktur	%	20,94	17,90	16,89	21,67	21,05

Sumber : BPKAD, Analisis Bappeda-Kota Prabumulih

Proporsi belanja infrastruktur (belanja modal) pemerintah Kota Prabumulih berkisar antara 16% hingga 21%. Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 21,67% menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk infrastruktur masih di bawah target minimal 40% yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Persentase Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (SPM)

Dalam hal ini mengacu pada Belanja Standar Pelayanan Minimal (SPM). Belanja Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang ditetapkan sebagai standar minimal, yang mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketertiban umum, dan sosial.

Tabel 2.172 Persentase Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (SPM) Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Total belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (SPM)	milyar Rp	n/a	n/a	n/a	n/a	11,33
2	Total belanja daerah	milyar Rp	1.054,35	949,04	996,27	1.077,61	1.192,76
3	Persentase Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (SPM)	%	n/a	n/a	n/a	n/a	0,95

Sumber : LPPD, Analisis Bappeda-Kota Prabumulih

Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar (SPM) sebesar 0,95% berarti bahwa hanya 0,95% dari anggaran yang telah dialokasikan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berhasil direalisasikan atau dibelanjakan.

4. Persentase Penurunan SILPA

SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto.

Tabel 2.173 Persentase Penurunan SILPA Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SILPA	milyar Rp	89,76	148,11	233,73	183,41	188
2	Persentase Penurunan SILPA	%		65,01	57,81	21,53	2,50

Sumber : BPKAD, Analisis Bappeda-Kota Prabumulih

Tabel diatas menunjukkan bahwa SILPA pemerintah Kota Prabumulih cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke 2024 sebesar 2,5% dan dari tahun 2021 ke 2022 sebesar 57,81%, sempat menurun sebesar 21,53% di tahun 2023. Kenderungan peningkatan SILPA ini mengindikasikan banyaknya pekerjaan yang tidak terlaksana di berbagai Perangkat Daerah (OPD).

Penyerapan anggaran oleh Perangkat Daerah (PD) masih belum optimal. Salah satu faktor penyebabnya adalah adanya kegiatan yang tidak terlaksana karena waktu yang mepet. Peningkatan ini dikaitkan dengan banyaknya pekerjaan yang tidak terlaksana di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

5. Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional atau produksi, bukan untuk dijual atau investasi jangka pendek. Aset tetap dapat berupa tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, dan inventaris.

Persentase penambahan nilai aset tetap mengindikasikan tingkat perubahan nilai aset yang terjadi selama periode tertentu.

Tabel 2.174 Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Aset Tetap	milyar Rp	2.415	2.392	2.457	2.387	5.000
2	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%		-0,95	2,72	-2,85	109,47

Sumber : BPKAD, Analisis Bappeda-Kota Prabumulih

Selama lima tahun terakhir, nilai aset tetap Pemerintah Kota Prabumulih menunjukkan tingkat perubahan yang berfluktuatif, di tahun 2021 dan 2023 nilai aset tetap mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,95% dan 2,85%. Penurunan nilai aset tetap sebesar -0,95% di tahun 2021 artinya terjadi penurunan atau berkurangnya nilai aset tetap sebesar 0,95% dari nilai aset tetap yang ada sebelumnya. Penurunan ini disebabkan karena adanya Penyusutan (Depresiasi) dan penurunan nilai pasar.

Namun di tahun 2022 dan 2024 nilai aset tetap mengalami kenaikan masing-masing sebesar 2,72% dan 109,47%, kenaikan nilai aset disebabkan karena Penambahan Nilai oleh Perbaikan atau Renovasi dan peningkatan harga pasar.

6. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Opini BPK merupakan penilaian dari BPK mengenai kewajaran laporan keuangan suatu institusi yang didasarkan kepada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal. Opini BPK menggambarkan tingkat kedisiplinan keuangan suatu instansi berdasarkan empat kriteria tersebut. Semakin baik opini BPK atas informasi keuangan suatu daerah, maka semakin baik pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah kemudian dapat menjadi tarikan bagi para investor untuk masuk ke dalam wilayah yang bersangkutan. Dalam rentang Tahun 2020-2024, Pemerintah Kota Prabumulih mendapatkan opini BPK sangat baik yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Tabel 2.175 Opini BPK Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Pemeriksaan atas laporan keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKAD, Analisis Bappeda-Kota Prabumulih

7. Kapasitas Fiskal Daerah

Rasio Kapasitas Fiskal Daerah adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola kemampuan keuangan mereka.

Tabel 2.176 Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	0,562	0,629	1,292	1,155	0,92
Kategori	rendah	rendah	rendah	rendah	rendah

Sumber : PMK

Selama lima tahun terakhir, Rasio kapasitas fiskal daerah Kota Prabumulih tergolong rendah, artinya kemampuan keuangan daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat tergolong lemah, dengan rasio kapasitas fiskal rendah maka Pemerintah Kota Prabumulih cenderung sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.

8. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dari berbagai sumber seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD merupakan sumber pendapatan utama daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Semakin tinggi persentase PAD terhadap pendapatan daerah, semakin mandiri keuangan daerah, dan semakin rendah ketergantungannya pada dana dari pemerintah pusat atau sumber dana eksternal.

Tabel 2.177 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	PAD	milyar Rp	85,04	80,65	101,59	120,62	130,75
2	Pendapatan Daerah	milyar Rp	972,24	1.008,99	1.004,88	1.108,98	1.197,85
3	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	8,75	7,99	10,11	10,88	10,91

Sumber : BPKAD, Analisis Bappeda-Kota Prabumulih

Persentase PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap Pendapatan Daerah Kota Prabumulih setiap tahunnya terus menunjukkan peningkatan. Di tahun 2024, Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 10,91% artinya 10,91% dari seluruh pendapatan daerah berasal dari sumber-sumber yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah sendiri, seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Sisanya merupakan pendapatan dari pemerintah pusat atau sumber dana eksternal.

c. Kepegawaian

1. Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Pegawai fungsional adalah pegawai yang menduduki jabatan yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus dalam bidang tertentu, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas yang terkait dengan keahlian tersebut. misalnya guru, dokter, peneliti, auditor, dan lainnya.

Tabel 2.178 Rasio Pegawai Fungsional Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pegawai PNS Fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	orang	n/a	646	1181	1162	387
2	Seluruh Jumlah Pegawai (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	orang	n/a	1723	1644	1627	1620
3	Rasio Pegawai Fungsional	%	n/a	37,49	71,83	71,41	23,88

Sumber : BKPSDM-Kota Prabumulih

Berdasarkan data pegawai fungsional pada tabel diatas rasio jabatan fungsional pada instansi pemerintah di Kota Prabumulih mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 jumlah jabatan adalah sebanyak 646 orang, selanjutnya, jumlah ini terus menurun sampai tahun 2024 menjadi 387 orang. Hal ini dikarenakan perubahan jabatan antara pejabat fungsional umum beralih menjadi jabatan fungsional

tertentu. Pada tahun 2022 jumlahnya meningkat lagi menjadi 1.181 orang, dan di tahun 2023 menjadi 1.162 orang. Penambahan dan pengurangan jumlah pemangku jabatan fungsional umum berdasarkan penambahan pegawai dari jalur CPNS, pegawai yang mutasi dari luar daerah maupun pegawai yang pensiun.

2. **Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)**

Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi mengacu pada proporsi atau persentase PNS yang menduduki jabatan fungsional dan memiliki sertifikat kompetensi. Interpretasinya adalah sebagai indikator kualitas sumber daya manusia, menunjukkan seberapa besar PNS di jabatan fungsional memiliki kompetensi yang telah diakui secara formal.

Melalui rasio ini dapat diketahui tingkat profesionalisme dan kompetensi PNS pemerintah Kota Prabumulih serta dapat mengevaluasi program pengembangan kompetensi PNS.

Tabel 2.179 Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	orang	n/a	9	8	4	5
2	Jumlah Pegawai PNS Fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	orang	n/a	646	1181	1162	387
3	Persentase Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi	%	n/a	1,39	0,68	0,34	1,29

Sumber : BKPSDM-Kota Prabumulih

Persentase pejabat fungsional pemerintah Kota Prabumulih yang memiliki sertifikat kompetensi rata-rata baru 1%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pegawai fungsional yang belum mendapatkan pengakuan atas kompetensinya melalui sertifikasi atau dapat dikatakan rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi dianggap rendah.

3. **Rasio Pegawai menurut Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)**

Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (SD, SMP, SMA) merupakan indikator yang mengukur perbandingan jumlah pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi (sarjana, diploma, magister, doktor) dengan jumlah pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan menengah atau dasar. Rasio ini memberikan gambaran mengenai komposisi pendidikan pegawai dalam suatu organisasi atau instansi. Semakin tinggi rasio, berarti

semakin banyak pegawai yang memiliki pendidikan tinggi, yang bisa menjadi indikasi kualitas sumber daya manusia yang lebih baik.

Tabel 2.180 Rasio Pegawai menurut Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT keatas	orang	n/a	3276	1457	1447	1455
2	Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah	orang	n/a	239	187	180	0
3	Rasio Pegawai menurut Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar	%	n/a	13,70	7,79	8,03	-

Sumber : BKPSDM-Kota Prabumulih

Pada Tahun 2023, rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar adalah 8,03:1, artinya untuk setiap 8,03 orang pegawai dengan pendidikan tinggi, ada 1 orang pegawai dengan pendidikan menengah atau dasar. Dari data diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan pegawai di Pemerintah Kota Prabumulih mayoritas Sarjana dan hanya sedikit yang masih berpendidikan Sekolah Menengah.

d. Pendidikan dan pelatihan

1. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan

Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan mengacu pada lamanya waktu secara rata-rata yang digunakan oleh seorang pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di tempat kerja atau lembaga terkait.

Jam Pelajaran (JP) adalah satuan waktu yang digunakan dalam pelatihan atau pendidikan, dengan 1 JP setara dengan 45 menit. Dalam konteks pengembangan kompetensi PNS, ada aturan yang menyebutkan kewajiban mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran (JP) per tahun adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang kemudian direvisi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Pasal 203 Ayat (4) dari PP Nomor 17 Tahun 2020 menetapkan bahwa setiap PNS wajib mengikuti pengembangan kompetensi dengan alokasi waktu minimal 20 jam pelatihan setiap tahun.

Melalui data ini dapat diketahui tingkat pengembangan Sumber Daya Manusia.

Tabel 2.181 Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jam pelajaran	n/a	n/a	15,0	17,4	22,1

Sumber : BKPSDM-Kota Prabumulih

Rata-rata lama pegawai Pemerintah Kota Prabumulih mendapatkan pendidikan dan pelatihan 15 JP – 22 JP artinya, secara rata-rata, setiap pegawai menerima

pendidikan dan pelatihan yang durasinya setara dengan 15 Jam Pelajaran sampai 22 Jam Pelajaran. 1 JP biasanya dihitung 45 menit, sehingga totalnya 15 JP adalah 675 menit atau 11,25 jam. Ini bisa jadi adalah standar waktu untuk pelatihan atau pendidikan yang biasanya diselenggarakan untuk mengembangkan kompetensi pegawai.

Berdasarkan aturan diatas, maka Rata-rata lama pegawai Pemerintah Kota Prabumulih mendapatkan pendidikan dan pelatihan sudah menunjukkan capaian yang baik karena sudah mencapai 22,1 di tahun 2024.

2. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural

Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti diklat struktural adalah pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam bidang kepemimpinan dan manajemen di lingkungan pemerintahan. Diklat struktural ini merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai jenjang jabatan tertentu dalam struktur organisasi pemerintahan.

Tabel 2.182 Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	orang	199	205	52	3	12
2	Total Jumlah pejabat	orang	493	493	493	493	493
3	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	%	40,37	41,58	10,54	0,60	2,43

Sumber : BKPSDM-Kota Prabumulih

Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural jumlahnya meningkat dari tahun 2020 sebesar 40,37% sampai dengan tahun 2021 menjadi 41,58%. Namun di tahun 2022 hingga 2024 realisasi pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural mengalami penurunan yang sangat signifikan terutama di tahun 2023 menjadi 0,66%. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kuota pihak penyelenggara (ketersediaan kuota di Bandiklat Sumsel), selain itu perampangan birokrasi yakni peralihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional menyebabkan berkurangnya kegiatan pelatihan kepemimpinan.

3. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal mengukur proporsi ASN yang telah mendapatkan peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan formal dalam suatu periode waktu tertentu.

Melalui indikator Ini dapat diketahui efektivitas program pengembangan SDM ASN dan relevansi dengan kebutuhan pelayanan publik.

Tabel 2.183 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	orang	118	210	131	221	71
2	Total Jumlah ASN	orang	3556	3511	3425	3301	3267
3	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	3,31	5,98	3,82	6,69	2,17

Sumber : BKPSDM-Kota Prabumulih

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Pemerintah Kota Prabumulih hanya sebesar 2 - 7%. Nilai persentase 6,67% ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal berarti bahwa dari setiap 100 ASN, hanya 6,67 di antaranya yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan formal. Ini menunjukkan tingkat partisipasi yang relatif rendah dalam pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan dan pelatihan formal.

e. Penelitian dan pengembangan

1. Persentase data hasil riset dan inovasi yang berkualitas

Data hasil riset dan inovasi yang berkualitas adalah data yang valid, dapat diandalkan (reliable), akurat, dan relevan dengan tujuan penelitian atau inovasi.

Tabel 2.184 Persentase data hasil riset dan inovasi yang berkualitas Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase data hasil riset dan inovasi yang berkualitas	%	-	-	-	-	20

Sumber : Balitbang-Kota Prabumulih

Persentase data hasil riset dan inovasi yang berkualitas Pemerintah Kota Prabumulih baru yaitu 20%, karena riset dan inovasi yang dilakukan baru sebatas Kebijakan berbasis ilmiah, atau Evidence-Based Policy (EBP), artinya keputusan kebijakan yang diambil baru berdasarkan pada bukti ilmiah, data, dan fakta yang terverifikasi, sedangkan dalam konteks persentase data hasil riset dan inovasi berkualitas, EBP memerlukan bukti-bukti yang akurat dan sistematis, termasuk hasil riset, untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan efektif dan memberikan manfaat yang optimal.

2. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Melalui IID ini maka kita dapat mengevaluasi kualitas inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Tabel 2.185 Indeks Inovasi Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Inovasi Daerah	nilai	1.050	38,51	37,18	10,50	10,20
2	Kategori	predikat	Sangat inovatif	inovatif	inovatif	Kurang inovatif	Kurang inovatif

Sumber : Balitbang- Kota Prabumulih

Pada keikutsertaan IGA 2020, Kota Prabumulih berhasil meraih peringkat sebagai Kota sangat inovatif, namun pada tahun 2021 dan 2022, turun ke peringkat sebagai Kota Inovatif, kemudian pada tahun 2023 dan 2024 Kota Prabumulih masuk dalam kategori Kurang inovatif, dengan skor indeks inovasi daerah 10,20, dengan kategori kurang inovatif, nilai ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Prabumulih belum mampu memanfaatkan potensi inovasi secara optimal, kondisi ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain banyaknya data dukung yang tidak sesuai dan minimnya jumlah inovasi baru/dikembangkan di OPD.

2.4.4.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

a. Pengawasan

1. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) merupakan tahapan penting dalam rangkaian pengawasan dan pengendalian intern di perangkat daerah pemerintah. TLHP dilakukan sebagai respons terhadap temuan dan rekomendasi yang diajukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan/atau oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Inspektorat Daerah Kota Prabumulih memiliki peran krusial dalam melakukan TLHP guna memastikan akuntabilitas dan peningkatan kinerja pemerintah daerah. Hasil dari pemeriksaan tersebut berupa temuan dan rekomendasi yang akan diberikan kepada perangkat daerah terkait.

Tabel 2.186 Indeks Inovasi Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	temuan	114	236	356	339	535
2	Jumlah total temuan	temuan	114	236	393	431	667
3	Persentase tindak lanjut temuan	%	100	100	90,58	78,65	80,21

Sumber : Inspektorat Kota Prabumulih

Secara keseluruhan persentase tindak lanjut temuan di Kota Prabumulih pada 2020 hingga 2021 sudah mencapai 100%, namun karena masih adanya Perangkat Daerah yang belum menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di tahun 2022 dan 2023, menyebabkan capaian temuan yang ditindaklanjuti menurun sebesar 90,58% dan 78,65%.

2. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern

Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) mengukur tingkat kematangan SPI dalam mencapai tujuan pengendalian internal. Semakin tinggi nilai maturitas SPI, semakin baik kualitas penyelenggaraannya.

Tabel 2.187 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern	2,86 (Level 2)	2,86 (Level 2)	3,24 (Level 3)	3,20 (Level 3)	3,15 (Level 3)

Sumber : Inspektorat Kota Prabumulih

Tingkat maturitas SPIP Kota Prabumulih pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 2,86 meningkat menjadi 3,15 pada tahun 2024. Dengan menempati tingkat maturitas pada level 3 pada tahun 2024, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Prabumulih telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, strategi pencapaiannya relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan meskipun belum sepenuhnya efektif.

3. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merujuk pada kemampuan APIP dalam melaksanakan kegiatan pengawasan yang efektif dan efisien. Kapabilitas APIP yang baik akan mendorong hasil pengawasan yang berkualitas dan mendukung tata kelola pemerintah yang lebih baik.

Tabel 2.188 Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber : Inspektorat Kota Prabumulih

Level 3 berarti kemampuan APIP di lingkungan Inspektorat Kota Prabumulih telah sanggup melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal.

2.4.4.7 Unsur Kewilayahan

a. Kecamatan

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pelayanan kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pelayanan kecamatan adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparatur kecamatan. IKM diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang membandingkan harapan dan kebutuhan masyarakat dengan kenyataan yang mereka terima.

Tabel 2.189 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	nilai				82,72	84,75

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
pada pelayanan kecamatan						

Sumber : Kecamatan-Kota Prabumulih

Nilai IKM pada pelayanan kecamatan di Kota Prabumulih berada pada angka 84,75 kategori ini sudah menunjukkan IKM tinggi, artinya bahwa masyarakat umumnya puas dengan pelayanan yang diberikan oleh aparaturnya kecamatan.

2.4.4.8 Unsur Pemerintah Umum

a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan diimplementasikan melalui berbagai kegiatan sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan, serta upaya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memperkuat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, serta membangun karakter kebangsaan yang kuat.

Tabel 2.190 Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah peserta yang meningkat pemahamannya	orang	-	-	-	140	52
2	Jumlah peserta yang akan ditingkatkan pemahamannya	orang	-	-	-	150	73
3	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	-	-	-	93	71

Sumber : Kesbangpol-Kota Prabumulih

Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Pemerintah Kota Prabumulih mulai dilaksanakan di tahun 2023 dengan capaian 93% dan 71% di tahun 2024, capaian ini sudah cukup baik karena melihat dari jumlah peserta yang lebih dari 2/3 yang pemahamannya terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan meningkat.

2. Persentase partisipasi politik masyarakat Kota Prabumulih dalam Pileg/Pilkada/Pilpres

Untuk indikator ini merujuk pada tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada, Pilpres dan Pileg.

Tabel 2.191 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada, Pilpres dan Pileg Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Masyarakat	%	84 - 88	86,51	80,09	140	52

Sumber : KPU-Kota Prabumulih

Baik Pilkada, Pilpres maupun Pileg, tingkat partisipasi masyarakat Kota Prabumulih sekitar angka 80-an%. Angka ini menunjukkan bahwa dari semua orang yang memiliki hak pilih dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), 80% di antaranya telah menggunakan hak pilihnya di TPS (Tempat Pemungutan Suara), kondisi ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi.

3. **Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Prabumulih**

Organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang terdaftar dan teregistrasi adalah ormas yang telah melakukan proses pendaftaran secara resmi kepada pemerintah, baik melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pendaftaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa ormas tersebut memiliki status hukum yang sah dan dapat beroperasi secara legal.

Tabel 2.192 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada, Pilpres dan Pileg Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah organisasi yang terdaftar dan teregister	unit	42	44	20	16	40
2	Jumlah organisasi yang terdata	unit	42	44	20	16	50
3	Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister	%	100	100	100	100	80

Sumber : Kesbangpol-Kota Prabumulih

Dari Tahun 2020-2023 organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Prabumulih semuanya telah memiliki status hukum yang sah dan terdaftar secara resmi, namun karena masih ada organisasi kemasyarakatan belum teregistrasi karena belum memenuhi persyaratan pendaftaran maka capaian di Tahun 2024 hanya 80%.

4. **Persentase pembentukan Satgas anti NAPZA**

5. **Persentase Penanganan konflik berbasis ekonomi, sosial dan budaya**

Penanganan konflik berbasis ekonomi, sosial, dan budaya membutuhkan pendekatan yang holistik dan partisipatif. Contohnya, penanganan konflik kesenjangan ekonomi bisa dilakukan dengan meningkatkan pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, serta redistribusi kekayaan yang adil. Konflik sosial bisa diatasi melalui dialog terbuka, diskusi, dan pendekatan mediasi. Sementara konflik budaya bisa diatasi dengan menghargai perbedaan, mendorong dialog, dan membangun pemahaman lintas budaya.

Dalam lima tahun terakhir, di Kota Prabumulih belum pernah terjadi konflik berbasis ekonomi, sosial dan budaya.

6. Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi di wilayah

Penyelesaian konflik sosial di suatu wilayah dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan tindakan represif. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran, pendidikan, komunikasi terbuka, membangun kepercayaan, dan pemberdayaan kelompok minoritas.

Tabel 2.193 Persentase Penyelesaian Konflik Sosial yang Terjadi di wilayah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Konflik sosial yang terjadi di wilayah yang bisa diselesaikan	konflik	5	5	3	3	1
2	Jumlah Konflik sosial yang terjadi	konflik	5	5	3	3	1
3	Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi di wilayah	%	100	100	100	100	100

Sumber : Kesbangpol-Kota Prabumulih

2.5 Gambaran Keuangan Daerah

2.5.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

2.5.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah di yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari: (1) Pendapatan Daerah; (2) Belanja Daerah; dan (3) Pembiayaan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 28 ayat (1), Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah berdasarkan peraturan yang sama Pasal 28 ayat (2) meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Sedangkan Pembiayaan Daerah berdasarkan peraturan yang sama Pasal 28 ayat (3) meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Analisis APBD Kota Prabumulih dalam rangka persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 menggunakan data dengan rentang tahun anggaran 2020-2024. Penentuan batas rentang waktu ini ditujukan untuk memudahkan analisis kinerja keuangan daerah di masa lalu yang digunakan untuk memproyeksi keuangan daerah di masa mendatang. Melalui analisis keuangan dengan rentang tahun tersebut, diharapkan proyeksi keuangan daerah di masa depan semakin

akurat sehingga perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang menjadi optimal dan lebih tepat sasaran.

a. Pendapatan Daerah

Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 1 ayat (39), Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber Pendapatan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Pendapatan Transfer; dan (3) Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Daerah merupakan salah satu komponen APBD yang memiliki peranan penting karena sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendongkrak Pendapatan Daerah. Secara umum, capaian realisasi Pendapatan Daerah selama periode tahun 2020-2024 telah melampaui 100 persen. Capaian realisasi pendapatan lebih dari 100 persen berarti terdapat surplus Pendapatan Daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2020- 2024 memiliki kecenderungan yang meningkat, meskipun terdapat fluktuasi. Pada tahun 2024, realisasi Pendapatan Daerah Kota Prabumulih mencapai 1,197 triliun rupiah. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.194 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi (Rp.)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PENDAPATAN					
1.1	Pendapatan Asli Daerah	85.037.055.387	80.782.256.532	101.593.166.773	120.616.191.128	130.745.181.958
1.1.1	Pajak daerah	28.487.061.805	33.210.978.441	35.535.542.734	42.619.605.076	40.696.468.326
1.1.2	Retribusi daerah	2.802.140.947	4.333.121.255	2.662.166.936	2.549.473.205	2.327.155.212
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	2.073.589.783	2.722.577.486	2.975.144.375	5.152.489.519	3.431.153.149
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	51.674.262.852	40.515.579.350	60.420.312.728	70.294.623.328	84.290.405.270
1.2	Pendapatan Transfer	859.882.828.239	902.476.004.563	965.882.728.111	988.368.135.382	1.067.106.507.100
1.2.1	Pendapatan Transfer	764.030.861.169	813.376.494.903	854.686.260.716	863.547.132.782	922.472.570.304

No	Uraian	Realisasi (Rp.)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Pemerintah Pusat					
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	95.851.967.070	89.099.509.660	111.196.467.395	124.821.002.600	144.633.936.796
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	27.322.490.000	25.839.520.000	16.576.291.000	-	-
1.3.1	Hibah	27.322.490.000	25.839.520.000	16.576.291.000	-	-
	Total Pendapatan	972.242.373.625,39	1.009.097.781.095	1.084.052.185.884	1.108.984.326.510	1.197.851.689.058

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Prabumulih, 2020-2024

Apabila dilihat dari segi laju pertumbuhan, pertumbuhan Pendapatan Daerah yang bersifat fluktuatif dipengaruhi oleh fluktuatifnya pertumbuhan komponen Pendapatan Daerah. Laju rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam rentang tahun 2020-2024 mengalami pertumbuhan sangat kecil sebesar 0,20 persen per tahun, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan nilai 8,01 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 dengan nilai -20,34 persen. Rendahnya pertumbuhan Pendapatan Daerah pada tahun 2020 terjadi karena adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah sebesar -15,78 persen dan Pendapatan Transfer yang signifikan sebesar -21,30 persen, dimana pada tahun tersebut mulai terjadinya pandemi Covid-19.

Tabel 2.195 Pertumbuhan Komponen Pendapatan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Uraian	Capaian (%)					Rata-rata pertumbuhan (%)
		2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	(15,78)	(5,00)	25,76	18,72	8,40	5,35
1.2	Pendapatan Transfer	(21,30)	4,95	7,03	2,33	7,97	0,16
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	1,78	(5,43)	(35,85)	(100,00)	-	-
	Total Pendapatan	(20,34)	3,79	7,43	2,30	8,01	0,20

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Prabumulih, 2019-2024; Hasil Olahan, 2025

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 31 ayat (1), terdapat empat sumber PAD yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; (4) Lain-lain PAD yang Sah. Realisasi PAD pada periode tahun 2020-2024 tidak selalu melebihi target yang ditetapkan.

Selama rentang waktu tersebut, capaian PAD Kota Prabumulih dari tahun 2020 bersifat fluktuatif sampai tahun 2024 dimana terendah yaitu pada tahun 2021 dengan nilai 52,45 persen dan capaian tertinggi yaitu pada tahun 2024 dengan nilai 92,05 persen. Jika melihat dari capaian realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah, rata-rata seluruh empat komponen pendapatan asli daerah tidak selalu mencapai nilai 100 persen. Nilai capaian paling rendah adalah dari retribusi daerah yang selalu kecil setiap tahunnya, tahun 2020 capaian sebesar 57,20 persen kemudian terus menurun sampai di tahun 2024 menjadi sebesar 28,65 persen. Komponen lainnya adalah pajak daerah yang sempat meningkat di tahun 2020 sebesar 98,14 persen dan menurun sedikit di Tahun 2023 sebesar 74,50 persen. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan juga sempat meningkat tinggi di tahun 2021 sebesar 131,30 persen dan kembali menurun di tahun 2024 sebesar 89,42 persen. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah juga selama kurun waktu lima tahun capaian realisasinya mengalami kenaikan yang sebelumnya di Tahun 2020 sebesar 80,37 persen menjadi sebesar 97,64 persen di Tahun 2024.

Tabel 2.196 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi dan Capaian									
		realisasi 2020	Capaian (%)	realisasi 2021	Capaian (%)	realisasi 2022	Capaian (%)	Realisasi 2023	Capaian (%)	Realisasi 2024	Capaian (%)
1	PENDAPATAN										
1.1	Pendapatan Asli Daerah	85.037.055.386,71	84,01	80.782.256.531,97	52,45	101.593.166.773,37	75,07	120.616.191.128	90,40	130.745.181.958	92,05
1.1.1	Pajak daerah	28.487.061.805,00	98,14	33.210.978.441,00	74,50	35.535.542.734,00	89,10	42.619.605.076	100,12	40.696.468.326	93,03
1.1.2	Retribusi daerah	2.802.140.946,50	57,20	4.333.121.255,00	23,90	2.662.166.936,00	32,39	2.549.473.205	29,99	2.327.155.212	28,65
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	2.073.589.783,33	69,12	2.722.577.485,86	131,30	2.975.144.375,15	92,97	5.152.489.519	100,00	3.431.153.149	89,42
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	51.674.262.851,88	80,37	40.515.579.350,11	45,40	60.420.312.728,22	71,90	70.294.623.328	91,05	84.290.405.270	97,64

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Prabumulih, 2020-2024

Tabel 2.197Pertumbuhan Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Uraian	Capaian (%)					Rata-rata pertumbuhan (%)
		2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	(15,78)	(5,00)	25,76	18,72	8,40	5,35
1.1.1	Pajak daerah	(5,64)	16,58	7,00	19,94	(4,51)	5,56
1.1.2	Retribusi daerah	(25,05)	54,64	(38,56)	(4,23)	(8,72)	(3,65)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	17,87	31,30	9,28	73,18	(33,41)	16,37
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	(20,85)	(21,59)	49,13	16,34	19,91	7,16

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Prabumulih, 2019-2023; Hasil Olahan, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa masing-masing komponen PAD mengalami fluktuasi pertumbuhan, dimana pertumbuhan negatif menunjukkan penurunan jumlah PAD. Dalam rangka optimalisasi PAD Kota Prabumulih, diharapkan pertumbuhan PAD terus berjalan signifikan sehingga struktur PAD pada Pendapatan Daerah Kota Prabumulih dapat semakin menguat. Penguatan PAD salah satunya dapat dilakukan dengan optimalisasi Pajak Daerah, sebagai komponen PAD yang memiliki kontribusi paling dominan di Kota Prabumulih

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 34 ayat (1), Pendapatan Transfer terbagi atas dua komponen utama, yang meliputi: (1) Transfer Pemerintah Pusat, yang terdiri dari: (a) Dana Perimbangan; (b) Dana Otonomi Khusus; (c) Dana Keistimewaan; dan (d) Dana Desa; dan (2) Transfer Antar Daerah, yang terdiri dari: (a) Pendapatan Bagi Hasil; dan (b) Bantuan Keuangan.

Tabel 2.198 Realisasi dan Capaian Pendapatan Transfer Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi									
		2020	Capaian (%)	2021	Capaian (%)	2022	Capaian (%)	2023	Capaian (%)	2024	Capaian (%)
1.2	Pendapatan Transfer	859.882.828.239	105	902.476.004.563	107	965.882.728.111	110	988.368.135.382	99	1.067.106.507.100	104
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	764.030.861.169	105	813.376.494.903	108	854.686.260.716	110	863.547.132.782	98	922.472.570.304	106
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	95.851.967.070	101	89.099.509.660	101	111.196.467.395	112	124.821.002.600	105	144.633.936.796	93

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Prabumulih, 2020-2024

Realisasi Pendapatan Transfer pada tahun 2020-2024 rata-rata di atas 100 persen namun di tahun 2023 menurun sedikit yaitu sebesar 99 persen, hal ini berarti menunjukkan persentase capaian yang sangat tinggi. Selama rentang tahun 2020-2024, capaian Pendapatan Transfer tertinggi yaitu pada tahun 2022 dengan nilai 110 persen.

Apabila dilihat dari segi laju pertumbuhan, rata-rata pertumbuhan Pendapatan Transfer terus menurun selama kurun waktu lima tahun. Laju rata-rata pertumbuhan Pendapatan Transfer dalam rentang tahun 2019-2024 sebesar -0,19 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan nilai 7,97 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 dengan nilai -21,30 persen. Urutan komponen Pendapatan Transfer dengan pertumbuhan terbesar ke terkecil, yaitu: (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dengan nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 0,79 persen per tahun; dan (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah, dengan nilai rata-rata pertumbuhan sebesar -0,69 persen per tahun.

Tabel 2.199 Pertumbuhan Komponen Pendapatan Transfer Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Uraian	Capaian (%)					Rata-rata pertumbuhan (%)
		2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	
1.2	Pendapatan Transfer	(21,30)	4,95	7,03	2,33	7,97	0,19
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	(15,43)	6,46	5,08	1,04	6,82	0,79
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	(49,34)	(7,04)	24,80	12,25	15,87	(0,69)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Prabumulih, 2019-2024 Hasil Olahan, 2025

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh Pendapatan Daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 295 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 46, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terbagi atas tiga komponen utama, yang meliputi: (1) Hibah; (2) Dana Darurat; dan (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Capaian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada periode tahun 2020-2024 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2020 merupakan capaian terbesar pada komponen ini yaitu sebesar 101,93 persen dari target. Kemudian sempat terjadi penurunan capaian di tahun 2021 sebesar 86,41 persen namun meningkat kembali di tahun 2022 sebesar 100,30 persen. Pada Tahun 2023 dan 2024 tidak ada sumber pendapatan yang dianggarkan sehingga realisasi dan capaian anggaran menjadi 0 persen.

Tabel 2.200 Capaian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi									
		2020	Capaian (%)	2021	Capaian (%)	2022	Capaian (%)	2023	Capaian (%)	2024	Capaian (%)
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	27.322.490.000	101,93	25.839.520.000	86,41	16.576.291.000	100,30	-		-	
1.3.1	Hibah	27.322.490.000	101,93	-		16.576.291.000	100,30	-		-	
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		25.839.520.000	86,41	-		-		-	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Prabumulih, 2020-2024

b. Belanja Daerah

Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 1 ayat (40), Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Lampiran pada peraturan ini, tujuan dari analisis Belanja Daerah adalah untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Secara umum, capaian realisasi Belanja Daerah selama periode tahun 2020-2024 lebih dari 80 persen, yang berarti memiliki deviasi realisasi kurang dari 20 persen. Realisasi Belanja Daerah tahun 2020-2024 memiliki kecenderungan yang menurun, meskipun terdapat fluktuasi. Pada tahun 2024, realisasi Belanja Daerah Kota Prabumulih mencapai 1.92 triliun rupiah dengan capaian realisasi 87,09 persen yang berarti masih terdapat anggaran sebesar 176 miliar yang tidak terserap oleh belanja daerah.

Tabel 2.201 Realisasi Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Uraian	Pagu Belanja (dalam miliar rupiah)														
		Anggaran 2020	realisasi 2020	Capaian (%)	Anggaran 2021	realisasi 2021	Capaian (%)	Anggaran 2022	realisasi 2022	Capaian (%)	Anggaran 2023	realisasi 2023	Capaian (%)	Anggaran 2024	realisasi 2024	Capaian (%)
2	Belanja Daerah															
2,1	Belanja Operasi	816	756	92,63	837	743	88,83	900	792	88,00	931	807	86,71	1000	898	89,83
2,2	Belanja Modal	228	220	96,41	215	169	78,70	196	168	85,79	249	233	93,53	283	251	88,55
2,3	Belanja Tidak Terduga	48	46	97,19	5	5	99,85	7	1	16,62	2	0,76	28,54	4	0,91	18,88
2,4	Belanja Transfer	24	30	121,50	55	30	54,29	69	34	49,91	80	35	44,57	80	42	52,15
Total Belanja Daerah		1.118	1.054	94,25	1.113	949	85,20	1.173	996	84,93	1.264	1.077,76	85,24	1.369	1.192,91	87,09

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Prabumulih, 2020-2024

Selama periode tahun 2020-2024, kontribusi dari keempat komponen Belanja Daerah memiliki proporsi yang berbeda, dimana Belanja Operasi selalu menjadi komponen dengan kontribusi terbesar. Kontribusi Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah bersifat fluktuatif menyesuaikan dengan Pendapatan Daerah. Pada Tahun 2020 kontribusi Belanja Operasi sebesar 71,76 persen dan meningkat pada tahun selanjutnya hingga menjadi 75,35 persen pada tahun 2024. Selama rentang tahun 2020-2024, rata-rata kontribusi Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah sebesar 75,98 persen. Kontribusi terbesar ke dua selama tahun 2020-2024 setelah Belanja Operasi adalah Belanja Modal, dengan rata-rata kontribusi sebesar 19,26 persen. Pada tahun 2020, kontribusi Belanja Modal sebesar 20,94 persen dan mengalami peningkatan menjadi 21,05 persen pada tahun 2024. Kontribusi terbesar ke tiga adalah Belanja Transfer, dengan rata-rata kontribusi sebesar 3,28 persen. Pada tahun 2020, kontribusi Belanja Transfer sebesar 2,88 persen dan mengalami peningkatan menjadi 3,53 persen pada tahun 2024. Sedangkan untuk Belanja Tidak Terduga, merupakan komponen Belanja Daerah dengan kontribusi terkecil dengan rata-rata kontribusi sebesar 1,05 persen per tahun. Pada tahun 2020, kontribusi Belanja Tidak Terduga sebesar 4,43 persen dan mengalami penurunan hingga menjadi 0,08 persen pada tahun 2024.

Tabel 2.202 Kontribusi Komponen Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Uraian	Kontribusi (%)					Rata-rata (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2	Belanja Daerah						
2.1	Belanja Operasi	71,76	78,36	79,50	74,92	75,35	75,98
2.2	Belanja Modal	20,94	17,90	16,89	21,67	21,05	19,69
2.3	Belanja Tidak Terduga	4,43	0,57	0,12	0,07	0,08	1,05
2.4	Belanja Transfer	2,88	3,18	3,49	3,34	3,53	3,28

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Prabumulih, 2020-2024; Hasil Olahan, 2025

Apabila dilihat dari segi laju pertumbuhan, pertumbuhan Belanja Daerah yang bersifat fluktuatif dipengaruhi oleh fluktuatifnya pertumbuhan komponen Belanja Daerah, Laju rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah dalam rentang tahun 2020-2024 mencapai 10,46 persen per tahun, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023-2024 dengan nilai 110,69 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020-2021 dengan nilai 90,01 persen. Rendahnya pertumbuhan Belanja Daerah pada tahun 2020-2021 terjadi karena adanya penurunan Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Transfer meskipun pada tahun tersebut terjadi peningkatan Belanja Tidak Terduga yang sangat tinggi. Akan tetapi, penurunan Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Transfer jauh lebih besar dibandingkan peningkatan Belanja Tidak Terduga. Pertumbuhan Belanja Daerah yang cukup drastis ini sebagai akibat mulai terjadinya pandemi Covid-19. Pada

tahun 2024, pertumbuhan Belanja Operasi mengalami peningkatan menjadi 111,31 persen. Sama halnya dengan Belanja transfer di tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 116,92 persen. Selanjutnya, Belanja Tidak Terduga selama tahun 2020-2024 memiliki rata-rata pertumbuhan terendah di antara komponen Belanja Daerah lainnya, yaitu mencapai 54,57 persen per tahun, dengan pertumbuhan terbesar di tahun 2024 sebesar 120,71 persen dan pertumbuhan terkecil di tahun 2021 sebesar 11,48 persen, yang merupakan pertumbuhan Belanja Tidak Terduga paling rendah selama tahun 2020-2024. Sedangkan untuk Belanja Modal, rata-rata pertumbuhan selama tahun 2020-2024 sebesar 105,57 persen per tahun, dengan pertumbuhan terkecil di tahun 2021 sebesar 76,96 persen dan terus meningkat hingga menjadi 138,79 persen di tahun 2023 dan turun menjadi 107,52 persen di tahun 2024.

Tabel 2.203 Pertumbuhan Komponen Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Uraian	Pertumbuhan (%)				Rata-rata Pertumbuhan (%) tahun)
		2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	
2	Belanja Daerah	90,01	104,98	108,16	110,69	103,46
2.1	Belanja Operasi	98,29	106,51	101,93	111,31	104,51
2.2	Belanja Modal	76,96	99,03	138,79	107,52	105,57
2.3	Belanja Tidak Terduga	11,48	22,18	63,91	120,71	54,57
2.4	Belanja Transfer	99,46	115,30	103,54	116,92	108,80

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Prabumulih, 2020-2024; Hasil Olahan, 2025

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 56 ayat (1), Belanja Operasi terdiri atas: (1) Belanja Pegawai; (2) Belanja Barang dan Jasa; (3) Belanja Bunga; (4) Belanja Subsidi; (5) Belanja Hibah; dan (6) Belanja Bantuan Sosial.

Rata-rata realisasi Belanja Operasi pada periode tahun 2020-2024 sebesar 89,20 persen, yang berarti menunjukkan persentase capaian yang tinggi karena deviasi sebesar 10,80 persen. Selama rentang tahun 2020-2024, capaian Belanja Operasi tertinggi yaitu pada tahun 2020 dengan nilai 92,63 persen dan capaian terendah yaitu pada tahun 2023 dengan nilai 86,71 persen.

Tabel 2.204 Realisasi Belanja Operasi Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi dan Capaian									
		realisasi 2020	Capaian (%)	realisasi 2021	Capaian (%)	realisasi 2022	Capaian (%)	Realisasi 2023	Capaian (%)	Realisasi 2024	Capaian (%)
2.1	Belanja Operasi	756.561.301.247,00	92,63	743.636.956.940,00	88,83	792.083.420.550,00	88,00	807.362.098.158,74	86,71	898.693.350.067,46	89,83
2.1.1	Belanja Pegawai	386.054.471.569,00	95,66	451.962.609.849,00	94,02	454.864.617.569,00	91,18	458.313.784.463,74	84,46	543.237.553.226,50	94,03
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	341.043.554.087,00	89,89	276.705.928.588,00	81,83	320.310.013.037,00	84,01	321.530.318.359,00	89,27	314.314.436.064,46	84,15
2.1.3	Belanja Subsidi									864.037.500,00	99,74
2.1.4	Belanja Hibah	29.298.275.591,00	87,22	12.762.138.503,00	79,63	13.792.169.944,00	86,63	27.148.515.336,00	97,18	40.018.603.276,50	83,28
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	165.000.000,00	82,09	2.206.280.000,00	96,43	3.116.620.000,00	77,01	369.480.000,00	97,86	258.720.000,00	98,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Prabumulih, 2020-2024

Realisasi Belanja Operasi selama periode tahun 2020-2024 yang fluktuatif dipengaruhi oleh fluktuatifnya kontribusi komponen pembentuk Belanja Operasi. Urutan komponen Belanja Operasi dari rata- rata kontribusi terbesar ke terkecil, yaitu: (1) Belanja Pegawai, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 57,29 persen dan kontribusi pada tahun 2024 sebesar 60,45 persen; (2) Belanja Barang dan Jasa, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 39,51 persen dan kontribusi pada tahun 2023 sebesar 34,97 persen; (3) Belanja Hibah, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 3,03 persen dan kontribusi pada tahun 2024 sebesar 4,45 persen; (4) Belanja Subsidi dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 0,10 persen dan kontribusi pada tahun 2024 sebesar 0,10 persen; (5) Belanja Bantuan Sosial dengan nilai rata kontribusi sebesar 0,16 persen dan kontribusi sebesar 0,03 persen di tahun 2024.

Tabel 2.205 Kontribusi Komponen Belanja Operasi Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Uraian	Kontribusi (%)					Rata-Rata (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2,1	Belanja Operasi						
2.1.1	Belanja Pegawai	51,03	60,78	57,43	56,77	60,45	57,29
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	45,08	37,21	40,44	39,82	34,97	39,51
2.1.3	Belanja Subsidi					0,10	0,10
2.1.4	Belanja Hibah	3,87	1,72	1,74	3,36	4,45	3,03
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0,02	0,30	0,39	0,05	0,03	0,16

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Prabumulih, 2020-2024; Hasil Olahan, 2025

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 56 ayat (2), disebutkan bahwa Belanja Modal dirinci atas jenis Belanja Modal.

Rata-rata realisasi Belanja Modal pada periode tahun 2020-2024 sebesar 88,60 persen, yang berarti menunjukkan persentase capaian yang tinggi karena deviasi kurang dari 11,40 persen. Selama rentang tahun 2020-2024, capaian Belanja Modal tertinggi yaitu pada tahun 2020 dengan nilai 96,41 persen dan capaian terendah yaitu pada tahun 2021 dengan nilai 78,70 persen. Sedangkan capaian Belanja Modal pada tahun 2024 yaitu sebesar 88,55 persen.

Tabel 2.206 Realisasi Belanja Modal Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun										Rata-rata (%)
		realisasi 2020	Capaian (%)	realisasi 2021	Capaian (%)	realisasi 2022	Capaian (%)	realisasi 2023	Capaian (%)	realisasi 2024	Capaian (%)	
2,2	Belanja Modal	220.756.462.110,66	96,41	169.883.537.767,00	78,70	168.233.155.773,00	85,79	233.487.862.056,73	93,53	251.051.778.496,09	88,55	88,60
2.2.1	Belanja Modal Tanah	922.500.000,00	80,71	3.769.045.000,00	48,06	5.247.486.000,00	67,55	102.906.000,00	8,95	234.278.000,00	72,09	55,47
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.748.022.380,00	92,61	21.392.623.989,00	84,22	26.569.489.974,00	83,77	65.600.384.935,00	90,37	47.215.680.414,00	89,58	88,11
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.883.633.009,00	98,14	41.781.087.294,00	77,62	31.210.593.527,00	73,75	30.987.921.863,35	92,38	29.907.428.954,00	92,46	86,87
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	153.927.062.066,66	96,91	93.789.110.754,00	78,77	103.029.998.130,00	92,59	132.652.584.758,38	96,36	169.550.570.978,09	87,41	90,41
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.275.244.655,00	97,45	9.151.670.730,00	94,09	2.175.588.142,00	71,86	4.144.064.500,00	88,48	4.143.820.150,00	99,08	90,19

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Prabumulih, 2020-2024

Realisasi Belanja Modal selama periode tahun 2020-2024 yang fluktuatif dipengaruhi oleh fluktuatifnya kontribusi komponen pembentuk Belanja Modal. Urutan komponen Belanja Modal dari rata-rata kontribusi terbesar ke terkecil, yaitu: (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 61,22 persen dan kontribusi pada tahun 2024 sebesar 67,54 persen; (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 19,48 persen dan kontribusi pada tahun 2024 sebesar 18,81 persen; (3) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 16,08 persen dan kontribusi pada tahun 2024 sebesar 11,91 persen; (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 2,23 persen dan kontribusi pada tahun 2024 sebesar 1,65 persen; (5) Belanja Modal Tanah, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 0,99 persen dan kontribusi pada tahun 2024 sebesar 0,99 persen. Dari penjelasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2020-2024 pembentuk komponen belanja modal adalah pada Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi.

Tabel 2.207 Kontribusi Komponen Belanja Modal Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Uraian	Kontribusi (%)					Rata-Rata (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.2	Belanja Modal						
2.2.1	Belanja Modal Tanah	0,42	2,22	3,12	0,04	0,09	0,99
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13,48	12,59	15,79	28,10	18,81	19,48
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14,90	24,59	18,55	13,27	11,91	16,08
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	69,73	55,21	61,24	56,81	67,54	61,22
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,48	5,39	1,29	1,77	1,65	2,23

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Prabumulih, 2020-2024; Hasil Olahan, 2025

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 56 ayat (3), disebutkan bahwa Belanja Tidak Terduga dirinci atas jenis Belanja Tidak Terduga. Rata-rata realisasi Belanja Tidak Terduga pada periode tahun 2020-2024 sebesar 52,22 persen. Selama rentang tahun 2020-2024, capaian Belanja Tidak Terduga tertinggi yaitu pada tahun 2021 dengan nilai 99,85 persen dan capaian terendah yaitu pada tahun 2022 dengan nilai 16,62 persen.

Tabel 2.208 Realisasi dan Capaian Belanja Tidak Terduga Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi dan Capaian									
		realisasi 2020	(%)	realisasi 2021	(%)	realisasi 2022	(%)	realisasi 2023	(%)	realisasi 2024	(%)
2,3	Belanja Tidak Terduga	46.713.255.000	97,19	5.364.887.909	99,85	1.189.695.212	16,62	760.345.000	28,54	917.830.200	18,88

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Prabumulih, 2020-2024; Hasil Olahan, 2025

Kontribusi Belanja Tidak Terduga selama periode tahun 2020-2024 bersifat fluktuatif, dengan rata-rata kontribusi sebesar 1,06 persen. Pada tahun 2020, kontribusi Belanja Tidak Terduga sebesar 4,43 persen yang merupakan kontribusi tertinggi pada periode tahun 2020-2024. Peningkatan tersebut disebabkan karena untuk melakukan Tindakan cepat untuk pemulihan dan penindakan terhadap Covid-19. Angka kontribusi ini kemudian menurun drastis setelah Covid-19 mulai berakhir sehingga menjadi 0,61 persen pada tahun 2021, menurun lagi drastis menjadi 0,12 persen pada tahun 2022, dan menurun lagi menjadi 0,08 persen pada tahun 2024.

Tabel 2.209 Kontribusi Komponen Belanja Tidak Terduga Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Uraian	Kontribusi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.3	Belanja Tidak Terduga	4,43	0,61	0,12	0,07	0,08

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Prabumulih, 2020-2024; Hasil Olahan, 2025

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 56 ayat (4), Belanja Transfer terdiri atas: (1) Belanja Bagi Hasil; dan (2) Belanja Bantuan Keuangan. Rata-rata realisasi Belanja Transfer pada periode tahun 2020-2024 sebesar 64,48 persen, yang berarti menunjukkan persentase capaian yang cukup karena deviasi sebesar 35,52 persen. Selama rentang tahun 2020-2024, capaian Belanja Transfer tertinggi yaitu pada tahun 2020 dengan nilai 121,50 persen dan capaian terendah yaitu pada tahun 2023 dengan nilai 44,57 persen

Tabel 2.210 Realisasi Belanja Transfer Kota Prabumulih Tahun 2020-2023

No	Uraian	Realisasi dan Capaian										Rata-rata (%)
		realisasi 2020	Capaian (%)	realisasi 2021	Capaian (%)	realisasi 2022	Capaian (%)	realisasi 2023	Capaian (%)	realisasi 2024	Capaian (%)	
2,4	Belanja Transfer	30.320.916.918,00	121,50	30.156.449.400,00	54,29	34.769.666.466,00	49,91	35.999.952.380,00	44,57	42.092.088.380,00	52,15	64,48

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Prabumulih, 2020-2024

Selama tahun 2020-2024, Belanja Transfer hanya didukung oleh Belanja Bantuan Keuangan, sehingga kontribusi komponen Belanja Bantuan Keuangan pada rentang tahun tersebut mencapai 100 persen. Sedangkan untuk komponen Belanja Bagi Hasil selama tahun 2020-2024 tidak terdapat target dan realisasi.

Tabel 2.211 Kontribusi Komponen Belanja Transfer Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Uraian	Kontribusi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.4	Belanja Transfer	2,88	3,18	3,49	3,34	3,53
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	0	0	0	0	0
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	100,00	100,00	100	100	100

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Prabumulih, 2020-2024; Hasil Olahan, 2025

c. Pembiayaan Daerah

Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 1 ayat (41). Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Sama halnya dengan analisis Belanja Daerah, analisis Pembiayaan Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 70 ayat (1), Pembiayaan Daerah terdiri atas: (1) Penerimaan Pembiayaan; dan (2) Pengeluaran Pembiayaan, Pasal 70 ayat (3) peraturan yang sama menyebutkan bahwa terdapat enam sumber Penerimaan Pembiayaan, yaitu: (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); (2) Pencairan Dana Cadangan; (3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; (4) Penerimaan Pinjaman Daerah; (5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan (6) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Sedangkan dalam Pasal 70 ayat (4) disebutkan bahwa Pembiayaan Daerah tersebut dapat digunakan untuk lima hal, yaitu: (1) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; (2) Penyertaan Modal Daerah; (3) Pembentukan Dana Cadangan; (4) Pemberian Pinjaman Daerah; dan (5) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya, selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan disebut dengan Pembiayaan Netto, dimana Pembiayaan Netto ini digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Selama tahun 2020-2024, Penerimaan Pembiayaan Kota Prabumulih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Pengeluaran Pembiayaan, Tingginya Penerimaan Pembiayaan banyak didukung oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dengan proporsi yang selalu berada di atas 99 persen. Pada tahun 2024, Penerimaan Pembiayaan Kota Prabumulih mencapai 147 miliar rupiah, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan mencapai 2 miliar rupiah dimana proporsi pengeluaran paling besar adalah Penyertaan Modal Daerah. Persentase Pengeluaran Pembiayaan dibandingkan Penerimaan Pembiayaan berkisar antara 1,35 persen sehingga Pembiayaan Netto dan SiLPA yang dihasilkan cukup besar. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan realisasi keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien, SiLPA pada tahun 2020 mencapai 171 miliar rupiah dan mengalami fluktuasi hingga menjadi 147 miliar rupiah pada tahun 2024.

Nominal Pembiayaan Netto yang positif menunjukkan bahwa daerah mampu mencukupi Pengeluaran Pembiayaan dikarenakan Penerimaan Pembiayaan yang lebih besar. Secara umum, Pembiayaan Netto di Kota Prabumulih selama periode tahun 2020-2024 selalu menunjukkan capaian positif walaupun sempat terjadi persentase yang turun di tahun 2022 namun di tahun selanjutnya telah mencapai nilai 100 persen dibandingkan target.

Tabel 2.212 Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi dan Capaian									
		realisasi 2020	(%)	realisasi 2021	(%)	realisasi 2022	(%)	realisasi 2023	(%)	realisasi 2024	(%)
3	PEMBIAYAAN										
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	171.866.820.389,63	100,00	89.757.216.580,36	100,00	147.952.735.340,41	99,89	147.952.735.340,41	100,00	147.952.735.340,41	100,00
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	171.866.820.389,63	100,00	89.757.216.580,36	100,00	147.952.735.340,41	99,89	147.952.735.340,41	100,00	147.952.735.340,41	100,00
3.1.2	Penerimaan piutang daerah					-		-		-	
3.1.3	Penerimaan Dana Talangan					-		-		-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			1.700.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00	100,00
3.2.1	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah/BUMD			1.700.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00	100,00
3.2.2	Pembayaran Pokok utang			-		-		-		-	
3.2.3	Dana Talangan			-		-		-		-	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Prabumulih, 2020-2024

Pembiayaan Netto Kota Prabumulih selama periode 2020-2024 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 104,25 persen per tahun, dengan pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 165,75 persen dan pertumbuhan terkecil terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 51,24 persen. Sedangkan SILPA selama periode tahun 2020-2024 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 126,01 persen per tahun, dengan pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 165,02 persen dan pertumbuhan terkecil terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 78,47 persen.

Tabel 2.213 Pertumbuhan Pembiayaan Netto dan SiLPA Kota Prabumulih Tahun 2020-2023

Uraian	Pertumbuhan (%)				Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	
Pembiayaan Netto	51,24	165,75	100,00	100,00	104,25
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	165,02	157,80	78,47	102,76	126,01

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Prabumulih, 2020-2024; Hasil Olahan, 2025

Secara umum dapat dijelaskan bahwa Kota Prabumulih masih sangat bergantung dengan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. Hal ini dibuktikan bahwa pada Tahun 2024, rasio kemandirian fiskal adalah sebesar 10,91%, ketergantungan fiskal sebesar 89,09% dan rasio belanja modal adalah sebesar 21,05%.

2.5.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu, Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah, maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu, Elemen utama neraca daerah meliputi: (1) aset; (2) kewajiban; dan (3) ekuitas dana, yang diturunkan lebih rinci ke dalam sub-sub rekening.

a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang, Aset diklasifikasikan ke dalam Aset Lancar (current asset) dan Aset Non Lancar/Tetap (long-term asset). Pada umumnya, jumlah aset Kota Prabumulih cenderung meningkat dari tahun ke tahun, baik Aset Lancar maupun Aset Tetap, Pada tahun 2024, jumlah aset Kota Prabumulih mencapai 2,97 triliun rupiah,

dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,12 per tahun selama tahun 2020-2024, Komponen aset dengan jumlah paling dominan yaitu Aset Tetap sebesar 2,5 triliun rupiah (84,82 persen dari total aset) pada tahun 2024 dan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,63 persen per tahun. Pada tahun 2024, komponen lainnya yaitu Investasi Jangka Panjang sebesar 46 miliar rupiah (1,54 persen dari total aset); Aset Lancar sebesar 364 miliar rupiah (12,22 persen dari total aset); dan Aset Lainnya sebesar 41,68 miliar rupiah (1,4 persen dari total aset).

b. Kewajiban

Kewajiban timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu, Kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan atau lembaga lain, Selain itu, kewajiban juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Kewajiban dikelompokkan kedalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Pada periode tahun 2020-2024, rata-rata pertumbuhan kewajiban daerah Kota Prabumulih yaitu 48,97 persen per tahun, dimana seluruh kewajiban berasal dari komponen Kewajiban Jangka Pendek. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar -65,46 persen. Pada tahun 2024, total kewajiban dalam neraca daerah Kota Prabumulih sebesar 44,74 miliar rupiah, yang berarti jumlah aset lebih besar dibandingkan jumlah kewajiban daerah. Kewajiban ini terdiri dari Utang Beban sebesar 32,89 miliar rupiah (73,52 persen dari total Kewajiban Jangka Pendek); dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar 11,84 miliar rupiah (26,48 persen dari total Kewajiban Jangka Pendek).

c. Ekuitas Dana

Ekuitas merupakan kekayaan bersih yaitu selisih antara aset dan kewajiban, dalam hal ini adalah ekuitas dana pemerintah daerah. Dalam periode tahun 2020-2024, rata-rata pertumbuhan ekuitas sebesar 2,97 persen per tahun. Jumlah ekuitas terus meningkat selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2020, jumlah ekuitas dana adalah sebesar 2,6 miliar rupiah dan bertambah sebesar 323 juta rupiah di tahun 2024 sehingga jumlah ekuitas dana pada tahun 2024 adalah sebesar 2,9 miliar rupiah.

Tabel 2.214 Neraca Keuangan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata Rata Pertumbuhan (%)
1	Aset	2.633.860.508.464	2.699.518.759.429	2.756.127.306.842	2.871.854.991.202	2.977.915.091.855	3,12
1.1	Aset Lancar	161.148.017.787	190.383.985.693	274.588.172.569	233.704.001.527	364.122.204.316	25,82
1.2	Investasi Jangka Panjang	67.487.436.703	62.965.828.809	61.846.020.531	52.214.542.646	46.045.480.407	(8,97)
1.3	Aset Tetap	2.368.980.508.107	2.415.027.440.621	2.392.238.439.740	2.448.148.630.818	2.526.058.083.308	1,63
1.5	Aset Lainnya	36.244.545.867	31.141.504.305	27.454.674.002	137.787.816.211	41.689.323.825	76,55
2	Kewajiban	24.505.424.469	66.066.026.894	22.820.638.704	42.611.116.922	44.745.680.252	48,97
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	24.505.424.469	66.066.026.894	22.820.638.704	42.611.116.922	44.745.680.252	48,97
2.2	Kewajiban Jangka Panjang	-					
3	Ekuitas Dana	2.609.355.083.996	2.633.452.732.534	2.733.306.668.138	2.829.243.874.280	2.933.169.411.603	2,97
	Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas	2.633.860.508.464	2.699.518.759.429	2.756.127.306.842	2.871.854.991.202	2.977.915.091.855	3,12

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Prabumulih, 2020-2024; Hasil Olahan, 2025

Analisis rasio keuangan diantaranya terdiri dari Rasio Lancar (*current ratio*), Rasio Cepat (*quick ratio*), Rasio Total Hutang terhadap Total Aset, dan lainnya. Rata-rata nilai rasio lancar Kota Prabumulih dalam periode tahun 2020-2024 bernilai tinggi, dengan rata-rata pertumbuhan 39,04 persen per tahun dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 288,17 persen dan mengalami peningkatan hingga menjadi 1203,04 persen pada tahun 2022, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 813,76 persen. Semakin tinggi nilai rasio lancar menunjukkan bahwa nilai aset melampaui kewajiban jangka pendek, sehingga daerah memiliki kemampuan yang tinggi dalam membayar kewajibannya. Selanjutnya, rasio cepat juga mengalami pertumbuhan nilai yg fluktuatif dengan pertumbuhan paling rendah di tahun 2021 sebesar 266,52 persen dan meningkat drastis sebesar 1151,08 persen di tahun 2022, kemudian kembali turun menjadi 768,83 persen di tahun 2024. Rasio lancar menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Prabumulih dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik setelah dikurangi nilai persediaan.

Rasio Total Hutang terhadap Total Aset menunjukkan perbandingan antara jumlah seluruh kewajiban dan jumlah seluruh aset. Dalam periode tahun 2020-2024, nilai Rasio Total Hutang terhadap Total Aset Kota Prabumulih mengalami fluktuatif, yang berarti bagian aset yang digunakan untuk membayar kewajiban juga sangat kecil. Pada tahun 2020, Rasio Total Hutang terhadap Total Aset sebesar 0,93 persen tetapi mengalami fluktuatif hingga menjadi sebesar 0,20 persen pada tahun 2024. Begitu juga dengan Rasio Total Hutang terhadap modal menunjukkan kemampuan modal pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban. Nilai Rasio Total Hutang terhadap Total Ekuitas hampir sama dengan nilai Rasio Total Hutang terhadap Total Aset yang disebabkan nilai aset dan ekuitas yang hampir sama.

Dalam analisis rasio keuangan, Rasio Lancar (*current ratio*) termasuk dalam analisis Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*), yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan keuangan dalam memenuhi Kewajiban Jangka Pendek. Sedangkan Rasio Total Hutang terhadap Total Aset maupun Rasio Total Hutang terhadap Total Ekuitas termasuk dalam analisis Rasio Solvabilitas, yang dimaksudkan untuk mengukur perbandingan dana yang harus dikeluarkan untuk membayar kewajiban terhadap aset maupun modal yang dimiliki. Dengan demikian, berdasarkan analisis Neraca Daerah dapat disimpulkan bahwa Kota Prabumulih memiliki kemampuan keuangan daerah yang baik, sehingga perlu dipertahankan maupun ditingkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaannya.

Tabel 2.215 Analisis Rasio Keuangan Kota Prabumulih Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan
A. Rasio Likuiditas							
1	Rasio lancar (<i>current ratio</i>) (%)	657,6,0	288,17	1203,24	548,46	813,76	39,04
2	Rasio cepat (<i>quick ratio</i>) (%)	593,80	266,52	1151,08	519,56	768,83	43,76
B. Rasio Solvabilitas							
3	Rasio total utang terhadap total aset (%)	0,93	2,45	0,83	1,48	1,73	0,2
4	Rasio utang terhadap ekuitas (%)	0,94	2,51	0,83	1,51	1,51	0,14

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Prabumulih, 2020-2024; Hasil Olahan, 2025

2.5.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

2.5.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran dapat ditinjau dari komponen Belanja Daerah Kota Prabumulih, khususnya Belanja Pegawai. Proporsi Belanja Pegawai dapat menunjukkan apakah penggunaan keuangan daerah terlaksana dengan efisien. Semakin tinggi proporsi Belanja Pegawai maka semakin rendah penggunaan anggaran yang bersifat substansial pembangunan, begitu pula sebaliknya, semakin rendah proporsi Belanja Pegawai maka semakin tinggi penggunaan anggaran yang bersifat substansial pembangunan. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan efisiensi penggunaan anggaran pada keuangan daerah.

Tabel 2.216 Analisis Proporsi Pemenuhan Kebutuhan Aparatur 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Pegawai	386.054.471.569	451.962.609.849	454.864.617.569	458.313.784.464	543.237.553.227
Belanja Daerah	1.024.031.018.358	949.041.832.016	996.275.938.001	1.077.610.257.595	1.192.755.047.144
Proporsi Belanja Pegawai	37,70	47,62	45,66	42,53	45,54

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Prabumulih, 2020-2024; Hasil Olahan, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa proporsi Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, dimana nilai proporsi berkisar antara 40 persen. Hal tersebut mengindikasikan kemajuan yang baik dalam hal peningkatan pelayanan publik maupun peningkatan pembangunan daerah. Pada tahun 2020, nilai Belanja Aparatur sebesar 386 miliar rupiah atau 37,70 persen terhadap Belanja Daerah. Nilai Belanja Aparatur ini kemudian terus meningkat menjadi 451 miliar rupiah atau 47,62 persen terhadap Belanja Daerah pada tahun 2021, dan mengalami penurunan pada tahun 2024 yaitu dengan nilai 543 miliar rupiah atau 45,54 persen terhadap Belanja Daerah.

2.5.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan keuangan daerah Kota Prabumulih ditinjau berdasarkan surplus ataupun defisit anggaran. Kondisi surplus berarti Pendapatan Daerah lebih besar daripada Belanja Daerah, sebaliknya kondisi defisit berarti Belanja Daerah lebih besar daripada Pendapatan Daerah. Kondisi keuangan daerah Kota Prabumulih dalam periode

tahun 2020-2024 mengalami nilai positif. Pada tahun 2020, terjadi penurunan defisit sebesar 51 miliar rupiah akibat dari pandemi Covid 19 dimana dana transfer pusat berkurang ke daerah. Meskipun demikian, terjadi peningkatan surplus yang cukup drastis pada tahun 2021 menjadi surplus 60,05 miliar rupiah atau 115 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2024 angka tersebut menurun sebesar 11,78% menjadi 5 miliar rupiah.

Tabel 2.217 Surplus/Defisit Anggaran Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

NO	Uraian	Realisasi (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan Daerah	972.242.373.625	1.009.097.781.095	1.084.052.185.884	1.108.984.326.510	1.197.851.689.058
2	Belanja Daerah	1.024.031.018.358	949.041.832.016	996.275.938.001	1.077.610.257.595	1.192.755.047.144
	Surplus/Defisit	(51.788.644.732)	60.055.949.079	87.776.247.883	31.374.068.915	5.096.641.914

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Prabumulih, 2020-2024

SILPA tahun sebelumnya digunakan untuk menutup defisit riil yang menjadi penerimaan pembiayaan. Pada tabel diatas terlihat bahwa rata-rata realisasi pendapatan masih lebih besar daripada realisasi belanja sehingga tidak diperlukan anggaran penutup defisit riil kecuali pada tahun 2020 yang mengalami defisit sebesar 51 miliar rupiah. Gambaran komposisi penutup defisit riil dapat dilihat sebagaimana pada tabel 2.218 berikut.

Tabel 2.218 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2020-2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	171.866.820.390	89.757.216.580	147.952.735.340	154.555.170.974	183.374.044.407
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang diPisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kota Prabumulih 2025

2.5.3 Kerangka Pendanaan

2.5.3.1 Proyeksi Pendanaan 2026-2030

Perhitungan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Prabumulih terkait erat dengan kapasitas daerah untuk membangun dan memberikan pelayanan publik. Pelaksanaan pembangunan Kota Prabumulih bergantung pada anggaran selama lima tahun ke depan. Proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan histori pendapatan selama lima tahun ke belakang. Proyeksi keuangan juga didasarkan pada rencana dan target pemerintah daerah. Perkiraan Pendapatan Daerah disajikan secara indikator dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.

Tabel 2.219 Proyeksi Keuangan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN	1.197.851.689.058,00	1.209.830.205.948,00	1.221.928.508.008,00	1.234.147.793.088,00	1.246.489.271.019,00	1.258.954.163.729,00
	A. Pendapatan Asli Daerah	130.745.181.958,00	132.052.633.777,00	133.373.160.115,00	134.706.891.716,00	136.053.960.634,00	137.414.500.240,00
	B. Pendapatan Transfer	1.067.106.507.100,00	1.077.777.572.171,00	1.088.555.347.893,00	1.099.440.901.372,00	1.110.435.310.385,00	1.121.539.663.489,00
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.197.851.689.058,00	1.209.830.205.948,00	1.221.928.508.008,00	1.234.147.793.088,00	1.246.489.271.019,00	1.258.954.163.729,00
2	BELANJA	1.192.755.047.143,00	1.210.646.372.850,00	1.228.806.068.443,00	1.247.238.159.470,00	1.265.946.731.861,00	1.284.935.932.839,00
	A. Belanja Operasi	898.693.350.067,00	912.173.750.318,00	925.856.356.573,00	939.744.201.921,00	953.840.364.950,00	968.147.970.424,00
	B. Belanja Modal	251.051.778.496,00	254.817.555.173,00	258.639.818.501,00	262.519.415.779,00	266.457.207.015,00	270.454.065.120,00
	C. Belanja Tak Terduga	917.830.200,00	931.597.653,00	945.571.618,00	959.755.192,00	974.151.520,00	988.763.793,00
	D. Belanja Transfer	42.092.088.380,00	42.723.469.706,00	43.364.321.751,00	44.014.786.578,00	44.675.008.376,00	45.345.133.502,00
	JUMLAH BELANJA	1.192.755.047.143,00	1.210.646.372.850,00	1.228.806.068.443,00	1.247.238.159.470,00	1.265.946.731.861,00	1.284.935.932.839,00
	SURPLUS/DEFISIT	5.096.641.915,00	(816.166.902,00)	(6.877.560.435,00)	(13.090.366.382,00)	(19.457.460.842,00)	(25.981.769.110,00)
3	PEMBIAYAAN	183.374.044.870,00	816.166.902,00	6.877.560.435,00	13.090.366.382,00	19.457.460.843,00	25.981.769.110,00
	A. Penerimaan	183.374.044.870,00	816.166.902,00	6.877.560.435,00	13.090.366.382,00	19.457.460.843,00	25.981.769.110,00
	B. Pengeluaran	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN	183.374.044.870,00	816.166.902,00	6.877.560.435,00	13.090.366.382,00	19.457.460.843,00	25.981.769.110,00
	PEMBIAYAAN NETTO	-	-	-	-	-	-

Sumber: Analisis, 2025

2.6 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Sub bab ini merupakan bagian penting yang akan mendeskripsikan isu-isu strategis terkait permasalahan pembangunan yang dihadapi Pemerintah Kota Prabumulih 5 (lima) tahun ke depan yang tentunya penetapan tujuan, sasaran serta arah pembangunan yang dihasilkan sejalan dengan tujuan periode akhir rencana pembangunan jangka menengah yakni: untuk mewujudkan **"PRABUMULIH MAKMUR SEJAHTERA"**.

2.6.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah adalah perbedaan pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi saat ini. Perbedaan dimaksud dilihat dari kesenjangan pencapaian daerah, maupun dengan pencapaian provinsi dan target indikator. Suatu permasalahan daerah dianggap mempunyai nilai prioritas apabila berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan termasuk prioritas lain dari kebijakan nasional dan provinsi.

Dalam perumusan masalah digunakan tiga konsep tentang masalah pembangunan yaitu masalah pokok, masalah dan akar masalah. Masalah pokok adalah masalah yang bersifat makro bagi daerah dan dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Masalah adalah beberapa penyebab dari masalah pokok dipecahkan melalui rumusan strategi. Akar masalah adalah penyebab dari masalah yang dirinci, dipecahkan melalui arah kebijakan atau kebijakan umum.

A. Permasalahan Pada Aspek Geografi dan Demografi

- a. Belum optimalnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yaitu dari aspek daya dukung air. Jumlah kebutuhan air, baik air domestik dan air non domestik di Kota Prabumulih jauh lebih besar dibandingkan jumlah ketersediaan air di Kota Prabumulih.
- b. Masih tingginya angka Prevalensi ketidakcukupan pangan (PoU) Kota Prabumulih sebesar 8,09% dibandingkan dengan rata-rata PoU Provinsi Sumatera Selatan sebesar 6,53%. Perkembangan jumlah penduduk miskin sebesar 22.120 jiwa menjadi 22.330 jiwa berpengaruh terhadap prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, karena semakin banyak jumlah penduduk miskin akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat khususnya terhadap makanan, sehingga dapat menyebabkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan mengalami peningkatan.
- c. Akses masyarakat terhadap air minum jaringan perpipaan masih rendah. Walaupun mayoritas penduduk Prabumulih telah memiliki akses terhadap air

minum layak, baru sebagian kecil di antaranya yang memiliki akses terhadap air minum perpipaan. Capaian saat ini menunjukkan sekitar 90 persen penduduk Prabumulih telah memiliki akses terhadap air minum layak. Namun, baru 10 persen yang memiliki akses air minum perpipaan.

- d. Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- e. Akses sanitasi yang layak di masyarakat sudah baik rata-rata diatas 95%. Namun, itu saja tidak belum cukup jika tidak disertai dengan pemenuhan akses sanitasi yang aman, capaiannya masih sangat minim yaitu sebesar 0,65% di tahun 2024.
- f. Kota Prabumulih memiliki indeks ketahanan daerah 0,23 (rendah) pada tahun 2023. Nilai ini menunjukkan bahwa Kota Prabumulih masih perlu banyak melaksanakan berbagai tindakan pengurangan risiko bencana, disertai dengan peningkatan komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan sistematis yang lebih baik. Ini berarti bahwa pelaksanaan mitigasi bencana belum optimal.

B. Permasalahan Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

- a. Pertumbuhan ekonomi cenderung melambat dan stagnan. Lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Prabumulih berada pada angka 4,6%. Sektor usaha yang berkembang masih seputar sektor usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan sektor usaha Industri Pengolahan, sedangkan sektor usaha lainnya belum banyak yang berkembang.
- b. Belum optimalnya pengentasan kemiskinan. Di tahun 2024 terjadi penurunan angka kemiskinan serta jumlah penduduk miskin, namun tidak pada indikator penting lainnya yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks keparahan kemiskinan, kedua indikator ini justru mengalami peningkatan bila dibandingkan pada periode awal (2020).
- c. Besaran Indeks Pembangunan Manusia Kota Prabumulih yang terus meningkat dari dari tahun ke tahun karena didukung oleh empat komponen penyusun IPM. Walaupun keempat komponen tersebut setiap tahun juga menunjukkan peningkatan, namun terdapat komponen yang pertumbuhannya cenderung lambat atau stagnan yaitu komponen Rata-Rata Lama Sekolah.
- d. Belum optimalnya kinerja ketenagakerjaan, penurunan tingkat pengangguran belum diiringi dengan tingkat kesempatan (peluang) kerja yang besar. Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, rata-rata pertumbuhan Angkatan Kerja selama empat tahun sebelumnya lebih besar bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan Tingkat Kesempatan (peluang) Kerja. Kualitas SDM tenaga kerja di Kota Prabumulih masih belum cukup baik karena masih banyaknya

tenaga kerja dengan latar belakang SD ke bawah. Kecenderungan penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang menandakan bahwa ketersediaan penduduk usia kerja yang dapat terlibat aktif dalam kegiatan perekonomian semakin sedikit tentunya akan berpengaruh terhadap berkurangnya produksi barang dan jasa.

- e. Belum optimalnya upaya menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat, ditandai dengan peningkatan Gini Ratio Kota Prabumulih menjadi 0,373. Angka ini sekaligus menjadikannya salah satu wilayah dengan tingkat ketidakmerataan pendapatan tertinggi di Sumatera Selatan.
- f. Usia Harapan Hidup masyarakat Prabumulih terus meningkat seiring dengan kemajuan pembangunan Kesehatan masyarakat, terutama dalam mengatasi berbagai penyakit. Meskipun demikian, beban penyakit tidak menular seperti Hipertensi dan Diabetes Melitus cenderung meningkat, diketahui bahwa jumlah kasus Hipertensi di tahun 2023 sebanyak 14.422 kasus meningkat menjadi 35.102 kasus di tahun 2024 begitu juga dengan kasus Diabetes Melitus sebanyak 3.197 kasus di tahun 2023 meningkat menjadi 3.472 kasus di tahun 2024. Meningkatnya jumlah kasus tidak menular ini disebabkan karena gaya hidup tidak sehat. Oleh sebab itu, Usia Harapan Hidup yang terus meningkat sampai 74,87 tahun (termasuk lansia) tanpa diiringi dengan upaya preventif akan menyebabkan penduduk Prabumulih lebih banyak tahun yang bakal dihabiskan dalam kondisi kesehatan yang buruk sehingga berpengaruh juga harapan untuk hidup sehat.
- g. Angka rata-rata lama sekolah di Kota Prabumulih tahun 2024 adalah sebesar 10,36 tahun, sementara angka Harapan Lama Sekolah 13,41 tahun. Dalam hal ini, ada kesenjangan antara rata-rata lama sekolah dengan harapan lama sekolah, artinya tingkat pendidikan penduduk Prabumulih rata-rata sampai dengan kelas 1 SLTA namun peluang bersekolah adalah tamat Diploma I. Diketahui bahwa wilayah dengan rata-rata lama sekolah (RLS) yang tinggi cenderung memiliki tenaga kerja yang lebih terampil dan berdaya saing.
- h. Persentase jumlah kunjungan per hari dibagi jumlah penduduk sebanyak 0,092%, belum ideal karena tingkat pemanfaatan perpustakaan masih dibawah 2%.
- i. Meskipun akses infrastruktur digital sudah cukup merata namun masyarakat belum memanfaatkannya untuk kegiatan sehari-hari, ini dapat dilihat dari salah satu pilar pemberdayaan (21,60) pada Indeks Masyarakat Digital, padahal untuk mendukung salah satu strategi pertumbuhan ekonomi nasional 8% agenda yaitu Transformasi digital, diketahui bahwa Dampak transformasi digital terhadap

masyarakat sangat besar dan beragam, menyentuh hampir setiap aspek kehidupan kita. Transformasi digital mengacu pada integrasi teknologi digital ke dalam berbagai aspek masyarakat, termasuk ekonomi, pemerintahan, layanan kesehatan, pendidikan, dan banyak lagi.

- j. Belum optimalnya upaya mengurangi ketimpangan gender, terutama pada dimensi pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Pada dimensi pemberdayaan menunjukkan bahwa peran perempuan dalam pengambilan keputusan masih jauh bila dibandingkan peran laki-laki. Selanjutnya pada dimensi pasar tenaga kerja terdapat perbedaan mencolok antara tingkat partisipasi perempuan dan laki-laki.

C. Permasalahan Pada Aspek Daya Saing

- a. Sektor usaha industri pengolahan sangat mempengaruhi pembentukan nilai Produk Domestik Regional Bruto Kota Prabumulih, namun kontribusinya terhadap PDRB Kota Prabumulih masih kecil hanya sekitar 10%, artinya bahwa masih banyak sub-sub sektor usaha dalam industri pengolahan yang belum diberdayakan secara maksimal sehingga berdampak pada masih minimnya kontribusi sektor industri pengolahan bagi pembentukan nilai PDRB Kota Prabumulih.
- b. Tingkat inovasi daerah masih rendah, dapat dilihat dari nilai indeks inovasi daerah sebesar 10,20.
- c. Penerimaan pajak daerah belum optimal. Ini dapat dilihat dari rendahnya rasio pajak daerah terhadap PDRB sebesar 0,44%.
- d. Risiko penduduk terkena tindak pidana kejahatan Kota Prabumulih cenderung mengalami peningkatan, seiring dengan meningkatnya jumlah tindak kejahatan.

D. Permasalahan Pada Aspek Pelayanan Umum

I. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Bidang Pendidikan

Tabel 2.220 Perumusan Permasalahan Bidang Pendidikan

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum optimalnya layanan penyelenggaraan pendidikan	Belum optimalnya kualitas pendidikan	▪ Belum semua guru memiliki kompetensi yang memadai ▪ Beberapa sekolah, terutama yang jauh dari pusat kota masih kekurangan fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar ▪ Kurikulum belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
		Belum optimalnya Akses dan Pemerataan pendidikan	▪ PPDB belum adil ▪ Akses terhadap pendidikan berkualitas belum merata di terutama di daerah yang jauh dari pusat kota
		Kualitas Pembelajaran belum optimalnya	▪ Kurangnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak ▪ Metode belajar mengajar agar lebih menarik dan efektif.

b. Bidang Kesehatan

Tabel 2.221 Perumusan Permasalahan Bidang Kesehatan

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
1	Usia Harapan Hidup masih perlu ditingkatkan dan mutu pelayanan kesehatan belum optimal	Masih tinggnya Penyakit Tidak Menular	▪ Pola hidup dan makan yang tidak sehat ▪ Kurang kepatuhan masyarakat untuk berobat teratur ▪ Belum optimalnya pelaksanaan skrining Penyakit Tidak Menular (PTM)
		Masih tinggnya Penyakit Menular	▪ Rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) baik individu maupun masyarakat ▪ Perilaku Seks Bebas/Penyalahgunaan Narkoba ▪ Kurangnya sosialisasi tentang penyakit menular ke masyarakat ▪ Lingkungan rumah dan permukiman yang kurang sehat
		Belum optimalnya layanan sarana dan prasarana kesehatan	▪ Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, warga negara usia produktif sampai usia lanjut yang sesuai standar ▪ Beberapa fasilitas kesehatan, terutama di wilayah yang jauh dari pusat kota masih kekurangan alat-alat kesehatan yang memadai ▪ Sarana dan prasarana kesehatan, serta tenaga kesehatan cenderung terkonsentrasi di pusat kota ▪ RSUD Prabumulih, yang seharusnya berstandar tipe C, menangani layanan yang seharusnya ditangani oleh rumah sakit tipe B ▪ pelayanan yang tidak konsisten, prosedur administrasi yang berbelit, dan kurangnya empati dari tenaga medis

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
			▪ Belum terpenuhinya secara maksimal pembiayaan kesehatan nasional secara efektif ,efisien dan berkeadilan ▪ Belum adanya asosiasi Penyehat Tradisional (Hattra) ▪ Pemenuhan kebutuhan obat kurang dari 70 persen ▪ Pemenuhan Alat Kesehatan sesuai standar di Fktp Puskesmas Kurang dari 70 persen ▪ Masih kurangnya sarana prasarana dalam menunjang CDOB pada Gedung Farmasi dan Sarana Kefarmasian UPTD Puskesmas ▪ Pengelolaan limbah medis masih belum optimal
		Masih tingginya prevalensi Stunting pada balita	▪ Masih adanya kasus balita gizi kurang, balita gizi buruk terutama pada keluarga miskin ▪ Kurangnya pengetahuan tentang gizi dan kesehatan ▪ Keterbatasan akses ke pelayanan kesehatan prenatal dan postnatal ▪ Lingkungan yang kurang bersih dan sanitasi yang buruk ▪ Keterbatasan akses terhadap pangan bergizi ▪ Pola asuh yang kurang tepat
		Belum optimalnya pembangunan SDM kesehatan	▪ Pemenuhan dan distribusi tenaga medis, termasuk dokter ahli dan perawat ▪ Kurangnya ketersediaan tenaga kesehatan khususnya ATEM untuk melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan Alat Kesehatan, baik di Dinas Kesehatan maupun di UPTD (Puskesmas,BKPM, Labkesda)
		Belum optimalnya layanan kesehatan ibu hamil	▪ Masih adanya kasus bumil KEK terutama pada keluarga miskin ▪ AKI/AKB masih menjadi perhatian, terutama pada keluarga miskin ▪ Masih banyak ibu yang kurang mendapatkan Edukasi Kesehatan Ibu Hamil

c. Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Tabel 2.222 Perumusan Permasalahan Bidang Kesehatan

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum memadainya Infrastruktur dasar serta keberlanjutan lingkungan perkotaan	Kondisi Jalan yang Buruk	▪ Masih terdapat ruas jalan kota dalam kondisi rusak seperti berlubang dan aspal yang mengelupas ▪ Saat hujan, jalan yang rusak seringkali tergenang air
		Drainase yang Buruk	▪ Drainase yang tidak berfungsi optimal ▪ Tersumbatnya drainase akibat sampah
		Ketidakmerataan Pembangunan	▪ Pembangunan infrastruktur cenderung lebih terfokus di pusat kota
		Belum optimalnya capaian pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari	▪ Masih terdapat rumah tangga yang belum mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan ▪ Jaringan distribusi air minum yang belum dapat menjangkau seluruh daerah layanan
		Belum optimalnya penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	▪ Masih terdapat rumah tangga yang belum memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik ▪ Terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam implementasi pengelolaan air limbah domestik ▪ Belum terdapat IPLT
		Belum optimalnya penataan kota dan lingkungan	▪ Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang sudah penuh dan perlu perluasan atau relokasi ▪ Penumpukan sampah terjadi di berbagai lokasi ▪ Masyarakat banyak membuang limbah domestik secara sembarangan ▪ Berkurangnya luasan RTH karena pembangunan yang pesat dan ekspansi kota menyebabkan hilangnya lahan hijau yang beralih fungsi menjadi bangunan atau infrastruktur lain ▪ Penyebaran bangunan yang tidak teratur, terutama di daerah pinggiran, dapat menyebabkan kesemrawutan (pembangunan yang tidak sesuai peruntukan)

d. Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.223 Perumusan Permasalahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penyediaan perumahan yang terjangkau dan layak	Keterbatasan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak	▪ Masyarakat dengan kondisi ekonomi yang kurang baik (miskin) ▪ Harga Perumahan yang Tidak Terjangkau ▪ Keterbatasan lahan dan urbanisasi ▪ Kurangnya infrastruktur dasar

e. Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.224 Perumusan Permasalahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
1	Masih adanya ketidaknyamanan dan ketidaktertiban di masyarakat	Ketidakpatuhan terhadap peraturan daerah (perda) tentang ketertiban umum	▪ Banyak masyarakat yang belum memahami isi dan tujuan dari Perda atau menganggapnya sebagai aturan yang tidak relevan dengan kehidupan mereka ▪ Penegakan hukum tidak konsisten dan tidak memberikan efek jera sehingga masyarakat cenderung mengabaikan Perda tersebut ▪ Kurangnya fasilitas atau infrastruktur yang memadai untuk mendukung pelaksanaan Perda ▪ Perda dianggap tidak adil atau memihak kelompok tertentu
		Masih terjadinya tindak kriminalitas	▪ Kesenjangan sosial ekonomi (kemiskinan) ▪ Kurangnya keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak (pengangguran) ▪ Kondisi psikologis individu ▪ Lingkungan yang permisif terhadap tindakan kriminal ▪ Perkembangan teknologi

f. Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.225 Perumusan Permasalahan Bidang Sosial

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum terpenuhinya kebutuhan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	PMKS tidak mampu menjalankan peran dan fungsi sosialnya di masyarakat	▪ Keterbatasan ekonomi menyebabkan PMKS kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. ▪ Ketidakmampuan mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
			- PMKS sering menghadapi diskriminasi dan stigma dari masyarakat, yang menghambat mereka untuk mendapatkan pekerjaan, akses pendidikan, atau layanan sosial lainnya - Keluarga yang mengalami masalah sosial dan psikologis
		Sebagian besar PMKS memiliki tingkat pendidikan yang rendah serta keterbatasan fisik dan mental	- PMKS kurang mendapatkan kesempatan pendidikan - Individu dengan keterbatasan fisik atau mental kerap mengalami kesulitan dalam mengikuti sistem pendidikan formal
		Penanganan masalah sosial masih secara parsial	- Kurangnya koordinasi dan komunikasi efektif antar lembaga - Keterbatasan Sumber Daya - Belum adanya pendekatan yang terintegrasi

II. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Bidang Tenaga Kerja

Tabel 2.226 Perumusan Permasalahan Bidang Tenaga Kerja

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
1	Masih tingginya tingkat pengangguran	Keterbatasan Lapangan Kerja	- Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Merata - Kurangnya Diversifikasi Ekonomi - Kualitas Tenaga Kerja
		Tidak terserapnya tenaga kerja lokal	- Keterbatasan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja - Ketidaksesuaian antara kualifikasi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja - Kurangnya investasi pada sektor padat karya
		Daya saing tenaga kerja yang masih relatif rendah	- Kompetensi tenaga kerja yang masih rendah - Kurangnya penguasaan teknologi - Kurangnya etos kerja
		Iklim hubungan Industrial belum sepenuhnya kondusif	- Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak - Perbedaan kepentingan antara pengusaha dengan pekerja - Masalah upah dan hak-hak pekerja

b. Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Tabel 2.227 Perumusan Permasalahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
1	Masih lemahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak	▪ Minimnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak ▪ Kemiskinan dan keterbatasan ekonomi ▪ Adanya budaya yang menempatkan laki-laki pada posisi superior dan perempuan pada posisi subordinat ▪ Penegakan hukum yang lemah
		Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak	▪ Keterbatasan akses informasi ▪ Sosialisasi yang efektif kepada masyarakat kurang ▪ Rendahnya Kesadaran Hak Asasi Manusia

c. Bidang Pangan

Tabel 2.228 Perumusan Permasalahan Bidang Pangan

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
1	Rentan Ketahanan Pangan	Ketergantungan pasokan pangan dari daerah lain	▪ Produksi pangan domestik yang tidak mencukupi ▪ Perubahan pola konsumsi
		Fluktuasi harga pangan	▪ Perubahan permintaan dan penawaran ▪ Kenaikan biaya produksi ▪ Kondisi Cuaca dan Iklim
		Alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian	▪ Peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan akan lahan untuk perumahan dan industri ▪ Nilai ekonomi yang lebih tinggi dari sektor non-pertanian

d. Bidang Lingkungan Hidup

Tabel 2.229 Perumusan Permasalahan Bidang Lingkungan Hidup

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
1	Kerusakan Lingkungan	Pengelolaan sampah yang belum optimal	▪ Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat ▪ Infrastruktur dan Fasilitas yang Belum Memadai ▪ Pertumbuhan Penduduk dan Perilaku Konsumsi ▪ Lemahnya Penegakan Hukum dan Regulasi ▪ Koordinasi dan Kerjasama yang Belum Optimal
		Pencemaran air	▪ Limbah Industri ▪ Limbah Domestik (Rumah Tangga) ▪ Aktivitas Pertambangan ▪ Sampah Plastik ▪ Limbah Pertanian
		Kebakaran hutan dan lahan	▪ Musim kemarau panjang ▪ Aktivitas manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
		Banjir di Musim hujan	▪ Sistem drainase yang tidak memadai ▪ Kurangnya daerah resapan air ▪ Pembangunan perumahan yang tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan, seperti pembangunan di daerah resapan air atau bantaran sungai ▪ Perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan, terutama di saluran air

e. Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.230 Perumusan Permasalahan Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
1	Rendahnya Kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan sipil	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat dokumen pencatatan sipil	▪ Banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan tidak sepenuhnya memahami manfaat dan pentingnya memiliki dokumen pencatatan sipil seperti akta kelahiran, akta nikah, atau kartu identitas ▪ Banyak masyarakat tidak menyadari bahwa dokumen ini penting untuk berbagai keperluan administrasi, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan publik ▪ Kurangnya informasi dan edukasi yang jelas mengenai pencatatan sipi
		Persepsi biaya dan kerumitan proses	▪ Beberapa masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah, menganggap biaya pembuatan dokumen pencatatan sipil terlalu mahal atau prosesnya terlalu rumit ▪ akses terhadap layanan pencatatan sipil masih terbatas, baik karena jarak maupun kurangnya infrastruktur
		Minimnya Sosialisasi dan Pelayanan	▪ Kurangnya sosialisasi yang efektif dari pemerintah daerah atau dinas terkait mengenai pentingnya pencatatan sipil

f. Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Tabel 2.231 Perumusan Permasalahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum optimalnya upaya peningkatan pembangunan kualitas keluarga	Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat mengenai manfaat KB	▪ Kurangnya informasi yang akurat dan mudah dipahami mengenai manfaat KB ▪ Stigma dan norma sosial yang menghambat penggunaan metode KB
		Belum optimalnya kualitas Tenaga Penyuluh KB	▪ Keterbatasan jumlah tenaga penyuluh KB yang berkualitas ▪ Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan penyuluh dalam memberikan informasi dan konseling KB
		Belum optimalnya aksesibilitas pelayanan KB	▪ Terbatasnya akses pelayanan KB yang jauh dari pusat kota ▪ Kurangnya fasilitas dan sarana prasarana pelayanan KB yang memadai ▪ Kurangnya informasi mengenai berbagai jenis metode KB yang tersedia

g. Bidang Perhubungan

Tabel 2.232 Perumusan Permasalahan Bidang Perhubungan

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
1	Insfrastruktur Transportasi masih belum optimal	Belum Optimalnya Penyediaan dan Penataan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	▪ Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana penunjang Lalu Lintas Angkutan Jalan ▪ Belum optimalnya pengembangan sistem dan manajemen perparkiran ▪ kurangnya fasilitas keselamatan seperti palang pintu Kereta Api, rambu peringatan serta penjagaan palang pintu ▪ Kurang Optimalnya sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor ▪ Belum adanya Transportasi Publik yang terpercaya
2	Kualitas Pelayanan Transportasi yang belum maksimal	Belum Optimalnya Pengawasan dan Pembinaan serta Pelayanan Perhubungan	▪ Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mentaati peraturan berlalu lintas ▪ Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mentaati Parkir ▪ Semakin berkurangnya peminat/pengguna angkutan umum

h. Bidang Komunikasi Dan Informatika

Tabel 2.233 Perumusan Permasalahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum optimalnya implementasi digital di Prabumulih	Infrastruktur TIK yang belum memadai	▪ Perencanaan dan Pengelolaan yang Kurang Efektif ▪ Kurangnya investasi dalam teknologi baru ▪ Infrastruktur TIK yang tidak terintegrasi ▪ Keterbatasan tenaga ahli dalam bidang TIK
2		Kurangnya literasi digital masyarakat	▪ Masyarakat belum banyak menyadari manfaat dan urgensi literasi digital dalam kehidupan sehari-hari ▪ Kurangnya Minat Baca dan Ketergantungan pada Hiburan Digital ▪ Tidak semua masyarakat memiliki akses ke internet yang stabil

i. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Tabel 2.234 Perumusan Permasalahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pengembangan Koperasi UMKM	Penguatan dan daya saing koperasi yang belum optimal	▪ Rendahnya kualitas dan kapasitas koperasi ▪ Pengawasan atas aktifitas koperasi belum berjalan dengan baik ▪ Peningkatan kapasitas dan pelatihan koperasi dan pelaku usaha mikro belum optimal ▪ Pemberdayaan dan peningkatan produktifitas dan akses koperasi yang belum merata
		Keberdayaan, daya saing dan pengembangan potensi pelaku usaha mikro yang belum optimal	▪ Fasilitas pemasaran dan permodalan pelaku usaha mikro yang belum berjalan optimal ▪ Masih rendahnya pertumbuhan pelaku usaha mikro ▪ Kurangnya daya saing usaha pelaku usaha mikro ▪ Belum optimalnya Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi produk pelaku usaha mikro

j. Bidang Penanaman Modal

Tabel 2.235 Perumusan Permasalahan Bidang Penanaman Modal

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum optimalnya iklim penanaman modal	Belum optimalnya regulasi untuk mendukung peningkatan investasi	- Belum efektifnya regulasi yang mendukung peningkatan investasi - Regulasi yang berubah-ubah dalam waktu singkat
		Masih kurangnya kajian investasi & peta potensi investasi	Belum tersedianya kebijakan daerah yang mendasari kajian investasi & peta potensi investasi

k. Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Tabel 2.236 Perumusan Permasalahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
1	Kurangnya daya saing keolahragaan	Kurangnya SDM Olahraga	- Terbatasnya SDM Keolahragaan yang berlisensi - Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga
		Rendahnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga	Minimnya minat/budaya gerak masyarakat untuk berolahraga
		Kurangnya kontribusi yang mendukung sarana dan prasarana olahraga bagi atlet	Kurangnya sarana dan prasarana olahraga
2	Rendahnya daya saing pemuda	Kurangnya kreatifitas pemuda di bidang wirausaha, dan organisasi kepemudaan	Kurangnya kegiatan pembinaan generasi muda di bidang wirausaha, dan organisasi kepemudaan
3	Belum optimalnya pengembangan kapasitas kepramukaan	Belum optimalnya peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah	Program-program kepramukaan yang belum berkelanjutan menyebabkan kurangnya dampak jangka panjang dan kurangnya daya tarik bagi anggot

l. Bidang Statistik

Tabel 2.237 Perumusan Permasalahan Bidang Statistik

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum optimalnya statistik sektoral	Kualitas dan Keterbatasan Data	- Data yang belum lengkap atau akurat - Data sektoral yang belum terintegrasi - Minimnya analisis data
		Kurangnya kesadaran akan pentingnya data	- Beberapa pihak belum sepenuhnya memahami pentingnya data dalam perencanaan dan pengambilan keputusan - keterbatasan sumber daya (tenaga ahli, peralatan) untuk mengelola dan menganalisis data secara efektif

m. Bidang Persandian

Tabel 2.238 Perumusan Permasalahan Bidang Persandian

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penguatan pertahanan siber	Ancaman Keamanan Digital	▪ Kerentanan sistem ▪ Kesalahan Manusia ▪ Kurangnya kesadaran akan keamanan digital ▪ Serangan Siber
		Keterbatasan Infrastruktur dan Sumber Daya	▪ Kurangnya pemahaman tentang kebutuhan spesifik dalam persandian ▪ Kurangnya koordinasi antar instansi ▪ Kurangnya tenaga ahli

n. Bidang Kebudayaan

Tabel 2.239 Perumusan Permasalahan Bidang Kebudayaan

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
1	Mulai adanya pergeseran nilai dari budaya lokal ke budaya lain yang lebih dominan	Pudarnya nilai-nilai tradisional	▪ Arus globalisasi dan modernisasi yang membawa masuknya budaya asing ▪ Modernisasi dan urbanisasi mengubah lanskap sosial dan budaya masyarakat ▪ Perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi, memudahkan akses terhadap budaya asing dan informasi global
		Kurangnya kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal	▪ Kurangnya pendidikan dan pemahaman mengenai nilai-nilai budaya lokal ▪ Persepsi kuno terutama generasi muda

o. Bidang Perpustakaan

Tabel 2.240 Perumusan Permasalahan Bidang Perpustakaan

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
1	Minat baca masyarakat masih rendah	Persaingan era digitalisasi yang lebih menarik dan instan	▪ Kurangnya pembiasaan membaca di lingkungan keluarga dan sekolah, serta kurangnya contoh dari orang dewasa ▪ Platform digital menawarkan kesenangan instan dan cepat, yang seringkali lebih menarik bagi anak-anak dan remaja dibandingkan membaca buku ▪ Kurangnya akses ke sumber bacaan berkualitas
		Belum adanya pustakawan	▪ Minimnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pustakawan yang berkualitas
		Pengelolaan Perpustakaan masih manual	▪ Kurangnya tenaga pengelola yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup dalam bidang teknologi informasi dan otomasi perpustakaan.

p. Bidang Kearsipan

Tabel 2.241 Perumusan Permasalahan Bidang Kearsipan

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
1	Rendahnya Pengelolaan Arsip Daerah	Belum optimalnya penerapan penyelenggaraan kearsipan dinamis	▪ Pembinaan dan sosialisasi kearsipan belum optimal ▪ Penguatan implementasi penyelenggaraan kearsipan belum optimal ▪ Kapasitas aparatur pengelola arsip dinamis belum optimal ▪ Kapasitas penyelenggaraan kearsipan belum optimal ▪ Masih Banyak Perangkat Daerah memandang tidak penting arsip ▪ Sarana dan Prasarana pelestarian arsip yang kurang memadai

III. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Bidang Pariwisata

Tabel 2.242 Perumusan Permasalahan Bidang Pariwisata

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata	Kurangnya Pengembangan destinasi dan sistem pemasaran wisata	▪ Kurangnya pengembangan sarana prasarana destinasi wisata ▪ Kurangnya Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata, Sinergi Kerjasama Antara Pelaku Wisata, Masyarakat Dan Pemerintah Daerah ▪ Terbatasnya Promosi Budaya Pendukung Pariwisata ▪ Belum Optimalnya Sistem Pemasaran Wisata Berbasis Teknologi

b. Bidang Pertanian

Tabel 2.243 Perumusan Permasalahan Bidang Pertanian

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
1	Sektor pertanian belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Keterbatasan Teknologi dan Produktivitas	▪ Keterbatasan akses terhadap teknologi ▪ Kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani ▪ Infrastruktur pertanian yang belum memadai
		Kesulitan Pemasaran Produk Pertanian	▪ Harga produk pertanian seringkali tidak stabil ▪ Petani seringkali tidak memiliki akses informasi yang akurat dan terkini mengenai harga pasar, permintaan, dan tren konsumen ▪ Rantai pasokan produk pertanian panjang dan kompleks sering melibatkan banyak perantara

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
			▪ Sulit mendapatkan akses pembiayaan yang terjangkau ▪ Petani kurang memiliki pengetahuan yang cukup tentang strategi pemasaran yang efektif
		Keterbatasan modal dan fasilitas pasca panen	▪ Petani, terutama petani skala kecil, seringkali kesulitan mengakses pinjaman dari lembaga keuangan formal ▪ Kurangnya jaminan atau riwayat kredit yang tidak memadai ▪ Lembaga keuangan formal terbatas ▪ Petani seringkali tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup dalam menggunakan teknologi pasca panen ▪ Kurangnya fasilitas seperti gudang penyimpanan, mesin pengering
		Kurangnya pengelolaan lahan pertanian	▪ Pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan ▪ Meningkatnya jumlah penduduk membutuhkan lebih banyak lahan untuk perumahan, industri, dan fasilitas umum, sehingga lahan pertanian beralih fungsi ▪ Perubahan iklim menyebabkan banjir yang merusak lahan pertanian dan kekeringan yang berkepanjangan membuat tanaman sulit tumbuh dan bahkan mati

c. Bidang Perindustrian

Tabel 2.244 Perumusan Permasalahan Bidang Perindustrian

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pertumbuhan industri kecil dan menengah yang inovatif dan berdaya saing	Keterbatasan akses terhadap pembiayaan	▪ Banyak pelaku UMKM kurang memahami Literasi Keuangan ▪ Lembaga keuangan seringkali mensyaratkan agunan yang cukup besar, yang tidak dimiliki oleh banyak UMKM ▪ Administrasi yang Kompleks ▪ Keterbatasan Infrastruktur Digital
		Penggunaan teknologi yang usang dan kurang efisien	▪ Biaya tinggi untuk adopsi teknologi baru ▪ Kurangnya kesadaran akan manfaat teknologi terkini ▪ Keterbatasan sumber daya manusia
		Kualitas Bahan Baku Rendah dan Kurangnya Tenaga Kerja Terampil	▪ Ketergantungan pada satu pemasok ▪ Fluktuasi Harga dan Kelangkaan Bahan Baku

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
			▪ Kurangnya Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan

d. Bidang Perdagangan

Tabel 2.245 Perumusan Permasalahan Bidang Perdagangan

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
1	Sektor perdagangan di Prabumulih belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal	Ketergantungan pada Konsumsi Rumah Tangga	▪ Konsumsi Rumah Tangga rentan terhadap fluktuasi daya beli masyarakat
		Sektor ekonomi Prabumulih cenderung didominasi oleh sektor non-tradable	▪ Keterbatasan sumber daya alam yang dapat diekspor secara luas ▪ Fokus pada kegiatan ekonomi yang melayani pasar lokal atau regional ▪ sektor jasa seperti pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan, yang termasuk dalam kategori non-tradable, memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB Prabumulih.
		Kurangnya Diversifikasi Ekonomi	▪ Sebagian besar tenaga kerja masih bekerja di sektor pertanian dan jasa dengan produktivitas rendah
		Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Lokal	▪ Keterbatasan modal dan teknologi ▪ Kurangnya sumber daya manusia yang terampil ▪ Rendahnya Kesadaran Masyarakat

e. Bidang Kelautan Dan Perikanan

Tabel 2.246 Perumusan Permasalahan Bidang Perikanan

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Produksi Perikanan	Keterbatasan Infrastruktur dan Sarana Perikanan	▪ Perencanaan dan Pengelolaan yang Kurang Efektif ▪ Keterbatasan sumber daya manusia dan teknolog
		Belum optimalnya penanganan pasca panen	▪ Kurangnya fasilitas penyimpanan dingin ▪ Praktik penanganan yang tidak tepat ▪ Kurangnya keterampilan nelayan

IV. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Dewan

Tabel 2.247 Perumusan Permasalahan Sekretariat Dewan

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum optimalnya fungsi fasilitasi legislasi terhadap Perda-Perda yang dihasilkan	Kurangnya koordinasi antara pembuat Perda	▪ Kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya harmonisasi peraturan ▪ Lemahnya kapasitas lembaga legislatif ▪ Kurangnya transparansi serta partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Perda
		Kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang lebih tinggi	▪ Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai regulasi baru kepada masyarakat ▪ Kompleksitas regulasi

b. Sekretariat Daerah

Tabel 2.248 Perumusan Permasalahan Sekretariat Daerah

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Belum optimalnya kapasitas akuntabilitas kinerja organisasi	▪ kurangnya pemahaman aparatur pemerintah terhadap SAKIP ▪ Kurangnya soliditas Perangkat Daerah selaku aktor utama dalam penerapan SAKIP
		Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	▪ Pola pikir birokrasi yang n kurang responsif terhadap perubahan ▪ Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal ▪ Kurangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

V. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

Tabel 2.249 Perumusan Permasalahan Perencanaan

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum adanya sinkronisasi antara Konsistensi, keselarasan dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah	Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan	▪ Pemahaman aparatur tentang perencanaan pembangunan daerah masih kurang ▪ Masih terdapat inkonsisten pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan perencanaan pembangunan ▪ Hasil evaluasi dan pengendalian belum secara maksimal di gunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah
		Belum optimalnya penggunaan data dalam perencanaan daerah.	▪ Penyediaan Data Perencanaan Pembangunan belum terpusat pada satu data ▪ Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah masih

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
			menggunakan data yang disajikan oleh OPD teknis pelaksana ▪ Data sectoral yang dimiliki oleh OPD Wali Data belum sesuai dengan yang dibutuhkan OPD dalam penyusunan perencanaan pembangunan

b. Keuangan

Tabel 2.250 Perumusan Permasalahan Keuangan

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	Belum terpenuhinya kualitas penganggaran sesuai dengan ketentuan	▪ Pengalokasian anggaran belum sesuai ketentuan perundang-undangan ▪ Adanya inkonsistensi sub kegiatan diluar regulasi dalam tahapan proses penganggaran
		Belum optimalnya pendayagunaan BMD	▪ Belum optimalnya pemanfaatan BMD ▪ Belum efisiennya penggunaan BMD

c. Kepegawaian

Tabel 2.251 Perumusan Permasalahan Kepegawaian

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
1	Kualitas database pegawai masih belum memenuhi standar sebagai basis dalam melakukan analisa penataan pegawai ASN sesuai formasi dan kebutuhan serta untuk pengembangan kompetensi ASN	Penataan pegawai belum sesuai dengan formasi dan kebutuhan dalam jabatan	▪ Masih terdapat penempatan ASN yang kompetensinya tidak sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diduduki
2	Penilaian kinerja pegawai ASN belum bisa diukur berdasarkan kompetensi	Evaluasi kinerja ASN belum berlandaskan pada sistem penilaian kinerja berbasis merit sistem	▪ Belum optimalnya sistem penilaian kinerja yang obyektif dan transparan
3	Belum optimalnya kompetensi ASN terkait pelayanan publik	Belum optimalnya peningkatan profesionalisme kompetensi pegawai	▪ Belum semua jabatan memiliki Standart Kompetensi ▪ Pemberian kesempatan Pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja belum sepenuhnya diberlakukan ▪ Belum semua pegawai ASN mengikuti asesmen dalam rangka penilaian kompetensi

d. Penelitian dan pengembangan

Tabel 2.252 Perumusan Permasalahan Penelitian dan pengembangan

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pemanfaatan hasil Kajian kelitbangan dalam pembangunan daerah dan budaya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan	▪ Belum optimalnya kontribusi kelitbangan terhadap perencanaan pembangunan daerah

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
			▪ Belum efektifnya regulasi daerah yang mendukung pemanfaatan hasil litbang ▪ Belum ada SDM peneliti
		Belum optimalnya budaya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	▪ Belum efektifnya regulasi daerah yang mendukung inovasi

e. Pendidikan dan pelatihan

Tabel 2.253 Perumusan Permasalahan Pendidikan dan pelatihan

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kinerja dan profesionalitas ASN	Pelaksanaan pendidikan pelatihan formal belum diikuti seluruh pegawai	▪ Kurangnya dukungan manajemen ▪ Minimnya minat dan motivasi pegawai ▪ Metode pelatihan yang tidak menarik atau tidak relevan dengan pekerjaan

VI. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Tabel 2.254 Perumusan Permasalahan Pengawasan

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum optimalnya profesionalisme APIP	Rendahnya respon auditan untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan	▪ Belum adanya sangsi
		Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah	▪ Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi maturitas SPIP pada perangkat daerah secara berkala ▪ Belum optimalnya pelaksanaan pendampingan maturitas SPIP pada perangkat daerah secara berkala ▪ Belum optimalnya dukungan sumber daya dan penerapan strategi pencegahan korupsi dalam pengendalian korupsi pada perangkat daerah
2	Masih rendahnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Masih rendahnya implementasi SAKIP pada perangkat daerah	▪ Belum optimalnya evaluasi akuntabilitas kinerja ▪ Belum optimalnya pendampingan manajemen akuntabilitas pada perangkat daerah

VII. Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

Tabel 2.255 Perumusan Permasalahan Kewilayahan (Kecamatan)

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan organisasi-organisasi ditingkat kecamatan dan kelurahan dalam upaya peningkatan kesejahteraan	Belum Optimalnya serapan usulan masyarakat	▪ Masih belum semua kelompok masyarakat berpartisipasi dalam Musrenbang, usulan masyarakat belum mengacu pada prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, sehingga usulan belum banyak yang direalisasikan
		Belum optimalnya kualitas pelayanan di kecamatan dan kelurahan	▪ Masih adanya pelayanan di kecamatan maupun kelurahan kepada masyarakat yang belum diselesaikan dengan tuntas.

VIII. Unsur Pemerintah Umum

Tabel 2.256 Perumusan Permasalahan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kehidupan yang harmonis dalam masyarakat	Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa	▪ Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di masyarakat ▪ Masih adanya gangguan keamanan dan ketertiban umum ▪ Masih rendahnya pengawasan terhadap organisasi masyarakat ▪ Masih adanya penyalahgunaan narkoba ▪ Adanya kesenjangan ekonomi yang bisa menimbulkan kerawanan konflik di masyarakat ▪ Masih rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat tentang pengetahuan politik dan demokrasi dalam pemerintahan

2.6.1.1 Permasalahan Utama Daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan termasuk prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatory. Berdasarkan analisis pemetaan permasalahan maka ditetapkan permasalahan pokok daerah Kota Prabumulih sebagai dasar penetapan prioritas dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana diuraikan pada tabel 2.257 berikut:

Tabel 2.257 Perumusan Permasalahan Daerah

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
1	Rendahnya daya tarik dan daya saing daerah	Rendahnya produktivitas daerah	▪ Belum optimalnya kontribusi sektor-sektor unggulan terhadap perekonomian daerah ▪ Produktivitas UMKM masih rendah ▪ Upaya memanfaatkan sektor pertanian sebagai daya ungkit perekonomian daerah belum optimal ▪ Belum terbangunnya inovasi daerah ▪ Rendahnya kualitas dan daya saing ketenagakerjaan ▪ Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata yang baru
2	Belum optimalnya fasilitasi infrastruktur dasar untuk mendukung daya saing daerah	Terbatasnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar	▪ Terbatasnya ketersediaan sarana parasana pelayanan publik ▪ Keterbatasan Fasilitas dan Infrastruktur PDAM ▪ Kualitas Air yang Buruk ▪ Kondisi Sumber Daya Air yang Tidak Stabil ▪ Kondisi Jalan masih rusak ▪ Pengelolaan Limbah belum optimal ▪ Masih minimnya cakupan ketersediaan sarana dan prasarana dasar sanitasi aman
		Belum optimalnya penataan kawasan kota	▪ Terbatasnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ▪ Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan ketertiban umum
3	Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup	Pencemaran Limbah Industri	▪ Pabrik membuang limbah cair tanpa tanpa pengolahan ▪ Emisi gas buang dari pabrik ▪ Pembuangan limbah padat tidak diolah dengan baik
		Kerusakan Lahan	▪ Alih fungsi lahan untuk kepentingan industri ▪ Penggunaan pestisida secara berlebihan ▪ Pembakaran sisa panen ▪ Penambangan galian tipe C ▪ Pembangunan tidak ramah lingkungan
		Sampah yang tidak dikelola dengan baik	▪ Minimnya sarana dan prasarana pengeloaan sampah dan limbah ▪ Minimnya kesadaran masyarakat terhadap PHBS
4	Belum meratanya tingkat kesejahteraan masyarakat	Angka kemiskinan masih dua digit	▪ Rendahnya pendidikan dan keahlian masyarakat untuk berusaha secara mandiri ▪ Belum maksimalnya pelaksanaan sinergitas program penanggulangan kemiskinan ▪ Layanan dasar bagi masyarakat (pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi) masih terbatas
		Pendapatan masyarakat masih rendah	▪ Pendidikan dan keterampilan masyarakat rendah

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
			▪ Minimnya lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha ▪ Produktivitas kerja rendah ▪ Minimnya permodalan usaha
5	Kualitas sumberdaya manusia masih rendah	Belum optimalnya kualitas derajat Kesehatan masyarakat	▪ Partisipasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan PHBS masih rendah ▪ Masih tingginya angka kematian bayi, kematian Ibu dan kekurangan gizi
		Belum optimalnya kualitas pendidikan dasar	▪ Partisipasi masyarakat dalam pendidikan masih kurang ▪ Sarana dan prasarana masih membutuhkan banyak pembenahan ▪ Belum optimalnya kualifikasi tenaga pendidik jenjang pendidikan dasar ▪ Kompetensi dan daya saing lulusan pendidikan masih perlu ditingkatkan ▪ Pengangguran rendah, tetapi sebagian besar merupakan tenaga kerja di sektor informal (terlebih lagi persentase tenaga kerja menurut jenjang pendidikan tertinggi adalah SD ke bawah)
6	Belum optimalnya penanganan permasalahan sosial dan dan pembangunan pemberdayaan masyarakat	Belum optimalnya penanganan keamanan dan ketertiban umum	▪ Masih rendahnya peran masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum ▪ Terbatasnya kemampuan personil Satpol PP ▪ Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan wawasan kebangsaan.
		Sistem pemberdayaan masyarakat belum optimal	▪ Rendahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk menjadi mandiri ▪ Peran Lembaga pemberdayaan masyarakat dalam mendorong partisipasi masyarakat belum optimal ▪ Belum optimalnya pelaksanaan pengarusutamaan gender
		Masih rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga	▪ Masih belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak ▪ Masih belum optimalnya upaya pemberdayaan keluarga
7	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Belum optimalnya pencapaian akuntabilitas kinerja birokrasi	▪ Belum optimalnya pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan daerah ▪ Sinergitas antara indikator kinerja pada dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan belum optimal ▪ Inovasi layanan publik masih rendah

2.6.2 Isu Strategis Daerah

Isu Strategis adalah kondisi yang harus kita perhatikan karena memiliki dampak yang sangat signifikan di masa mendatang. Isu strategis jika diprioritaskan penanganannya maupun antisipasinya, akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, namun sebaliknya jika isu strategis tidak diindahkan maka akan terjadi beberapa kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah.

Isu strategis itu tidak selalu identik dengan masalah, karena kondisi yang digambarkan dalam isu strategis tersebut tidak selalu bermuatan/ bernuansa negatif. Isu strategis baru akan menjadi masalah apabila tidak mendapat respon yang tepat

2.6.2.1 Isu Strategis Global

Isu strategis global adalah isu yang berdampak signifikan pada berbagai negara dan masyarakat di dunia, serta membutuhkan perhatian dan tindakan bersama untuk diatasi. Terdapat beberapa isu global yang menjadi perhatian dalam merumuskan isu strategis pembangunan daerah, yaitu:

1. Perubahan Iklim

Perubahan Iklim telah terjadi saat ini dan semakin nyata dirasakan di berbagai belahan dunia. Perubahan iklim berdampak pada kehidupan dan kesehatan manusia dalam berbagai cara.

Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari ekstraksi dan pembakaran bahan bakar fosil (revolusi industri) merupakan kontributor utama bagi perubahan iklim dan polusi udara. Banyak kebijakan dan tindakan individual, seperti pilihan transportasi, makanan, dan penggunaan energi, berpotensi mengurangi emisi gas rumah kaca dan menghasilkan manfaat kesehatan yang besar, khususnya dengan mengurangi polusi udara. Penghapusan bertahap sistem energi yang mencemari, misalnya, atau promosi transportasi umum dan pergerakan aktif, dapat menurunkan emisi karbon dan mengurangi beban polusi udara rumah tangga dan udara sekitar, yang menyebabkan 7 juta kematian dini per tahun(WHO).

2. Ketahanan Pangan

Sejak tahun 2001 hingga 2021 produksi pertanian dunia tumbuh sebesar 54% dengan total produksi mencapai 9,5 miliar ton pada tahun 2021. Pertumbuhan tersebut bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk dunia, yakni sebesar 29%. Meskipun relatif tinggi, tingkat pertumbuhan produksi pertanian saat ini masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan 9,6 miliar penduduk dunia pada tahun-tahun mendatang. Produksi pangan diperkirakan perlu

meningkat sebesar 100% untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Tillman, 2011). Hal ini salah satunya disebabkan oleh turunnya produksi pangan dunia akibat tekanan dari perubahan iklim.

Risiko yang dihadapi ketahanan pangan global ini diperparah dengan rendahnya diversifikasi pangan dunia. Produk utama dari hasil pertanian dunia adalah padi-padian (cereals), gula dan minyak nabati. Khusus jenis padi-padian, 90% produksinya didominasi oleh jagung, beras dan gandum. Hal ini mengindikasikan tingginya ketergantungan dunia atas komoditas pangan tertentu (WRI Indonesia).

3. Transformasi Digital

Transformasi digital menjadi isu strategis global pada periode 2025-2029 karena merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup di era digital yang semakin maju. Perkembangan teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi, mendorong transformasi digital yang dapat meningkatkan efisiensi, inovasi, dan layanan publik.

4. Konflik Regional

Konflik regional dapat menyebabkan meningkatnya ketegangan geopolitik, fragmentasi masyarakat, dan bahkan perang terbuka. Konflik dapat mengganggu perdagangan internasional, investasi, dan rantai pasokan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan krisis ekonomi. Konflik regional dapat meningkatkan risiko terorisme, serangan siber, dan juga serangan militer. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara di seluruh dunia untuk bekerja sama dalam mengatasi konflik regional, mencegah eskalasi, dan mencari solusi damai untuk memastikan stabilitas dan keamanan global.

5. Kesehatan Global

Perubahan iklim memiliki dampak langsung pada kesehatan manusia, termasuk peningkatan penyakit menular, perubahan pola penyakit, dan dampak pada sistem pangan dan air. Penyakit seperti HIV, malaria, tuberkulosis, dan COVID-19 terus menjadi tantangan global yang membutuhkan perhatian dan upaya kolaboratif. Penyakit seperti HIV, malaria, tuberkulosis, dan COVID-19 terus menjadi tantangan global yang membutuhkan perhatian dan upaya kolaboratif. Resistensi terhadap antibiotik semakin meningkat, yang dapat membuat penyakit tertentu lebih sulit diobati dan meningkatkan risiko kematian. Pertumbuhan dan penuaan populasi dapat menciptakan tantangan baru bagi sistem kesehatan dan infrastruktur, seperti peningkatan kebutuhan perawatan medis dan layanan kesehatan bagi lansia. Pentingnya membangun sistem kesehatan yang lebih tangguh, inklusif, dan

berdaya tahan, agar dapat menghadapi tantangan kesehatan yang terus berkembang.

6. Krisis Keuangan Global

Krisis keuangan global menyebabkan dampak luas terhadap ekonomi, sosial, dan politik global. Krisis ini bisa dipicu oleh Fluktuasi harga aset, gelembung aset, dan kegagalan lembaga keuangan dapat memicu krisis, Kenaikan harga yang signifikan dapat mengurangi daya beli masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi, Konflik, perang dagang, dan perubahan kebijakan pemerintah dapat menciptakan ketidakpastian di pasar keuangan, Kenaikan suku bunga, pengetatan kredit, dan perubahan nilai tukar dapat memicu krisis. Dampak dari krisis keuangan global dapat mencakup perlambatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, penurunan daya beli masyarakat, serta ketidakstabilan sistem keuangan.

7. Peningkatan Populasi

Pertumbuhan penduduk yang pesat memerlukan perencanaan dan penyesuaian yang cermat untuk mengatasi tantangan karena peningkatan populasi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi akibat peningkatan jumlah pekerja dan konsumen. Di sisi lain, pertumbuhan populasi juga bisa menimbulkan tantangan di bidang ketenagakerjaan, terutama jika persentase penduduk usia produktif tidak seimbang dengan kebutuhan tenaga kerja. Pertumbuhan populasi berpotensi meningkatkan konsumsi, yang dapat membebani ketersediaan sumber daya alam dan menimbulkan masalah lingkungan.

2.6.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional 2025-2029 berfokus pada transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, serta peningkatan kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Terdapat beberapa isu nasional yang menjadi perhatian dalam merumuskan isu strategis pembangunan daerah, yaitu:

1. Peningkatan Infrastruktur dan Pelayanan Publik

Peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik merupakan fondasi penting untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Peningkatan infrastruktur, seperti jalan, transportasi, dan telekomunikasi akan mendukung pertumbuhan ekonomi, konektivitas antar wilayah, dan peningkatan kualitas hidup. Pelayanan publik yang baik, seperti kesehatan dan pendidikan, juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, fokus pada peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik dalam periode 2025-2029 adalah investasi strategis yang penting untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, yang mana negara diharapkan menjadi negara maju dengan perekonomian yang kuat, masyarakat yang sejahtera, dan sumber daya manusia yang berkualitas.

2. Pemerataan Ekonomi

Pemerataan ekonomi merupakan prasyarat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan, selain itu pemerataan ekonomi merupakan salah satu pilar penting dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045, yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan ekonomi yang kuat dan masyarakat yang sejahtera. Pembangunan ekonomi yang tidak merata dapat memicu ketimpangan sosial, menyebabkan konflik sosial, dan menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pemerataan ekonomi sendiri bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif, di mana semua wilayah dan kelompok masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Indonesia menghadapi tantangan global seperti revolusi industri 4.0 dan transformasi digital, yang membutuhkan SDM yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan perkembangan teknologi. SDM yang berkualitas tinggi akan mendorong peningkatan produktivitas kerja, inovasi, dan daya saing bangsa dalam menghadapi persaingan global. Pembangunan SDM yang unggul akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan berdaya saing, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Peningkatan SDM juga penting untuk memanfaatkan peluang bonus demografi, yaitu peningkatan jumlah penduduk usia produktif, dengan mempersiapkan mereka untuk memiliki keterampilan yang dibutuhkan.

4. Degradasi Lingkungan Hidup

Degradasi lingkungan dapat menyebabkan kerugian ekonomi, misalnya berkurangnya produktivitas pertanian, kerusakan infrastruktur akibat bencana alam, dan biaya pengobatan penyakit yang terkait dengan pencemaran. Degradasi lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran, dan perubahan iklim, dapat menghambat pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang mengabaikan lingkungan dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang yang sulit diperbaiki dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam. Pencemaran udara, air, dan tanah akibat aktivitas manusia dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti

penyakit pernapasan, penyakit menular, dan gangguan pada sistem reproduksi. Degradasi lingkungan juga dapat menjadi faktor pemicu konflik sosial dan keamanan nasional, terutama di daerah yang rentan terhadap bencana alam dan kekeringan.

5. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Tata kelola yang baik dan akuntabilitas pemerintah yang kuat merupakan prasyarat utama untuk mencapai target pembangunan nasional, termasuk penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lebih lanjut, tata kelola yang baik dan akuntabilitas pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan nasional berjalan efektif dan mencapai sasaran yang diinginkan.

2.6.2.3 Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional 2025-2029 berfokus pada transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, serta peningkatan kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Terdapat beberapa isu nasional yang menjadi perhatian dalam merumuskan isu strategis pembangunan daerah, yaitu:

A. Provinsi Sumatera Selatan

1. Kemiskinan dan Stunting yang Masih Tinggi
2. Produktivitas Pertanian dan Hilirasi Komoditi Unggulan Belum Optimal
3. Layanan Pendidikan dan Kesehatan Belum Optimal
4. Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Belum Optimal
5. Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Lahan, Banjir, dan Tanah Longsor Belum Optimal
6. Peningkatan Daya Saing dan Realisasi Investasi Belum Optimal
7. Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam Mendorong Pengembangan Wilayah
8. Transformasi Ekonomi dan Transisi Energi Berkeadilan
9. Reformasi Birokrasi

B. Kota Prabumulih

Sebagai dokumen perencanaan jangka panjang yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah, RPJPD Kota Prabumulih Tahun 2025-2045 juga harus menjadi pertimbangan dalam merumuskan isu strategis dalam

RPJMD. Secara garis besar Isu strategis dalam RPJPD dibagi dalam beberapa aspek yaitu:

1. Sosial Budaya, mencakup belum optimalnya akses terhadap layanan dasar sosial dan pelestarian budaya.
2. Ekonomi, mencakup ketimpangan kesejahteraan dan rendahnya daya saing ekonomi kota.
3. Infrastruktur, mencakup belum optimalnya kualitas serta pemerataan infrastruktur perkotaan.
4. Ketahanan Kota, mencakup tantangan dan perubahan termasuk perubahan iklim, dinamika perekonomian atau bahkan pertumbuhan penduduk yang pesat.
5. Tata Kelola, mencakup belum optimalnya sistem regulasi dan reformasi birokrasi.

Kelima isu tersebut mengarah pada satu isu besar yaitu permasalahan ketimpangan, rendahnya daya saing global, kualitas infrastruktur yang belum merata, dan tata kelola yang belum optimal merupakan isu-isu yang masih dihadapi Kota Prabumulih. Permasalahan ketimpangan yang belum terselesaikan dapat meningkatkan ketegangan sosial, terbatasnya akses terhadap layanan publik, meningkatnya kemiskinan, diskriminasi, dan perubahan kualitas hidup. Selain itu, ketimpangan juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, menyebabkan ketidakstabilan sosial, dan bahkan memicu konflik.

Rendahnya daya saing global, terutama dalam hal teknologi dan inovasi, menghalangi upaya untuk membangun kembali dan memperkuat infrastruktur kota agar lebih tahan terhadap bencana dan perubahan iklim. Infrastruktur yang kurang merata memperbesar kesenjangan dalam kesiapan dan aksesibilitas terhadap layanan dasar, sementara tata kelola yang lemah merupakan salah satu pendorong risiko bencana, dan terkait dengan banyak faktor risiko lain seperti kemiskinan dan ketimpangan, pembangunan perkotaan yang kurang terencana. Dengan demikian, penanganan isu-isu ini merupakan langkah penting dalam memperkuat ketahanan Kota Prabumulih dan meningkatkan kesiapannya menghadapi tantangan di masa depan.

Telaah Isu Strategis KLHS

KLHS menjadi dokumen yang terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah yang memuat integrasi pertimbangan lingkungan untuk memastikan bahwa aspek lingkungan dan pembangunan keberlanjutan telah terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Kota Prabumulih. Isu strategis terkait dengan muatan

lingkungan hidup di Kota Prabumulih yang menjadi fokus dan perhatian pemerintah daerah antara lain: (1) Perlu meningkatkan akses dan infrastruktur air bersih serta sanitasi layak; (2) Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan; (3) Perlu meningkatkan kapasitas penanganan perubahan iklim; (4) Penguatan pengelolaan limbah dan penggunaan sumber daya berkelanjutan; (5) Kolaborasi dan sinergi lintas sektor untuk pencapaian TPB.

Isu Strategis Daerah

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu strategi RPJPD Kota Prabumulih 2025-2045, program unggulan Walikota terpilih dan isu strategis KLHS RPJMD Kota Prabumulih 2025-2029, maka isu strategis Kota Prabumulih pada pelaksanaan pembangunan periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu strategi RPJPD Kota Prabumulih 2025-2045, program unggulan Walikota terpilih dan isu strategis KLHS RPJMD Kota Prabumulih 2025-2029, maka isu strategis Kota Prabumulih pada pelaksanaan pembangunan periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Kesenjangan Infrastruktur

Kesenjangan infrastruktur di Prabumulih, terlihat dalam perbedaan kondisi jalan seperti Jalan Muda di Kelurahan Sukajadi dan jalan menuju TPA Sungai Medang, mengalami kerusakan parah dan belum diperbaiki, akses antar kelurahan, seperti yang menghubungkan Kelurahan Sukajadi dan Majasari, menjadi sulit dilalui karena kondisi jalan yang buruk, dan ketersediaan fasilitas umum antara pusat kota dan wilayah pinggiran. Beberapa wilayah mengalami kerusakan parah pada jalan utama dan akses vital dapat menghambat mobilitas dan aktivitas warga, bahkan menyebabkan kecelakaan. Di sisi lain, ada juga upaya pembangunan infrastruktur digital, seperti penyediaan internet cepat di desa-desa, untuk mengurangi kesenjangan digital.

2. Ketimpangan Sosial

Ketimpangan sosial di Prabumulih tercermin dari beberapa indikator, diantaranya persentase penduduk miskin yang masih cukup tinggi, meskipun ada penurunan dari tahun sebelumnya, pada 30 November 2024, persentase penduduk miskin di Prabumulih tercatat 10,13%, turun dari 11,23% pada tahun sebelumnya. Meskipun ada penurunan, angka ini masih menunjukkan bahwa sekitar satu dari sepuluh penduduk Prabumulih tergolong miskin. Selain itu, ketimpangan juga terlihat dari perbedaan kualitas infrastruktur dan akses layanan publik di berbagai wilayah, beberapa daerah di Prabumulih, terutama

yang berada di pinggiran atau pelosok, mengalami ketertinggalan dalam hal infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan akses ke fasilitas umum. Contohnya, kerusakan jalan di Talang Sako, Kelurahan Sukajadi, yang tak kunjung diperbaiki. Selain itu terdapat potensi kesenjangan dalam bidang pendidikan, di mana akses dan kualitas pendidikan mungkin berbeda antara sekolah di pusat kota dan daerah terpencil, atau antara sekolah negeri dan swasta.

3. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi memiliki sangat peran penting dalam pemerintahan karena Reformasi birokrasi dapat menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini mencakup peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik, serta pengurangan potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, Reformasi birokrasi juga mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kepercayaan publik, dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan daya saing daerah.

Walaupun Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Prabumulih menunjukkan capaian yang baik dengan nilai 73,26 di tahun 2024 bila dibandingkan capaian di tahun 2023, tetap saja masih perlu dilakukan perbaikan seperti :

- Perlu perbaikan dokumen perencanaan pada setiap level organisasi agar lebih berorientasi pada hasil dan manfaat langsung bagi masyarakat.
- Perlu perbaikan penjenjangan/cascading kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional.
- Perlu penyempurnaan indikator kinerja agar lebih berorientasi hasil dan memenuhi kriteria yang spesifik, terukur, relevan, dan cukup dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja daerah.
- Belum adanya kebijakan reward and punishment yang efektif untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP.

4. Demografi

Di tahun 2024, total jumlah penduduk Kota Prabumulih tercatat sebesar 211.395 jiwa, dengan penyebarannya cenderung terkonsentrasi di pusat kota yang memiliki fasilitas ekonomi lebih beragam (lengkap) seperti pasar dan pertokoan, sementara daerah dengan fasilitas minim memiliki kepadatan penduduk rendah. Dilihat dari laju pertumbuhan, dalam lima tahun terakhir rata-rata laju pertumbuhan penduduk Prabumulih tahunan sebesar 1,41% dengan jumlah komposisi penduduk usia produktif (15-64 tahun) paling banyak

sebesar 66,91% dari total jumlah penduduk. Besaran proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) diatas 60% menandakan bahwa Kota sedang mengalami *bonus demografi*. Apabila dapat dikelola dengan baik, bonus demografi ini dapat memberikan manfaat signifikan bagi Kota Prabumulih, karena dengan adanya peningkatan jumlah penduduk usia produktif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan peluang tenaga kerja, dan perkembangan sektor pemerintah. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, bonus demografi juga bisa membawa tantangan seperti peningkatan pengangguran dan tekanan pada sumber daya.

5. Ketahanan Pangan

Pangan memiliki kontribusi yang sangat strategis bagi suatu daerah dikarenakan pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang permintaannya meningkat terus seiring bertambahnya jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup. Saat ini, kebutuhan pangan di kota Prabumulih lebih banyak dipenuhi dari daerah lain. Kondisi ini karena terjadi pergeseran dalam pola produksi pertanian di Prabumulih. Konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian, penurunan kualitas kesuburan lahan, dan terbatasnya ketersediaan air akibat kerusakan lingkungan menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi produksi pangan lokal, akibatnya, kebutuhan pangan di Prabumulih, seperti beras, sayuran, dan buah-buahan lebih banyak dipenuhi dari daerah lain, seperti daerah sekitar atau bahkan dari luar Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan di Prabumulih masih perlu ditingkatkan melalui memperkuat produksi pangan lokal, diversifikasi produk pertanian, serta menjaga kelestarian lingkungan. Semua perlu diupayakan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan, serta memperkuat daya tahan ekonomi Kota Prabumulih.

6. Penurunan kualitas lingkungan Hidup

Meskipun pembangunan sektor industri membawa berbagai manfaat, seperti peningkatan ekonomi dan kesempatan kerja, ia juga dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan, salah satunya pencemaran air sungai akibat limbah industri, terutama dari sektor minyak dan gas yang mencemari Sungai Kelekar dan Sungai Lematang menyebabkan air menjadi keruh, berbau dan berubah menjadi hitam pekat. Tidak hanya pencemaran air akibat limbah industri, pencemaran air sumur akibat limbah domestik juga masih sering terjadi seperti yang dialami warga di sejumlah kawasan di kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan. Belum tuntasnya penanganan sampah

yang ditandai dengan adanya penumpukan sampah di berbagai lokasi, termasuk di taman kota yang seharusnya menjadi ruang publik yang bersih juga menjadi penyebab menurunnya kualitas lingkungan hidup karena dapat menimbulkan pencemaran air, tanah, dan udara, serta mengganggu ekosistem. Oleh sebab itu, penurunan kualitas lingkungan hidup tidak hanya menjadi masalah lingkungan, tetapi juga masalah sosial, ekonomi, dan politik yang harus segera diantisipasi demi mengusung pembangunan yang berkelanjutan.

7. Masih rendahnya kapasitas fiskal daerah

Kapasitas fiskal yang rendah membatasi kemampuan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Daerah menjadi lebih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, mengurangi kemandirian dan fleksibilitas dalam mengelola potensi daerah. Pendapatan daerah yang terbatas akan menyulitkan penyediaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan sosial lainnya. Hal ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan anggaran akan menghambat investasi dalam pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, serta program-program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi daerah terhambat dan ketimpangan antar daerah semakin melebar.

Berdasarkan perumusan dari permasalahan diatas, serta antara isu strategis global, nasional, dan regional maka isu strategis yang dituangkan dalam rancangan awal RPJMD Kota Prabumulih 2025-2029 adalah sebagai berikut (Tabel 2.258):

Tabel 2.258 Perumusan Isu Strategis Kota Prabumulih Tahun 2025-2029

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Pertambangan Minyak dan Gas	Pengendalian kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan masih belum optimal (Pertambangan migas menyebabkan pencemaran udara, air, dan tanah. Selain itu, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dapat mengganggu ekosistem alami)	Penguatan pengelolaan limbah dan penggunaan sumber daya berkelanjutan	Perubahan Iklim dan Lingkungan	Perubahan Iklim dan Ketahanan Lingkungan	Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Lahan, Banjir, dan Tanah Longsor Belum Optimal	Penurunan kualitas lingkungan hidup
Pertanian	Belum optimalnya pengembangan ekonomi berbasis keunggulan lokal (Sebagian besar usaha pertanian di Prabumulih masih bersifat tradisional dan belum memanfaatkan teknologi modern secara optimal; Usaha tani di Prabumulih umumnya berskala kecil, sehingga menghambat peningkatan produktivitas dan pendapatan petani; Petani menghadapi kesulitan dalam memasarkan hasil panen, termasuk kurangnya akses ke pasar yang lebih luas dan fluktuasi harga yang tidak stabil; Perubahan iklim, seperti cuaca ekstrem dan musim kemarau yang berkepanjangan, mengganggu siklus tanam dan mengurangi	▪ Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan	Ketahanan Pangan	Pemerataan Ekonomi	Produktivitas Pertanian dan Hilirasi Komoditi Unggulan Belum Optimal	Ketahanan Pangan

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	hasil panen; Petani hanya fokus pada satu jenis tanaman sehingga rentan terhadap risiko gagal panen atau penurunan harga.					
Jalur transit darat yang menghubungkan berbagai kota di Sumatera Selatan, Sumatera, dan Jawa	Penyediaan dan kualitas infrastruktur kota masih perlu ditingkatkan (Banyak ruas jalan di Kota Prabumulih, termasuk Jalan Sudirman, yang mengalami kerusakan, terutama akibat drainase yang kurang baik. Kerusakan jalan ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi dan sosial)	Perlu meningkatkan akses dan infrastruktur air bersih serta sanitasi layak		Peningkatan Infrastruktur dan Pelayanan Publik	Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Belum Optimal	Kesenjangan Infrastruktur
Perdagangan dan jasa.	Belum optimalnya pengembangan ekonomi berbasis keunggulan lokal (Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk)	Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan		Pemerataan Ekonomi	Produktivitas Pertanian dan Hilirasi Komoditi Unggulan Belum Optimal	Ketimpangan Sosial

Berikut ini uraian singkat terkait isu strategis Kota Prabumulih Tahun 2025-2029 :

1. Kelestarian Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana, dan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim

Penanganan sampah perlu perhatian lebih serius, mengingat volume sampah yang terus meningkat. Perubahan iklim, pencemaran, dan degradasi lingkungan menjadi ancaman serius bagi ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan kelestarian lingkungan menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan generasi mendatang.

Perubahan iklim menyebabkan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan gelombang panas. Mitigasi bencana, termasuk pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, menjadi penting untuk mengurangi dampak negatif bencana terhadap masyarakat dan perekonomian.

Perubahan iklim berdampak pada berbagai sektor, termasuk pertanian, perikanan, pariwisata, dan kesehatan. Ketahanan terhadap perubahan iklim, termasuk adaptasi terhadap dampak iklim yang sudah terjadi dan mitigasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Ketahanan Pangan dan Pemerataan Ekonomi

Ketahanan pangan dan pemerataan ekonomi merupakan fondasi penting untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Ketahanan pangan yang baik mendukung pembangunan manusia, termasuk peningkatan kesehatan dan penurunan kemiskinan. Ketahanan pangan yang kuat juga akan membantu mengurangi kerentanan terhadap krisis pangan, seperti perubahan iklim dan fluktuasi harga. Melalui pemerataan ekonomi akan membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di berbagai wilayah, kualitas hidup meningkat karena semua masyarakat dapat menikmati akses yang sama terhadap berbagai kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menciptakan iklim yang lebih kompetitif bagi semua pelaku ekonomi serta penciptaan lapangan kerja.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM yang berkualitas tinggi adalah fondasi penting untuk mencapai tujuan pembangunan, baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun lingkungan. SDM yang kompeten dan berpengetahuan dapat meningkatkan daya saing daerah, baik

secara nasional maupun internasional. SDM yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas ekonomi melalui peningkatan efisiensi, inovasi, dan kreativitas. SDM yang berpengetahuan dan memiliki keterampilan yang relevan dapat berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan, termasuk dalam bidang lingkungan dan teknologi. Peningkatan SDM menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan global, seperti revolusi industri 4.0 dan transformasi digital, yang membutuhkan tenaga kerja yang siap dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Oleh karena peningkatan kualitas SDM bukan hanya merupakan fokus pembangunan daerah, tetapi juga merupakan investasi penting untuk masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan.

4. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur dasar

Infrastruktur dasar yang memadai, seperti jalan yang baik, jembatan, dan fasilitas transportasi, dapat mempermudah mobilitas barang dan jasa, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Akses terhadap air bersih, listrik, fasilitas kesehatan, dan pendidikan yang layak dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

5. Tata Kelola Pemerintahan

Berdasarkan hasil penilaian dalam bentuk Evaluasi Unit Pelayanan Publik (EUPP) dalam bentuk Indeks Pelayanan Publik (IPP). Tahun 2024, Indeks Pelayanan Publik Kota Prabumulih mencapai nilai 4,46 termasuk kategori A- (sangat baik).

Walaupun kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kota Prabumulih umumnya berkualitas baik dan dapat memenuhi standar pelayanan publik yang ditetapkan, namun masih rendahnya kapasitas fiskal daerah berdampak pada efektivitas pembangunan daerah, karena mempengaruhi kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan dan layanan publik secara mandiri.

6. Penegakan Hukum dan Keamanan Masyarakat

Penegakan hukum yang efektif dan keamanan yang terjamin sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat untuk hidup, bekerja, dan beraktivitas sehari-hari. Hal ini juga penting untuk mencegah tindak pidana dan menjaga ketertiban umum. Keamanan dan ketertiban yang terjamin akan menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan pembangunan. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Penegakan hukum yang adil dan efektif dapat mencegah konflik sosial dan menjaga stabilitas daerah. Hal ini penting untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi

Penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kota Prabumulih Tahun 2025-2029 disusun dalam kerangka transisi kepemimpinan kepala daerah hasil pemilihan umum serentak tahun 2024, sekaligus menjawab dinamika kebijakan pembangunan daerah yang terus berkembang. Penyelarasan dokumen RPJMD ini dilaksanakan dengan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran dilakukan untuk memastikan adanya kesinambungan pembangunan yang selaras dengan arah kebijakan RPJPD Kota Prabumulih Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029, serta RPJMN tahun 2025-2029.

Sebagai upaya memastikan kesesuaian arah pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah maka perumusan visi dan misi kepala daerah terpilih diselaraskan secara teknokratik. Dalam kerangka tersebut, visi kepala daerah terpilih tidak hanya menjadi representasi dari mandat politik masyarakat, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip kesinambungan pembangunan yang berbasis pada isu-isu strategis yang telah diidentifikasi. Visi tersebut menjadi gambaran ideal kondisi masa depan Kota Prabumulih yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan, sedangkan misi menjadi arah kebijakan dan strategi pokok yang digunakan untuk mencapai visi tersebut.

Perumusan visi dan misi pembangunan Kota Prabumulih dilakukan melalui proses yang partisipatif dan berbasis pada analisis teknokratik, dengan melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah, lembaga legislatif, dunia usaha, akademisi, hingga elemen masyarakat sipil. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa visi dan misi kepala daerah terpilih tidak hanya mendapatkan legitimasi secara demokratis, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif, realistis, dan akuntabel dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, visi dan misi yang ditetapkan mampu menjadi arah dan landasan utama perencanaan pembangunan Kota Prabumulih selama lima tahun ke depan.

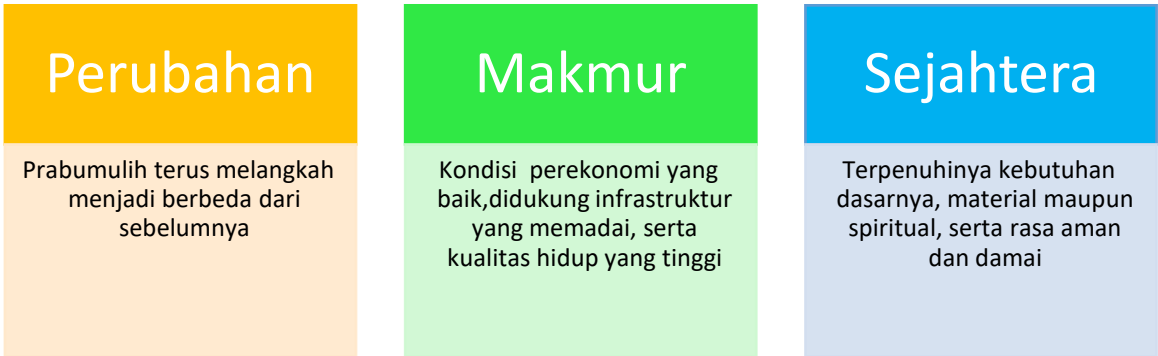
Dengan memperhatikan hasil identifikasi isu strategis pembangunan Kota Prabumulih serta visi politik kepala daerah terpilih, maka rumusan visi pembangunan Kota Prabumulih

Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dianggap telah mampu merangkum cita-cita pembangunan daerah dan mewakili harapan masyarakat untuk mewujudkan Kota Prabumulih sebagai kota yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun rumusan Visi Pembangunan Kota Prabumulih Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“PRABUMULIH MAS 2029”

**BERSAMA MASYARAKAT MEWUJUDKAN PERUBAHAN MENUJU
MASYARAKAT PRABUMULIH YANG MAKMUR DAN SEJAHTERA**

Berdasarkan redaksi visi Kota Prabumulih 2025-2029 diatas dapat ditangkap bahwa setidaknya terdapat 2 kata kunci yang dapat ditekankan meliputi Perubahan, Makmur dan Sejahtera. Memahami lebih dalam terkait visi tersebut berikut merupakan gambaran maksud tersirat dari poin-poin visi sebagai berikut:



Gambar 3.1 Poin Visi Kota Prabumulih Tahun 2025-2029

Lebih detail memahami pokok-pokok visi Kota Prabumulih Tahun 2025-2029 berikut merupakan penjabaran detailnya. Perubahan dalam konteks pembangunan Kota Prabumulih mencerminkan semangat menuju kondisi yang lebih baik di berbagai sektor strategis. Prabumulih dihadapkan pada tantangan global yang menuntut adaptasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, perubahan yang dimaksud merupakan langkah signifikan yang menghasilkan dampak besar bagi masyarakat. Fokus ini diwujudkan melalui pengembangan sektor ekonomi unggulan berbasis nilai tambah, didukung oleh iklim investasi yang kondusif serta layanan perizinan yang transparan dan berkualitas. Perubahan ini juga melibatkan penguatan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berkarakter melalui pemanfaatan teknologi di sektor pendidikan dan kesehatan, menciptakan SDM Prabumulih yang mampu bersaing di tingkat regional maupun global. Prabumulih akan terus berupaya menghadirkan inovasi kebijakan, dan menciptakan peluang kerja baru untuk menggerakkan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

Konsep “Makmur” diwujudkan melalui pembangunan SDM yang unggul, tangguh, dan berkualitas. Sistem pendidikan yang baik dan bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat

dan dunia kerja. Pembangunan yang merata ke seluruh pelosok wilayah, tidak hanya terkonsentrasi di pusat kota, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Menciptakan keadilan dalam berbagai bidang, agar semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk maju dan berkembang. Peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja.

Sejahtera merupakan konsep yang komprehensif dan multidimensional, kondisi kehidupan masyarakat, tidak hanya diharapkan terpemenuhinya kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan, namun masyarakat perlu juga rasa aman dan tenteram serta kebahagiaan.

Untuk mewujudkan Visi serta mendukung pencapaian sasaran RPJMN, RPJMD Sumsel, dan RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2025-2029 sehingga pembangunan daerah menjadi sinergi dan terukur, maka perlu ditetapkan target Tahun 2029 setiap sasaran utama pembangunan daerah. Sasaran utama pembangunan nasional dan Kota Prabumulih Tahun 2029 adalah sebagai berikut (table 3.1):

Tabel. 3.1 Sasaran Utama Pembangunan Nasional, Provinsi SUMSEL dan Kota Prabumulih Tahun 2029

No	SUP Nasional Tahun 2029	SUP Prabumulih Tahun 2029
1	Peningkatan Pendapatan per Kapita • GNI Per Kapita 8.000 USD • Kontribusi PDB Maritim 9,1% • Kontribusi PDB Manufaktur 21,9% • Pertumbuhan ekonomi 8%	Peningkatan Pendapatan per Kapita • PDRB ADHB per kapita 65,47 Juta Rupiah • Kontribusi perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor 28,5% • Kontribusi PDRB Industri Pengolahan 12,57%
2	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang • 4,5-5,0% (tingkat kemiskinan ekstrim 0,5%* di tahun kedua) • Rasio Gini 0,372-0,375 • Kontribusi PDRB KTI 22,4%	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan • Tingkat Kemiskinan 8,9% • Rasio Gini 0,339 • Kontribusi PDRB Kota 0,057% • Pertumbuhan Ekonomi 6,1%
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat • Global Power Indeks berada di rangking 29	Peningkatan Daya Saing Daerah • Indeks Daya Saing Daerah 4,1
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia • Indeks Modal Manusia (IMM) mencapai 0,59	Peningkatan daya saing sumber daya manusia • Indeks Pembangunan Manusia 79,75
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission • Penurunan intensitas emisi GRK menjadi 45,17% • Indeks kualitas lingkungan hidup menjadi 77,20	Keberlanjutan lingkungan dapat terjaga • Penurunan Emisi GRK 44.104,09 Ton Co2e • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 63,18

3.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Prabumulih untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029. Rumusan misi ini berfungsi sebagai penjabaran visi “Prabumulih Mas 2029”, sekaligus memberikan arah dan fokus pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang. Misi ini juga mencerminkan komitmen kepala daerah terpilih yang telah mendapatkan legitimasi langsung dari masyarakat Prabumulih melalui proses pemilihan umum. Oleh karena

itu, setiap misi yang dirumuskan memuat penekanan pada langkah-langkah strategis yang diyakini mampu mewujudkan Prabumulih sebagai kota yang makmur dan sejahtera di tahun 2029. Sebagai gambaran penjabaran visi berikut merupakan misi kepala daerah daerah terpilih, yaitu:

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju masyarakat Makmur dan Sejahtera
2. Mewujudkan perekonomian yang lebih baik melalui kemudahan investasi yang berkeadilan, dan peningkatan kesempatan kerja serta pengembangan kegiatan ekonomi berbasis kearifan lokal dan keunggulan wilayah
3. Mendorong kemandirian masyarakat melalui penguatan ketahanan pangan daerah dan mendukung swasembada energi
4. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berprestasi, berbudaya, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
5. Mewujudkan pembangunan daerah dengan dukungan infrastruktur yang berkualitas, dan ramah lingkungan
6. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis, efisien, bersih dan profesional

Berikut merupakan gambaran perubahan misi beserta fokus pembangunannya:

Tabel 3.2 Transformasi Misi Kota Prabumulih Tahun 2025-2029

Misi 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju masyarakat Makmur dan Sejahtera	• Pendidikan Berkualitas • Kesehatan Optimal • Pengembangan Keterampilan • Pemberdayaan Masyarakat
Misi 2. Mewujudkan perekonomian yang lebih baik melalui kemudahan investasi yang berkeadilan, dan peningkatan kesempatan kerja serta pengembangan kegiatan ekonomi berbasis kearifan lokal dan keunggulan wilayah	• Sektor Unggulan • Investasi • Tenaga Kerja • Wirausaha
Misi 3. Mendorong kemandirian masyarakat melalui penguatan ketahanan pangan daerah dan mendukung swasembada energi	• Peningkatan produksi pangan • Diversifikasi Pangan • Penguatan Cadangan Pangan • Pengembangan Energi Terbarukan • Efisiensi Energi
Misi 4. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berprestasi, berbudaya, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	• Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan • Pembentukan Budaya • Pencapaian Prestasi • Karakter yang Kuat
Misi 5. Mewujudkan pembangunan daerah dengan dukungan infrastruktur yang berkualitas, dan ramah lingkungan	• Penyediaan Infrastruktur Berkelanjutan • Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan • Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Bijaksana • Peningkatan Kualitas Udara dan Air
Misi 6. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis, efisien, bersih dan profesional	• Peningkatan kualitas pelayanan publik • Efektivitas dan efisiensi birokrasi • Penerapan prinsip-prinsip good governance

Berikut merupakan penjelasan lebih detail dari masing-masing Misi Pembangunan Kota Prabumulih Tahun 2025-2029:

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju masyarakat Makmur dan Sejahtera

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkualitas adalah kunci untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. SDM berkualitas tidak hanya mencakup pendidikan dan keterampilan, tetapi juga kesehatan, kesejahteraan, dan moralitas. Peningkatan kualitas SDM akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas, inovasi, serta stabilitas sosial.

2. Mewujudkan perekonomian yang lebih baik melalui kemudahan investasi yang berkeadilan, dan peningkatan kesempatan kerja serta pengembangan kegiatan ekonomi berbasis kearifan lokal dan keunggulan wilayah

Mendorong transformasi ekonomi daerah berbasis potensi lokal dan berkelanjutan, serta memastikan pembangunan yang merata di seluruh wilayah. Misi ini menjawab tantangan ketimpangan antar wilayah, tingginya ketergantungan pada sektor migas, dan kebutuhan diversifikasi ekonomi ke sektor UMKM, industri pengolahan dan pertanian unggulan seperti nanas dan karet.

3. Mendorong kemandirian masyarakat melalui penguatan ketahanan pangan daerah dan mendukung swasembada energi

Dengan ketahanan pangan yang kuat, masyarakat akan terjamin kebutuhan pangannya, mengurangi ketergantungan pada pihak luar, dan meningkatkan kesejahteraan. Sementara itu, swasembada energi akan mengurangi ketergantungan pada energi impor, menstabilkan harga energi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Keduanya, jika terwujud, akan menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan sejahtera bagi masyarakat.

4. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berprestasi, berbudaya, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Mewujudkan masyarakat yang berprestasi, berbudaya, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berkaitan erat dengan kemakmuran dan kesejahteraan. Hal ini karena nilai-nilai tersebut menjadi dasar bagi pembangunan manusia seutuhnya, yang pada gilirannya akan mendorong terciptanya masyarakat yang sejahtera secara lahir dan batin.

5. Mewujudkan pembangunan daerah dengan dukungan infrastruktur yang berkualitas, dan ramah lingkungan

Pembangunan infrastruktur yang baik, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mempermudah distribusi barang dan jasa, serta membuka akses ke pasar dan layanan publik. Selain itu, infrastruktur ramah lingkungan, seperti transportasi publik yang berkelanjutan dan bangunan hijau, akan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat.

6. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis, efisien, bersih dan profesional

Reformasi ini mencakup perbaikan dalam manajemen perubahan, penguatan kelembagaan, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sistem manajemen SDM aparatur, sistem pengawasan, dan akuntabilitas kinerja. Tujuan utamanya adalah menciptakan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik berkualitas, transparan, dan akuntabel, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.3 Keselarasan Misi RPJMD Provinsi Sumsel, dan RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2025-2029

No	Misi Pembangunan RPJMD Sumsel	Misi Pembangunan RPJMD Kota Prabumulih
1	Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing	Misi 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju masyarakat makmur dan sejahtera
2	Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat	Misi 2. Mewujudkan perekonomian yang lebih baik melalui kemudahan investasi yang berkeadilan, dan peningkatan kesempatan kerja serta pengembangan kegiatan ekonomi berbasis kearifan lokal dan keunggulan wilayah
3	Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim	Misi 3. Mendorong kemandirian masyarakat melalui penguatan ketahanan pangan daerah dan mendukung swasembada energi
4	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.	Misi 5. Mewujudkan pembangunan daerah dengan dukungan infrastruktur yang berkualitas, dan ramah lingkungan

No	Misi Pembangunan RPJMD Sumsel	Misi Pembangunan RPJMD Kota Prabumulih
5	Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan	Misi 2. Mewujudkan perekonomian yang lebih baik melalui kemudahan investasi yang berkeadilan, dan peningkatan kesempatan kerja serta pengembangan kegiatan ekonomi berbasis kearifan lokal dan keunggulan wilayah
6	Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas	Misi 6. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis, efisien, bersih dan profesional
7	Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal	Misi 4. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berprestasi, berbudaya, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Selain itu misi dalam RPJMD Prabumulih Tahun 2025-2029 juga mengacu dan berpedoman pada RPJPD Kota Prabumulih Tahun 2025-2045 dimana terdapat hubungan yang erat antara misi dalam RPJPD dan misi dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4 Keselarasan Misi RPJPD 2025-2045 dan Misi RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2025-2029

No	Misi RPJPD 2025-2045	Misi Pembangunan RPJMD 2025-2029
1	Mewujudkan Transformasi Sosial menuju Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Misi 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju masyarakat makmur dan sejahtera
2	Mewujudkan Transformasi Ekonomi menuju Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Misi 2. Mewujudkan perekonomian yang lebih baik melalui kemudahan investasi yang berkeadilan, dan peningkatan kesempatan kerja serta pengembangan kegiatan ekonomi berbasis kearifan lokal dan keunggulan wilayah
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Misi 6. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis, efisien, bersih dan profesional
4	Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Misi 4. Mendorong kemandirian masyarakat melalui penguatan ketahanan pangan daerah dan mendukung swasembada energi Misi 6. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis, efisien, bersih dan profesional
5	Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	Misi 4. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berprestasi, berbudaya, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

No	Misi RPJPD 2025-2045	Misi Pembangunan RPJMD 2025-2029
6	Mewujudkan Keadilan Pemerataan Pembangunan	Misi 5. Mewujudkan pembangunan daerah dengan dukungan infrastruktur yang berkualitas, dan ramah lingkungan
7	Meningkatkan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan	Misi 5. Mewujudkan pembangunan daerah dengan dukungan infrastruktur yang berkualitas, dan ramah lingkungan
8	Menguatkan Kestinambungan Pembangunan	Misi 5. Mewujudkan pembangunan daerah dengan dukungan infrastruktur yang berkualitas, dan ramah lingkungan

3.3 Tujuan dan Sasaran

Untuk memastikan bahwa visi tersebut dapat diwujudkan secara nyata pada tahun 2029, visi dan misi tersebut perlu dijabarkan secara lebih sistematis dan operasional. Penerjemahan visi dan misi ini penting agar arah pembangunan Kota Prabumulih tidak bersifat normatif semata, melainkan dikembangkan menjadi serangkaian sasaran dan kinerja yang terukur. Proses ini mencakup perumusan dampak perubahan (*outcome*) yang diinginkan hingga penetapan langkah-langkah implementasi di tingkat teknis. Di sisi lain, perangkat daerah sebagai pelaksana utama birokrasi harus dipetakan secara jelas peran dan tanggung jawabnya, guna menjamin keterpaduan dalam pelaksanaan program pembangunan. Dengan demikian, perumusan tujuan RPJMD ditentukan dengan mempertimbangkan visi dan misi Wali Kota terpilih, hasil analisis kondisi daerah, serta isu-isu strategis yang ada serta arah pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD Kota Prabumulih 2025-2045), serta prioritas pembangunan nasional melalui RPJMN 2025-2029.

Selanjutnya sasaran RPJMD merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan, satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran. Sasaran juga harus relevan dengan permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi daerah, yang diidentifikasi melalui proses analisis dan pengkajian. Sasaran yang baik harus memenuhi kriteria *SMART-C*, yaitu: spesifik (terdefinisi dengan jelas), terukur (dapat dinilai pencapaiannya), dapat dicapai (realistis), relevan (sesuai dengan tujuan), dan terikat waktu (memiliki target waktu pencapaian).

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan tujuan dan sasaran Kota Prabumulih Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5 Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Prabumulih 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Misi 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju masyarakat makmur dan sejahtera									
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	78,95	79	79,45	79,85	79,9	80
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,45	10,55	10,65	10,69	10,7	10,72
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,44	13,47	13,49	13,5	13,51	13,53
		Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	%	46,11	48,2	50,61	51,41	53,67	55,67
		Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	%	51,95	54,54	57,27	60,12	63,12	66,27
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	%	14,5	15	15,25	15,75	16	16,25
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	75	77	79	80	81	82

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Meningkatnya kesehatan untuk semua	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,9	75	75,15	75,35	75,5	75,6
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	8,5	8	7,5	7	6,5	6
		Angka kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	80	75	73	72	70	68
		Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	%	90	90	90	90	90	90
		Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolusis (treatment success rate)	%	90	90	90	90	90	90
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	99,4	99,5	99,6	99,7	99,8	99,9
	Meningkatnya Kesenjangan Gender	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	58,65	59	59,5	60	60,5	61
		Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,327	0,318	0,308	0,299	0,29	0,282
	Terciptanya Masyarakat yang Inklusif dan Berdaya Saing	Indeks Masyarakat Digital	Indeks	42,5	43,2	43,5	44	44,5	45
		Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	64,9	65,6	66,4	67,1	67,9	68,7
		Persentase Atlet yang masuk Pelatda	%	36	36,5	37	37,5	38	38,5

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Misi 2. Mewujudkan perekonomian yang lebih baik melalui kemudahan investasi yang berkeadilan, dan peningkatan kesempatan kerja serta pengembangan kegiatan ekonomi berbasis kearifan lokal dan keunggulan wilayah									
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3	5,5	5,7	5,8	6,1	6,3
		PDRB per kapita	Juta Rupiah	54,54	57,27	60,00	62,74	65,47	68,20
	Meningkatnya pengembangan potensi unggulan ekonomi daerah	Rasio PDRB industri pengolahan	%	10,9	11	11,5	12	12,57	12,95
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	4,61	4,75	5,32	5,68	6,04	6,40
		Jumlah Tamu Wisatawan Nusantara	Orang	49.800	50.100	50.300	50.500	50.700	60.000
		Proporsi PDRB Sektor Jasa	%	57,90	58,00	58,50	58,75	59,00	59,50
		Proporsi Kontribusi PDRB Kota terhadap nasional	%	0,049	0,051	0,053	0,055	0,057	0,059
		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,42	0,45	0,47	0,5	0,53	0,55
		Indeks Kemandirian Fiskal	Nilai	0,12	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18
		Meningkatnya kontribusi UMKM, Koperasi, BUMD terhadap perekonomian daerah	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian	%	93,8	94	94,25	94,5	95
	Jumlah Industri Kecil dan Menengah		unit	6.220	6.270	6.300	6.400	6.500	6.600
	Rasio Kewirausahaan		%	3,8	3,85	3,9	4	4,2	4,4
	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB		%	0,068	0,069	0,07	0,071	0,072	0,073

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Return on asset (ROA) BUMD	%	0,01	0,05	1	1,5	2,5	2,8
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan daya saing produk ekspor	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	38,5	39	39,25	39,75	40	40,5
		Net ekspor Barang dan Jasa	Milyar Rp	-1826,57	-1826,32	-1825	-1824	-1823	-1822
	Terciptanya pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antara desa dan kota	Persentase Desa Mandiri	%	16,67	16,67	17,67	18,67	18,67	18,67
		Indeks Entropy Theil	Indeks	1,65	1,64	1,62	1,60	1,58	1,56
	Terwujudnya stabilitas ekonomi daerah	Indeks Harga Konsumen	Indeks	110,63	107,01	106,57	105,00	104,00	103,00
		Rasio PDRB sektor jasa keuangan	%	4,24	4,30	4,35	4,87	5,00	5,24
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial masyarakat		Indeks Gini	Indeks	0,347	0,345	0,343	0,341	0,339	0,337
	Meningkatnya perlindungan sosial ekonomi kepada pekerja	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota	%	42,5	45	48	50	60	63
	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,83	4,73	4,63	4,53	4,43	4,35
	Menurunnya angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	%	10	9,7	9,4	9,1	8,9	8,6
Misi 3. Mendorong kemandirian masyarakat melalui penguatan ketahanan pangan daerah dan mendukung swasembada energi									
Terwujudnya Kedaulatan Pangan		Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	75,55	79,93	84,31	88,69	93,07	93,50
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	6,8	6,2	5,8	5,4	5,2	5

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Meningkatnya kebutuhan energi masyarakat	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh	1251,87	1270,64	1340,00	1380,00	1401,61	1450,00
Misi 4. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berprestasi, berbudaya, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa									
Terwujudnya kehidupan kota yang harmonis		Indeks Harmoni Indonesia (Prabumulih)	Indeks	7,3	7,5	7,7	7,9	8,1	8,3
	Terciptanya ketentraman di masyarakat	Angka Kriminalitas	Per 100.000 Penduduk	230	225	220	215	210	205
		Partisipasi Pemilih dalam PEMILU terakhir	%	n/a	n/a	n/a	n/a	88	n/a
		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	88	90	92	94	96	98
Misi 5. Mewujudkan pembangunan daerah dengan dukungan infrastruktur yang berkualitas, dan ramah lingkungan									
Terwujudnya kualitas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan lingkungan hidup yang berkesinambungan		Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	62,17	62,42	62,67	62,92	63,18	63,5
		Indeks infrastruktur daerah	Indeks	86,94	87,00	87,20	87,50	87,75	88,00
	Terciptanya lingkungan hidup yang berkelanjutan	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	0,37	0,5	0,68	0,75	0,85	0,9
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	70,26	73,42	74,8	75,45	75,8	76
	Mendorong ketersediaan air bersih yang cukup dan berkelanjutan bagi masyarakat	Kapasitas air baku	m ³ /detik	0,11	0,17	0,20	0,24	0,28	0,30
		Akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum perpipaan	%	12,75	13,50	14,00	15,25	15,90	16,50

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Meningkatnya akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	92,45	94,71	95	95,5	96	96,5
Terwujudnya Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim		Indeks Resiko Bencana	Indeks	131	130	129	128	127	126
	Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi dan menanggulangi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,32	0,35	0,37	0,39	0,42	0,45
	Berkurangnya tekanan emisi gas rumah kaca	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	ton ekuivalen karbon dioksida (tCO2e)	28.000,00	30.122,55	35.000,00	40.000,00	44.104,09	50.000,00
Misi 6. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis, efisien, bersih dan profesional									
Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan yang berintegritas		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	74,2	75,4	76,3	77,2	78,3	78,5
	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	62	64	66	68	70	72
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	Nilai	100	100	100	100	100	100
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks	15	20	25	30	35	40
		Indeks daya saing daerah	Indeks	3,97	3,98	3,99	4,00	4,1	4,2
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,39	3,4	3,45	3,5	3,55	3,6
		Indeks Reformasi Hukum	Indeks	78	78,5	79	79,5	80	80,5

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Nilai Sistem Merit	Nilai	180	200	220	240	260	280
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,5	4,55	4,58	4,6	4,65	4.7
		Survey Penilaian Integritas	Nilai	76,79	79,06	81,39	83,79	86,26	88,81
		Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	%	100	100	100	100	100	100

3.4 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Kondisi yang ingin diwujudkan di Kota Prabumulih adalah: “Prabumulih Yang Makmur dan Sejahtera di Tahun 2029”. Prabumulih yang Makmur itu akan ditandai dengan tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, infrastruktur yang baik, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, tingkat kejahatan yang rendah serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, kemudian Prabumulih yang Sejahtera ditandai dengan tingginya tingkat pendapatan per kapita, ketersediaan lapangan kerja, akses pendidikan dan kesehatan yang baik, serta rasa aman dan nyaman.

3.4.1 Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

3.4.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan dirumuskan untuk mendukung strategi.

Tabel 3.6 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Prabumulih Tahun 2025-2029

Visi : Prabumulih Yang Makmur Dan Sejahtera					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju masyarakat makmur dan sejahtera	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan dan literasi masyarakat	Peningkatan kualitas guru	▪ Pelatihan yang menunjang kualitas guru ▪ Melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ▪ Berpartisipasi dalam seminar dan konferensi pendidikan ▪ Mengikuti kegiatan KKG/MGMP
				Peningkatan kualitas fasilitas pendidikan	▪ Penyediaan Ruang Kelas yang Memadai ▪ Tersedianya Perpustakaan yang Lengkap ▪ Tersedianya Laboratorium yang Lengkap ▪ Tersedianya Fasilitas Olahraga ▪ Tersedianya Fasilitas Seni dan Budaya ▪ Tersedianya Fasilitas Sanitasi yang Memadai
				Optimalisasi gerakan literasi	▪ Tersedianya sudut baca yang menarik dan nyaman di sekolah, rumah, atau tempat umum lainnya ▪ Tersedianya buku-buku berkualitas dengan berbagai genre ▪ Terciptanya suasana yang tenang dan mendukung minat baca ▪ Kunjungan ke perpustakaan secara rutin ▪ Pelibatan semua pihak
				Pemanfaatan teknologi	▪ Penggunaan platform pembelajaran daring ▪ Tersedianya akses ke sumber belajar digital

Visi : Prabumulih Yang Makmur Dan Sejahtera					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
					▪ Pemanfaatan perpustakaan digital ▪ Penerapan pembelajaran interaktif & menarik ▪ Pelatihan & Workshop literasi digital ▪ Pelibatan kolaborasi multi pihak
			Meningkatnya kesehatan untuk semua	Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan	▪ Penguatan Layanan Kesehatan Primer ▪ Penguatan Sistem Rujukan ▪ Pemanfaatan Teknologi Informasi (Digitalisasi Kesehatan) ▪ Peningkatan SDM Kesehatan dan Fasilitas
				Promosi Kesehatan dan Pencegahan	▪ Edukasi dan Penyuluhan ▪ Pelaksanaan program vaksinasi dan deteksi dini penyakit serta mendukung gerakan hidup sehat melalui olahraga dan pola makan bergizi.
				Penguatan Sistem Informasi dan Data Kesehatan	▪ Optimalisasi penggunaan data yang akurat ▪ Penguatan sistem surveilans
				Peningkatan Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	▪ Kerja sama dengan LSM, organisasi masyarakat ▪ Pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan di lingkungan ▪ Pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM)
			Meningkatnya kesetaraan Gender	Pendidikan dan Peningkatan Kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender	▪ Pengintegrasikan Kesetaraan Gender dalam Kurikulum ▪ Terciptanya Lingkungan Sekolah yang Inklusif ▪ Pemanfaatan media dan teknologi tentang pentingnya kesetaraan gender kepada semua siswa ▪ Edukasi Sejak Dini di Keluarga

Visi : Prabumulih Yang Makmur Dan Sejahtera					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung kesetaraan gender	▪ Penguatan Pengarusutamaan Gender untuk memastikan kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi ▪ Penegakan dan Pengawasan bagi pelanggaran kebijakan terkait kesetaraan gender
				Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	▪ Peningkatan Akses Keuangan dan Keterampilan ▪ Pengembangan UMKM dan Kewirausahaan
				Peningkatan Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan di posisi-posisi strategis	▪ Pendidikan politik sejak dini ▪ Dukungan dan advokasi bagi perempuan untuk berani terjun ke dunia politik ▪ Penerapan kebijakan afirmatif ▪ Perubahan Sosial dan Budaya
				Perlindungan dari Kekerasan dan Pelecehan	▪ Penguatan Kebijakan dan Implementasi UU TPKS ▪ Peningkatan peran lembaga seperti Komnas Perempuan ▪ Peningkatan Layanan dan Pemberdayaan ▪ Kolaborasi Lintas Sektor dan Kemitraan
			Terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya saing	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Inklusif	▪ Penguatan kebijakan ▪ Penyediaan fasilitas dan teknologi pendukung ▪ Pelatihan guru yang komprehensif ▪ Pengembangan kurikulum yang adaptif
				Pengembangan Infrastruktur dan Kesejahteraan Sosial	▪ Perancangan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan matang ▪ Pelibatan masyarakat dalam perencanaan

Visi : Prabumulih Yang Makmur Dan Sejahtera					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
					▪ Penggunaan teknologi ▪ Pengembangan infrastruktur fisik
				Pemberdayaan Ekonomi dan UMKM	▪ Pemberian akses permodalan ▪ Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan ▪ Penggunaan Teknologi dan Inovasi ▪ Pengembangan Pasar dan Pemasaran ▪ Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif
				Pembangunan Budaya Inklusif dan Toleransi	▪ Penerapan Pendidikan Multikultural ▪ Dukungan terhadap kebijakan anti-diskriminasi
				Pengurangan Ketimpangan dan Keadilan Ekonomi	▪ Bantuan sosial yang tepat sasaran ▪ Pembangunan infrastruktur yang merata ▪ Pemberdayaan UMKM ▪ Penguatan partisipasi masyarakat untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan setara
			Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Pembangunan Keolahragaan	Pengembangan keterampilan kewirausahaan	▪ Penguatan Ekosistem Kewirausahaan ▪ Peningkatan Kapasitas Wirausaha ▪ Peningkatan Inovasi dan Daya Saing ▪ Penyediaan akses pasar dan fasilitasi
				Peningkatan akses terhadap infrastruktur dan teknologi	▪ Pengembangan Infrastruktur yang Inklusif dan Terintegrasi ▪ Pengembangan Integrasi Teknologi dan Informasi ▪ Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Pemuda
				Pemberdayaan partisipasi pemuda dalam pembangunan	▪ Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan ▪ Penciptaan Ruang untuk Berkontribusi ▪ Pengembangan Pemuda sebagai Agen Perubahan

Visi : Prabumulih Yang Makmur Dan Sejahtera					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Penguatan kelembagaan	- Perbaikan internal organisasi dan kolaborasi eksternal - Pengembangan kompetensi aparatur - Peningkatan sarana dan prasarana - Pemanfaatan teknologi untuk tata kelola yang lebih efektif dan efisien - Pengembangan kemitraan dengan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha
				Peningkatan kualitas SDM	- Pendidikan dan Pelatihan Berkualitas - Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas - Penciptaan Kesempatan dan Lingkungan Mendukung - Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan
2	Mewujudkan perekonomian yang lebih baik melalui kemudahan investasi yang berkeadilan, dan peningkatan kesempatan kerja serta pengembangan kegiatan ekonomi berbasis kearifan lokal dan keunggulan wilayah	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya pengembangan potensi unggulan ekonomi daerah	Peningkatan pemberdayaan sektor pertanian melalui pengembangan budidaya potensial unggulan daerah	- Identifikasi dan Pengembangan Komoditas Unggulan - Pemanfaatan Teknologi Pertanian - Penguatan Kelembagaan dan Kesejahteraan Petani - Penguatan Akses Pasar dan Jaringan Pemasaran
				Pengembangan dan diversifikasi sektor ekonomi daerah melalui pengembangan sektor unggulan, dversifikasi industri dan produk lokal	- Pengembangan dan inovasi produk-produk lokal - Penguatan pembangunan infrastruktur dasar daerah
			Meningkatnya kontribusi UMKM, Koperasi, BUMD terhadap perekonomian daerah	Peningkatan akses pasar dan pembiayaan melalui digitalisasi	- Pemanfaatan pembayaran digital - Adanya platform e-commerce dan media sosial

Visi : Prabumulih Yang Makmur Dan Sejahtera					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Pengembangan kapasitas SDM UMKM	▪ Pelatihan dan sosialisasi keterampilan manajemen usaha, keuangan, dan pemasaran digital ▪ Pemanfaatan teknologi dan inovasi produk
				Penguatan kemitraan strategis antara UMKM dengan pengusaha	▪ Penguatan Kapasitas dan Kualitas UMKM ▪ Pemanfaatan Teknologi Digital ▪ Peningkatan Akses Pasar dan Rantai Pasok
				Penciptaan produk unggulan daerah	▪ Identifikasi Potensi dan Keunikan Daerah ▪ Pengembangan Kapasitas dan Inovasi ▪ Dukungan Kebijakan dan Regulasi
			Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui investasi	Memperbaiki Iklim Investasi	▪ Terciptakan lingkungan yang kondusif melalui stabilitas politik dan ekonomi ▪ Perbaikan regulasi dan birokrasi ▪ Peningkatan Infrastruktur ▪ Pengembangan Sumber Daya Manusia ▪ Peningkatan Transparansi dan Tata Kelola
			Meningkatkan daya saing produk ekspor	Peningkatan Kualitas Produk	▪ Peningkatkan kualitas produk melalui standar internasional dan inovasi ▪ Pemanfaatan platform digital
			Terwujudnya pemerataan pembangunan dan berkurangnya kesenjangan antara desa dan kota	Pembangunan infrastruktur yang merata	▪ Perencanaan secara jangka panjang dan berbasis data ▪ Pelibatan Pemangku Kepentingan ▪ Penguatan tata kelola dan regulasi yang transparan serta inklusif

Visi : Prabumulih Yang Makmur Dan Sejahtera					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Terwujudnya stabilitas ekonomi daerah	Peningkatan kapasitas fiskal daerah	▪ Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi ▪ Penguatan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel ▪ Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
		Peningkatan Kesejahteraan Sosial masyarakat	Meningkatnya perlindungan sosial ekonomi kepada pekerja	Peningkatan akses terhadap layanan kesejahteraan sosial	▪ Penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat ▪ Peningkatan akses layanan ▪ penggunaan teknologi untuk mempermudah akses layanan
				Perlindungan jaminan kesehatan dan pemberian bantuan untuk penyandang disabilitas	▪ Perluasan akses jaminan kesehatan dan rehabilitasi ▪ Pemberian bantuan tunai dan konsesi ▪ Peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan ▪ Penyelenggaraan pendidikan dan pekerjaan yang inklusif.
				Peningkatan pelayanan pendidikan dan keterampilan bagi ppks dan keluarga rentan untuk mendapatkan pelatihan kehidupan (<i>life skills</i>)	▪ Pelatihan yang terintegrasi melalui workshop, praktik langsung, dan pendampingan intensif ▪ Evaluasi dan tindak lanjut berkelanjutan ▪ Penciptaan lingkungan yang mendukung pengembangan diri
				Penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan	▪ Pemberian perlindungan terhadap anak dan lansia ▪ pemberian fasilitas untuk penyandang disabilitas ▪ Pengembangan bantuan khusus untuk kelompok rentan

Visi : Prabumulih Yang Makmur Dan Sejahtera					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Peningkatan kolaborasi dengan lembaga dan organisasi sosial melalui	Kemitraan dengan LSM dan organisasi masyarakat dan bekerja sama dengan sektor swasta
			Menurunnya angka pengangguran	Peningkatan kesempatan kerja	Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi keahlian tenaga kerja untuk menumbuhkan wirausaha baru
					Peningkatan perlindungan tenaga kerja
				Percepatan penciptaan lapangan kerja baru	Peningkatan investasi dengan meningkatkan daya tarik investor untuk membuka perusahaan di Prabumulih
				Perluasan jaringan informasi lapangan kerja	Pemanfaatan dan pengembangan platform digital
				Pengembangan kemitraan pemerintah kota dengan sektor swasta	▪ Penyediaan beasiswa dan bantuan untuk pelatihan ▪ Adanya magang untuk pemuda
			Menurunnya angka Kemiskinan	Peningkatan program bantuan sosial	▪ Penguatan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan ▪ Pemberian bantuan modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi ▪ Perbaikan data penerima manfaat ▪ Optimalisasi penggunaan teknologi dan data terpadu ▪ Peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah
				Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan untuk masyarakat miskin	▪ Identifikasi kebutuhan keterampilan ▪ Perencanaan pelatihan berbasis keterampilan yang diminati pasar atau potensi lokal ▪ Pelaksanaan pelatihan ▪ Pendampingan dan dukungan setelah pelatihan

Visi : Prabumulih Yang Makmur Dan Sejahtera					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3	Mendorong kemandirian masyarakat melalui penguatan ketahanan pangan daerah dan mendukung swasembada energi	Terwujudnya Kedaulatan Pangan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau	Peningkatan pemberdayaan sektor pertanian melalui diversifikasi pangan	▪ Peningkatan produksi pangan lokal ▪ Pengembangan UMKM ▪ Perbaikan akses petani terhadap modal dan informasi pasar ▪ Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani untuk mengolah hasil pertanian yang beragam
				Peningkatan jaringan distribusi melalui penguatan infrastruktur distribusi pangan untuk memastikan kelancaran aliran pangan dari produsen ke konsumen	▪ Penguatan Infrastruktur Fisik (jalan, gudang, cold storage) ▪ Penguatan Kelembagaan Distribusi ▪ Pemanfaatan Teknologi Informasi ▪ Stabilitas harga serta ketersediaan pangan.
				Pengembangan ketahanan pangan masyarakat	▪ Pemberdayaan masyarakat perkotaan dengan dukungan penyediaan bibit, pupuk, dan pelatihan teknis untuk memanfaatkan lahan pekarangan ▪ Peningkatan kualitas lingkungan perkotaan melalui penghijauan
			Meningkatnya kebutuhan energi masyarakat	Peningkatan Diversifikasi Sumber Energi	▪ Pemanfaatan beragam sumber energi, terutama energi baru terbarukan (EBT) seperti biofuel dan tenaga surya ▪ Dukungan regulasi dan insentif fiskal untuk EBT ▪ Optimalisasi sumber daya yang sudah ada dan memperluas rantai pasokan domestik
				Peningkatan Efisiensi Energi	▪ Penguatan kebijakan yang mewajibkan penggunaan peralatan yang lebih efisien dan hemat energi ▪ Peningkatan Kolaborasi dan Edukasi
				Peningkatan Aksesibilitas Energi	▪ Perluasan elektrifikasi di wilayah yang belum terjangkau ▪ Penyediaan dan Peningkatan Pasokan

Visi : Prabumulih Yang Makmur Dan Sejahtera					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
					Energi
4	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berprestasi, berbudaya, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	Terwujudnya kehidupan kota yang harmonis	Terciptanya ketentraman di masyarakat	Peningkatan ketentraman dan perlindungan masyarakat dengan memperkuat koordinasi antara aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif	▪ Penguatan Sinergi dan Koordinasi Aparat Keamanan, Pemerintah dan Masyarakat ▪ Peningkatan Pencegahan Dini & Mitigasi Bencana ▪ Penciptaan Lingkungan yang Kondusif
				Penguatan kehadiran aparat keamanan dan memperkuat sistem patroli dan pemantauan, terutama di daerah rawan pelanggaran perda/perkada	▪ Peningkatan fungsi Satpol PP dalam menegakkan perda dan perkada ▪ Penguatan Sistem Patroli dan Pemantauan
			Meningkatnya toleransi dalam masyarakat	Peningkatan silaturahmi antar kelembagaan dengan memperkuat dialog antar kelompok dengan forum-forum terbuka yang mengedepankan saling pengertian dan toleransi	▪ Adanya Forum Dialog yang Inklusif ▪ Terjalinnnya Komunikasi yang Kolaboratif
				Penyelenggaraan program pendidikan multikultural	▪ Pengintegras nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap keragaman dalam kurikulum sekolah ▪ Pengembangan lingkungan belajar yang inklusif ▪ Pelatihan dan Pengembangan Guru untuk mengelola keberagaman
5	Mewujudkan pembangunan daerah dengan dukungan infrastruktur yang berkualitas, dan ramah lingkungan	Terwujudnya kualitas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan lingkungan hidup yang berkesinambungan	Terciptanya lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pengelolaan sumber daya alam secara bijak	▪ Perlindungan sumber daya alam yang ada dan pemulihan area yang rusak untuk memastikan keberlanjutan ekosistem ▪ Penggunaan sumber daya secara efisiensi ▪ Penguatan hukum dan penegakan ▪ Penggunaan Teknologi ramah lingkungan

Visi : Prabumulih Yang Makmur Dan Sejahtera					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Terwujudnya ketersediaan air bersih yang cukup dan berkelanjutan bagi masyarakat	Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan	▪ Peningkatan Konservasi Sumber Daya Air ▪ Peningkatan Kinerja Pendayagunaan Sumber Daya Air ▪ Peningkatan Kinerja Pengendalian Daya Rusak Air dan Pengelolaan Risiko ▪ Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air
				Peningkatan Akses Air Bersih	▪ Peningkatan infrastruktur penyediaan air minum perpipaan ▪ Pengintegrasian sistem pengolahan air limbah
			Meningkatnya akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Penyediaan Rumah Umum dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	▪ Peningkatan akses pembiayaan perumahan ▪ Pengembangan sistem penyediaan rumah ▪ Peningkatan peran fasilitasi pemerintah dalam penyediaan dan peningkatan kualitas hunian
		Terwujudnya Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi dan menanggulangi bencana	Pencegahan dan pengurangan risiko (mitigasi)	▪ Pemetaan dan Identifikasi Risiko ▪ Pembangunan Infrastruktur Tahan Bencana ▪ Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang risiko bencana
				Kesiapsiagaan	▪ Pengembangan sistem peringatan dini ▪ Penyusunan rencana tanggap darurat ▪ Pelatihan kesiapsiagaan
				Peningkatan Kapasitas dan Kolaborasi	Pelibatan semua elemen daerah dan sektor swasta
			Berkurangnya tekanan emisi gas rumah kaca	Pengurangan sumber emisi dan peningkatan penyerapan karbon	▪ Peralihan dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan ▪ Efisiensi penggunaan energi di rumah, kantor, dan industri

Visi : Prabumulih Yang Makmur Dan Sejahtera					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
					▪ Penerapan prinsip ekonomi sirkular
6	Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis, efisien, bersih dan profesional	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan yang berintegritas	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah Kota	▪ Peningkatan kualitas penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja ▪ Peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP
			Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Penguatan Budaya Kerja BerAKHLAK	▪ Pengenalan nilai-nilai BerAKHLAK secara rutin ▪ Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ▪ Komitmen dan Peran Pimpinan ▪ Pengawasan dan Evaluasi
				Peningkatan Kapasitas ASN	▪ Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan ASN ▪ Penerapan sistem merit secara transparan ▪ Profesionalisme dan Adaptabilitas (ASN sebagai profesional harus mampu beradaptasi dengan perubahan)

Berangkat dari strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, dapat dirumuskan beberapa tema atau fokus pembangunan tahunan yang akan menjadi acuan umum penentuan prioritas di setiap tahunnya. Tema dan prioritas Daerah pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi pemerintah Kota Prabumulih dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPJMD setiap tahun. Penetapan tema tahunan pada RPJMD Tahun 2025-2029 juga mengacu pada tema pembangunan tahap pertama RPJPD Kota Prabumulih 2025-2045. Dengan demikian, tema pembangunan Tahun 2026 2030 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7 Tema dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan 2026-2030

2026	2027	2028	2029	2030
Penguatan Perekonomian Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan	Akselerasi Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Penguatan Sektor Unggulan Daerah Melalui Penerapan Riset & Inovasi	Pemantapan Pembangunan Komprehensif Melalui Penyelarasan Pembangunan Sosial Ekonomi	Perwujudan Pembangunan Yang Berkelanjutan Sebagai Landasan Menuju Kota Prabumulih Yang Makmur dan Sejahtera
Peningkatan Diversifikasi Ekonomi : •Pengurangan ketergantungan pada satu sektor ekonomi •Pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata, dan ekonomi digital •Dukungan UMKM untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat	Penerapan Prinsip-Prinsip Infrastruktur Hijau : •Pengintegrasian solusi energi terbarukan dalam proyek infrastruktur •Pengurangan timbulan limbah dan penerapan prinsip ekonomi sirkular melalui penggunaan kembali dan daur ulang material •Perlindungan Lingkungan	Pengidentifikasian Sektor Unggulan yang Tepat: •Pengidentifikasian potensi sektor unggulan daerah untuk menentukan produk dan industri potensial •Fokus pada sektor-sektor yang memiliki daya saing, mampu menciptakan nilai, serta memberi kesempatan kerja dan pendapatan	Pembangunan Ekonomi Inklusif : •Peningkatan industrialisasi ekonomi hijau •Peningkatan produktivitas sektor-sektor	Pengembangan Infrastruktur hijau : •Pengembangan Ruang Terbuka Hijau •Pembangunan kawasan hutan di tengah kota •Pengintegrasian area pertanian di dalam kota •Penanaman pohon di sepanjang trotoar
Pemanfaatan Teknologi Hijau : •Pengembangan energi terbarukan •Penerapan teknologi yang ramah lingkungan dalam berbagai sektor industry •Pengurangan emisi karbon dan dampak negatif terhadap lingkungan	Pengadopsian Kerangka Kerja dan Standar Pembangunan Berkelanjutan : •Pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana alam dan dampak perubahan iklim •Pengintegrasian standar dan pedoman perencanaan infrastruktur hijau ke dalam setiap tahap pembangunan	Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi : •Penguatan kerja sama antara pemerintah, sektor bisnis/swasta, dan lembaga pendidikan (perguruan tinggi) untuk menciptakan sinergi dalam mengembangkan dan menerapkan inovasi •Pengembangan infrastruktur inovasi	Pembangunan Sosial Berkeadilan: •Peningkatan kualitas SDM •Pemerataan Pembangunan •Peningkatan ketahanan daerah	Pemberdayaan Masyarakat Lokal: •Pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan •Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja •Penyaluran bantuan sosial

2026	2027	2028	2029	2030
Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan : •Pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas, mobilitas, dan aksesibilitas •Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan •Pengembangan sistem pengelolaan air bersih dan sanitasi yang baik	Kebijakan dan Pembiayaan yang Mendukung : •Tersedianya kerangka regulasi yang efektif untuk mendorong investasi sektor publik dan swasta dalam infrastruktur berkelanjutan •Penggunaan berbagai instrumen keuangan dan pembiayaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Peningkatan Kapasitas SDM: •Pelatihan SDM dan pengembangan kompetensi pengelolaan inovasi	Perlindungan Lingkungan Berkelanjutan : •Penataan Ruang Terpadu •Pemanfaatan pola ruang berkelanjutan	Peningkatan Inovasi dan Teknologi: •Pemanfaatan teknologi baru dan inovatif untuk mendukung adaptasi dan transfer pengetahuan ilmiah
Pemberdayaan Masyarakat : •Pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat agar memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja •Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan •Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan	Peningkatan Kapasitas dan Inovasi Teknologi : •Pengembangan teknologi terbaru seperti kendaraan listrik dan transportasi berbasis bahan bakar terbarukan •Pelatihan masyarakat agar memiliki kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam industri berkelanjutan	PengIntegrasian Hasil Riset dalam Kebijakan dan Regulasi : •Pemanfaatan hasil-hasil riset dan inovasi dalam penyusunan regulasi dan kebijakan pembangunan daerah yang bersifat evidence-based •Penguatan koordinasi yang kuat antara lembaga riset dan dinas teknis di daerah		Peningkatan Tata Kelola yang Inklusif: •Peningkatan kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan filantropi
		Penyediaan Akses Pembiayaan : •Tersedianya akses pembiayaan yang, khususnya bagi UMKM dan koperasi, untuk mendukung pengembangan inovasi dan produk unggulan daerah		Perencanaan Terintegrasi : •Pengintegrasian aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam perencanaan tata ruang kota

3.4.3 Program Prioritas

Perencanaan strategis yang dituangkan dalam RPJMD harus dapat diterjemahkan ke dalam perencanaan operasional. Dalam RPJMD yang disusun saat ini keselarasan antara tujuan, dan sasaran daerah, serta strategi dan arah kebijakannya. Program pembangunan daerah merupakan program pada periode RPJMD yang akan menjadi prioritas atau target selama lima tahun yang secara langsung didedikasikan untuk mencapai sasaran daerah. Adapun program unggulan Kota Prabumulih Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Gerakan Makan Bersama Anak Sekolah
2. Bantuan Kematian bagi Masyarakat Kota Prabumulih
3. Bantuan seragam bagi siswa pada Tahun Ajaran Baru
4. Pengadaan ambulance pada setiap desa dan kelurahan
5. Peningkatan insentif RT dan RW
6. Bantuan Pembukaan Lahan, dan Bantuan Bibit bagi Petani
7. Bantuan Permodalan bagi Usaha Mikro
8. Promosi Kemudahan Berinvestasi di Kota Prabumulih
9. Bantuan Gas Rumah Tangga Gratis
10. Pengembangan Perkebunan Sawit, Karet dan Jagung Masyarakat
11. Peningkatan insentif Guru TPA, Penjaga Makam, Pemandi Jenazah, dan Penjaga Tempat Ibadah. Insentif kepada Anggota LVRI, Warakauri, Pepabri, Petugas Kebersihan TMP, PSM, TKSK, TAGANA, Ketua LPM Kelurahan/Desa, dan Anggota LINMAS.
12. Peningkatan Prestasi Olahraga Prabumulih, Pembinaan Atlet Berbakat, Pemberian Reward kepada Atlet Berprestasi
13. Peningkatan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
14. Peningkatan Pelayanan Penyediaan Air Bersih
15. Rehabilitasi Fasilitas sekolah
16. Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih
17. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Pemerintah Kota Prabumulih

Dalam implementasinya program pembangunan daerah dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun program prioritas yang akan dilaksanakan selama lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Program Prioritas RPJMD

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
PRABUMULIH MAS 2029					
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju masyarakat makmur dan sejahtera	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	
				Numerasi SMP (%)	
				Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)	
				Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	
				Literasi Membaca SMP (%)	
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)	
				Numerasi SD (%)	
				Literasi Membaca SD (%)	
			Meningkatnya Daya saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda ()	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
				Jumlah Pemuda yang ditingkatkan daya saingnya (Orang)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
			Meningkatnya keaktifan Gugus pramuka	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
				Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (Persentase)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Iklim Kebinekaan SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Iklim Keamanan SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Iklim Keamanan SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	
				Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (Persentase)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Iklim Kebhinekaan SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
			Meningkatnya Pembudayaan dan Persentasi olahraga	Indeks Partisipasi Olahraga ()	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
		Meningkatnya kesehatan untuk semua		Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) (Jiwa)	
				Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	
				Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	
				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	
				Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)(%)	
			Meningkatnya Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			Meningkatnya Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			Meningkatnya Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) berizin yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
			Meningkatnya Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			Meningkatnya Persentase indikator standar pelayanan minimal SPM) bidang kesehatan yang mencapai 100%	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			Meningkatnya Persentase Kelurahan / Desa yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			Meningkatnya Persentase Pemenuhan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			Meningkatnya Persentase sumber daya manusia yang berkompeten	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
			Menurunnya Angka kematian Ibu	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
		Meningkatnya Kesetaraan Gender			PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			Menurunya Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek pada Balita)	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan (%)	
				Indeks Ketimpangan Gender(Indeks)	
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase ARG Daerah (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan (Persentase)	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
		Terciptanya Masyarakat yang Inklusif dan Berdaya Saing	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
				Indeks Masyarakat Digital Indonesia (Indeks)	
				Indeks Pembangunan Keluarga (Indeks)	
			Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi publik pemerintah Daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
Mewujudkan perekonomian yang lebih baik melalui kemudahan investasi yang berkeadilan, dan peningkatan kesempatan kerja serta pengembangan kegiatan ekonomi berbasis	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah			Produk Domestik Regional Bruto per Kapita ((Rp Juta))	
				Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	
		Meningkatnya pengembangan potensi unggulan ekonomi daerah		Indeks Kemandiran Fiskal(Indeks)	
				Jumlah tamu wisatawan Nusantara (Orang)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
kearifan lokal dan keunggulan wilayah				Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	
				Proporsi PDRB Sektor Jasa (%)	
				Proporsi Kontribusi PDRB Kota Terhadap Nasional (%)	
				Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	
				Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ((%))	
				Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	
			Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (Orang)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
			Meningkatnya jangkauan pemasarann Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata ()	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
			Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata (Orang)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
			Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi ()	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
			Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, Merata dan Terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya ()	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan ()	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
			Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
		Meningkatnya kontribusi UMKM, Koperasi, BUMD terhadap perekonomian daerah		Jumlah Industri Kecil dan Menengah (Unit)	
				Rasio kewirausahaan daerah (%)	
				Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	
				Return on asset (ROA) BUMD (%)	
				Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kota (%)	
			Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
				Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
			Meningkatnya kinerja pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
			Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
		Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan daya saing produk ekspor		Net ekspor Barang dan Jasa (Milyar Rupiah)	
				Pembentukan modal tetap bruto (%)	
			Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi ()	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
			Meningkatnya Kemudahan Investasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi ()	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
			Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan ()	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
			Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
			Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal ()	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan ()	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
			Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha ()	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
		Terciptanya pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antara desa dan kota		Indeks Entropy Theil (Indeks)	
				Indeks Desa Membangun(Indeks)	
			Meningkatnya capaian kinerja Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal(Persentase)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
				Konektivitas Darat(Km)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
			Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
			Meningkatnya Jalan dalam Kondisi Baik	Persentase Jalan Kondisi Baik (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA
		Terwujudnya stabilitas ekonomi daerah		Indeks Harga Konsumen (Indeks)	
				Rasio PDRB sektor jasa keuangan (%)	
			Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting ()	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
			Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	Peningkatan Kesejahteraan Sosial masyarakat			Rasio Gini (Indeks)	
		Meningkatnya perlindungan sosial ekonomi kepada pekerja		Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	
			Meningkatnya Pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
		Menurunnya angka pengangguran		Tingkat pengangguran terbuka (%)	
			Meningkatnya Pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
			Meningkatnya Pencari kerja yang ditempatkan	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar lintas kerja daerah	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. (%)	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
		Menurunnya angka Kemiskinan		Tingkat Kemiskinan (%)	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Ha)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			Meningkatnya Korban bencana alam dan bencana sosial tingkat Kota/ Kab yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase ARG Daerah (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
			Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
				Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (Persentase)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Iklim Kebinekaan SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Iklim Keamanan SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Iklim Keamanan SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (Persentase)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Iklim Kebhinekaan SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang telah mendapatkan Pelayanan dan rehabilitasi Sosial diluar Pant	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian()	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
			Meningkatnya Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
			Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
			Meningkatnya Persentase Pemenuhan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			Meningkatnya PSM/ TKSK yang diberdayakan dalam penanganan masalah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya Tingkat Realisasi Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
			Menurunnya Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek pada Balita)	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Mendorong kemandirian masyarakat melalui penguatan ketahanan pangan daerah dan mendukung swasembada energi	Terwujudnya Kedaulatan Pangan			Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau		Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	
			Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Ha)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah Produksi Telur (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
				Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan (Nilai)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
			Meningkatnya Kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Kelembagaan Petani yang ditingkatkan Kapasitasnya (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian()	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
			Meningkatnya Tingkat Realisasi Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
			Meningkatnya Tingkat Realisasi Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP) (Ton)	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Meningkatnya Tingkat Realisasi Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
		Meningkatnya kebutuhan energi masyarakat		Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh/Kapita)	
			Meningkatnya literasi keuangan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata	Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh/Kapita)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
				Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berprestasi, berbudaya, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	Terwujudnya kehidupan kota yang harmonis	Terciptanya ketentraman di masyarakat		Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)	
				Angka Kriminalitas (Angka)	
				Persentase Partisipasi Pemilih dalam PEMILU terakhir (5 Tahunan) (%)	
				Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) (Indeks)	
			Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
			Meningkatnya penanganan konflik berbasis ekonomi, sosial dan budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi ()	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
			Meningkatnya pengelolaan bina mental spiritual	Persentase Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Meningkatnya penyelesaian konflik sosial yang terjadi	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan ()	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
Mewujudkan pembangunan daerah dengan dukungan infrastruktur yang berkualitas, dan ramah lingkungan	Terwujudnya kualitas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan lingkungan hidup yang berkesinambungan	Terciptanya lingkungan hidup yang berkelanjutan		Indeks Infrastruktur (Angka)	
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	
				Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (Indeks)	
				Timbulan sampah terolah difasilitas pengolahan sampah (%)	
			Meningkatnya Dokumen Lingkungan yang mendapatkan persetujuan Lingkungan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
			Meningkatnya dokumen pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah ((%))	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
			Meningkatnya dokumen Pengelolaan Limbah B3	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
			Meningkatnya Dokumen rencana perlindungan dan	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			pengelolaan lingkungan hidup	yang Ditindaklanjuti (Persentase)	
			Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO2 Ekuivalen)	Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
				Indeks Kualitas Udara (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
				Indeks Kualitas Air (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
			Meningkatnya Jumlah RT yang menempati hunian dengan akses sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
			Meningkatnya Masyarakat yang Mendapat Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
			MeningkatnyaPengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
			Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Kota Prabumulih	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup (unit)	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
				Kapasitas air baku (m3/detik)	
		Mendorong ketersediaan air bersih yang cukup dan berkelanjutan bagi masyarakat		Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	
			Meningkatnya Rumah Tangga yang memiliki akses air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
		Meningkatnya akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau		Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	
			Meningkatnya bangunan ber-PBG per satuan bangunan	Persentase kab/kota yang menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (%)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
			Meningkatnya Jalan dalam Kondisi Baik	Persentase Jalan Kondisi Baik (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
			Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
			Meningkatnya Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
			Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan (Persentase)	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
			Meningkatnya Rumah Korban Bencana yang ditindak lanjuti	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
			Meningkatnya Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	Terwujudnya Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi dan menanggulangi bencana		Indeks Risiko Bencana (Indeks)	
				Indeks Ketahanan Daerah (Angka)	
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
			Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya Penanganan Bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
		Berkurangnya tekanan emisi gas rumah kaca		Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) (Ton CO2 eq)	
			Meningkatnya dokumen Pengelolaan Limbah B3	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
			Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO2 Ekuivalen)	Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
				Indeks Kualitas Udara (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
				Indeks Kualitas Air (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan				Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
secara dinamis, efisien, bersih dan profesional	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan yang berintegritas	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	
				Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	
				Indeks daya saing daerah (Indeks)	
				Opini BPK (Nilai)	
				Nilai SAKIP (Angka)	
				Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	
			Jumlah Kegiatan Masyarakat kelurahan dan Desa yang Diberdayakan	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
			Jumlah Kegiatan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup ()	2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran (%)	2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Meningkatnya Capaian Kinerja bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Persentase capaian kinerja bidang Infrastruktur dan kewilayahan (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Meningkatnya Capaian Kinerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase capaian kinerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya Capaian Kinerja bidang perekonomian dan SDA	Persentase capaian kinerja bidang perekonomian dan SDA (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Meningkatnya Capaian Sasaran Daerah	Persentase Indikator sasaran daerah yang tercapai (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
			Meningkatnya Inovasi Daerah yang dilegalkan	Indeks Inovasi Daerah (Angka)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
				Indeks Daya Saing Daerah (Angka)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
			Meningkatnya keamanan informasi pemerintah	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Persentase MOU/Perjanjian kerjasama yang difasilitasi (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
					MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
			Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Meningkatnya literasi keuangan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata	Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh/Kapita)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
				Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
			Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan ()	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Meningkatnya pembangunan fasilitas dan infrastruktur daerah	Persentase Realisasi Fisik OPD Kota Prabumulih (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
			Meningkatnya pemenuhan administrasi perkantoran	Nilai SAKIP OPD (Angka)	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran (%)	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Nilai SAKIP OPD (Angka)	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persentase Rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persentase Rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Tingkat Kematangan Organisasi (Angka)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Nilai SAKIP OPD (Angka)	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persentase Rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persentase Rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Nilai SAKIP OPD (Angka)	5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Nilai SAKIP OPD (Angka)	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran (%)	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Nilai SAKIP OPD (Angka)	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persentase Rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Meningkatnya perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
			Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip ()	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
			Meningkatnya Predikat Nilai Sakip	Nilai SAKIP OPD (Angka)	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Meningkatnya Predikat Nilai Sakip OPD	Nilai SAKIP OPD (Angka)	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya Predikat Nilai SAKIP OPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran (%)	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Meningkatnya Predikat Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD (Angka)	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran (%)	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Meningkatnya Predikat Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD (Angka)	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Meningkatnya Predikat Nilai SAKIP OPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran (%)	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Meningkatnya Predikat Nilai SAKIP OPD	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Meningkatnya Predikat Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD (Angka)	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Meningkatnya Tata Kelola Anggaran, Tata Kelola Perbendaharaan dan Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Penurunan SILPA ()	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
				Persentase laporan keuangan tepat waktu ()	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD ()	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik ()	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
				Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar ()	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip ()	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
				Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (%)	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
			Meningkatnya tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap ()	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
			Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis, efisien, bersih dan profesional	Nilai SAKIP OPD (Angka)	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD (Angka)	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran (%)	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Nilai SAKIP OPD (Angka)	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
					PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran (%)	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran (%)	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Nilai SAKIP OPD (Angka)	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Nilai SAKIP OPD (Angka)	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran (%)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Nilai SAKIP OPD (Angka)	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Nilai SAKIP OPD (Angka)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran (%)	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran (%)	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Nilai SAKIP OPD (Angka)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran (%)	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Persentase Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
			Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Nilai SAKIP OPD (Angka)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
		Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional		Survey Penilaian Integritas (Nilai)	
				Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	
				Nilai Sistem Merit (Angka)	
				Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	
			Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya ()	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
			Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
			Meningkatnya Kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Kegiatan)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
				Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
				Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ()	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
			Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
			Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
			Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
				Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
					PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan()	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			MeningkatnyaORMAS yang diawasi dan diberdayakan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif ()	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
			Meningkatnya PARPOL yang mendapatkan pengembangan etika dan pendidikan politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik ()	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
			Meningkatnya pelaksanaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan ()	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya ()	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
			Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat ()	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
					KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 ()	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
			Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
			Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Nilai SAKIP OPD (Angka)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Dalam bab ini diuraikan program per urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah. Selain itu, disajikan pula target indikator kinerja pada awal dan akhir periode perencanaan, serta alokasi pagu indikatif program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang dialokasikan untuk mendanai program prioritas tahunan. Jumlah dana yang dialokasikan tersebut merupakan belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Rencana program perangkat daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Kinerja dan pendanaan pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.

Penyusunan rencana program perangkat daerah perlu memperhatikan: a) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, b) Penggunaan sumberdayanya lebih efisien dan/atau c) Urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. Urusan pemerintahan daerah meliputi, Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Wajib non Pelayanan Dasar, Urusan pilihan dan sejumlah Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah.

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
5. Ketentraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat;
6. Sosial.

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1. Tenaga Kerja;
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan Hidup;

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan Informatika;
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
12. Penanaman Modal;
13. Kepemudaan dan Olahraga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan; dan
18. Kearsipan.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi :

1. Kelautan Dan Perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Perdagangan;
5. Perindustrian;

D. Urusan Penunjang Pemerintahan daerah yaitu :

1. Perencanaan;
2. Keuangan;
3. Sekretariat DPRD;
4. Sekretariat Daerah;
5. Inspektorat;
6. Kepegawaian Pendidikan Pelatihan SDM;
7. Penelitian dan Pengembangan;
8. BPBD;
9. Pelayanan Perijinan Terpadu dan lain sebagainya.

Seluruh program perangkat daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif dan perangkat daerah penanggung jawab dalam pencapaian visi dan misi berdasarkan bidang urusan ditunjukkan pada tabel 4.1 terlampir :

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					282.371.077.028		310.608.184.730		341.669.003.203		375.835.903.524		413.419.493.876	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					210.808.964.596		231.889.861.055		255.078.847.161		280.586.731.877		308.645.405.065	
Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	210.808.964.596	100	231.889.861.055	100	255.078.847.161	100	280.586.731.877	100	308.645.405.065	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					67.294.112.432		74.023.523.675		81.425.876.042		89.568.463.647		98.525.310.011	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (Persentase)	82.24	83.93	85.62	67.294.112.432	8.731	74.023.523.675	8.900	81.425.876.042	9.069	89.568.463.647	9.238	98.525.310.011	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN
	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	98.55	98.94	99.32		9.970		100		100		100		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (Persentase)	30.02	35.00	39.97		4.495		4.993		5.491		5.988		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN
	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	54.76	69.28	81.61		9.805		100		100		100		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN
	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%)	62.42	63.15	63.90		6.465		6.540		6.615		6.690		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Iklm Inklusivitas SD (Nilai)	60.37	62.87	65.37		6.787		7.037		7.287		7.537		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN
	Iklm Inklusivitas SMP (Nilai)	58.80	61.20	63.60		6.600		6.840		7.080		7.320		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN
	Iklm Keamanan SD (Nilai)	77.13	78.03	78.93		7.983		8.073		8.163		8.253		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN
	Iklm Keamanan SMP (Nilai)	72.36	73.86	75.36		7.686		7.836		7.986		8.136		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN
	Iklm Kebhinekaan SD (Nilai)	72.57	73.57	74.57		7.557		7.657		7.757		7.857		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN
	Iklm Kebinekaan SMP (Nilai)	70.40	71.40	72.40		7.340		7.440		7.540		7.640		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		161.051.000	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	74.98	80	80	110.000.000	80	121.000.000	80	133.100.000	80	146.410.000	80	161.051.000	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					4.158.000.000		4.573.800.000		5.031.180.000		5.534.298.000		6.087.727.800	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	0.73	0.73	0.70	4.158.000.000	66	4.573.800.000	63	5.031.180.000	60	5.534.298.000	55	6.087.727.800	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	84.98	90	90		90		90		90		90		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					305.807.692.709		327.485.145.526		339.783.055.919		391.672.316.938		367.672.986.932	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					235.034.975.491		251.818.377.712		269.922.016.313		289.507.505.642		298.682.114.714	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	72.18	75	78	100.426.458.915	81	110.479.105.307	83	121.515.780.288	85	133.680.957.816	85	135.064.239.496	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Nilai SAKIP OPD (Angka)	76.18	77	77.5	134.608.516.576	78	141.339.272.405	785	148.406.236.025	80	155.826.547.826	805	163.617.875.218	1.02.0.00.0.00.31.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					69.160.289.584		74.058.564.095		67.691.352.918		100.084.937.183		66.865.446.295	
Meningkatnya Persentase Pemenuhan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	74.87	74.9	75	17.880.477.356	7.515	19.366.025.091	7.535	20.970.377.600	755	22.734.665.440	756	22.734.665.440	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
Meningkatnya Persentase indikator standar pelayanan minimal SPM) bidang kesehatan yang mencapai 100%	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	74.87	74.9	75	396.500.000	7.515	436.000.000	7.535	483.100.000	755	531.410.000	756	531.410.000	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
Meningkatnya Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi (Persentase)	89.2	79.41	85.29	4.840.302.500	8.824	5.337.296.050	9.118	5.852.288.955	9.412	6.364.144.851	9.412	6.364.144.851	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
Menurunnya Angka kematian Ibu	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	85.4	85.4	56.9	81.000.000	569	90.000.000	569	95.000.000	2.848	100.000.000	2.848	100.000.000	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
Menurunnya Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek pada Balita)	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	0.38	0.35	0.33	649.354.768	30	712.140.246	27	782.354.270	25	859.089.696	23	859.089.696	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
Meningkatnya Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	86.5	95	95	40.000.000	95	50.000.000	95	50.000.000	95	50.000.000	95	50.000.000	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	92.3	90	90	245.000.000	90	275.000.000	90	305.000.000	90	335.000.000	90	335.000.000	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
Meningkatnya Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	99	98	99	15.465.000.000	100	15.465.815.000	100	15.466.630.000	100	15.467.445.000	100	15.467.445.000	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	74.87	74.9	75	29.562.654.960	7.515	32.326.287.708	7.535	23.686.602.093	755	53.643.182.196	756	20.423.691.308	1.02.0.00.0.00.31.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.103.823.654		1.212.190.969		1.711.378.663		1.578.898.185		1.624.449.995	
Meningkatnya Persentesumber daya manusia yang berkompeten	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	100	100	100	616.522.654	100	687.274.919	100	749.601.810	100	805.861.990	100	805.861.990	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	74.87	74.9	75	487.301.000	7.515	524.916.050	7.535	961.776.853	755	773.036.195	756	818.588.005	1.02.0.00.0.00.31.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					223.602.500		254.962.750		287.459.025		321.204.928		321.204.928	
Meningkatnya Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) berizin yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	100	100	100	223.602.500	100	254.962.750	100	287.459.025	100	321.204.928	100	321.204.928	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					285.001.480		141.050.000		170.849.000		179.771.000		179.771.000	
Meningkatnya Persentase Kelurahan / Desa yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100	285.001.480	100	141.050.000	100	170.849.000	100	179.771.000	100	179.771.000	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					133.596.400.000		144.568.840.000		157.806.724.000		171.423.586.400		186.210.689.040	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.109.400.000		17.472.840.000		19.204.124.000		21.118.536.400		23.203.389.040	
Meningkatnya Predikat Nilai Sakip	Nilai SAKIP OPD (Angka)	70	72	74	16.109.400.000	76	17.472.840.000	78	19.204.124.000	80	21.118.536.400	85	23.203.389.040	1.03.2.10.0.00.03.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					5.150.000.000		5.665.000.000		6.231.500.000		6.854.700.000		7.540.200.000	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (%)	1	1	1	5.150.000.000	1	5.665.000.000	1	6.231.500.000	1	6.854.700.000	1	7.540.200.000	1.03.2.10.0.00.03.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					1.650.000.000		1.815.000.000		1.996.500.000		2.196.150.000		2.200.000.000	
Meningkatnya Rumah Tangga yang memiliki akses air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	73.48	75	77	1.650.000.000	79	1.815.000.000	81	1.996.500.000	83	2.196.150.000	85	2.200.000.000	1.03.2.10.0.00.03.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
MeningkatnyaRumah tangga dengan akses sanitasi aman	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	100	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	1.04.1.03.2.11.04.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Meningkatnya Jumlah RT yang menempati hunian dengan akses sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	8.13	10	12	600.000.000	14	600.000.000	16	600.000.000	18	600.000.000	20	600.000.000	1.03.2.10.0.00.03.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					5.250.000.000		5.765.000.000		6.331.500.000		6.954.700.000		7.640.200.000	
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	50	55	65	5.250.000.000	70	5.765.000.000	75	6.331.500.000	77	6.954.700.000	80	7.640.200.000	1.03.2.10.0.00.03.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					16.520.000.000		18.152.000.000		19.947.200.000		21.921.800.000		24.094.000.000	
Meningkatnya bangunan ber-PBG per satuan bangunan	Persentase kab/kota yangmenerbitkan PersetujuanBangunan Gedung (%) (%)	63	65	67	16.520.000.000	69	18.152.000.000	71	19.947.200.000	73	21.921.800.000	75	24.094.000.000	1.03.2.10.0.00.03.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					84.817.000.000		91.949.000.000		100.045.900.000		108.527.700.000		117.432.900.000	
Meningkatnya Jalan dalam Kondisi Baik	Persentase Jalan Kondisi Baik (%)	48.94	54	58	84.817.000.000	63	91.949.000.000	67	100.045.900.000	72	108.527.700.000	77	117.432.900.000	1.03.2.10.0.00.03.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Meningkatnya Data dan Informasi PaketPekerjaan Jasa Konstruksi yang diterbitkan	Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi (%)	50	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	1.03.2.10.0.00.03.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					2.300.000.000		1.950.000.000		2.250.000.000		2.050.000.000		2.300.000.000	
Meningkatnya Realisasi Rencana Struktur Ruang sesuai dengan Peraturan Rencana RTRW	Persentase Kesesuaian Peruntukan Lahan dengan Tata Ruang (%)	48	50	52	2.300.000.000	54	1.950.000.000	56	2.250.000.000	68	2.050.000.000	60	2.300.000.000	1.03.2.10.0.00.03.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					34.826.634.960		37.230.113.500		38.284.370.500		39.370.172.200		40.533.239.500	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.518.585.960		9.804.122.500		10.098.253.500		10.401.202.500		10.713.239.500	
Meningkatnya Predikat Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD (Angka)	67.19	70	75	9.518.585.960	75	9.804.122.500	80	10.098.253.500	80	10.401.202.500	85	10.713.239.500	1.04.1.03.2.11.04.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					207.000.000		213.210.000		219.652.000		226.209.700		230.000.000	
MeningkatnyaRumah Korban Bencana yang ditindak lanjuti	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	100	100	100	207.000.000	100	213.210.000	100	219.652.000	100	226.209.700	100	230.000.000	1.04.1.03.2.11.04.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					710.000.000		990.000.000		990.000.000		990.000.000		990.000.000	
Meningkatnya Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	0	13	25	710.000.000	44	990.000.000	63	990.000.000	81	990.000.000	100	990.000.000	1.04.1.03.2.11.04.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					-		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000	
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	0	0	0	-	25	1.100.000.000	50	1.100.000.000	75	1.100.000.000	100	1.100.000.000	1.04.1.03.2.11.04.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,					24.391.049.000		25.122.781.000		25.876.465.000		26.652.760.000		27.500.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)														
Meningkatnya Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	94	94	94	24.391.049.000	94	25.122.781.000	94	25.876.465.000	94	26.652.760.000	94	27.500.000.000	1.04.1.03.2.11.04.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					37.904.892.571		48.692.753.965		53.013.499.362		56.635.029.298		61.224.624.488	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					28.266.315.571		36.078.319.265		38.072.121.192		41.507.513.311		45.444.884.642	
Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Nilai SAKIP OPD (Angka)	75	80	90	21.626.381.150	92	23.789.019.265	95	26.167.921.192	98	28.784.713.311	100	31.663.184.642	1.05.0.00.0.00.06.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran (%)	91.41	92.38	93.39		9.428		9.478		9.515		9.635		1.05.0.00.0.00.06.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Nilai SAKIP OPD (Angka)	61.98	65	66	6.639.934.421	67	12.289.300.000	68	11.904.200.000	69	12.722.800.000	70	13.781.700.000	1.05.0.00.0.00.07.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					8.108.577.000		8.919.434.700		9.811.378.170		10.792.515.987		11.864.739.846	
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	100	100	100	4.712.477.000	100	5.183.724.700	100	5.702.097.170	100	6.272.306.887	100	6.899.537.516	1.05.0.00.0.00.06.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.06.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100	580.800.000	100	638.880.000	100	702.768.000	100	773.044.800	100	843.321.600	1.05.0.00.0.00.06.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	100	100	100	2.331.300.000	100	2.564.430.000	100	2.820.873.000	100	3.102.960.300	100	3.413.256.330	1.05.0.00.0.00.06.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100	484.000.000	100	532.400.000	100	585.640.000	100	644.204.000	100	708.624.400	1.05.0.00.0.00.06.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					650.000.000		2.515.000.000		2.420.000.000		2.935.000.000		2.515.000.000	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	0	100	100	450.000.000	100	1.575.000.000	100	1.640.000.000	100	1.915.000.000	100	1.465.000.000	1.05.0.00.0.00.07.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya Penanganan Bencana pada saat Pascabencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	0	100	100	100.000.000	100	320.000.000	100	130.000.000	100	340.000.000	100	350.000.000	1.05.0.00.0.00.07.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya Penanganan Bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	100	100	100	100.000.000	100	620.000.000	100	650.000.000	100	680.000.000	100	700.000.000	1.05.0.00.0.00.07.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					880.000.000		1.180.000.000		2.710.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000	
Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	100	100	100	380.000.000	100	280.000.000	100	540.000.000	100	310.000.000	100	310.000.000	1.05.0.00.0.00.07.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	100	100	100	500.000.000	100	900.000.000	100	2.170.000.000	100	1.090.000.000	100	1.090.000.000	1.05.0.00.0.00.07.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					24.898.148.935		25.247.648.935		25.430.048.935		25.708.048.935		25.879.548.935	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.863.048.935		6.620.548.935		6.675.048.935		6.737.548.935		6.785.548.935	
Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Nilai SAKIP OPD (Angka)	66.57	68	70	6.863.048.935	72	6.620.548.935	74	6.675.048.935	76	6.737.548.935	78	6.785.548.935	1.06.0.00.0.00.08.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.08.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					14.839.500.000		15.410.500.000		15.526.000.000		15.730.500.000		15.832.000.000	
Meningkatnya PSM/ TSKS yang diberdayakan dalam penanganan masalah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase)	71	73	75	14.839.500.000	77	15.410.500.000	79	15.526.000.000	81	15.730.500.000	83	15.832.000.000	1.06.0.00.0.00.08.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					2.038.000.000		2.039.000.000		2.040.000.000		2.041.000.000		2.042.000.000	
Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang telah mendapatkan Pelayanan dan rehabilitasi Sosial diluar Pant	Persentase (%) penyanggand disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	25	25	50	2.038.000.000	75	2.039.000.000	80	2.040.000.000	85	2.041.000.000	100	2.042.000.000	1.06.0.00.0.00.08.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					380.000.000		380.000.000		380.000.000		380.000.000		380.000.000	
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	85	86	87	380.000.000	88	380.000.000	89	380.000.000	90	380.000.000	91	380.000.000	1.06.0.00.0.00.08.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat	0	10	15		20		25		30		35		1.06.0.00.0.00.08.0000 - DINAS SOSIAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Kemandirian Ekonomi (Persentase)													
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					631.000.000		651.000.000		661.000.000		671.000.000		691.000.000	
Meningkatnya Korban bencana alam dan bencana sosial tingkat Kota/ Kab yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	100	631.000.000	100	651.000.000	100	661.000.000	100	671.000.000	100	691.000.000	1.06.0.00.0.00.08.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					146.600.000		146.600.000		148.000.000		148.000.000		149.000.000	
Meningkatnya Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan (Persentase)	100	100	100	146.600.000	100	146.600.000	100	148.000.000	100	148.000.000	100	149.000.000	1.06.0.00.0.00.08.0000 - DINAS SOSIAL
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					6.628.049.782		6.771.673.782		6.776.673.782		6.776.673.782		6.776.673.782	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.506.673.782		5.501.673.782		5.506.673.782		5.506.673.782		5.506.673.782	
Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis, efisien, bersih dan profesional	Nilai SAKIP OPD (Angka)	71.20	72	73	5.506.673.782	74	5.501.673.782	75	5.506.673.782	76	5.506.673.782	77	5.506.673.782	2.07.0.00.0.00.09.0000 - DINAS TENAGA KERJA
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	20	20	50	90.000.000	55	90.000.000	70	90.000.000	80	90.000.000	85	90.000.000	2.07.0.00.0.00.09.0000 - DINAS TENAGA KERJA
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					421.376.000		510.000.000		510.000.000		510.000.000		510.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	32	46	70	421.376.000	75	510.000.000	80	510.000.000	85	510.000.000	90	510.000.000	2.07.0.00.0.00.09.0000 - DINAS TENAGA KERJA
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					450.000.000		510.000.000		510.000.000		510.000.000		510.000.000	
Meningkatnya Pencari kerja yang ditempatkan	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar lintas kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. (%)	80	85	100	450.000.000	100	510.000.000	100	510.000.000	100	510.000.000	100	510.000.000	2.07.0.00.0.00.09.0000 - DINAS TENAGA KERJA
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000	
Meningkatnya Pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	6	5	10	160.000.000	10	160.000.000	10	160.000.000	10	160.000.000	10	160.000.000	2.07.0.00.0.00.09.0000 - DINAS TENAGA KERJA
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					795.660.000		1.180.660.000		1.180.660.000		1.180.660.000		1.180.660.000	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					190.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase ARG Daerah (%)	0.44	7	7	190.000.000	7	220.000.000	7	220.000.000	7	220.000.000	7	220.000.000	2.14.2.08.0.00.10.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					188.554.500		243.554.500		243.554.500		243.554.500		243.554.500	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	188.554.500	100	243.554.500	100	243.554.500	100	243.554.500	100	243.554.500	2.14.2.08.0.00.10.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					30.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	0	80	80	30.000.000	80	25.000.000	80	25.000.000	85	25.000.000	85	25.000.000	2.14.2.08.0.00.10.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					35.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	80	80	80	35.000.000	80	70.000.000	80	70.000.000	80	70.000.000	80	70.000.000	2.14.2.08.0.00.10.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					60.000.000		195.000.000		195.000.000		195.000.000		195.000.000	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	0	64.94	64.99	60.000.000	6.504	195.000.000	6.509	195.000.000	6.604	195.000.000	6.604	195.000.000	2.14.2.08.0.00.10.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					292.105.500		427.105.500		427.105.500		427.105.500		427.105.500	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	100	292.105.500	100	427.105.500	100	427.105.500	100	427.105.500	100	427.105.500	2.14.2.08.0.00.10.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					8.957.572.714		9.088.709.986		9.938.660.984		10.676.807.083		11.319.267.791	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.078.572.714		5.753.709.986		6.243.660.984		6.786.807.083		7.384.267.791	
Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Nilai SAKIP OPD (Angka)	73,9	74	75	6.078.572.714	753	5.753.709.986	755	6.243.660.984	758	6.786.807.083	76	7.384.267.791	2.09.0.00.0.00.11.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					2.254.000.000		2.555.000.000		2.830.000.000		2.920.000.000		2.935.000.000	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	198.36	290	248	355.000.000	242	380.000.000	237	405.000.000	231	430.000.000	226	440.000.000	2.09.0.00.0.00.11.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	89,2	93,7	96,8	874.000.000	97,1	970.000.000	97,3	1.065.000.000	97,5	1.070.000.000	97,7	1.075.000.000	2.09.0.00.0.00.11.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan (Nilai)	94.59	94.3	95.12	1.025.000.000	9.540	1.205.000.000	9.566	1.360.000.000	9.594	1.420.000.000	96	1.420.000.000	2.09.0.00.0.00.11.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					295.000.000		360.000.000		420.000.000		480.000.000		490.000.000	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.7	2.7	2.7	295.000.000	27	360.000.000	27	420.000.000	0	480.000.000	0	490.000.000	2.09.0.00.0.00.11.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					330.000.000		420.000.000		445.000.000		490.000.000		510.000.000	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	78.56	75	75.2	330.000.000	753	420.000.000	754	445.000.000	755	490.000.000	756	510.000.000	2.09.0.00.0.00.11.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					2.150.000.000		2.150.000.000		2.150.000.000		2.150.000.000		2.150.000.000	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan (Persentase)	0	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1.03.2.10.0.00.03.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	
Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	30	50	55	2.000.000.000	60	2.000.000.000	65	2.000.000.000	70	2.000.000.000	75	2.000.000.000	1.03.2.10.0.00.03.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Persentase Kejelasan Hak Milik Atas Tanah (Persentase)	1	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1.03.2.10.0.00.03.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					14.343.688.633		15.214.176.997		16.175.235.996		17.217.726.956		18.531.378.931	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.856.288.633		8.641.296.997		9.509.259.996		10.449.543.756		11.689.046.931	
Meningkatnya Predikat Nilai SAKIP OPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	7.856.288.633	100	8.641.296.997	100	9.509.259.996	100	10.449.543.756	100	11.689.046.931	2.11.0.00.0.00.12.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					310.000.000		340.000.000		370.000.000		400.000.000		430.000.000	
Meningkatnya Dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100	310.000.000	100	340.000.000	100	370.000.000	100	400.000.000	100	430.000.000	2.11.0.00.0.00.12.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					166.000.000		182.000.000		198.000.000		214.000.000		230.000.000	
Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO2 Ekuivalen)	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	91.44	60.43	60.83	166.000.000	6.123	182.000.000	6.163	198.000.000	6.203	214.000.000	6.243	230.000.000	2.11.0.00.0.00.12.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks Kualitas Air (Indeks)	53.33	67.44	67.64		6.784		6.804		6.824		6.844		2.11.0.00.0.00.12.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	26.05	56.32	56.39		5.646		5.653		5.660		573		2.11.0.00.0.00.12.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					90.000.000		108.000.000		129.600.000		155.520.000		160.000.000	
Meningkatnya dokumen pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah ((%))	100	100	100	90.000.000	100	108.000.000	100	129.600.000	100	155.520.000	100	160.000.000	2.11.0.00.0.00.12.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					3.600.000		4.320.000		5.184.000		6.220.800		6.500.000	
Meningkatnya dokumenPengelolaanLimbah B3	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	65.71	65.91	66.11	3.600.000	6.631	4.320.000	6.651	5.184.000	6.671	6.220.800	6.691	6.500.000	2.11.0.00.0.00.12.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					16.800.000		20.160.000		24.192.000		29.030.400		35.000.000	
Meningkatnya Dokumen Lingkungan yang mendapatkan persetujuan Lingkungan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	87.5	87.7	87.9	16.800.000	881	20.160.000	883	24.192.000	885	29.030.400	887	35.000.000	2.11.0.00.0.00.12.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					25.000.000		30.000.000		36.000.000		43.200.000		51.840.000	
Meningkatnya Masyarakat yang Mendapat Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	12.5	13.2	13.9	25.000.000	146	30.000.000	153	36.000.000	16	43.200.000	167	51.840.000	2.11.0.00.0.00.12.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					12.000.000		14.400.000		17.280.000		20.736.000		23.000.000	
Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Kota Prabumulih	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas	1	2	2	12.000.000	3	14.400.000	3	17.280.000	4	20.736.000	4	23.000.000	2.11.0.00.0.00.12.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup (unit)													
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					12.000.000		14.400.000		17.280.000		20.736.000		23.000.000	
MeningkatnyaPengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	12.000.000	100	14.400.000	100	17.280.000	100	20.736.000	100	23.000.000	2.11.0.00.0.00.12.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					5.852.000.000		5.859.600.000		5.868.440.000		5.878.740.000		5.882.992.000	
Meningkatnya pelayananan persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	84	84	87	5.800.000.000	88	5.800.000.000	90	5.800.000.000	92	5.800.000.000	100	5.800.000.000	1.04.1.03.2.11.04.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Meningkatnya Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah ((%))	30	32	34	52.000.000	36	59.600.000	38	68.440.000	40	78.740.000	42	82.992.000	2.11.0.00.0.00.12.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					15.491.807.014		16.550.807.014		19.380.307.014		21.677.807.014		21.445.807.014	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.256.807.014		11.795.807.014		14.010.307.014		15.972.807.014		15.445.807.014	
Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD (Angka)	75.62	75.65	75.66	11.256.807.014	7.567	11.795.807.014	7.568	14.010.307.014	7.569	15.972.807.014	7.570	15.445.807.014	2.12.0.00.0.00.13.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					1.700.000.000		1.905.000.000		2.085.000.000		2.205.000.000		2.340.000.000	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	6.45	6.50	6.51	1.700.000.000	652	1.905.000.000	553	2.085.000.000	554	2.205.000.000	555	2.340.000.000	2.12.0.00.0.00.13.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	54.23	54.25	54.30		5.435		5.440		5.445		5.450		2.12.0.00.0.00.13.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					1.265.000.000		1.460.000.000		1.655.000.000		1.780.000.000		1.920.000.000	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	95	95.50	1.265.000.000	9.560	1.460.000.000	9.570	1.655.000.000	9.580	1.780.000.000	9.690	1.920.000.000	2.12.0.00.0.00.13.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	95	95.50		9.560		9.570		9.580		9.590		2.12.0.00.0.00.13.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	67.98	62.90	63.00		6.350		6.360		6.370		6.480		2.12.0.00.0.00.13.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	52.55	52.60	52.65		5.270		5.275		5.280		5.285		2.12.0.00.0.00.13.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					1.110.000.000		1.220.000.000		1.450.000.000		1.530.000.000		1.540.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Di manfaatkan (Persentase)	78.38	78.40	78.45	1.110.000.000	7.850	1.220.000.000	7.855	1.450.000.000	7.860	1.530.000.000	7.865	1.540.000.000	2.12.0.00.0.00.13.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					160.000.000		170.000.000		180.000.000		190.000.000		200.000.000	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	1	1	1	160.000.000	1	170.000.000	1	180.000.000	1	190.000.000	1	200.000.000	2.12.0.00.0.00.13.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					21.011.839.326		21.536.839.326		21.492.940.939		32.799.509.513		33.020.892.465	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.935.016.126		4.945.016.126		5.361.117.739		5.817.829.513		6.319.212.465	
Meningkatnya pemenuhan administrasi perkantoran	Nilai SAKIP OPD (Angka)	68	70	73	4.935.016.126	80	4.945.016.126	83	5.361.117.739	85	5.817.829.513	88	6.319.212.465	2.13.0.00.0.00.14.0000 - DINASPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					20.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000		60.000.000	
Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase)	60.25	65	70	20.000.000	7.880	30.000.000	83	40.000.000	90	50.000.000	100	60.000.000	2.13.0.00.0.00.14.0000 - DINASPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa (Persentase)	100	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	2.13.0.00.0.00.14.0000 - DINASPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					430.000.000		930.000.000		450.000.000		1.130.000.000		830.000.000	
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	60	62.40	65	430.000.000	7.050	930.000.000	7.535	450.000.000	8.065	1.130.000.000	9.460	830.000.000	2.13.0.00.0.00.14.0000 - DINASPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					15.576.823.200		15.581.823.200		15.591.823.200		25.751.680.000		25.761.680.000	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	93.33	95	95	15.576.823.200	97	15.581.823.200	98	15.591.823.200	99	25.751.680.000	100	25.761.680.000	2.13.0.00.0.00.14.0000 - DINASPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					9.554.664.000		11.422.074.000		11.987.429.000		13.378.609.000		13.378.609.000	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.702.125.000		6.993.625.000		7.451.625.000		8.791.500.000		8.791.500.000	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	5.702.125.000	100	6.993.625.000	100	7.451.625.000	100	8.791.500.000	100	8.791.500.000	2.14.2.08.0.00.10.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					414.550.000		405.950.000		480.000.000		490.000.000		490.000.000	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	19.5- 19.05	19.05- 18.2	19.05- 17.6	414.550.000	19-169	405.950.000	19-163	480.000.000	19-157	490.000.000	19-152	490.000.000	2.14.2.08.0.00.10.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					2.139.389.000		2.441.899.000		2.475.204.000		2.516.509.000		2.516.509.000	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	12.54	16	15.1	2.139.389.000	142	2.441.899.000	133	2.475.204.000	124	2.516.509.000	115	2.516.509.000	2.14.2.08.0.00.10.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1.298.600.000		1.580.600.000		1.580.600.000		1.580.600.000		1.580.600.000	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran	Presentase Keluarga yang Mengikuti	12.09	12.59	13.09	1.298.600.000	1.359	1.580.600.000	1.409	1.580.600.000	1.459	1.580.600.000	1.509	1.580.600.000	2.14.2.08.0.00.10.0000 - DINAS

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)													PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					17.963.040.818		10.167.170.818		10.747.170.818		10.422.170.818		10.700.000.000	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.717.770.818		8.450.770.818		8.990.770.818		8.450.770.818		8.700.000.000	
Meningkatnya Predikat Nilai SAKIP OPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	15.717.770.818	100	8.450.770.818	100	8.990.770.818	100	8.450.770.818	100	8.700.000.000	2.15.0.00.0.00.15.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					2.245.270.000		1.716.400.000		1.756.400.000		1.971.400.000		2.000.000.000	
Meningkatnya capaian kinerja Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Konektivitas Darat (Persentase)	78	78	96	2.245.270.000	106	1.716.400.000	116	1.756.400.000	135	1.971.400.000	145	2.000.000.000	2.15.0.00.0.00.15.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	53.56	57.14	60.72		643		6.788		7.146		7.504		2.15.0.00.0.00.15.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					10.144.058.386		10.493.390.428		11.130.829.642		11.170.832.642		11.625.102.642	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.637.682.592		4.847.526.428		5.005.729.642		5.040.729.642		5.499.999.642	
Meningkatnya Predikat Nilai SAKIP OPD	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja	70.19	75	80	5.637.682.592	85	4.847.526.428	85	5.005.729.642	85	5.040.729.642	85	5.499.999.642	2.16.2.21.2.20.16.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)													
	Nilai SAKIP OPD (Angka)	90	90	90		90		90		90		90		2.16.2.21.2.20.16.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran (%)	90	90	90		90		90		90		90		2.16.2.21.2.20.16.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					2.961.271.800		4.035.000.000		4.095.000.000		4.095.000.000		4.095.000.000	
Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi publik pemerintah Daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	90	90	90	2.961.271.800	90	4.035.000.000	90	4.095.000.000	90	4.095.000.000	95	4.095.000.000	2.16.2.21.2.20.16.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					1.545.103.994		1.610.864.000		2.030.100.000		2.035.103.000		2.030.103.000	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	3.35	3.45	3.5	1.545.103.994	355	1.610.864.000	36	2.030.100.000	365	2.035.103.000	37	2.030.103.000	2.16.2.21.2.20.16.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					6.299.751.640		7.467.726.804		8.143.874.484		9.382.030.683		9.543.885.939	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.439.751.640		4.883.726.804		5.312.874.484		6.304.030.683		6.348.885.939	
Meningkatnya Predikat Nilai Sakip OPD	Nilai SAKIP OPD (Angka)	71	72	73	4.439.751.640	74	4.883.726.804	75	5.312.874.484	76	6.304.030.683	77	6.348.885.939	2.17.0.00.0.00.17.0000 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					50.000.000		95.000.000		110.000.000		120.000.000		125.000.000	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan	100	100	100	50.000.000	100	95.000.000	100	110.000.000	100	120.000.000	100	125.000.000	2.17.0.00.0.00.17.0000 - DINAS KOPERASI DAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Pemeriksaan Koperasi (Persentase)													USAHA KECIL MENENGAH
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					110.000.000		115.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000	
Meningkatnya kinerja pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	35	37.43	38.29	110.000.000	3.915	115.000.000	40	120.000.000	4.083	130.000.000	4.083	140.000.000	2.17.0.00.0.00.17.0000 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					200.000.000		250.000.000		270.000.000		300.000.000		350.000.000	
Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	15	16.04	17.02	200.000.000	1.798	250.000.000	1.896	270.000.000	1.990	300.000.000	1.990	350.000.000	2.17.0.00.0.00.17.0000 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					500.000.000		720.000.000		769.000.000		840.000.000		860.000.000	
Presentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	10	10.70	11.70	500.000.000	1.270	720.000.000	1.368	769.000.000	1.466	840.000.000	16	860.000.000	2.17.0.00.0.00.17.0000 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					700.000.000		995.000.000		1.116.000.000		1.203.000.000		1.235.000.000	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	20	29.33	30	700.000.000	32	995.000.000	3.333	1.116.000.000	3.429	1.203.000.000	35	1.235.000.000	2.17.0.00.0.00.17.0000 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	20	29.33	30		32		3.333		3.429		35		2.17.0.00.0.00.17.0000 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					300.000.000		409.000.000		446.000.000		485.000.000		485.000.000	
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan	1.30	1.57	2.33	300.000.000	388	409.000.000	384	446.000.000	456	485.000.000	456	485.000.000	2.17.0.00.0.00.17.0000 - DINAS KOPERASI DAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	dan Ekspor (Persentase)													USAHA KECIL MENENGAH
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					17.412.605.438		17.896.028.537		19.710.203.945		20.751.238.894		20.823.330.894	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.410.497.438		16.874.220.537		18.694.415.945		19.519.330.894		19.519.330.894	
Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	16.410.497.438	100	16.874.220.537	100	18.694.415.945	100	19.519.330.894	100	19.519.330.894	2.18.0.00.0.00.18.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					380.000.000		354.000.000		329.000.000		494.000.000		494.000.000	
Meningkatnya Kemudahan Investasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	62.7	100	100	380.000.000	100	354.000.000	100	329.000.000	100	494.000.000	100	494.000.000	2.18.0.00.0.00.18.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					109.000.000		113.500.000		125.000.000		140.000.000		190.000.000	
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	5	5	5	109.000.000	5	113.500.000	5	125.000.000	5	140.000.000	5	190.000.000	2.18.0.00.0.00.18.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					200.108.000		204.308.000		211.788.000		219.908.000		240.000.000	
Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	75	75	80	200.108.000	85	204.308.000	90	211.788.000	95	219.908.000	100	240.000.000	2.18.0.00.0.00.18.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					163.000.000		200.000.000		200.000.000		228.000.000		230.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100	100	100	163.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	228.000.000	100	230.000.000	2.18.0.00.0.00.18.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	2.18.0.00.0.00.18.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					6.242.300.000		7.763.500.000		7.468.000.000		9.329.500.000		8.790.000.000	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.616.300.000		3.988.500.000		4.357.000.000		4.734.500.000		5.220.000.000	
Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	53.82	55.43	57.09	3.616.300.000	5.881	3.988.500.000	6.057	4.357.000.000	6.239	4.734.500.000	6.482	5.220.000.000	2.19.3.26.0.00.19.0000 - DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					262.000.000		280.000.000		301.000.000		325.000.000		350.000.000	
Meningkatnya Daya saing Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang ditingkatkan daya saingnya (Orang)	60	200	300	262.000.000	400	280.000.000	500	301.000.000	600	325.000.000	700	350.000.000	2.19.3.26.0.00.19.0000 - DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	20	25	30		35		40		45		50		2.19.3.26.0.00.19.0000 - DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					2.224.000.000		3.340.000.000		2.640.000.000		4.085.000.000		3.020.000.000	
Meningkatnya Pembudayaan dan Persentasi olahraga	Indeks Partisipasi Olahraga (Persentase)	35.48	36.00	36.50	2.224.000.000	3.700	3.340.000.000	3.750	2.640.000.000	3.800	4.085.000.000	3.850	3.020.000.000	2.19.3.26.0.00.19.0000 - DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					140.000.000		155.000.000		170.000.000		185.000.000		200.000.000	
Meningkatnya keaktifan Gugus pramuka	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	65.50	66.00	66.50	140.000.000	6.700	155.000.000	6.750	170.000.000	6.800	185.000.000	6.850	200.000.000	2.19.3.26.0.00.19.0000 - DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					100.000.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000		250.000.000	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					100.000.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000		250.000.000	
Meningkatnyaperangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.21	2.31	2.35	100.000.000	24	150.000.000	245	200.000.000	25	200.000.000	255	250.000.000	2.16.2.21.2.20.16.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					145.000.000		160.000.000		120.000.000		120.000.000		130.000.000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					145.000.000		160.000.000		120.000.000		120.000.000		130.000.000	
Meningkatnya keamanan informasi pemerintah	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	100	100	100	145.000.000	100	160.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	130.000.000	2.16.2.21.2.20.16.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					1.353.000.000		1.488.300.000		1.637.130.000		1.800.843.000		1.980.927.300	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1.034.000.000		1.137.400.000		1.251.140.000		1.376.254.000		1.513.879.400	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	100	100	100	1.034.000.000	100	1.137.400.000	100	1.251.140.000	100	1.376.254.000	100	1.513.879.400	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					198.000.000		217.800.000		239.580.000		263.538.000		289.891.800	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	100	100	100	198.000.000	100	217.800.000	100	239.580.000	100	263.538.000	100	289.891.800	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					121.000.000		133.100.000		146.410.000		161.051.000		177.156.100	
Meningkatnya warisan budayayang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	2	2	2	121.000.000	2	133.100.000	2	146.410.000	2	161.051.000	2	177.156.100	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	1	1	1		1		1		1		1		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					8.015.343.069		9.513.854.268		10.916.107.707		13.083.674.834		13.255.174.834	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.990.055.999		8.408.067.198		9.712.320.637		11.902.387.764		12.023.187.764	
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Nilai SAKIP OPD (Angka)	69.15	75	77	6.990.055.999	80	8.408.067.198	81	9.712.320.637	83	11.902.387.764	85	12.023.187.764	2.23.2.24.0.00.20.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					878.787.070		922.287.070		1.013.787.070		984.287.070		1.015.287.070	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	60,02	60,3	60,5	878.787.070	60,7	922.287.070	60,8	1.013.787.070	60,9	984.287.070	61	1.015.287.070	2.23.2.24.0.00.20.0000 - DINAS

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					146.500.000		183.500.000		190.000.000		197.000.000		216.700.000	
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	60	60	65	146.500.000	70	183.500.000	75	190.000.000	80	197.000.000	85	216.700.000	2.23.2.24.0.00.20.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					263.600.000		304.400.000		329.100.000		343.800.000		354.800.000	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					128.600.000		150.400.000		169.100.000		179.800.000		180.800.000	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	25.83	37.70	37.83	128.600.000	3.787	150.400.000	3.796	169.100.000	3.797	179.800.000	3.798	180.800.000	2.23.2.24.0.00.20.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (%)	25.83	37.70	37.83		3.770		3.796		377		377		2.23.2.24.0.00.20.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					135.000.000		141.000.000		146.000.000		149.000.000		152.000.000	
Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	20.29	30	32	135.000.000	35	141.000.000	36	146.000.000	38	149.000.000	38	152.000.000	2.23.2.24.0.00.20.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					-		13.000.000		14.000.000		15.000.000		22.000.000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip	100	100	100	-	100	13.000.000	100	14.000.000	100	15.000.000	100	22.000.000	2.23.2.24.0.00.20.0000 - DINAS

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
penggunaan arsip yang bersifat tertutup	yang Bersifat Tertutup (Persentase)													PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTANDAN PERIKANAN					6.890.917.682		6.826.465.167		7.143.853.765		7.542.649.819		7.582.649.819	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.165.917.682		4.781.465.167		5.008.853.765		5.217.649.819		5.217.649.819	
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Nilai SAKIP OPD (Angka)	65	65	66	5.165.917.682	67	4.781.465.167	68	5.008.853.765	69	5.217.649.819	70	5.217.649.819	3.25.0.00.0.00.38.0000 - DINAS PERIKANAN
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.25.0.00.0.00.38.0000 - DINAS PERIKANAN
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					315.000.000		330.000.000		330.000.000		340.000.000		340.000.000	
Meningkatnya Tingkat Realisasi Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	142.3	234	240	315.000.000	245	330.000.000	248	330.000.000	250	340.000.000	255	340.000.000	3.25.0.00.0.00.38.0000 - DINAS PERIKANAN
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					945.000.000		1.220.000.000		1.290.000.000		1.450.000.000		1.490.000.000	
Meningkatnya Tingkat Realisasi Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	268.6	396	412	945.000.000	429	1.220.000.000	446	1.290.000.000	464	1.450.000.000	483	1.490.000.000	3.25.0.00.0.00.38.0000 - DINAS PERIKANAN
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					130.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000	
Meningkatnya Tingkat Realisasi Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP) (Ton)	410.9	630	652	130.000.000	674	140.000.000	694	140.000.000	714	140.000.000	738	140.000.000	3.25.0.00.0.00.38.0000 - DINAS PERIKANAN
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					335.000.000		355.000.000		375.000.000		395.000.000		395.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	42.50	45	45.15	335.000.000	4.565	355.000.000	4.615	375.000.000	4.665	395.000.000	4.715	395.000.000	3.25.0.00.0.00.38.0000 - DINAS PERIKANAN
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					1.880.000.000		1.545.000.000		1.685.000.000		1.825.000.000		1.965.000.000	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					925.000.000		500.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (Orang)	40563	51000	52500	925.000.000	54000	500.000.000	55000	550.000.000	56500	600.000.000	58000	650.000.000	2.19.3.26.0.00.19.0000 - DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					430.000.000		465.000.000		500.000.000		535.000.000		570.000.000	
Meningkatnya jangkauan pemasarann Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	1	2	3	430.000.000	3	465.000.000	3	500.000.000	3	535.000.000	3	570.000.000	2.19.3.26.0.00.19.0000 - DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					525.000.000		580.000.000		635.000.000		690.000.000		745.000.000	
Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata (Orang)	24	46	80	525.000.000	80	580.000.000	80	635.000.000	80	690.000.000	80	745.000.000	2.19.3.26.0.00.19.0000 - DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					25.333.500.921		26.707.004.713		26.938.100.713		28.357.275.684		28.412.006.684	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.881.097.921		15.022.469.713		15.072.469.713		16.326.403.684		16.326.403.684	
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Nilai SAKIP OPD (Angka)	72.05	75.65	75.80	13.881.097.921	7.590	15.022.469.713	7.715	15.072.469.713	7.725	16.326.403.684	7.750	16.326.403.684	3.27.0.00.0.00.21.0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					2.253.531.000		2.350.670.000		2.452.605.000		2.539.269.000		2.594.000.000	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah Produksi Tanaman	57.60	56.15	58.17	120.000.000	5.846	145.000.000	5.876	170.000.000	5.905	200.000.000	5.934	200.000.000	3.27.0.00.0.00.21.0000 - DINAS PERTANIAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Hortikultura Jenis Cabai (Ton)													
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet (Ton)	10200	10302	10405	1.958.531.000	10509	2.005.670.000	10614	2.057.605.000	10720	2.114.269.000	10827	2.144.000.000	3.27.0.00.0.00.21.0000 - DINAS PERTANIAN
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah Produksi Telur (Ton)	953.61	954.26	963.81	175.000.000	97.345	200.000.000	98.318	225.000.000	99.301	225.000.000	1000	250.000.000	3.27.0.00.0.00.21.0000 - DINAS PERTANIAN
	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi) (Ton)	1580.61	1588.51	1596.45		160.443		161.246		162.052		162.862		3.27.0.00.0.00.21.0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					7.400.000.000		7.430.000.000		7.455.000.000		7.480.000.000		7.480.000.000	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Ha)	0	50	50	7.400.000.000	50	7.430.000.000	50	7.455.000.000	50	7.480.000.000	50	7.480.000.000	3.27.0.00.0.00.21.0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					210.000.000		255.000.000		255.000.000		262.500.000		262.500.000	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	1	1	1	210.000.000	1	255.000.000	1	255.000.000	1	262.500.000	1	262.500.000	3.27.0.00.0.00.21.0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					206.620.000		231.613.000		260.774.000		281.851.000		281.851.000	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	100	100	100	206.620.000	100	231.613.000	100	260.774.000	100	281.851.000	100	281.851.000	3.27.0.00.0.00.21.0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					330.000.000		330.000.000		330.000.000		330.000.000		330.000.000	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang	100	100	100	330.000.000	100	330.000.000	100	330.000.000	100	330.000.000	100	330.000.000	3.27.0.00.0.00.21.0000 - DINAS PERTANIAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Diterbitkan (Persentase)													
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					1.052.252.000		1.087.252.000		1.112.252.000		1.137.252.000		1.137.252.000	
Meningkatnya Kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Kelembagaan Petani yang ditingkatkan Kapasitasnya (%)	100	100	100	1.052.252.000	100	1.087.252.000	100	1.112.252.000	100	1.137.252.000	100	1.137.252.000	3.27.0.00.0.00.21.0000 - DINAS PERTANIAN
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					7.830.608.082		8.536.208.082		9.359.582.082		9.534.008.082		9.760.008.082	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.115.608.082		6.541.208.082		7.089.582.082		6.989.008.082		6.940.008.082	
Meningkatnya Predikat Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD (Angka)	65,72	82.25	82.25	6.115.608.082	8.225	6.541.208.082	8.225	7.089.582.082	8.225	6.989.008.082	8.225	6.940.008.082	3.31.3.30.0.00.30.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					210.000.000		260.000.000		305.000.000		350.000.000		395.000.000	
Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	16.66	16.66	18.08	210.000.000	1.922	260.000.000	2.102	305.000.000	2.222	350.000.000	2.222	395.000.000	3.31.3.30.0.00.30.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					210.000.000		240.000.000		270.000.000		300.000.000		330.000.000	
Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, Merata dan Terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	15	15	16	210.000.000	165	240.000.000	17	270.000.000	175	300.000.000	19	330.000.000	3.31.3.30.0.00.30.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					305.000.000		395.000.000		485.000.000		575.000.000		665.000.000	
Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	7.5	7.15	7	305.000.000	69	395.000.000	655	485.000.000	64	575.000.000	625	665.000.000	3.31.3.30.0.00.30.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Dan Barang Penting (Persentase)													
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					450.000.000		470.000.000		490.000.000		510.000.000		530.000.000	
Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	0	0.26	0.52	450.000.000	78	470.000.000	105	490.000.000	131	510.000.000	157	530.000.000	3.31.3.30.0.00.30.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					140.000.000		155.000.000		170.000.000		185.000.000		200.000.000	
Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	99,75	99,8	99.90	140.000.000	100	155.000.000	100	170.000.000	100	185.000.000	100	200.000.000	3.31.3.30.0.00.30.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.07 - PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					400.000.000		475.000.000		550.000.000		625.000.000		700.000.000	
Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	0.26	0.52	0.78	400.000.000	105	475.000.000	131	550.000.000	157	625.000.000	184	700.000.000	3.31.3.30.0.00.30.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					1.025.000.000		1.180.000.000		1.330.000.000		1.430.000.000		1.530.000.000	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					945.000.000		1.095.000.000		1.245.000.000		1.345.000.000		1.445.000.000	
Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	61.47	73.33	77	945.000.000	80	1.095.000.000	83	1.245.000.000	87	1.345.000.000	93	1.445.000.000	3.31.3.30.0.00.30.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					30.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	
Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	93.68	0	94.95	30.000.000	9.507	35.000.000	9.523	35.000.000	9.534	35.000.000	9.545	35.000.000	3.31.3.30.0.00.30.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
INFORMASI INDUSTRI NASIONAL														
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	1.65	1.87	2	50.000.000	209	50.000.000	229	50.000.000	232	50.000.000	240	50.000.000	3.31.3.30.0.00.30.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					126.579.962.279		125.724.289.247		132.858.474.848		141.090.966.665		155.198.727.600	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					112.093.712.279		108.669.051.747		114.555.557.973		121.737.544.696		134.637.450.358	
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Tingkat Kematangan Organisasi (Angka)	40.58	46.1	47	112.093.712.279	47	108.669.051.747	48	114.555.557.973	49	121.737.544.696	50	134.637.450.358	4.01.0.00.0.00.22.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					9.537.750.000		11.766.887.500		12.340.731.875		12.930.018.469		13.535.519.392	
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Persentase MOU/Perjanjian kerjasama yang difasilitasi (%)	100	100	100	2.880.000.000	100	4.700.000.000	100	4.950.000.000	100	5.200.000.000	100	5.450.000.000	4.01.0.00.0.00.22.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	2.93	3.2	3.2		33		33		34		34		4.01.0.00.0.00.22.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	83	84	84	775.000.000	85	890.000.000	85	905.000.000	86	920.000.000	86	935.000.000	4.01.0.00.0.00.22.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya pengelolaan bina mental spiritual	Persentase Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi (%)	85	100	100	5.882.750.000	100	6.176.887.500	100	6.485.731.875	100	6.810.018.469	100	7.150.519.392	4.01.0.00.0.00.22.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					4.948.500.000		5.288.350.000		5.962.185.000		6.423.403.500		7.025.757.850	
Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	84.17	85	85	2.035.000.000	85	2.238.500.000	86	2.462.350.000	86	2.708.585.000	88	2.979.457.500	4.01.0.00.0.00.22.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya literasi keuangan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata	Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	76.47	77	77	1.550.000.000	78	1.550.000.000	79	1.850.000.000	80	1.900.000.000	80	2.050.000.000	4.01.0.00.0.00.22.0000 - SEKRETARIAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh/Kapita)	1248.92	1251.87	1270.64		1340		1380		140.161		1450		4.01.0.00.0.00.22.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya pembangunan fasilitas dan infrastruktur daerah	Persentase Realisasi Fisik OPD Kota Prabumulih (%)	81.5	100	100	1.363.500.000	100	1.499.850.000	100	1.649.835.000	100	1.814.818.500	100	1.996.300.350	4.01.0.00.0.00.22.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					72.993.164.646		79.438.881.110		87.382.769.222		98.521.046.146		106.051.415.755	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					33.859.921.931		36.392.314.124		40.031.545.537		46.434.700.091		48.756.435.095	
Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	33.859.921.931	100	36.392.314.124	100	40.031.545.537	100	46.434.700.091	100	48.756.435.095	4.02.0.00.0.00.23.0000 - SEKRETARIAT DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					39.133.242.715		43.046.566.986		47.351.223.685		52.086.346.055		57.294.980.660	
Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	84	100	100	2.371.723.200	100	2.608.895.520	100	2.869.785.072	100	3.156.763.580	100	3.472.439.938	4.02.0.00.0.00.23.0000 - SEKRETARIAT DPRD
Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	100	36.761.519.515	100	40.437.671.466	100	44.481.438.613	100	48.929.582.475	100	53.822.540.722	4.02.0.00.0.00.23.0000 - SEKRETARIAT DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	66.67	78	80		80		85		85		85		4.02.0.00.0.00.23.0000 - SEKRETARIAT DPRD
5.01 - PERENCANAAN					13.150.701.000		13.660.701.000		13.874.701.000		13.996.701.000		14.126.201.000	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.700.701.000		9.210.701.000		9.424.701.000		9.546.701.000		9.676.201.000	
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	8.700.701.000	100	9.210.701.000	100	9.424.701.000	100	9.546.701.000	100	9.676.201.000	5.01.0.00.0.00.25.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN,					2.170.000.000		2.170.000.000		2.170.000.000		2.170.000.000		2.170.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH														
MeningkatnyaCapaian Sasaran Daerah	Persentase Indikator sasaran daerah yang tercapai (%)	67.47	70.50	72.00	2.170.000.000	7.350	2.170.000.000	7.400	2.170.000.000	7.450	2.170.000.000	7.500	2.170.000.000	5.01.0.00.0.00.25.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					2.280.000.000		2.280.000.000		2.280.000.000		2.280.000.000		2.280.000.000	
Meningkatnya Capaian Kinerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase capaian kinerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)	64.38	78.50	78.55	850.000.000	7.875	850.000.000	7.900	850.000.000	7.955	850.000.000	8.000	850.000.000	5.01.0.00.0.00.25.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatnya Capaian Kinerja bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Persentase capaian kinerja bidang Infrastruktur dan kewilayahan (%)	61.29	78.50	78.55	880.000.000	7.875	880.000.000	7.900	880.000.000	7.955	880.000.000	8.000	880.000.000	5.01.0.00.0.00.25.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatnya Capaian Kinerja bidang perekonomian dan SDA	Persentase capaian kinerja bidang perekonomian dan SDA (%)	78.43	78.50	78.55	550.000.000	7.875	550.000.000	7.900	550.000.000	7.955	550.000.000	8.000	550.000.000	5.01.0.00.0.00.25.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.02 - KEUANGAN					126.312.213.969		126.037.365.516		126.968.138.184		127.964.158.088		129.029.851.236	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					39.982.287.487		39.107.873.390		39.509.505.819		39.939.252.518		40.399.081.486	
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Nilai SAKIP OPD (Angka)	72.52	75	77	26.581.016.912	80	26.956.374.322	81	27.358.006.751	82	27.787.753.450	85	28.247.582.418	5.02.0.00.0.00.26.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Nilai SAKIP OPD (Angka)	78	78	79	13.401.270.575	80	12.151.499.068	81	12.151.499.068	82	12.151.499.068	83	12.151.499.068	5.02.0.00.0.00.27.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					83.825.504.508		84.209.160.614		84.619.627.647		85.058.920.522		85.528.915.748	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran, Tata Kelola Perbendaharaan dan Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	39.35	40	45	83.825.504.508	46	84.209.160.614	48	84.619.627.647	49	85.058.920.522	50	85.528.915.748	5.02.0.00.0.00.26.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	40	40	40		40		40		40		40		5.02.0.00.0.00.26.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	51.33	52	55		57		59		62		65		5.02.0.00.0.00.26.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	2.76	2.5	2.2		2		18		15		1		5.02.0.00.0.00.26.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.26.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.584.421.974		1.695.331.512		1.814.004.718		1.940.985.048		2.076.854.002	
Meningkatnya tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	3.08	3.5	3.8	1.584.421.974	4	1.695.331.512	45	1.814.004.718	48	1.940.985.048	5	2.076.854.002	5.02.0.00.0.00.26.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					920.000.000		1.025.000.000		1.025.000.000		1.025.000.000		1.025.000.000	
MENINGKATNYA PENERIMAAN DARI 9 PAJAK DAERAH PBBP2 DAN BPHTB	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)				920.000.000		1.025.000.000		1.025.000.000		1.025.000.000		1.025.000.000	5.02.0.00.0.00.27.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.03 - KEPEGAWAIAN					24.870.991.316		24.504.991.316		24.079.991.316		24.299.991.316		24.299.991.316	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.456.551.816		21.346.551.816		21.021.551.816		21.541.551.816		21.541.551.816	
Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Nilai SAKIP OPD (Angka)	71	75	80	21.456.551.816	85	21.346.551.816	90	21.021.551.816	95	21.541.551.816	95	21.541.551.816	5.03.5.04.0.00.28.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														SUMBER DAYA MANUSIA
	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	71.11	75.01	80.01		8.501		9.001		9.501		9.501		5.03.5.04.0.00.28.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					3.414.439.500		3.158.439.500		3.058.439.500		2.758.439.500		2.758.439.500	
Meningkatnya Kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi (%)	50	80	80	626.688.000	80	626.688.000	80	626.688.000	80	626.688.000	80	626.688.000	5.03.5.04.0.00.28.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	50	50	55	1.487.794.000	65	1.231.794.000	70	1.131.794.000	75	831.794.000	80	831.794.000	5.03.5.04.0.00.28.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	50	70	70	735.000.000	70	735.000.000	80	735.000.000	80	735.000.000	80	735.000.000	5.03.5.04.0.00.28.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	50	70	70	564.957.500	70	564.957.500	70	564.957.500	70	564.957.500	70	564.957.500	5.03.5.04.0.00.28.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					1.909.610.000		1.909.610.000		1.909.610.000		1.909.610.000		1.909.610.000	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					1.909.610.000		1.909.610.000		1.909.610.000		1.909.610.000		1.909.610.000	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional (%)	4	4	4	1.909.610.000	4	1.909.610.000	4	1.909.610.000	4	1.909.610.000	4	1.909.610.000	5.03.5.04.0.00.28.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					10.707.033.041		10.927.533.041		11.977.533.041		13.549.033.041		13.900.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.532.033.041		4.022.533.041		4.322.533.041		4.549.033.041		4.600.000.000	
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Nilai SAKIP OPD (Angka)	70	71	72	4.532.033.041	73	4.022.533.041	74	4.322.533.041	75	4.549.033.041	76	4.600.000.000	5.05.0.00.0.00.29.0000 - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					3.525.000.000		3.885.000.000		4.270.000.000		5.250.000.000		5.250.000.000	
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	100	100	100	3.525.000.000	100	3.885.000.000	100	4.270.000.000	100	5.250.000.000	100	5.250.000.000	5.05.0.00.0.00.29.0000 - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					2.650.000.000		3.020.000.000		3.385.000.000		3.750.000.000		4.050.000.000	
Meningkatnya Inovasi Daerah yang dilegalkan	Indeks Daya Saing Daerah (Angka)	3.95	3.97	3.98	2.650.000.000	399	3.020.000.000	4	3.385.000.000	41	3.750.000.000	42	4.050.000.000	5.05.0.00.0.00.29.0000 - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Indeks Inovasi Daerah (Angka)	10.2	20	25		30		35		40		50		5.05.0.00.0.00.29.0000 - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					15.177.997.405		16.695.867.146		18.365.453.859		20.201.929.246		22.221.982.171	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.202.004.560		12.322.275.016		13.554.502.517		14.909.882.769		16.400.731.046	
Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Nilai SAKIP OPD (Angka)	74.45	75	76	11.202.004.560	77	12.322.275.016	78	13.554.502.517	79	14.909.882.769	80	16.400.731.046	6.01.0.00.0.00.24.0000 - INSPEKTORAT DAERAH
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		6.01.0.00.0.00.24.0000 - INSPEKTORAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					3.352.328.045		3.687.560.850		4.056.316.934		4.461.948.628		4.908.143.491	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	TindakanJut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	75	77	79	3.352.328.045	81	3.687.560.850	83	4.056.316.934	85	4.461.948.628	87	4.908.143.491	6.01.0.00.0.00.24.0000 - INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					623.664.800		686.031.280		754.634.408		830.097.849		913.107.634	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	3.000	3.025	3.050	623.664.800	3.075	686.031.280	3.100	754.634.408	3.125	830.097.849	3.150	913.107.634	6.01.0.00.0.00.24.0000 - INSPEKTORAT DAERAH
7.01 - KECAMATAN					57.324.310.341		60.073.726.156		64.604.570.808		69.182.109.312		74.960.588.601	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					48.860.294.341		51.525.502.156		55.969.428.808		60.213.097.312		65.646.857.701	
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	20.523.128.207	100	22.575.441.028	100	24.832.985.130	100	27.316.283.644	100	30.047.912.007	7.01.0.00.0.00.36.0000 - KECAMATAN PRABUMULIH TIMUR
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persentase Rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100	5.387.877.268	100	5.404.677.268	100	5.536.780.000	100	5.654.030.000	100	6.654.030.000	7.01.0.00.0.00.32.0000 - KECAMATAN PRABUMULIH SELATAN
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persentase Rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100	5.932.202.449	100	6.285.279.011	100	6.622.925.000	100	7.014.107.203	100	7.394.812.563	7.01.0.00.0.00.34.0000 - KECAMATAN CAMBAI
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persentase Rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100	7.175.123.284	100	7.192.023.284	100	7.562.674.448	100	7.918.233.171	100	8.280.994.830	7.01.0.00.0.00.35.0000 - KECAMATAN PRABUMULIH BARAT
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persentase Rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100	5.178.832.408	100	5.179.832.408	100	6.267.597.212	100	6.894.356.933	100	7.583.792.626	7.01.0.00.0.00.33.0000 - KECAMATAN PRABUMULIH UTARA
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persentase Rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100	4.663.130.725	100	4.888.249.157	100	5.146.467.018	100	5.416.086.361	100	5.685.315.675	7.01.0.00.0.00.37.0000 - KECAMATAN RAMBANG KAPAK TENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					814.416.000		869.424.000		927.862.000		1.009.729.000		1.068.069.600	
Jumlah Kegiatan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	77	78	79	316.000.000	80	347.600.000	81	381.560.000	82	420.596.000	83	462.655.600	7.01.0.00.0.00.36.0000 - KECAMATAN PRABUMULIH TIMUR
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	3.64	3.8	4	88.500.000	42	87.950.000	44	88.300.000	46	88.650.000	47	89.250.000	7.01.0.00.0.00.32.0000 - KECAMATAN PRABUMULIH SELATAN
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	3.0	3.12	3.17	98.736.000	321	108.954.000	324	112.050.000	33	133.000.000	333	139.650.000	7.01.0.00.0.00.34.0000 - KECAMATAN CAMBAI
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	3.64	3.8	4	105.500.000	42	117.500.000	44	118.000.000	46	123.000.000	47	124.000.000	7.01.0.00.0.00.35.0000 - KECAMATAN PRABUMULIH BARAT
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	10	100	100	169.000.000	100	170.000.000	100	186.790.000	100	199.280.000	100	204.764.000	7.01.0.00.0.00.33.0000 - KECAMATAN PRABUMULIH UTARA
Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	3.44	3.60	4.00	36.680.000	420	37.420.000	440	41.162.000	460	45.203.000	470	47.750.000	7.01.0.00.0.00.37.0000 - KECAMATAN RAMBANG KAPAK TENGAH
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					7.649.600.000		7.678.800.000		7.707.280.000		7.959.283.000		8.245.661.300	
Jumlah Kegiatan Masyarakat kelurahan dan Desa yang Diberdayakan	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	60	62	64	2.693.000.000	66	2.702.300.000	68	2.712.530.000	70	2.723.783.000	72	2.736.161.300	7.01.0.00.0.00.36.0000 - KECAMATAN PRABUMULIH TIMUR
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	3.64	3.8	4	628.000.000	42	629.500.000	44	629.500.000	46	630.000.000	47	635.000.000	7.01.0.00.0.00.32.0000 - KECAMATAN PRABUMULIH SELATAN
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	100	100	100100	2.235.000.000	100	2.237.000.000	100	2.238.000.000	100	2.460.000.000	100	2.717.000.000	7.01.0.00.0.00.33.0000 - KECAMATAN PRABUMULIH UTARA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	3.0	3.12	3.17	629.000.000	321	630.000.000	324	632.000.000	33	635.000.000	333	636.750.000	7.01.0.00.0.00.34.0000 - KECAMATAN CAMBAI
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	3.64	3.8	4	1.247.000.000	42	1.252.000.000	44	1.257.000.000	46	1.262.000.000	47	1.262.000.000	7.01.0.00.0.00.35.0000 - KECAMATAN PRABUMULIH BARAT
Persentase Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	3.64	3.8	4	217.600.000	42	228.000.000	44	238.250.000	46	248.500.000	47	258.750.000	7.01.0.00.0.00.37.0000 - KECAMATAN RAMBANG KAPAK TENGAH
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					9.587.558.158		8.950.238.974		9.821.381.871		54.194.486.367		15.579.056.694	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.329.240.884		5.373.839.973		5.900.742.970		6.471.185.567		7.090.559.124	
Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran (%)	72.72	73	73.5	6.329.240.884	74	5.373.839.973	745	5.900.742.970	75	6.471.185.567	755	7.090.559.124	1.05.8.01.0.00.05.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.372.646.000		1.509.910.600		1.660.901.660		1.826.888.700		2.009.577.570	
Meningkatnya pelaksanaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	70.83	280	280	1.372.646.000	280	1.509.910.600	280	1.660.901.660	280	1.826.888.700	280	2.009.577.570	1.05.8.01.0.00.05.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					1.275.071.274		1.400.478.401		1.537.726.241		35.099.000.000		2.779.100.000	
Meningkatnya PARPOL yang mendapatkan pengembangan etika dan pendidikan politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	97.66	98	98.3	1.275.071.274	985	1.400.478.401	987	1.537.726.241	99	35.099.000.000	993	2.779.100.000	1.05.8.01.0.00.05.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					89.100.000		98.010.000		107.811.000		118.592.100		125.000.000	
MeningkatnyaORMAS yang diawasi dan diberdayakan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	4.87	70	75	89.100.000	80	98.010.000	85	107.811.000	90	118.592.100	95	125.000.000	1.05.8.01.0.00.05.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					175.000.000		189.000.000		200.000.000		216.000.000		232.000.000	
Meningkatnya penanganan konflik berbasis ekonomi, sosial dan budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi ()	85.83	86	87	175.000.000	88	189.000.000	89	200.000.000	90	216.000.000	91	232.000.000	1.05.8.01.0.00.05.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					346.500.000		379.000.000		414.200.000		10.462.820.000		3.342.820.000	
Meningkatnya penyelesaian konflik sosial yang terjadi	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	84.14	84.5	85	346.500.000	855	379.000.000	86	414.200.000	865	10.462.820.000	87	3.342.820.000	1.05.8.01.0.00.05.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL KESELURUHAN					1.467.850.395.863		1.555.869.880.084		1.653.770.186.939		1.856.705.906.280		1.886.724.182.321	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sasaran Utama Visi

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun.

Penentuan keberhasilan tujuan dan sasaran RPJMD ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator yang terseleksi.

Penentuan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ditetapkan melalui indikator kinerja daerah (IKD) yang dibagi dalam empat aspek, yaitu :

- 1. Aspek Geografi dan Demografi;
- 2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
- 3. Aspek Daya Saing Daerah;
- 4. Aspek Pelayanan Umum.

Indikator tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk matriks yang akan dipergunakan sebagai acuan dan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Selengkapnya, matriks indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	79,3	79,55	79,65	79,75	80
2.	Rasio Gini	Indeks	0,345	0,343	0,341	0,339	0,337
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,5	5,7	5,8	6,1	6,3
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	62,42	62,67	62,92	63,18	63,2
5.	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	7,5	7,7	7,9	8,1	8,3
6.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	130	129	128	127	126
7.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	75,4	76,3	77,2	78,3	78,5
8.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	79,93	84,31	88,69	93,07	93,5
9.	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	(Rp Juta)	57,27	60	62,74	65,47	68,2
10.	Indeks Infrastruktur	Angka	74,89	75,12	75,34	75,57	75,79
11.	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	Ton CO2 eq	30.122,55	35.000	40.000	44.104,09	50.000
12.	Nilai SAKIP	Angka	64	66	68	70	72
13.	Tingkat pengangguranterbuka	%	4,73	4,63	4,53	4,43	4,35
14.	Tingkat Kemiskinan	%	9,7	9,4	9,1	8,9	8,6
15.	Opini BPK	Nilai	100	100	100	100	100

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3.4	3.45	3.48	3.5	3.55	3.6	3.65
2	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	2	5	5	5	5	5	5
3	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2.69	2.72	2.74	2.77	2.9	3	3.2
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	68.6	68.8	69	69.5	70	70.5	71
5	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1
6	Rasio Industri Pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	%	10.71	10.9	11	11.5	12	12.57	12.95
7	Indeks Perkembangan Harga	Indeks	0.8	0.77	0.75	0.70	0.65	0.63	0.6
8	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,066	0,068	0,070	0,072	0,073	0,075	0,076
9	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	3.02	3.5	3.75	4	4.5	4.8	5
10	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kategori Pertanian, dan Perikanan	%	1.68	1.90	2.10	2.40	2.60	2.70	2.90
11	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi makan dan Minum terhadap Produk Domestik Regional Bruto	%	26.74	27.42	28.12	28.83	29.56	30.31	31.08
12	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kota	%	10	10.4	10.8	11	11.3	11.5	11.7
13	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	0.44	0.47	0.5	0.75	1	1.2	1.5
14	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kota	%	1.2	1.3	1.35	1.4	1.45	1.5	1.55
15	Tingkat Inflasi	(%)	1.24	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
16	Persentase Desa Mandiri	%	0	0	10	20	40	50	55
17	Konektivitas Darat	Km	78	78	96	106	116	135	145
18	Rasio kewirausahaan daerah	%	2,69	2,72	2,74	2,77	2,9	3	3,2
II	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	8.09	7.95	7.65	7.35	7	6.85	6.5
2	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	0.65	0.85	1.10	1.43	1.86	2.41	3.14
3	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	68.11	75.55	79.93	84.31	88.69	93.07	93.50
4	Indeks Risiko Bencana	(%)	107.86	107.5	107	106.75	106.50	106.25	106
5	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	%	17.93	19	21	22.5	23.5	25.52	26
6	Timbulan sampah terolah difasilitas pengolahan sampah	%	85.49	85.75	86	87	88	89	90
7	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	(%)	30	32	34	36	38	40	42
8	Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	28	29	30	31	32	33	34
9	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	107.86	107.5	107	106.75	106.5	106.25	106
III	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.01	5.3	5.5	5.7	5.8	6.1	6.3
2	Rasio Gini	Indeks	0.35	0.347	0.345	0.343	0.34	0.338	0.336
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.94	4.83	4.73	4.63	4.53	4.43	4.35
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	78.86	78.95	79.30	79.55	79.65	79.75	80
5	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	64.1	64.9	65.6	66.4	67.1	67.9	68.7
6	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	(%) Indeks	0.337	0.327	0.318	0.308	0.299	0.290	0.282
7	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74.87	74.9	75	75.15	75.35	75.5	75.6
8	Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama (%)	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94.47	94.48	94.49	94.5	94.51	94.52	94.53
10	Rasio Wirausaha Pemuda		20	25	30	35	40	45	50
11	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10.36	10.45	10.55	10.65	10.69	10.7	10.72
12	Persentase Benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	%	0	1	2	3	4	5	6

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
13	Tingkat Kemiskinan	(%)	10.13	10	9.7	9.65	9.5	9.45	9.4
14	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	64.1	64.9	65.6	66.4	67.1	67.9	68.7
15	Indeks Desa Membangun	Indeks	0.7163	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77
16	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	9.3	8.07	6.84	5.61	4.38	3.15	1.92
17	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	67.18	67.18	67.19	67.2	67.21	67.22	67.23
18	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	%	10	10	10	10	10	10	10
19	Persentase Atlet yang masuk Pelatda	%	2	5	10	15	20	25	30
20	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.41	13.44	13.47	13.49	13.50	13.51	13.53
21	Literasi Membaca SD	%	60.27	62.77	65.27	67.77	70.27	72.77	75.77
22	Literasi Membaca SMP	%	72.45	73.55	74.65	75.75	76.85	77.95	79.05
23	Numerasi SD	%	54.11	57.01	59.91	62.81	65.71	68.61	71.51
24	Numerasi SMP	%	62.88	64.38	65.88	67.38	68.88	70.38	71.88
25	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	73.68	75	77	79	80	81	82
26	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persentase	65,50	66.00	66.50	67.00	67.50	68.00	68.50
27	Nilai SAKIP OPD	Angka	75.11	69.5	70.7	71.9	73.1	74.3	75.5
28	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	73.68	73.8	73.9	74	74.2	74.68	74.9
29	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2.14	2.19	2.18	2.17	2.17	2.17	2.16
30	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100
31	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	54.7	54.9	55.1	55.3	55.5	55.7	55.9
32	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	63.01	10	15	20	25	30	35
33	Capaian Akuntabilitas Kinerja	Angka	71.20	72	73	74	75	76	77
34	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	60.02	60.3	60.5	60.7	60.8	60.9	61
35	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR	%	67	52.3	54.5	56.7	58.9	61.1	63.3
36	rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan)	%	7:5.48	7:5.4	6:5:5.32	6:25:5.24	6:5.16	6:5.08	6:5.08
37	Jumlah tamu wisatawan Nusantara	Orang	49563	51000	52500	54000	55000	56500	58000
38	Persentase ARG Daerah	%	0.44	7	7	7	7	7	7
39	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	0	64.94	64.99	65.04	65.09	66.04	66.04
40	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai	Indeks	0	80	80	80	80	85	85
41	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase	12.09	12.59	13.09	13.59	14.09	14.59	15.09
42	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	12.54	16	15.1	14.2	13.3	12.4	11.5
43	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan	Persentase	80	80	80	80	80	80	80
44	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	0.38	0.35	0.33	0.30	0.27	0.25	0.23
45	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100
46	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	(%)	92.3	90	90	90	90	90	90
47	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	19.5-19.05	19.05-18.2	19.05-17.6	19-16.9	19-16.3	19-15.7	19-15.2
48	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
49	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
50	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	(%)	86.5	95	95	95	95	95	95
51	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet	Ton	10200	10302	10405	10509	10614	10720	10827
52	Tingkat Kemiskinan	%	10,13	10,1	10	9,75	9,5	9,3	9
53	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis sawit	Ton	1600	1616	1632	1648	1664	1681	1698
54	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)	Ton	1580.61	1588.51	1596.45	1604.43	1612.46	1620.52	1628.62
55	Jumlah Produksi Padi	Ton	768.6	776.28	784.04	791.88	799.80	807.80	815.88
56	Jumlah Produksi Jagung	Ton	244.2	246.60	249.10	251.50	254.11	256.65	259.22
57	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis nanas	Kuintal/Ha	37454.02	37641.29	37829.49	38018.64	38208.73	38399.78	38591.77
58	Jumlah Produksi Telur	Ton	953.61	954.26	963.81	973.45	983.18	993.01	1000
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Indeks Profesionalitas ASN		76.85	79	80	82	85	88	90
2	Nilai Survey Penilaian Integritas	Angka	74.59	76.79	79.06	81.39	83.79	86.26	88.81
3	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Indeks Inovasi Daerah	Angka	10.2	20	25	30	35	40	50
5	Persentase Perda yang disahkan oleh DPRD	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Indeks Pembangunan Statistik	poin	2.21	2.31	2.35	2.4	2.45	2.5	2.55
7	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	4.46	4.5	4.55	4.58	4.6	4.65	4.9
8	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	77.4	78	78.5	79	79.5	80	80.5
9	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3.35	3.45	3.5	3.55	3.6	3.65	3.7
10	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	77.4	78	78.5	79	79.5	80	80.5
11	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks	42.08	42.5	43	43.5	44	44.5	45
12	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77.4	78.2	79.4	80.3	81.2	82.5	83.3
13	Capaian Akuntabilitas Kinerja	Angka	70	70	75	80	85	90	95
14	Nilai SAKIP OPD	Angka	72.72	73	7.5	74	74.5	75	75.5
15	Laju pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah	%	12.5	47.13	47.13	47.13	47.13	47.13	47.13
18	Persentase Partisipasi Pemilih dalam PEMILU terakhir (5 Tahunan)	%	97.66	98	98.3	98.5	98.7	99	99.3
19	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai							
20	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N		100	100	100	100	100	100	100
21	Capaian Akuntabilitas Kinerja	Angka	60.86	62	64	66	68	70	72
22	Indeks Kinerja Ormas	Nilai	4.87	120	125	130	135	140	145
27	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3.64	3.8	4	4.2	4.4	4.6	4.7
28	Persentase Rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
29	Persentase Rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
30	Persentase capaian kinerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	64.38	78.50	78.55	78.75	79.00	79.55	80.00
31	Persentase Rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
32	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3.64	3.8	4	4.2	4.4	4.6	4.7
33	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	%	72.72	73	73.5	74	74.5	75	75.5
34	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3.44	3.60	4.00	4.20	4.40	4.60	4.70
35	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3.64	3.8	4	4.2	4.4	4.6	4.7
39	Persentase Rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
41	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100
43	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3.64	3.8	4	4.2	4.4	4.6	4.7
48	Persentase Indikator sasaran daerah yang tercapai	%	67.47	70.50	72.00	73.50	74.00	74.50	75.00
49	Persentase capaian kinerja bidang perekonomian dan SDA	%	78.43	78.50	78.55	78.75	79.00	79.55	80.00
50	Persentase capaian kinerja bidang Infrastruktur dan kewilayahan	%	61.29	78.50	78.55	78.75	79.00	79.55	80.00
51	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	77	78	79	80	81	82	83

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
56	Rasio Pajak Daerah terhadap pendapatan asli daerah	%	100	85	87	89	90	95	100
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
1	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persentase	82.24	83.93	85.62	87.31	89.00	90.69	92.38
2	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	98.55	98.94	99.32	99.70	100	100	100
3	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Persentase	30.02	35.00	39.97	44.95	49.93	54.91	59.88
4	Indeks Pemerataan Guru	Rasio	0.73	0.73	0.70	0.66	0.63	0.60	0.55
5	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase	74.98	80	80	80	80	80	80
6	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Persentase	84.98	90	90	90	90	90	90
AB	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	85.4	85.4	56.9	56.9	56.9	28.48	28.48
2	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	Persentase	89.2	79.41	85.29	88.24	91.18	94.12	94.12
3	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B	%	72.18	75	78	81	83	85	85
5	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
7	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	99	98	99	100	100	100	100
8	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.87	74.9	75	75.15	75.35	75.5	75.6
AC	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi	%	50	100	100	100	100	100	100
2	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	%	1	1	1	1	1	1	1
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	73.48	75	77	79	81	83	85
4	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Persentase	70	246	74	75	76	78	80
5	Persentase Jalan Kondisi Baik	%	48.94	54	58	63	67	72	77
6	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	8.13	10	12	14	16	18	20
7	Persentase kab/kota yangmenerimaPersetujuanBangunan Gedung (%)	%	63	65	67	69	71	73	75
AD	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	%	1	1	1	1	1	1	1
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	20	20	20	20	20	20	20
3	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	%	0	0	0	0	0	0	0
4	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana	Persentase	100	11	12	12	12	12	12
AE	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persentase	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Persentase penanganan tanggap bencana darurat	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase	0	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persentase	0	100	100	100	100	100	100
7	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya		100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat		100	100	100	100	100	100	100
AF	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	25	25	50	75	80	85	100
4	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	Persentase	71	73	75	77	79	81	83
5	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persentase	85	86	87	88	89	90	91
6	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	Persentase	0	10	15	20	25	30	35
AG	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
1	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%	32	46	70	75	80	85	90
2	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar lintas kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	%	80	85	100	100	100	100	100
3	Nilai SAKIP OPD	Angka	71.20	72	73	74	75	76	77
4	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	20	20	50	55	70	80	85
5	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	6	5	10	10	10	10	10
AH	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
1	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	0	0
2	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	89,2	93,7	96,8	97,1	97,3	97,5	97,7
3	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persentase	78.56	75	75.2	75.3	75.4	75.5	75.6
4	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persentase	198.36	290	248	242	237	231	226
5	Skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan	Nilai	94.59	94.3	95.12	95.40	95.66	95.94	96
AI	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
1	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan	Persentase	0	1	1	1	1	1	1
AJ	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
1	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	100	12	12	12	12	12	12
AK	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan		1	1	1	1	1	1	1
2	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Kegiatan	100	95	95.50	95.60	95.70	95.80	96.90
3	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	6.45	6.50	6.51	6.52	5.53	5.54	5.55
4	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persentase	78.38	78.40	78.45	78.50	78.55	78.60	78.65
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	54.23	54.25	54.30	54.35	54.40	54.45	54.50
6	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	95	95.50	95.60	95.70	95.80	95.90
7	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	67.98	62.90	63.00	63.50	63.60	63.70	64.80
8	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	52.55	52.60	52.65	52.70	52.75	52.80	52.85

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
AL	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1	Persentase Fasilitas Penataan Desa	Persentase	60.25	65	70	78.80	83	90	100
2	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
AM	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
2	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase	2	2	2	2	2	2	2
4	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Persentase	1	1	1	1	1	1	1
AN	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
1	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	1	1	1	1	1	1	1
2	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	858	859	862	864	866	868	870
AO	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
1	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi		16.66	16.66	18.08	19.22	21.02	22.22	22.22
2	Nilai SAKIP OPD	Angka	65,72	82.25	82.25	82.25	82.25	82.25	82.25
3	Proporsi UKM Menjalini Kemitraan dan Ekspor	Persentase	0	0.26	0.52	0.78	1.05	1.31	1.57
4	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya		15	15	16	16.5	17	17.5	19
5	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan		0.26	0.52	0.78	1.05	1.31	1.57	1.84
6	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		7.5	7.15	7	6.9	6.55	6.4	6.25
7	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	99,75	99,8	99.90	100	100	100	100
AP	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
1	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Persentase	61.47	73.33	77	80	83	87	93
2	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	1.65	1.87	2	2.09	2.29	2.32	2.40
3	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan		93.68	0	94.95	95.07	95.23	95.34	95.45
AQ	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH								
1	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	Persentase	83	84	84	85	85	86	86
2	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	76.47	77	77	78	79	80	80
3	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	2.93	3.2	3.2	3.3	3.3	3.4	3.4
4	Persentase Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi	%	85	100	100	100	100	100	100
5	Tingkat Kematangan UKPBJ	Angka	84.17	85	85	85	86	86	88
6	Tingkat Kematangan Organisasi	Angka	40.58	46.1	47	47	48	49	50
7	Persentase Realisasi Fisik OPD Kota Prabumulih	%	81.5	100	100	100	100	100	100
8	Persentase MOU/Perjanjian kerjasama yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100
AR	5.02 - KEUANGAN								
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase							
2	Opini BPK Atas Laporan Keuangan		Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian
AS	5.03 - KEPEGAWAIAN								
1	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	387	387	387	387	387	387	387
AT	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
1	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	41	41	41	41	41	41	41
AU	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH								
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		3,154	3,165	3,175	3,185	3,195	3,2	3,215
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		3.000	3.025	3.050	3.075	3.100	3.125	3.150
3	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1		75	77	79	81	83	85	87
4	Nilai SAKIP OPD	Angka	74.45	75	76	77	78	79	80

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
AV	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
1	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan		84.14	84.5	85	85.5	86	86.5	87
2	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		70.83	280	280	280	280	280	280
3	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi		85.83	86	87	88	89	90	91
4	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik		97.66	98	98.3	98.5	98.7	99	99.3
5	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif		4.87	70	75	80	85	90	95

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Tahun 2025-2029 ini menjabarkan visi-misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Prabumulih yang erat kaitannya dengan penyelarasan kinerja serta periodisasi RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini tidak hanya pada penjabaran visi-misi program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sekaligus juga untuk mendukung pencapaian 8 (delapan) Asta Cita, 17 (tujuh belas) program prioritas yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029. Periodisasi RPJMD Kota Prabumulih ini disesuaikan dengan masa jabatan kepala daerah, yakni 2025-2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Prabumulih Tahun 2025-2029 ini disusun dengan mempertimbangkan hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Prabumulih Tahun 2025-2045, memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Selain itu juga mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Prabumulih Tahun 2014-2034.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Prabumulih Tahun 2025-2029 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Prabumulih untuk periode satu tahun dan menjadi arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah di Kota Prabumulih periode 2025-2029. Selain itu dokumen ini juga menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Prabumulih.

Selanjutnya, Walikota Kota Prabumulih dan DPRD Kota Prabumulih nantinya akan menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah RPJMD kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan terkait sesuai dengan amanat ketentuan pasal 253 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5.1 Pedoman Transisi

Periodisasi RPJMD Kota Prabumulih sebelumnya telah berakhir di tahun 2023. Sehubungan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat (8) tentang Pilkada serentak 2024, maka untuk menjaga kesinambungan pembangunan, Pemerintah Kota Prabumulih telah menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) mulai tahun 2024 hingga 2026. Selanjutnya dengan dilaksanakannya Pilkada serentak 2024 serta penyusunan dokumen perencanaan lima tahunan (RPJMD) 2025-2029 sesuai dengan periodisasi masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota terpilih, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Prabumulih Tahun 2025-2029 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2025 hingga 2029, oleh karena itu, secara simultan, perencanaan pembangunan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 sudah mengacu pada RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2025-2029. Hal ini didasarkan pada tahun 2026 sudah memasuki periodisasi RPJMD 2025-2029.

Selama kurun waktu lima tahun ke depan, diasumsikan berbagai program yang dirumuskan dalam RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2025-2029 ini telah dilaksanakan dengan konsisten oleh perangkat daerah, yang didukung peran aktif seluruh stakeholders dan partisipasi masyarakat. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi pondasi bagi kesinambungan pelaksanaan program-program pembangunan daerah Kota Prabumulih periode berikutnya.

Secara garis besar, pembangunan yang berlangsung lima tahun ke depan tidak hanya diharapkan mampu menurunkan kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tetapi sekaligus diharapkan dapat memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia; memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pemberantasan korupsi.

Program transisi tahun 2030 dirancang untuk menjadi peta jalan global menuju kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang lebih baik pada tahun 2030, karena ini terkait dengan periodisasi SDG's 2015-2030, sehingga program pembangunan yang dikembangkan bertujuan untuk 1) menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan; 2) menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat; 3) menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif; dan 4) terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Prabumulih Tahun 2025-2029 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

1. Dinas/Badan/Unit Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2025-2029 ini dengan sebaik-baiknya.
2. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Prabumulih Tahun

2025-2029 ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2025 hingga 2029.

3. Dinas/Badan/Unit Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Dinas/Badan/Unit Perangkat Daerah masing-masing, yang berpedoman pada RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2025-2029, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas/Badan/Unit Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).
4. Dinas/Badan/Unit Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2025-2029 dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas/Badan/Unit Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2025-2029, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Prabumulih berkewajiban melakukan fasilitasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2025-2029 melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Dengan memanfaatkan SIPD, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi RPJMD, sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan daerah secara efektif dan efisien.
6. Inspektorat Daerah sebagai pengawasan eksternal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan pembangunan.

WALI KOTA PRABUMULIH,

